

**PT RAJAWALI NUSANTARA
INDONESIA (Persero)
(dan Entitas Anak/ *and Subsidiaries*)**

Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021/

*Consolidated Financial Statements
for the year ended
31 December 2021*

beserta Laporan Auditor Independen/
with Independent Auditors' Report

Daftar Isi/ *Table of contents*

Halaman/ *Page*

Surat Pernyataan Direksi/ *Directors' Statement*

Laporan Auditor Independen/ *Independent Auditors' Report*

Laporan Keuangan Konsolidasian/ *Consolidated Financial Statements*

Laporan posisi keuangan konsolidasian/
Consolidated statements of financial position 1 – 2

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian/
Consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income 3

Laporan perubahan ekuitas konsolidasian/
Consolidated statements of changes in equity 4

Laporan arus kas konsolidasian/
Consolidated statements of cash flows 5

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian/
Notes to consolidated financial statements 6 – 245

Lampiran/ *Appendix*

Laporan keuangan Entitas Induk/ *Financial statements of Parent Company*

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/
DIRECTORS' STATEMENT ON
THE RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020
PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES

Kami yang bertanda tangan dibawah ini/ *We, the undersigned* :

1. Nama / *Name* : Endang Suraningsih
Alamat kantor / *Office address* : Gedung Waskita Rajawali Tower Lantai 1
Jl. MT. Haryono No. 12-13, Jatinegara, Jakarta Timur

Alamat domisili sesuai KTP atau
kartu identitas lain / *Residential address*
(*as in identity card*) or other identity : Jl. LPP No. 01/1 RT059 RW015 Klitren Gondokusuman
Yogyakarta
Nomor telepon / *Phone number* : (021) 80604255
Jabatan / *Title* : Plt. Direktur Utama

2. Nama / *Name* : Thomas Hadinata
Alamat kantor / *Office address* : Gedung Waskita Rajawali Tower Lantai 1
Jl. MT. Haryono No. 12-13, Jatinegara, Jakarta Timur

Alamat domisili sesuai KTP atau
kartu identitas lain / *Residential address*
(*as in identity card*) or other identity : Jl. Vanda X No.7 Palem Semi RT 002/011 Kelurahan
Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Tangerang
Nomor telepon / *Phone number* : (021) 80604255
Jabatan / *Title* : Direktur Keuangan Dan Manajemen Risiko

Menyatakan bahwa :

Hereby state that :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan entitas anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
 2. Laporan keuangan konsolidasian PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan entitas anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan entitas anak telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - b. Laporan keuangan konsolidasian PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan entitas anak tidak mengandung informasi atau fakta material
1. *Responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and subsidiaries for the year ended 31 December 2021;*
 2. *The consolidated financial statements of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
 3. a. *All information in the consolidated financial statements of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and subsidiaries have been disclosed in a complete and truthful manner;*
b. *The consolidated financial statements of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and subsidiaries do not contain any incorrect*



yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan entitas anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.



information or material facts, nor do they omit information or material facts;

4. *Responsible for the Company's internal control system in PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and subsidiaries.*

This statement is issued to the best of our knowledge and belief.

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi / *For and on behalf of the Board of Directors :*

Jakarta, 28 Februari/ *February* 2022



Endang Suraningsih
Plt. Direktur Utama

Thomas Hadinata
Direktur Keuangan Dan Manajemen Risiko

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



No. : 00287/2.1133/AU.1/10/0261-3/1/II/2022

Pemegang Saham, Dewan Komisaris
dan Direksi

*Shareholders, Boards of Commissioner
and Director*

**PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
dan Entitas Anak**

*PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
and Subsidiaries*

Laporan Auditor Independen

Independent Auditors' Report

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan Entitas Anak terlampir, yang terdiri atas laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying financial statements of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and Subsidiaries, which comprise of the consolidated statement of financial position as of 31 December 2021, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statements of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Auditors' responsibility

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants and Standards on Auditing based on State Finance Audit Standards (SPKN) established by The Audit Board of the Republic of Indonesia. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

Tel: +62 21 29932121 (Hunting) & +62 21 3144003 • Fax: +62 21 29932113 & +62 21 3144213 • Email: jkt-office@pkfhadiwinata.com • www.pkfhadiwinata.com
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan • UOB Plaza 42nd & 30th Floor • Jl. MH. Thamrin Lot 8-10
Central Jakarta 10230 • Indonesia

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm or firms.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and Subsidiaries as of 31 December 2021, and its consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



Hal lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021 terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. Informasi keuangan Perusahaan (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk") yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi keuangan entitas induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi keuangan entitas induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia menurut opini kami, informasi keuangan entitas induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Other matters

Our audit of the consolidated financial statements of the Company and subsidiaries as of 31 December 2021 as attach, was conducted for the purpose of forming an opinion on the consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of the Company (parent entity), which comprises the statement of financial position as of 31 December 2021, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and notes on investments in subsidiary and associate (collectively referred to as "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. This Parent Entity Financial Information is the responsibility of the management and was derived from and relate directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. Such Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in our audit of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, such Parent Entity Financial information is fairly stated in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements taken as a whole.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern kami sampaikan secara terpisah dengan laporan kami No. PHHARP-AL/063/AH/BL/2022 dan No. PHHARP-AL/064/AH/BL/2022 masing-masing tertanggal 28 Februari 2022.

Compliance with laws and regulations and the internal control have been submitted in separate reports to the management with our report No. PHHARP-AL/063/AH/BL/2022 and No. PHHARP-AL/064/AH/BL/2022 dated 28 February 2022, respectively.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Paul Hadiwinata'.

Drs. Paul Hadiwinata, CPA (Ca. USA), CA, Asean CPA
Izin Akuntan Publik/ *Public Accountant License* No. AP.0261
Izin Usaha KAP/ *Business License* No. 855/KM.1/2017



28 Februari/ *February* 2022

**PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan
Entitas Anak**
Laporan posisi keuangan konsolidasian
Per 31 Desember 2021

**PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and
Subsidiaries**
Consolidated statements of financial position
As of 31 December 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 2021	31 Desember/ December 2020	
Aset				Assets
Aset lancar				Current assets
Kas dan setara kas	3d, 4	674.070.695.044	307.299.268.370	Cash and cash equivalents
Kas dan setara kas dibatasi penggunaannya	3e, 5	1.166.500.804.847	1.081.779.053.941	Restricted cash and cash equivalent
Piutang usaha	3f, 3m, 6			Account receivables
Pihak berelasi		34.007.940.032	21.770.542.417	Related parties
Pihak ketiga		589.783.783.600	606.563.844.328	Third parties
Piutang lain-lain				Other receivables
Pihak berelasi	3f, 3m, 7	118.346.050.513	81.094.927.550	Related parties
Pihak ketiga	3f, 3g, 7	691.736.968.029	476.201.320.952	Third parties
Persediaan	3o, 8	804.546.319.821	1.491.963.493.652	Inventories
Beban panen tanaman tebu				Harvest sugarcane expense
Beban satu tahun yang akan datang	3n, 3p, 9	81.139.430.476	84.327.340.175	Future one year harvest expense
Pendapatan yang akan diterima	11	4.052.979.107	3.054.739.100	Accrued income
Uang muka	12	349.731.831.508	212.996.425.985	Advances
Biaya dibayar dimuka	3h, 13	50.214.265.186	37.059.965.989	Prepaid expenses
Pajak dibayar dimuka - bersih	3z, 14a	241.435.723.513	482.336.637.257	Prepaid taxes – net
Aset biologis	3t, 10	110.386.239.679	82.011.539.679	Biological assets
Aset tidak lancar yang diklasifikasi sebagai aset dalam penghentian dan investasi tersedia untuk dijual	24c	15.431.725.891	15.431.725.891	Non current assets classified as discontinued asset and available for sales investment
Jumlah aset lancar		4.931.384.757.246	4.983.890.825.286	Total current assets
Aset tidak lancar				Non-current assets
Aset pajak tangguhan	3z, 14e	523.400.189.678	500.944.036.334	Deferred tax assets
Piutang lain-lain				Other receivables
Pihak berelasi	3m, 3f, 7	51.116.637.595	49.298.819.712	Related parties
Pihak ketiga	3f, 3g, 3i, 7	164.891.273.408	165.085.183.576	Third parties
Piutang pajak	14c	33.490.476.016	19.396.574.086	Tax receivable
Investasi jangka panjang	15	55.412.821.304	55.787.718.288	Long term investments
Tanaman tahunan	3r, 16	948.486.514.610	900.899.491.634	Annual plantation
Aset tetap	3r, 3s, 17	3.207.930.259.101	3.480.059.923.455	Fixed assets
Beban panen dua tahun yang akan datang	3p, 3n, 18	16.954.708.359	21.545.363.060	Future two years harvest expense
Properti investasi	3q, 19	3.781.395.476.187	3.858.070.948.747	Investment property
Aset non-operasional	3v, 20	251.682.153.862	251.731.564.090	Non-operational assets
Uang jaminan	21	1.971.019.906	2.240.259.906	Security deposits
Aset tidak berwujud	3u, 22	47.774.204.232	51.832.183.106	Intangible assets
Aset lain-lain	23	91.069.519.700	83.108.395.373	Other assets
Jumlah aset tidak lancar		9.175.575.253.958	9.440.000.461.367	Total non-current assets
Jumlah aset		14.106.960.011.204	14.423.891.286.653	Total assets

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian *The accompanying notes to consolidated financial statements form* tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara *an integral part of these consolidated financial statements.* keseluruhan.

**PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan
Entitas Anak**
Laporan posisi keuangan konsolidasian
Per 31 Desember 2021

**PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and
Subsidiaries**
Consolidated statements of financial position
As of 31 December 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 2021	31 Desember/ December 2020	
Liabilitas dan ekuitas				Liabilities and equity
Liabilitas jangka pendek				Current liabilities
Utang bank	25	3.312.271.122.381	2.615.483.315.770	Bank loans
Utang usaha				Trade payables
Pihak berelasi	3w, 26	12.551.319.802	105.723.003	Related parties
Pihak ketiga	3w, 26	269.833.150.546	908.157.574.962	Third parties
Utang lain-lain				Other payables
Pihak berelasi	3w, 27	13.100.443.087	13.117.071.530	Related parties
Pihak ketiga	3w, 27	639.383.782.635	728.213.468.847	Third parties
Utang pajak	3y, 14b	140.539.796.245	134.101.419.743	Taxes payable
Biaya yang masih harus dibayar	28	100.424.476.664	79.384.560.596	Accrued expenses
Pendapatan diterima dimuka	29	23.359.337.077	28.682.832.296	Unearned revenues
Utang yang jatuh tempo dalam satu tahun				Current maturity of liabilities
Rekening dana investasi	31	22.083.980.569	22.381.291.446	Investment fund accounts
Sewa pembiayaan	32	4.843.400.077	6.083.570.244	Lease payable
Bank	33	181.040.154.207	67.904.892.701	Bank loan
Surat berharga jangka menengah			497.678.233.316	Medium term notes
Liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai aset dalam penghentian	24	38.511.386	38.511.386	Liabilities that are directly related to non current assets classified as discontinued assets
Jumlah liabilitas jangka pendek		4.719.469.474.676	5.101.332.465.840	Total current liabilities
Liabilitas jangka panjang				Non-current liabilities
Utang jangka panjang setelah dikurangi jatuh tempo dalam satu tahun				Long-term bank loans - net of current portion
Surat berharga jangka menengah	30	-	-	Medium term notes
Rekening Dana Investasi	31	1.167.580.296.578	1.167.238.462.081	Investment fund accounts
Sewa pembiayaan	32	627.646.559	627.646.559	Lease
Bank	33	1.020.277.730.010	964.256.745.720	Bank loans
Pendapatan yang ditangguhkan	34	68.222.400.000	68.222.400.000	Deferred income
Liabilitas pajak tangguhan	3z, 14	59.870.073.470	54.407.551.867	Deferred tax liabilities
Imbalan paska kerja	3ab, 35	526.333.349.866	512.624.360.520	Post employment benefits
Utang lain-lain	27b	146.161.158.294	166.248.937.235	Other payables
Jumlah liabilitas jangka panjang		2.989.072.654.777	2.933.626.103.982	Total non-current liabilities
Ekuitas				Equity
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan				Equity attributable to owner of the Company
Modal saham – modal dasar				Share capital – authorized
4.100.000 lembar dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per lembar ditempatkan dan disetor penuh				4,100,000 shares with nominal value of Rp 1,000,000 per share, fully paid of
2020 : 1.051.567 lembar				2018 : 1,051,567 shares
2021 : 1.051.567 lembar	3ac, 37	1.051.567.000.000	1.051.567.000.000	2019 : 1,051,567 shares
Tambahan modal disetor	38	996.231.122.101	996.231.122.101	Additional paid-in capital
Komponen ekuitas lainnya		3.113.613.511.344	3.148.698.386.125	Other components of equity
Saldo laba				Retained earnings
Telah ditentukan penggunaannya	39a	1.119.420.468.624	1.056.633.742.444	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	39b	65.220.914.079	57.608.686.290	Unappropriated
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik perusahaan		6.346.053.016.148	6.310.738.936.960	Total equity attributable to owner of the Company
Keperentingan non pengendali	36	52.364.865.603	78.193.779.871	Non-controlling interests
Jumlah ekuitas		6.398.417.881.751	6.388.932.716.831	Total equity
Jumlah liabilitas dan ekuitas		14.106.960.011.204	14.423.891.286.653	Total liabilities and equity

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian *The accompanying notes to consolidated financial statements form* tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara *an integral part of these consolidated financial statements.* keseluruhan.

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan Entitas Anak
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and Subsidiaries
Consolidated statements of profit or loss and other comprehensive
income

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021

For the year ended 31 December 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Note	2021	2020	
Penjualan	3ad, 40	8.019.118.080.060	6.974.083.944.999	Sales
Beban pokok penjualan	3ad, 41	(6.978.089.088.091)	(5.871.647.983.264)	Cost of goods sold
Laba kotor		1.041.028.991.969	1.102.435.961.735	Gross profit
Beban umum dan administrasi	3ad, 42	(204.696.914.299)	(207.092.308.032)	General and administrative expenses
Beban pegawai	3ad, 42	(447.269.401.378)	(412.791.999.359)	Employee expenses
Beban penjualan	3ad, 42	(76.963.322.895)	(77.876.950.142)	Selling expenses
Pendapatan lain-lain	3ad, 43	218.905.593.952	162.131.049.978	Other incomes
Beban lain-lain	3ad, 43	(92.627.848.304)	(100.645.903.505)	Other expenses
Beban keuangan	3ad, 44	(354.773.951.173)	(377.856.033.739)	Finance cost
Laba sebelum pajak penghasilan		83.603.147.872	88.303.816.936	Profit before income taxes
Manfaat (beban) pajak penghasilan				Tax income (expense)
Pajak penghasilan kini				Current income tax
Pajak kini	3z, 14d	(39.610.983.284)	(55.705.397.302)	Current tax
Pajak tangguhan	3z, 14e	2.625.462.907	4.646.631.467	Deferred tax
Jumlah manfaat (beban) pajak penghasilan		(36.985.520.377)	(51.058.765.835)	Total tax income (expenses)
Laba tahun berjalan		46.617.627.495	37.245.051.101	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain				Other comprehensive income
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi :				Item that will not be reclassified to profit or loss :
Keuntungan (kerugian) aktuarial	35	(48.413.387.160)	(34.274.810.080)	Actuarial gain or loss
Pajak penghasilan yang terkait		13.328.512.379	(674.129.927)	Relating income tax
Jumlah penghasilan komprehensif lain		(35.084.874.781)	(34.948.940.007)	Total other comprehensive income
Jumlah laba (rugi) komprehensif		11.532.752.714	2.296.111.094	Total comprehensive income (loss)
Laba (rugi) tahun berjalan yang diatribusikan kepada:				Total net profit (loss) attributable to:
Pemilik entitas induk		65.220.914.079	57.608.686.290	Owners of the Company
Kepentingan non pengendali		(18.603.286.584)	(20.363.635.189)	Non-controlling interests
Jumlah		46.617.627.495	37.245.051.101	Total
Laba (rugi) komprehensif yang diatribusikan kepada:				Total comprehensive income (loss) attributable to:
Pemilik entitas induk		30.526.276.725	20.902.327.984	Owners of the Company
Kepentingan non pengendali		(18.993.524.011)	(18.606.216.890)	Non-controlling interests
Jumlah		11.532.752.714	2.296.111.094	Total

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan Entitas Anak
Laporan perubahan ekuitas konsolidasian
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and Subsidiaries
Consolidated statements of changes in equity
For the year ended
31 December 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

	Modal saham/ Capital share	Tambahan modal di setor/ Additional paid-in capital	Komponen ekuitas lainnya/ Other equity component	Saldo laba/ Retained earnings		Ekuitas induk Parent equity	Kepentingan non pengendali Non-controlling interests	Jumlah ekuitas Total equity	
				Ditentukan penggunaannya Appropriate	Tidak ditentukan penggunaannya Unappropriate				
Saldo per 31 Desember 2019	1.051.567.000.000	996.231.122.101	3.184.138.038.648	1.126.779.889.526	(76.042.058.967)	6.282.673.991.308	106.252.097.016	6.388.926.088.324	Balance as of 31 December 2019
Cadangan umum	-	-	-	(76.042.058.967)	76.042.058.967	-	-	-	General reserve
<u>Laba (rugi) komprehensif lainnya:</u>									<u>Other comprehensive income (loss):</u>
Penyesuaian PT Madu Baru	-	-	-	5.895.911.885	-	5.895.911.885	-	5.895.911.885	Recognition PT Madu Baru
Pensiun manfaat pasti	-	-	(35.439.652.523)	-	-	(35.439.652.523)	(7.694.681.956)	(43.134.334.481)	Defined benefit pension
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	57.608.686.290	57.608.686.290	(20.363.635.189)	37.245.051.103	Net profit of current year
Saldo per 31 Desember 2020	1.051.567.000.000	996.231.122.101	3.148.698.386.125	1.056.633.742.444	57.608.686.290	6.310.738.936.960	78.193.779.871	6.388.932.716.831	Balance as of 31 December 2020
Cadangan umum	-	-	-	57.608.686.290	(57.608.686.290)	-	-	-	General reserve
<u>Laba (rugi) komprehensif lainnya:</u>									<u>Other comprehensive income (loss):</u>
Penyesuaian PT Madu Baru	-	-	-	5.178.039.890	-	5.178.039.890	-	5.178.039.890	Recognition PT Madu Baru
Pensiun manfaat pasti	-	-	(35.084.874.781)	-	-	(35.084.874.781)	11.767.896.327	(23.316.978.454)	Defined benefit pension
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	65.220.914.079	65.220.914.079	(37.596.810.595)	27.624.103.484	Net profit of current year
Saldo per 31 Desember 2021	1.051.567.000.000	996.231.122.101	3.113.613.511.344	1.119.420.468.624	65.220.914.079	6.346.053.016.148	52.364.865.603	6.398.417.881.751	Balance as of 31 December 2021

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan Entitas Anak

Laporan arus kas konsolidasian

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah)

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and Subsidiaries

Consolidated statements of cash flows

For the year ended
31 December 2021

(Expressed in Rupiah)

	2021	2020	
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flows from operating activities
Penerimaan kas dari pelanggan	8.062.713.122.856	6.940.673.972.779	Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada pemasok, karyawan dan untuk biaya-biaya lainnya	(7.800.657.488.350)	(6.268.427.848.050)	Cash paid to suppliers, employees and for other expenses
Kas diperoleh dari operasi	262.055.634.506	672.246.124.729	Cash received from operations
Pembayaran beban bunga	(362.606.425.597)	(334.085.878.838)	Payments of interest expenses
Pembayaran pajak	178.490.307.123	(161.150.666.260)	Tax payments
Penerimaan (pembayaran) aktivitas operasional lainnya - bersih	30.685.359.732	-	Addition (payments) from other operating activity - net
Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	108.624.875.764	177.009.579.631	Net cash used in operating activities
Arus kas dari aktivitas investasi			Cash flows from investing activities
Penerimaan (pembayaran) uang muka penggantian lahan	-	-	Addition from (payments) from land replacement
Penerimaan investasi jangka panjang	-	-	Addition from long term investment
Perolehan aset tetap dan tanaman perkebunan	89.794.947.933	(224.553.314.873)	Acquisition cost of fixed assets and plantations
Perolehan aset lain-lain	-	-	Other acquisitions
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	89.794.947.933	(224.553.314.873)	Net cash used in investing activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash flows from financing activities
Penerimaan (pembayaran) utang bank	865.944.052.405	583.758.568.591	Addition (payments) from bank loans
Pembayaran dividen	-	-	Dividend payments
Pembayaran utang rekening dana investasi	(125.432.186.112)	(1.304.405.425)	Investment fund accounts payments
Penerimaan (pembayaran) MTN	(497.678.233.316)	(659.595.539.792)	Addition (payments) of MTN
Penerimaan (pembayaran) sewa pembiayaan	(1.240.170.167)	(1.073.655.010)	Addition (payments) of leasing
Penerimaan (pembayaran) lain-lain	(73.241.859.833)	(553.402.270.828)	Other addition (payments)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	168.351.602.977	(631.617.302.464)	Net cash provided from (used in) financing activities
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	366.771.426.674	(679.161.037.706)	Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
Pengaruh divestasi PT Phapros Tbk		-	Impact divestment PT Phapros Tbk
Kas dan setara kas pada awal tahun	307.299.268.370	986.460.306.076	Cash and cash equivalent at the beginning of period
Kas dan setara kas pada akhir tahun	674.070.695.044	307.299.268.370	Cash and cash equivalent at the end of period

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

1. Umum

Pendirian Perusahaan

Berdasarkan SK Menteri Koordinator Kompartemen Keuangan No. 0642/M.K.3/64 tanggal 11 Agustus 1964, Pemerintah menggunakan seluruh harta kekayaan eks Oei Tiong Ham Concern sebagai penyeteroran Modal Pemerintah dalam pendirian PT Perusahaan Perkembangan Ekonomi Negara (PPEN) Rajawali Nusantara Indonesia (“Perusahaan”). Hal tersebut dilakukan dengan Akta Notaris Ny. Adasiah Harahap, Jakarta No.5 tanggal 12 Oktober 1964, kemudian diubah dengan Akta Notaris Joeni Mulyani, Semarang No. 26 tanggal 30 Juni 1969 dan No. 17 tanggal 16 Juli 1969.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 1968 dan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1974, PT PPEN Rajawali Nusantara Indonesia disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan nama yang sama. Perubahan bentuk badan hukum tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman No. J.A.S/25/13 tanggal 20 April 1976 dan No. C.24260-HT01-04 tahun 1983 tanggal 3 Juni 1983. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1983 tentang tata cara pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Negara, telah dilakukan penyesuaian/ perubahan Anggaran Dasar Perusahaan dengan Akta Notaris Imas Fatimah, SH, No. 87 tanggal 13 September 1986. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dengan No. C.2-160-HT.01.04 tahun 1987 tanggal 9 Januari 1987.

Pada tanggal 31 Mei 2017 Perseroan melakukan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham No. SK-291/MBU/05/2017 tanggal 8 Mei 2017 yang diaktakan dengan Akta Notaris No.11 oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0011956.AH.01.02 tahun 2017 tanggal 2 Juni 2017 yang diantaranya meningkatkan Modal Dasar Perseroan dari semula Rp 600.000.000.000 menjadi Rp 4.100.000.000.000 dan penempatan modal serta diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia sebanyak 1.027.425 lembar saham atau seluruhnya sebesar Rp 1.027.425.000.000.

1. General

Establishment

Based on the Decree of the Coordinating Minister of Finance Compartment No. 0642/M.K.3/64 dated 11 August 1964, the Government used all the assets of former Oei Tiong Ham Concern as Government Capital Deposit in the establishment of PT Perusahaan Perkembangan Ekonomi Negara (PPEN) Rajawali Nusantara Indonesia (the “Company”). The Company was established based on Notarial Deed of Mrs. Adasiah Harahap, Jakarta No. 5 dated 12 October 1964, subsequently amended by Notarial Deed of Joeni Mulyani, Semarang No. 26 dated 30 June 1969 and No. 17 dated 16 July 1969.

Based on Law No. 6 year 1968 and Government Regulation No. 5 year 1974, PT PPEN Rajawali Nusantara Indonesia adjusted its legal form into a Limited Liability Company (Persero) with the same name. Changes in the legal entity has obtained approval from the Minister of Justice No. J.A.S/25/13 dated 20 April 1976 and No. C.24260-HT01-04 year 1983 dated 3 June 1983. With the issuance of Government Regulation No. 3 year 1983 on procedures for guidance and supervision of State-Owned Enterprises, there have been made the adjustments/ changes in the Company's Articles of Association by Imas Fatimah, SH, No. 87 dated 13 September 1986. The amendment has been ratified by the Minister of Justice with his Decree No. C.2-160-HT.01.04 year 1987 dated 9 January 1987.

On 31 May 2017 the Company changes its Articles of Association based on Decision Letter of SOE Minister as a shareholder No. SK-291/MBU/05/2017 dated 8 May 2017 which then notarized into Deed No.11 of Notary Nanda Fauz Iwan SH, M.Kn and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with his decision letter Number AHU-0011956.AH.01.02 year 2017 dated 2 June 2017 which increase the authorized capital of the Company from amounting to Rp 600,000,000,000 to Rp 4,100,000,000,000 and capital placed and paid by the Republic of Indonesia consisting of 1,027,425 shares or amounting to Rp 1,027,425,000,000.

31 Desember 2021

31 December 2021

1. Umum (lanjutan)

Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Anggaran Dasar Perusahaan beberapa kali mengalami perubahan, terakhir tanggal 22 Mei 2018 PT Rajawali Nusantara Indonesia melakukan penambahan kegiatan usaha, penambahan modal disetor dan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham No. S-302/MBU/04/2018 tanggal 4 Mei 2018 yang diaktakan dengan Akta Notaris Nomor 14 Tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0011424.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 23 Mei 2018 mengenai penambahan modal Negara Republik Indonesia kedalam saham Perseroan berupa pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Perindustrian yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2017 tanggal 7 Desember 2017 sebesar Rp 24.141.010.000 dan sebesar Rp 990.000 berasal dari kapitalisasi sebagian cadangan PT Rajawali Nusantara Indonesia. Dengan adanya penambahan modal tersebut, maka modal ditempatkan/ disetor PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) yang semula Rp 1.027.425.000.000 menjadi sebesar Rp 1.051.567.000.000.

Maksud dan Tujuan Kegiatan Usaha

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) bertujuan turut melaksanakan dan menunjang kebijakan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, serta pembangunan sektor pertanian, industri, dan perdagangan pada khususnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Perusahaan menjalankan usaha di bidang pengelolaan (manajemen), industri, perkebunan, perdagangan umum, perdagangan farmasi dan alat-alat kesehatan, pembangunan kawasan, perumahan, dan gedung-gedung (*real estate*).

1. General (continued)

Establishment (continued)

The Company's Articles of Association were amended several times, most recently on 22 May 2018 PT Rajawali Nusantara Indonesia added its business activities, added its paid-up capital and amended the Articles of Association based on the Decree of the Minister of BUMN as Shareholder No. S-302/MBU/04/2018 dated 4 May 2018 which was notarized by Notarial Deed Number 14 dated 22 May 2018 made by Notary Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn and was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with his Decree Number AHU-0011424.AH.01.02.Year 2018 dated 23 May 2018 concerning the addition of the capital of the Republic of Indonesia into the Company's shares in the form of transfer of State Owned Goods to the Ministry of Industry whose procurement is sourced from the State Budget of 2010. Based on Government Regulation No. 50 of 2017 dated 7 December 2017 amounting to Rp 24,141,010,000 and Rp 990,000 came from the capitalization of part of the reserves of PT Rajawali Nusantara Indonesia. With the addition of the capital, the issued/ paid-up capital of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) which was originally Rp 1,027,425,000,000 become Rp 1,051,567,000,000.

Purpose and Objectives of Business Activities

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) aims to contribute implement and support government programs policies in economics and national development in general, and the development of agriculture, industry, and trade in particular. To achieve these objectives, the Company carries on business in the field of management, industry, plantations, general trading, trading pharmaceuticals and medical equipment, region development, housing, and buildings (real estate).

31 Desember 2021

31 December 2021

1. Umum (lanjutan)

1. General (continued)

Maksud dan Tujuan Kegiatan Usaha (lanjutan)

Purpose and Objectives of Business Activities (continued)

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham No. S-302/MBU/04/2018 tanggal 4 Mei 2018 yang diaktakan dengan Akta Notaris Nomor 14 Tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0011424.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 23 Mei 2018 menyetujui penambahan kegiatan usaha PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), berupa penambahan bidang industri pengolahan hasil pertanian dan produk turunannya, dan bidang pengelolaan kawasan dengan status Hak Pengelolaan (HPL).

Based on the Decree of the Minister of BUMN as Shareholder No. S-302/MBU/04/2018 dated 4 May 2018 which was notarized by Notarial Deed Number 14 dated 22 May 2018 made by Notary Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn and was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with his Decree No. AHU-0011424.AH.01.02.Year 2018 dated 23 May 2018 approves the addition of business activities of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), in the form of additional industrial processing of agricultural products and derivative products area management with the status of Management rights.

Perusahaan berkedudukan di Jakarta, dan dalam menjalankan usahanya, Perusahaan berkantor pusat di gedung Rajawali Nusantara Indonesia, Jalan Denpasar Raya Kav. D III, Kuningan, Jakarta Selatan sedangkan anak/ unit/ cabang Perusahaan tersebar di hampir seluruh kota Indonesia.

The Company is domiciled in Jakarta, and in running the business, the Company's head-office located at the Rajawali Nusantara Indonesia Building, Jalan Denpasar Raya Kav. D III, Kuningan, South Jakarta while the subsidiaries/ units/ company branches spread across almost all cities in Indonesia.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Board of Commissioners and Directors

Susunan Dewan Komisaris sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 berdasar pada Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. SK-390/MBU/12/2021 tanggal 23 Desember 2021 melalui akta notaris Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn No. 17 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris serta Penetapan Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia, sehingga susunan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

Composition of the Board of Commissioners up to date 31 December 2021 based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-390/MBU/12/2021 dated 23 December 2021 through the notarial deed of Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn No. 17 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners and the Appointment of Independent Commissioners of the Company (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia, so that the composition of the Board of Commissioners is as follows:

	2021	2020	
Dewan Komisaris :			Board of Commissioners :
Komisaris Utama	Bayu Krisnamurthi	Ramelan	President Commissioner
Komisaris	Abdi Mustakim	Abdi Mustakim	Commissioner
Komisaris	Abdul Rochim	Abdul Rochim	Commissioner
Komisaris	Himawan Arief Sugoto	Himawan Arief Sugoto	Commissioner
Komisaris	Budiono Sandi	-	Commissioner
Komisaris Independen	Arie Sujito	Arie Sujito	Independence Commissioner
Komisaris Independen	Marsudi Wahyu Kisworo	-	Independence Commissioner

31 Desember 2021

31 December 2021

1. Umum (lanjutan)

1. General (continued)

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi (lanjutan)

Board of Commissioners and Directors (continued)

Susunan Direksi sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 berdasar pada Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-337/MBU/12/2021 tanggal 02 Desember 2021 serta melalui akta Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn tanggal 23 Desember 2021 Nomor 16, tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero), sehingga susunan Direksi menjadi sebagai berikut :

Composition of the Board of Directors as of 31 December 2021 is based on Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: SK-337/MBU/12/2021 dated 02 December 2021 and through the deed of Notary Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn dated 23 December 2021 Number 16 concerning Dismissal, Changes in Position Nomenclature, Transfer of Duties, and Appointment of Members of the Board of Directors of the Limited Liability Company (Persero), so that the composition of the Board of Directors is as follows:

Susunan Direksi per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

The members of the Company's Directors as of 31 December 2021 and 2020 are as follows :

31 Desember 2021/ 31 December 2021		
Direktur Utama	Arief Prasetyo Adi	<i>President Director</i>
Direktur Manajemen Aset Sumber Daya Manusia	Endang Suraningsih	<i>Asset Management and Human Resources Director</i>
Direktur Pengembangan dan Pengendalian Usaha	Febriyanto	<i>Development and Business Control Director</i>
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Thomas Hadinata	<i>Finance and Risk Management Director</i>
Direktur Komersial	Frans Marganda Tambunan	<i>Commercial Director</i>
Direktur <i>Supply Chain Management</i> & Teknologi Informasi	Adhi Cahyono Nugroho	<i>Supply Chain Management & Information Technology Director</i>
31 Desember 2020/ 31 December 2020		
Direktur Utama	Arief Prasetyo Adi	<i>President Director</i>
Direktur SDM	Johanes Nanang Marjianto	<i>Human Resources Director</i>
Direktur Pengembangan dan Pengendalian Usaha	Febriyanto	<i>Development and Business Control Director</i>
Direktur Keuangan	Pramusti Indrascaryo	<i>Finance Director</i>
Direktur Manajemen Aset	Endang Suraningsih	<i>Asset Management Director</i>
Direktur Komersial	Frans Marganda Tambunan	<i>Commercial Director</i>
Direktur <i>Supply Chain Management</i> & Teknologi Informasi	Thomas Hadinata	<i>Supply Chain Management & Information Technology Director</i>

31 Desember 2021

31 December 2021

1. Umum (lanjutan)

I. General (continued)

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi (lanjutan)

Board of Commissioners and Directors (continued)

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

The composition of the Nomination and Remuneration Committee as of 31 December 2021 and 2020 is as follows :

	2021	2020	
Komite Nominasi dan Remunerasi:			Nomination and Remuneration Committee:
Ketua	Bayu Krisnamurthi	Ramelan	Chairman
Sekretaris	Desti Fitriani	Desti Fitriani	Secretary
Anggota	Adriani Sukmono	Himawan Arief Sugoto	Member
Anggota	Abdul Rochim	Abdul Rochim	Member
Anggota	-	Arie Sujito	Member
Anggota	-	Abdi Mustakim	Member

Susunan Komite Manajemen Risiko per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

The composition of the Risk Management Committee as of 31 December 2021 and 2020 is as follows :

	2021	2020	
Komite Manajemen Risiko:			Risk Management Committee:
Ketua	Marsudi Wahyu Kisworo	Abdul Rochim	Chairman
Sekretaris	Febyyanita	Pratama S. Adi	Secretary
Anggota	Pratama S. Adi	-	Member
Anggota	Risqi Fadilah Ramadhona	Risqi Fadilah Romadhona	Member

Susunan Komite Audit per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

The composition of the Audit Committee as of 31 December 2021 and 2020 is as follows :

	2021	2020	
Komite Audit :			Audit Committee :
Ketua	Abdi Mustakim	Abdi Mustakim	Chairman
Sekretaris	Faishal Fuad Rahman Soeharto	-	Secretary
Anggota	M. Malik	M. Malik	Member
Anggota	Fitriansyah Monasfaly	Azwir Zamrinurdin	Member

Jumlah karyawan Perusahaan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut :

The number of employees of the Company as of 31 December 2021 and 2020 is as follows :

	2021	2020	
Formasi karyawan :			Employees formation :
Karyawan pimpinan	666	692	Officer
Karyawan pelaksana	3.326	3.425	Executor employee
Karyawan kontrak waktu tertentu	1.571	3.528	Definite period contract employee
Jumlah	5.563	7.645	Total

Pengawasan terhadap kegiatan usaha PT Rajawali Nusantara Indonesia dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Control of business activities of PT Rajawali Nusantara Indonesia is conducted by the Internal Audit Unit (SPI), which is directly responsible to the President Director.

31 Desember 2021

31 December 2021

2. Penyertaan

2. Investments

Rincian dari penyertaan Perusahaan pada entitas anak dan perusahaan asosiasi adalah sebagai berikut:

The details of the Company's investments in subsidiaries and associate companies are as follows:

Keterangan/ <i>Descriptions</i>	Persentase Kepemilikan/ <i>Ownership percentage</i>	Lokasi/ <i>Location</i>	Bidang usaha/ <i>Business field</i>
Entitas anak yang dikonsolidasikan			Consolidated subsidiaries :
PT Rajawali Nusindo	100%	Kantor pusat di Jakarta dan cabang di seluruh Indonesia/ <i>Central office in Jakarta and branch offices in all across Indonesia</i>	Distribusi dan perdagangan obat, alat kesehatan, dan perdagangan umum/ <i>Distribution and trading of medicine health equipment, and general trading</i>
PT PG Rajawali I	100%	Surabaya	Industri gula/ <i>Sugar industry</i>
PT PG Rajawali II dan entitas anak/ <i>and subsidiaries</i>	100%	Cirebon	Industri gula, alkohol, arak, and spiritus/ <i>Sugar, alcohol, arrack, and spirituous.</i>
PT PG Candi Baru	98,85%	Sidoarjo	Industri gula/ <i>Sugar industry</i>
PT Mitra Rajawali Banjarn	100%	Bandung	Industri alat kesehatan meliputi kondom, alat suntik sekali pakai, dan <i>Hyperbaric Oxygen Chamber Therapy (HBOT)/ Medical equipment industry such as condom, disposable syringe and Hyperbaric Oxygen Chamber Therapy (HBOT).</i>
PT Perkebunan Mitra Ogan	73,58%	Palembang	Perkebunan dan pabrik kelapa sawit serta perkebunan karet/ <i>Palm Oil plantations and mills and rubber plantations.</i>
PT Mitra Kerinci dan entitas anak/ <i>and subsidiaries</i>	100%	Padang	Perkebunan teh/ <i>Tea plantation</i>
PT GIEB Indonesia	80,96%	Denpasar	Distribusi dan perdagangan/ <i>Distribution and trading</i>

31 Desember 2021

31 December 2021

2. Penyertaan (lanjutan)

Rincian dari penyertaan Perusahaan pada entitas anak dan perusahaan asosiasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

2. Investments (continued)

The details of the Company's investments in subsidiaries and associate companies are as follows:(continued)

Keterangan/ Descriptions	Persentase Kepemilikan/ Owner percentage	Lokasi/ Location	Bidang usaha/ Business field
PT Rajawali Citramass	100%	Mojokerto	Industri karung plastik/ <i>Plastic bag industry</i>
PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring	100%	Sidoarjo	Industri karung plastik dan kulit/ <i>Plastic bag and leather industry</i>
PT Laras Astra Kartika	100%	Palembang	Perkebunan dan pabrik kelapa sawit/ <i>Palm Oil plantations and mills</i>
PT Rajawali Gloves Corporation (dalam likuidasi/ <i>in liquidation</i>)	61,25%	Sidoarjo	Industri sarung tangan kulit/ <i>Gloves industry</i>
Perusahaan asosiasi :			Associate companies :
PT Madu Baru	35%	Yogyakarta	Industri gula, spiritus, dan alkohol/ <i>Sugar, spirituous, and alcohol industry</i>
PT Padi Energi Nusantara	14%	Jakarta	Ketahanan pangan dan energi/ <i>Food and energy endurance</i>
PT Mitra BUMDes Nusantara	10%	Jakarta	Logistik dan perdagangan / <i>Logistics and trading</i>
PT PP Sinergi Banjaratma	7%	Jakarta	Pembangunan, perdagangan dan Jasa / <i>Building, trading and service</i>
Ventura bersama :			Joint venture :
PT Rajawali Stevia Indonesia	45%	Padang	Tanaman Stevia

31 Desember 2021

31 December 2021

2. Penyertaan (lanjutan)

a. Penyertaan pada entitas anak

1) PT Rajawali Nusindo

PT Rajawali Nusindo dibentuk pada tanggal 31 Mei 2004 dengan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn, No. 4 tanggal 31 Mei 2004 sehubungan perubahan usaha Perusahaan dari *operating holding* menjadi *investment holding*. Pendirian entitas anak tersebut telah disetujui oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. S-244/MBU/2004 tanggal 4 Mei 2004 serta telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-16617.HT.01.01.TH.2014 tanggal 2 Juli 2004.

Penyertaan Perusahaan pada PT Rajawali Nusindo dilakukan dengan cara penyerahan aset “di luar tanah dan bangunan” dan kewajiban divisi perdagangan dan distribusi dengan menggunakan nilai buku per tanggal 31 Mei 2004. Nilai saham penyertaan Perusahaan pada PT Rajawali Nusindo adalah sebesar Rp 160.000.000.000 dengan kepemilikan sebesar 100%. Atas penyerahan aset dan kewajiban dalam rangka penyertaan tersebut tidak terdapat keuntungan dan kerugian.

Perubahan terakhir dari Anggaran Dasar Perusahaan didasarkan akta notaris No. 03 tanggal 06 September 2019 oleh Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn, notaris di Jakarta tentang peningkatan modal dasar dan modal disetor Perusahaan. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan ini telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai surat No.: AHU-AH.01.03.0330653 tertanggal 12 September 2019.

2. Investments (continued)

a. Investment in subsidiaries

1) PT Rajawali Nusindo

PT Rajawali Nusindo was formed on 31 May 2004 through Deed of Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn, No. 4 dated 31 May 2004 in respect of changes in the Company's business from operating holding company into an investment holding company. Establishment of subsidiaries was approved by the Minister of State Owned Enterprises No. S-244/MBU/2004 dated 4 May 2004 and was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia No. C-16617.HT.01.01.TH.2014 dated 2 July 2004.

The Company's investment in PT Rajawali Nusindo was done by transferring assets “excluding land and buildings” and the obligations of trade and distribution division by using the book value as of 31 May 2004. The value of shares of the Company's investment in PT Rajawali Nusindo amounting to Rp 160,000,000,000 with ownership at 100%. On the transfer of assets and liabilities in connection with of these investments there are no profit or loss.

The latest change in the Company's Articles of Association is based on notarial deed No. 03 dated 06 September 2019 of Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn, notary in Jakarta concerning the increase in authorized capital and paid-up capital of the Company. Changes to the Company's Articles of Association have been recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights in accordance with letter No.: AHU-AH.01.03.0330653 dated 12 September 2019.

31 Desember 2021

31 December 2021

2. Penyertaan (lanjutan)

a. Penyertaan pada entitas anak (lanjutan)

2) PT Pabrik Gula Rajawali I

PT Pabrik Gula Rajawali I (PT PG Rajawali I) pada awalnya merupakan penggabungan 2 (dua) Pabrik Gula yaitu PG Krebet Baru dan PG Rejo Agung Baru yang dilaksanakan berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia, selaku Pemegang Saham, melalui surat No. S.560/ MK.016/ 1995 tanggal 19 September 1995.

Penggabungan tersebut diputuskan dalam Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PG Krebet Baru dan PG Rejo Agung Baru tanggal 5 Desember 1995 yang risalahnya diaktakan oleh Notaris Sutjipto, SH, masing-masing dengan Akta No. 14 dan 13 tanggal 3 Januari 1996 yang dipertegas dengan Akta No. 90 dan 91 tanggal 28 Agustus 1996 oleh Notaris yang sama.

Perjanjian Penggabungan Usaha PG Krebet Baru dan PG Rejo Agung Baru No. 16/SP/DIRU/XII/95 tanggal 29 Desember 1995 yang diaktakan oleh Notaris Sutjipto, SH, dengan Akta No. 92 tanggal 28 Agustus 1996 berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 1996. Perubahan nama menjadi PT PG Rajawali I sesuai dengan Akta Notaris Sutjipto, SH, No. 91 tanggal 28 Agustus 1996.

Pada tanggal 22 November 2000 sesuai Akta Notaris No.103 dari Notaris Sutjipto, S.H., Entitas telah mengubah status badan hukum entitas anak, PT Pucuk Rosan Baru dan PT Mitra Nusantara, menjadi unit-unit Entitas. Perubahan status tersebut efektif mulai tanggal 1 Januari 2001.

Maksud dan tujuan usaha PT PG Rajawali I sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar adalah melaksanakan dan menunjang kebijakan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya sektor pertanian industri gula.

2. Investments (continued)

a. Investment in subsidiaries (continued)

2) PT Pabrik Gula Rajawali I

PT Pabrik Gula Rajawali I (PT PG Rajawali I) was originally a merger of 2 (two) Sugar Mills, i.e. PG Krebet Baru and PG Rejo Agung implemented under the approval of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, as a shareholder, through letter No. S.560/MK.016/1995 dated 19 September 1995.

The merger was decided in the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PG Krebet and PG Rejo Agung Baru dated 5 December 1995 that documented by Notary Sutjipto, SH, with Deed No. 14 and 13 dated 3 January 1996 which then confirmed by Deed No. 90 and 91 dated 28 August 1996 by the same Notary.

Merger Agreement of PG Krebet Baru and PG Rejo Agung Baru No. 16/SP/DIRU/XII/95 dated 29 December 1995 which was documented by Notary Sutjipto, SH, through deed No. 92 dated 28 August 1996 was effective from 1 January 1996. The amendment of name to PT PG Rajawali I is in accordance with the Deed of Sutjipto, SH, No. 91 dated 28 August 1996.

On 22 November 2000 pursuant to Notarial Deed No.103 of Notary Sutjipto, S.H., the Entity has changed the status of the legal entity of its subsidiaries, PT Pucuk Rosan Baru and PT Mitra Nusantara, to become Entity units. The status change was effective starting 1 January 2001.

The purpose and objectives of PT PG Rajawali I in accordance with the Amendments to the Articles of Association are to implement and support government program policies in the national economic and development fields in general, especially the sugar industry's agricultural sector.

31 Desember 2021

31 December 2021

2. Penyertaan (lanjutan)

a. Penyertaan pada entitas anak (lanjutan)

2) PT Pabrik Gula Rajawali I (lanjutan)

Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Entitas pada pasal 4 disebutkan modal dasar Entitas sebesar Rp 115.000.000.000 yang terdiri dari 115.000 lembar saham dengan nominal Rp1.000.000.

3) PT Pabrik Gula Rajawali II dan entitas anak

PT Pabrik Gula Rajawali II (PT PG Rajawali II) berawal dari PT Perkebunan XIV berkedudukan di Cirebon yang didirikan berdasarkan Akta No. 3 tanggal 2 Mei 1981 dan diperbaiki dengan Akta No. 57 tanggal 29 Juni 1983 dari Notaris Gustaaf Moemala Soankoepon Loemban Tobing, SH, Notaris di Jakarta. Anggaran Dasarnya telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C27991.HT.01.01.TH.83 tanggal 12 Desember 1983.

Akta pendirian tersebut mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 05 tanggal 6 September 2019 dari Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn., notaris di Jakarta Selatan tentang perubahan Anggaran Dasar Perusahaan yang semula PT Perkebunan XIV berkedudukan di Jakarta menjadi PT Pabrik Gula Rajawali II (Perusahaan) yang berkedudukan dan berkantor di Kota Cirebon dengan alamat Jalan Dr. Wahidin No. 46 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan RT 1 RW 1 Kota Cirebon 45122, Jawa Barat. Telp. (0231) 204752. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan No. AHU-0070504.AH01.02.Tahun 2019 tanggal 17 September 2019.

2. Investments (continued)

a. Investment in subsidiaries (continued)

2) PT Pabrik Gula Rajawali I (continued)

Based on the Amendment of Articles of Association mentioned in Article 4 of the authorized capital amounted to Rp 115,000,000,000 consisting of 115,000 shares with a nominal of Rp 1,000,000.

3) PT Pabrik Gula Rajawali II and its subsidiaries

PT Pabrik Gula Rajawali II (PT PG Rajawali II) formerly PT Perkebunan XIV which domiciled in Cirebon was established based on Deed No. 3 dated 2 May 1981 and amended with Deed No. 57 dated 29 June 1983 of Notary Gustaaf Moemala Soankoepon Loemban Tobing, SH, Notary in Jakarta. Its Articles of Association have been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. C27991.HT.01.01.TH.83 dated 12 December 1983.

The Notarial Deed of Establishment has been amended several times, most recently through Notarial Deeds No. 05 dated 6 September 2019 of Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn., notary in South Jakarta, concerning the amendment to the Company's Articles of Association which was originally PT Perkebunan XIV domiciled in Jakarta to become PT Gula Rajawali II domiciled and has an office in Cirebon City with the address at Jalan Dr. Wahidin No. 46 Sukapura Subdistrict, Kejaksan District RT 1 RW 1 Cirebon City 45122, West Java. Tel. (0231) 204752. This change has been approved by the Minister of Law and Human Rights No. AHU-0070504.AH01.02. 2019 on 17 September 2019.

31 Desember 2021

31 December 2021

2. Penyertaan (lanjutan)

a. Penyertaan pada entitas anak (lanjutan)

3) PT Pabrik Gula Rajawali II dan entitas anak (lanjutan)

Berdasarkan perubahan akta terakhir No. 05 tanggal 6 September 2019 dari Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, maksud dan tujuan Perusahaan yang tertuang dalam pasal 3 berubah sebagai berikut: (1) Melakukan usaha di bidang pertanian tanaman, peternakan, perburuan dan kegiatan YBDI; (2) Perdagangan besar bukan mobil dan sepeda motor; (3) Perdagangan eceran bukan mobil dan motor; (4) Industri makanan dan minuman; (5) Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia; (6) Industri farmasi; (7) Pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan; (8) Real estate; (9) Aktivitas kesehatan manusia; dan (10) Aktivitas administrasi kantor.

Mulai musim tanam tahun 2018/2019 Perusahaan sudah tidak mengelola tebu milik sendiri (TS) karena lahan HGU Perusahaan disewakan kepada petani/warga desa dalam rangka menyejahterakan warga dan membentuk situasi yang kondusif. Diharapkan pula dengan pola tersebut dapat memberikan kontribusi positif kepada Perusahaan.

PT PG Rajawali II yang berdomisili di Cirebon memiliki 4 unit pabrik gula dan 1 unit pengolahan tetes (pabrik spiritus dan alkohol/ PSA) yaitu sebagai berikut :

- PG Sindang Laut
- PG Tersana Baru
- PSA Palimanan
- PG Jatitujuh
- Unit *Research & Development* (Puslitagro)
- PG Subang
- Apotek Nusindo Farma

2. Investments (continued)

a. Investment in subsidiaries (continued)

3) PT Pabrik Gula Rajawali II and its subsidiaries (continued)

Based on the latest notarial deeds No. 05 dated 6 September 2019 from Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn., notary in South Jakarta, the purpose and objectives of the Company set forth in article 3 are changed as follows: (1) conducting business in the fields of agriculture, animal husbandry, hunting and YBDI activities ; (2) Wholesale that are not cars and motorcycles; (3) Non-car and motorcycle retail trade; (4) Food and beverage industry; (5) Chemical industry and chemical goods; (6) Pharmaceutical industry; (7) Warehousing and transportation support activities; (8) Real estate; (9) Human health activities; and (10) Office administration activities.

Starting on the planting season in 2018/2019, the Company no longer manages its own sugarcane (TS) because the Company's HGU land is leased to farmers / villagers in order to prosper the residents and form a conducive situation. It is also hoped that this scheme can make a positive contribution to the Company.

PT PG Rajawali II which domiciled in Cirebon has 4 sugar factory units and 1 unit of molasses processing (spirituous and alcohol/ PSA factory) as follows :

- *PG Sindang Laut*
- *PG Tersana Baru*
- *PSA Palimanan*
- *PG Jatitujuh*
- *Research & Development Unit (Puslitagro)*
- *PG Subang*
- *Nusindo Farma Pharmacy*

31 Desember 2021

31 December 2021

2. Penyertaan (lanjutan)

a. Penyertaan pada entitas anak (lanjutan)

3) PT Pabrik Gula Rajawali II dan entitas anak (lanjutan)

Berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Direksi PT PG Rajawali II No. 10.1/SK/RW-II.01/2018 tanggal 17 Mei 2018, terdapat penggabungan Subang ke Jatitujuh menjadi unit Pabrik Gula Guna Usaha (Jatitujuh dan Subang). Kondisi ini dilakukan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengawasan, optimalisasi kapasitas pabrik dan persiapan perubahan peruntukan lahan HGU PG Subang, sehingga pada tahun 2018 PG Subang tidak melaksanakan giling dan digabung ke Jatitujuh.

4) PT Pabrik Gula Candi Baru

PT Pabrik Gula Candi Baru (PT PG Candi Baru) sebelumnya merupakan Perusahaan perorangan yang didirikan pada tanggal 21 Oktober 1911. Pengesahannya sebagai badan hukum terdaftar pada Panitera Pengadilan Negeri di Surabaya No. 122 tanggal 31 Oktober 1911 dengan nama NV Suiker Fabrik Tjandi. Berdasarkan RUPS tanggal 8 Februari 1962 nama Perusahaan diubah menjadi PT Pabrik Gula Tjandi dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A5/112/1 tanggal 4 Oktober 1962.

Berdasarkan akta pernyataan RUPS yang dikukuhkan dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 73 tanggal 28 Juli 1993 yang dibuat oleh Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, berubah menjadi PT Pabrik Gula Candi Baru.

2. Investments (continued)

a. Investment in subsidiaries (continued)

3) PT Pabrik Gula Rajawali II and its subsidiaries (continued)

Based on a decree issued by the Board of Directors of PT PG Rajawali II No. 10.1/SK/RW-II.01/2018 dated 17 May 2018, concerning the merger between Subang and Jatitujuh to become Pabrik Gula Guna Usaha (Jatitujuh and Subang) in order to be more efficient and effective in monitoring the factory, optimizing plant capacity and preparing changes to the allocation of PG Subang's HGU land, so that in 2018 PG Subang will no longer do the milling activity and be merged into Jatitujuh.

4) PT Pabrik Gula Candi Baru

PT Pabrik Gula Candi Baru (PT PG Candi Baru) was previously a private company that was established on 21 October 1911. The authorization as a legal entity was registered in the District Court Clerk in Surabaya No. 122 dated 31 October 1911 under the name of NV Suiker Fabrik Tjandi. Based on the Annual General Meeting on 8 February 1962 the Company's name was changed to PT Pabrik Gula Tjandi and has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia with his Decree No. Y.A5/112/1 dated 4 October 1962.

Based on the deed of GMS statement which is notarized through the Deed of Association Amendment No. 73 dated 28 July 1993 made by Imas Fatimah, SH, Notary in Jakarta, was changed to PT Pabrik Gula Candi Baru.

31 Desember 2021

31 December 2021

2. Penyertaan (lanjutan)

a. Penyertaan pada entitas anak (lanjutan)

4) PT Pabrik Gula Candi Baru (lanjutan)

Anggaran Dasar Entitas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 9 tanggal 12 September 2019 yang disusun oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn terkait dengan perubahan ketentuan pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan. Perubahan terakhir tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. AHU-0072910.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 20 September 2019.

Anggaran dasar Entitas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 8 tanggal 14 Mei 2020 yang disusun oleh Notaris Ermin Yuniastuti, S.H terkait dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Perubahan terakhir tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. AHU-AH.01.03-0219628 Tahun 2020 tanggal 14 Mei 2020.

PT PG Candi Baru berkedudukan di Sidoarjo dan beroperasi di Jl. Raya Candi No. 10, Sidoarjo.

Sesuai dengan pasal 3 Akta No. 19 tanggal 18 Juli 1998, maksud dan tujuan pendirian adalah berusaha dalam bidang perkebunan dan pertanian tebu, serta industri gula dan perdagangan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

2. Investments (continued)

a. Investment in subsidiaries (continued)

4) PT Pabrik Gula Candi Baru (continued)

The Articles of Association of the Entity have been updated several times, most recently with Deed No. 9 dated 12 September 2019 of Notary Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn, related to changes in the provisions of article 3 concerning the Purpose and Objectives of the Company. The latest amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his decision letter No. AHU-0072910.AH.01.02. YEAR 2019 dated 20 September 2019.

The Articles of Association of the Entity have been updated several times, most recently with deed No. 8 dated 14 May 2020 compiled by Notary Ermin Yuniastuti, S.H related to changes in the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors. The latest amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its decision letter No. AHU-AH.01.03-0219628 YEAR 2020 dated 14 May 2020.

PT PG Candi Baru is located in Sidoarjo and operates at Jl. Raya Candi No. 10, Sidoarjo.

In accordance with article 3 of Deed No. 19 dated 18 July 1998, the intent and purpose of establishment is to engage in agricultural plantations and sugarcane, as well as the sugar industry and trade by applying the principles of Limited Company.

31 Desember 2021

31 December 2021

2. Penyertaan (lanjutan)

a. Penyertaan pada entitas anak (lanjutan)

5) PT Mitra Rajawali Banjaran

Anggaran Dasar PT Mitra Rajawali Banjaran diaktakan oleh Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, dengan Akta No. 21 tanggal 12 Januari 1994, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-7003.HT.01.01.TH.96 tanggal 6 Maret 1996.

Anggaran Dasar PT Mitra Rajawali Banjaran telah beberapa kali mengalami perubahan, diantaranya tentang jangka waktu pendirian serta maksud dan tujuan pendirian, dan selanjutnya berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Skifa Rajawali Indonesia, menyetujui rancangan penggabungan usaha dan rapat umum luar biasa pemegang saham PT Mitra Rajawali Banjaran yang diaktakan oleh Notaris yang sama.

Pada tahun 1998 PT Skifa Rajawali Indonesia dan PT Mitra Rajawali Banjaran telah melakukan penggabungan usaha dengan menggunakan metode penggabungan (*merger*) *pooling of interest* sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan serta peraturan pajak dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Berkaitan dengan penggabungan usaha tersebut, dilakukan perubahan Anggaran Dasar PT Mitra Rajawali Banjaran dengan Akta No. 108 tanggal 29 Desember 1998 dari Notaris Sutjipto, SH, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-15189.HT.01.04.TH.99 tanggal 19 Agustus 1999.

Maksud dan dasar tujuan didirikannya PT Mitra Rajawali Banjaran adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan serta program Pemerintah di bidang industri dan perdagangan khususnya alat-alat kesehatan.

2. Investments (continued)

a. Investment in subsidiaries (continued)

5) PT Mitra Rajawali Banjaran

Articles of Association of PT Mitra Rajawali Banjaran were notarized by Imas Fatimah, SH, Notary in Jakarta, with Deed No. 21 dated 12 January 1994, which was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia with his Decree No. C2-7003.HT.01.01.TH.96 dated 6 March 1996.

The Articles of Association of PT Mitra Rajawali Banjaran have been amended several times, including amendment regarding the time period of establishment and the purpose and objectives of the establishment, and subsequently based on the Extraordinary Shareholders General Meeting of PT Skifa Rajawali Indonesia, approved the draft merger and extraordinary general meeting of shareholders of PT Mitra Rajawali Banjaran which then notarized by the same Notary.

In 1998 PT Skifa Rajawali Indonesia and PT Mitra Rajawali Banjaran have been merged using amalgamation (merger) pooling of interest in accordance with Financial Accounting Standards and tax regulations and applicable law in Indonesia.

In connection with the merger, the Articles of Association of PT Mitra Rajawali Banjaran were amended with Deed No. 108 dated 29 December 1998 of Sutjipto, SH, and has received approval from the Minister of Justice of the Republic of Indonesia No. C-15189.HT.01.04.TH.99 dated 19 August 1999.

The purpose and objective of the establishment of PT Mitra Rajawali Banjaran are to conduct and support government policies and programs in the field of industry and trade in especially in medical devices.

31 Desember 2021

31 December 2021

2. Penyertaan (lanjutan)

a. Penyertaan pada entitas anak (lanjutan)

5) PT Mitra Rajawali Banjaran (lanjutan)

Sampai dengan 31 Desember 2015 PT Mitra Rajawali Banjaran mempunyai kewajiban tidak lancar sebesar Rp 24.000.000.000 kepada Perusahaan. Untuk memperbaiki kinerja dan struktur permodalan PT Mitra Rajawali Banjaran saat ini, Perusahaan setuju untuk melakukan Perjanjian Konversi Tagihan/ Pinjaman menjadi Penyertaan Saham pada tanggal 23 Desember 2016 dengan No. 160/S.Pj/RNI.01/XII/2016.

Keputusan para Pemegang Saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Rajawali Banjaran No. 54/Kep.PS/RNI.01/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 telah dilakukan peningkatan modal disetor dari Rp 71.000.000.000 yang terdiri dari 71.000 lembar saham menjadi Rp 95.000.000.000 yang terdiri dari 95.000 lembar saham, atas penambahan sebesar Rp 24.000.000.000 seluruhnya diambil dan disetor penuh oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) melalui konversi pinjaman menjadi penyertaan saham.

6) PT Perkebunan Mitra Ogan

PT Perkebunan Mitra Ogan didirikan berdasarkan Akta No. 170 tanggal 19 Desember 1988 dari Imas Fatimah, SH. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Perusahaan berkedudukan di Jalan Kol. H. Burlian Km. 9 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dan lokasi perkebunannya terletak di Peninjauan dan Semidang Aji di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), di Rambang Lubai Kabupaten Muara Enim dan Batanghari Leko dan Sekayu Sungai Keruh di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

2. Investments (continued)

a. Investment in subsidiaries (continued)

5) PT Mitra Rajawali Banjaran (continued)

As of 31 December 2015 PT Mitra Rajawali Banjaran has a non-current liability amounting to Rp 24,000,000,000 to the Company. To improve performance and capital structure of PT Mitra Rajawali Banjaran at current time, the Company agreed to enter into Claims Conversion Agreement/ Loan converted into Investments in Shares on 23 December 2016 under No. 160/S.Pj/RNI.01/XII/2016.

The decision of the shareholders outside the General Meeting of Shareholders of PT Mitra Rajawali Banjaran No. 54/Kep.PS/RNI.01/XII/2016 dated 23 December 2016 has made an increase in paid-in capital from Rp 71,000,000,000 consisting of 71,000 shares to Rp 95,000,000,000 consisting of 95,000 shares, for the addition of Rp 24,000,000,000, all of which were taken and fully paid by PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) through the conversion of loans into equity investments.

6) PT Perkebunan Mitra Ogan

PT Perkebunan Mitra Ogan was established based on Deed No. 170 dated 19 December 1988 of Imas Fatimah, SH. This deed was approved by Minister of Justice of the Republic of Indonesia. The Company is domiciled at Jalan Kol. H. Burlian Km. 9 Palembang, South Sumatra Province and the plantations are located in Peninjauan and Semidang Aji in Ogan Komering Ulu (OKU) Regency, in Rambang Lubai, Muara Enim Regency and Batanghari Leko and Sekayu Sungai Keruh in Musi Banyuasin Regency, South Sumatra Province.

31 Desember 2021

31 December 2021

2. Penyertaan (lanjutan)

a. Penyertaan pada entitas anak (lanjutan)

6) PT Perkebunan Mitra Ogan (lanjutan)

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir dibuat berdasarkan Akta Notaris No. 31 tanggal 13 Agustus 2008 tentang persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar Perusahaan yang dibuat dan disampaikan oleh Siti Rayhana, SH, sebagai pengganti dari notaris B.R.Ay. Mahyastoeti N, SH. Perubahan Anggaran Dasar ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan Nomor AHU-75920 AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan pasal 3 ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama bergerak dalam bidang industri atas hasil pertanian, dan perkebunan serta industri perdagangan.

7) PT Perkebunan Mitra Kerinci

PT Perkebunan Mitra Kerinci (Perusahaan) merupakan anak Perusahaan dari PT Rajawali Nusantara Indonesia. Pada awalnya, Perusahaan bernama PT Perkebunan Mitra Kerinci, didirikan dengan Akta No. 98 tanggal 17 Juli 1990 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, notaris di Jakarta. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan dengan Akta notaris No. 38 tanggal 10 Desember 1992 yang dibuat di hadapan notaris yang sama dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan Nomor C2.4734.HT.01.01. Tahun 1993 tanggal 16 Juni 1993 dan sejak tanggal 23 Agustus 1993 nama Perusahaan berubah menjadi PT Mitra Kerinci.

2. Investments (continued)

a. Investment in subsidiaries (continued)

6) PT Perkebunan Mitra Ogan (continued)

The Company's Articles of Association have been amended several times. The latest was made based on Notarial Deed No. 31 dated 13 August, 2008 regarding the approval of amendment to the Articles of Association of the Company made and submitted by Siti Rayhana, SH, in lieu of notary B.R.Ay. Mahyastoeti N, SH. The amendment to the Articles of Association has been approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia with his Decree Number AHU-75920 AH.01.02 of 2008 dated 20 October 2008. In accordance with the article 3 of the Articles of Association, the scope of activities of the Company is mainly engaged in the industry of the agricultural products, plantations and the trade industry.

7) PT Perkebunan Mitra Kerinci

PT Perkebunan Mitra Kerinci (the Company) is a subsidiary of PT Rajawali Nusantara Indonesia. Initially, the company was named PT Perkebunan Mitra Kerinci, which was established by Deed No. 98 dated 17 July 1990 drawn up before Imas Fatimah, SH, a notary in Jakarta. The Company's Articles of Association have been amended by notarial deed no. 38 dated 10 December 1992 which was made before the same notary and has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia by decree Number C2.4734.HT.01.01. 1993 dated 16 June 1993 and since 23 August 1993 the Company's name changed to PT Mitra Kerinci.

2. Penyertaan (lanjutan)

a. Penyertaan pada entitas anak (lanjutan)

7) PT Perkebunan Mitra Kerinci (lanjutan)

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 212 tanggal 28 Februari 2013 tentang peningkatan modal dasar dan modal yang ditempatkan yang dibuat di hadapan H. Indra Jaya, SH, notaris di Padang. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan Nomor AHU-18192 AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 9 April 2013.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, Perusahaan terutama bergerak dalam bidang pertanian, perkebunan dan industri. Produk turunannya dengan segala sesuatu yang atau menunjang bidang tersebut tetapi tidak terbatas kepada penguasaan lahan, tanaman, pengolahan, pemasaran dan pendistribusian hasilnya. Menjalankan usaha perdagangan atas barang produksi sendiri maupun barang produksi pihak lain dan perdagangan pada umumnya termasuk impor, ekspor, lokal dan interinsurer serta bidang jasa lainnya kecuali jasa perpajakan dan hukum.

8) PT GIEB Indonesia

PT GIEB Indonesia (dahulu bernama PT Gabungan Import Export Bali) didirikan tanggal 20 Agustus 1948 dengan Akta Wakil Notaris PJV Leeuween No.12 dan Anggaran Dasar yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada tanggal 27 Desember 2019 dengan Akta No. 04 yang dibuat di hadapan Notaris I Gusti Rai Daniel Ari Putra, SH. M.kn mengenai Berita Acara Rapat Umum Tahunan tahun buku 2019 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT GIEB Indonesia, telah disetujui konversi hutang ke penyertaan (DEC) dengan jumlah utang seluruhnya sebesar Rp 10.275.500.000 kepada PT Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).

2. Investments (continued)

a. Investment in subsidiaries (continued)

7) PT Perkebunan Mitra Kerinci (continued)

The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently based on Notarial Deed No. 212 dated 28 February 2013 regarding the increase in authorized capital and issued capital made before H. Indra Jaya, SH, a notary in Padang. The amendments to the Articles of Association have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by decree Number AHU-18192 AH.01.02 Year 2013 dated 9 April 2013.

In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the Company is primarily engaged in agriculture, plantation and industry. Derivative products with everything that supports or supports the said field, but is not limited to land tenure, plants, processing, marketing and distribution of the results. Running a trading business on self-produced goods as well as goods produced by other parties and trading in general, including imports, exports, local and interinsurer as well as other service sectors except taxation and legal services.

8) PT GIEB Indonesia

PT GIEB Indonesia (formerly PT Combined Import Export Bali) was established on August 20, 1948 with the Deed of Deputy Notary PJV Leeuween No. 12 and the Articles of Association which have been amended several times. On 27 December 2019 with Deed No. 04 made before Notary I Gusti Rai Daniel Ari Putra, SH. M.kn regarding the Minutes of the 2019 Annual General Meeting and the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Limited Liability Company PT GIEB Indonesia, it has been approved to convert debt to equity (DEC) with a total debt of Rp 10,275,500,000 to PT Perusahaan Pembangunan National Economy Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).

31 Desember 2021

31 December 2021

2. Penyertaan (lanjutan)

a. Penyertaan pada entitas anak (lanjutan)

8) PT GIEB Indonesia (lanjutan)

Peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp 25.000.000.000 menjadi Rp 90.000.000.000 terbagi atas 9.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 10.000. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% atau sejumlah saham dengan nominal Rp 23.275.000.000 oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham.

Perubahan akta terakhir adalah pada tanggal 06 September 2021 dengan nomor 10 yang dibuat di hadapan Notaris I Gede Semester Winarno SH mengenai pernyataan keputusan rapat dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT GIEB Indonesia mengenai perubahan susunan direksi PT GIEB Indonesia.

Perusahaan berkedudukan di Jl Gatot Subroto No. 66X Denpasar-Bali dengan cabang-cabangnya di Denpasar, Singaraja, Klungkung, Tabanan, dan Gianyar.

Maksud dan tujuan pendirian Perusahaan adalah melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, angkutan dan jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

2. Investments (continued)

a. Investment in subsidiaries (continued)

8) PT GIEB Indonesia (continued)

An increase in the Company's authorized capital from Rp 25,000,000,000 to Rp 90,000,000,000 divided into 9,000,000 shares with a nominal value of Rp 10,000. From the authorized capital, 25% has been issued and paid-up or a number of shares with a nominal value of Rp 23,275,000,000 by the founders who have subscribed to the shares and details as well as the nominal value of the shares.

The last amendment to the deed was on 6 September 2021 with number 10 made before Notary I Gede Semester Winarno SH regarding the statement of the resolutions of the meeting and the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Shareholders of the Limited Liability Company PT GIEB Indonesia regarding the change in the composition of the board of directors of PT GIEB Indonesia.

The Company is located at Gatot Subroto Street No 66x Denpasar - Bali, with its branches in Denpasar, Singaraja, Klungkung, Tabanan and Gianyar.

The purpose and objective of establishing the Company is to carry out business activities in the fields of trade, transportation and services. To achieve these aims and objectives, the Company carries out business activities in accordance with the Indonesian Standard Classification of Business Fields (KBLI).

31 Desember 2021

31 December 2021

2. Penyertaan (lanjutan)

a. Penyertaan pada entitas anak (lanjutan)

9) PT Rajawali Citramass

PT Citramass Plastics Industry ("Entitas") pertama kalinya didirikan di Mojokerto berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 12 tanggal 10 September 1993 yang dibuat di hadapan Dharminto, S.H., Notaris di Mojokerto. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. C2-164666.HT.01.01.Tahun 94 tanggal 1 November 1994.

Anggaran dasar telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No.07 tanggal 20 Agustus 2019 dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., tentang perubahan anggaran dasar perseroan. Akta perubahan ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0059396.AH.01.02. tahun 2019 tanggal 28 Agustus 2019.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Entitas, ruang lingkup kegiatan Entitas adalah melakukan usaha di bidang sebagai berikut:

- a. Industri tekstil;
- b. Industri kertas dan barang dari kertas;
- c. Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia;
- d. Industri karet, barang dari karet, dan plastik;
- e. Pengelolaan dan daur ulang sampah;
- f. Perdagangan besar bukan mobil dan sepeda motor;
- g. Perdagangan eceran bukan mobil dan motor; dan
- h. Aktivitas administrasi kantor, aktivitas penunjang kantor dan aktivitas penunjang usaha lainnya.

2. Investments (continued)

a. Investment in subsidiaries (continued)

9) PT Rajawali Citramass

PT Citramass Plastics Industry ("Entity") was first established in Mojokerto based on the Deed of Establishment of a Limited Liability Company. 12 dated 10 September 1993 drawn up before Dharminto, S.H., Notary in Mojokerto. The deed has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia based on his Decree No. C2-164666.HT.01.01.Year 94 dated 1 November 1994.

The Articles of Association have been amended several times, most recently by Deed No. 07 dated 20 August 2019 before Notary Fauz Nanda Iwan, SH, M.Kn., change the articles of association. This change was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No. AHU-0059396.AH.01.02. year 2019 dated 28 August 2019.

In accordance with article 3 of the Entity's Articles of Association, the Entity's scope of activities is to conduct business in the following fields:

- a. Textile industry;*
- b. Paper and paper goods industry;*
- c. Manufacture of chemicals and goods made from chemicals;*
- d. Industry of rubber, rubber products, and plastics;*
- e. Waste management and recycling;*
- f. Wholesale trade is not cars and motorcycles;*
- g. Non-car and motorcycle retail trade; and*
- h. Office administration activities, office support activities and other business support activities.*

31 Desember 2021

31 December 2021

2. Penyertaan (lanjutan)

a. Penyertaan pada entitas anak (lanjutan)

**10) PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring
(PT RTE)**

PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring (PT RTE) didirikan berdasarkan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn, No. 3 tanggal 8 Juli 2004. Akta pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-27946.HT.01.01.TH.2004 tanggal 8 November 2004.

Sebelumnya PT RTE merupakan unit usaha PT Rajawali Nusantara Indonesia (Rajawali Nusindo Unit Pabrik Tanjungsari) yang berpusat di Jl. Denpasar Raya Kav DIII Kuningan, Jakarta.

Pada tanggal 7 Juli 2004 PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) telah melakukan restrukturisasi dengan melakukan pemisahan unit pabrik kulit Tanjungsari menjadi PT Rajawali Tanjungsari.

Sesuai dengan Pasal 3 dari Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn, No. 3 tanggal 7 Juli 2004, maksud dan tujuan pendirian adalah menjalankan usaha di bidang perdagangan dan perindustrian kulit hewan.

Pada tanggal 5 November 2014 Perusahaan berubah nama menjadi PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-10585.40.20.2014 dan akta notaris Nanda Fauz Iwan S.H., M.Kn., tanggal 3 November 2014.

2. Investments (continued)

a. Investment in subsidiaries (continued)

**10) PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring
(PT RTE)**

PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring (PT RTE) was established under Notarial Deed of Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn, No. 3 dated 8 July 2004. The establishment deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. C-27946.HT.01.01.TH.2004 dated 8 November 2004.

Previously PT RTE is a business unit of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Rajawali Nusindo Factory Unit of Tanjungsari) which is located at Jl. Denpasar Raya Kav DIII Kuningan, Jakarta.

On 7 July 2004 PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) has restructured by separating the Tanjungsari leather factory unit into PT Rajawali Tanjungsari.

In accordance with Article 3 of the Deed of Notary Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn, No. 3 dated 7 July 2004, the purpose and objective of the establishment is to run a business in the trade and industry of animal skins.

On 5 November 2014 the Company has changed its name to PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-10585.40.20.2014 and notarial deed by Nanda Fauz Iwan S.H., M.Kn., dated 3 November 2014.

31 Desember 2021

31 December 2021

2. Penyertaan (lanjutan)

a. Penyertaan pada entitas anak (lanjutan)

**10) PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring
(PT RTE) (lanjutan)**

Anggaran Dasar Entitas telah mengalami beberapa kali perubahan. Salah satu perubahannya sesuai dengan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Nomor 6 tanggal 20 Agustus 2019, notaris di Jakarta mengenai Perubahan Anggaran Dasar Entitas dan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0321573 tanggal 28 Agustus 2019 dan sesuai dengan Akta Notaris Ratu Arlini Sriwahyuni Widyastuti Suhadiwaraatmaja, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, Nomor 45 tanggal 26 Desember 2019 mengenai Persetujuan Peningkatan Modal Dasar dan Modal Disetor Entitas dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0043001 tanggal 24 Januari 2020.

Berdasarkan Akta Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 122/ Kep.PS/ RNI.01/ XII2019 tanggal 17 Desember 2019, menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Entitas dengan modal ditempatkan dan disetor sejumlah 122.866 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.122.866.000.000 oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).

2. Investments (continued)

a. Investment in subsidiaries (continued)

**10) PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring
(PT RTE) (continued)**

The Entity's Articles of Association have been amended several times. One of the amendments is in accordance with the Deed of Notary Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn., Number 6 dated 20 August 2019, a notary in Jakarta regarding Amendments to the Entity's Articles of Association and Changes in the Composition of the Board of Directors and Board of Commissioners and has been approved by the Minister of Law and Human Rights. Human Number AHU-AH.01.03-0321573 dated 28 August 2019 and in accordance with the Deed of Notary Ratu Arlini Sriwahyuni Widyastuti Suhadiwaraatmaja, SH, M.Kn., notary in Jakarta, Number 45 dated 26 December 2019 regarding the Approval for the Increase in Authorized Capital and Paid-Up Capital of Entities and has been approved by the Minister of Law and Human Rights Number AHU-AH.01.03-0043001 dated 24 January 2020.

Based on the Deed of Resolution of the General Meeting of Shareholders Number 122/ Kep.PS/ RNI.01/ XII2019 dated 17 December 2019, approved the Amendment to the Articles of Association of the Entity with issued and paid-up capital of 122,866 shares with a total nominal value of Rp 122,866,000,000 by PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).

31 Desember 2021

31 December 2021

2. Penyertaan (lanjutan)

b. Penyertaan pada entitas anak (lanjutan)

11) PT Laras Astra Kartika

PT Laras Astra Kartika didirikan berdasarkan Akta Notaris Ny. Rukmasanti Hardjastya, SH No. 9 tanggal 3 Oktober 1988. Akta pendirian telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2050.HT.01.01.Th.89 tanggal 25 Februari 1989 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta dengan No. 732/1989 tanggal 12 April 1989 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 105 tanggal 31 Desember 1991, Tambahan No. 5098.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor di Jl. Kol. H. Barlian KM. 9, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan yang sebelumnya berpindah ke KPP Pratama Baturaja terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cakung Satu dengan Nomor NPWP 01.348.896.0-004.000, serta terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Raja dengan Nomor NPWP 01.348.896.0-302.001 (cabang kebun).

Pada tahun 2019, berdasarkan Perjanjian Konversi Tagihan/Pinjaman menjadi Penyertaan Saham dalam PT Laras Astra Kartika antara PT PPEN Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dengan PT Laras Astra Kartika Nomor. 132/S.Pj/RNI.01/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019, PT Rajawali Nusantara Indonesia mengonversi sebagian tagihan/pinjaman kepada PT Laras Astra Kartika sebesar Rp 17.949.000.000 menjadi 17.949 lembar saham, sehingga jumlah lembar saham yang terdapat di PT Laras Astra Kartika sebanyak 52.299 lembar dengan persentase kepemilikan sebesar 99,998%.

2. Investments (continued)

b. Investment in subsidiaries (continued)

11) PT Laras Astra Kartika

PT Laras Astra Kartika was established based on Notarial Deed of Mrs. Rukmasanti Hardjastya, SH No. 9 on 3 October 1988. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia with his Decree No. C2-2050.HT.01.01Th.89 dated 25 February 1989 and was registered in the District Court of Jakarta No. 732/1989 dated 12 April 1989 and was published in the Official State Gazette No. 105 dated 31 December 1991, Supplement No. 5098.

The company is domiciled and has its office at Jl. Kol. H. Barlian KM. 9, Palembang, South Sumatra Province, which previously moved to Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cakung Satu with NPWP No. 01.348.896.0-004,000, and is registered at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Raja with NPWP No. 01.348.896.0-302.001 (branch kebun).

In 2019, based on the Agreement to Convert Bills/Loans into Shares Participation in PT Laras Astra Kartika between PT PPEN Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and PT Laras Astra Kartika Number: 132/S.Pj/RNI.01/XII/2019 dated 17 December 2019, PT Rajawali Nusantara Indonesia converted some of the claims/loans to PT Laras Astra Kartika amounting to Rp 17,949,000,000 to 17,949 shares, so that the number of shares in PT Laras Astra Kartika is 52,299 shares with an ownership percentage of 99.998%.

31 Desember 2021

31 December 2021

2. Penyertaan (lanjutan)

a. Penyertaan pada entitas anak (lanjutan)

11) PT Laras Astra Kartika (lanjutan)

Akta Perubahan anggaran dasar Perusahaan telah mengalami perubahan dan perubahan terakhir tentang perubahan susunan pengurus Perusahaan berdasarkan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, SH. M.Kn, Nomor 11 tanggal 13 Juli 2019 dan perubahan tersebut telah terdaftar dan tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum di Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia No. AHU-AH.0103-0219970 tanggal 14 Mei 2020.

12) PT Rajawali Gloves Corporation (dalam proses likuidasi)

PT Rajawali Gloves Corporation didirikan pada tanggal 20 November 1991 dengan Akta No. 124 dan diubah dengan akta No.84 tanggal 28 Desember 1992. Keduanya dibuat di hadapan Raharti Sudjarjati, SH, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya tertanggal 5 Januari 1993 No. C2-52.HT.01.01.TH.93 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 12 Maret 1993 No. 21 tambahan Nomor 1078 sebagai realisasi formal atas perjanjian kerjasama (*Joint Venture Agreement*) pada tanggal 29 Agustus 1990 antara PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dengan investor asing (Amerika Serikat dan Korea Selatan). Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 89 Notaris Sutjipto, SH, tanggal 17 Mei 2005.

2. Investments (continued)

a. Investment in subsidiaries (continued)

11) PT Laras Astra Kartika

The Company's deed has been amended several times and the latest is regarding the change in the composition of the Company's management based on the Notary Deed of Nanda Fauz Iwan, SH. M.Kn, No. 11 dated July 13, 2019 and these changes have been registered and recorded in the Legal Entity Administration System at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.0103-0219970 dated 14 May 2020.

12) PT Rajawali Gloves Corporation (in liquidation)

*PT Rajawali Gloves Corporation was established on 20 November 1991 with the Deed No. 124 and amended by Deed No.84 dated 28 December 1992. Both were made before Raharti Sudjarjati, SH, Notary in Jakarta, which has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in accordance with his decree dated 5 January 1993 No. C2-52.HT.01.01.TH.93 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia dated 12 March 1993 under No. 21, supplement No. 1078 as the formal realization of cooperation agreement (*Joint Venture Agreement*) on 29 August 1990 between PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) with foreign investors (United States and South Korea). The Articles of Association have been amended several times, most recently by Deed No. 89 of Sutjipto, SH, dated 17 May 2005.*

31 Desember 2021

31 December 2021

2. Penyertaan (lanjutan)

a. Penyertaan pada entitas anak (lanjutan)

**12) PT Rajawali Gloves Corporation (dalam
proses likuidasi) (lanjutan)**

PT Rajawali Gloves berkedudukan di Sidoarjo Jawa Timur dan bergerak dalam bidang perdagangan serta industri sarung tangan kulit.

PT Rajawali Gloves telah mengalami akumulasi kerugian dari usahanya sampai dengan 31 Desember 2018 dan tidak ada transaksi sejak tahun 2011, sehingga akumulasi kerugian per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp 15.910.449.045 dan Rp 12.571.901.777 yang mengakibatkan kesulitan modal kerja, terjadinya pemutusan hubungan kerja serta penghentian kegiatan operasional Perusahaan.

Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 762/Pdt.P/2012PN.Sby tanggal 26 Juni 2012 PT Rajawali Gloves diputuskan/ disetujui untuk likuidasi yang selanjutnya diaktakan dengan akta RUPS-LB PT Rajawali Gloves No.7 tanggal 16 Juli 2012.

Sesuai Laporan Kemajuan Likuidator PT Rajawali Gloves Corporation No. 77/RNI.02.2/I/14, tanggal 14 Januari 2014, selama tahun 2013 telah dilaksanakan pelelangan atas aset bergerak melalui KPKNL Sidoarjo dengan hasil seluruhnya Rp 418.650.000, sedangkan aset tidak bergerak yang terdiri dari 1 unit tanah bangunan pabrik dan 1 unit tanah rumah dinas akan dijual kepada PT RNI sesuai harga NJOP sebesar Rp 5.398.920.000.

Perijinan-perijinan PT Rajawali Gloves Corporation telah dicabut di tahun 2012, diantaranya dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan sudah diajukan Permohonan Pencabutan NPWP kepada KPP Sidoarjo yang sampai saat ini masih menunggu selesainya Audit Perpajakan.

2. Investments (continued)

a. Investment in subsidiaries (continued)

**12) PT Rajawali Gloves Corporation (in
liquidation) (continued)**

PT Rajawali Gloves is located in Sidoarjo, East Java, and is engaged in trade and industry of leather gloves.

PT Rajawali Gloves has suffered accumulated losses in its business as of 31 December 2018 and did not have transactions since 2011, so that the accumulated loss as of 31 December 2018 and 31 December 2017 amounted to Rp 15,910,449,045 and Rp 12,571,901,777 which result in difficulty in working capital, the dismissal and termination of the Company's operation.

Based on the Surabaya District Court decision No.762/Pdt.P/2012PN.Sby dated 26 June 2012 PT Rajawali Gloves decided/ approved for liquidation which then notarized based on Extraordinary Shareholder General Meeting (ESGM) of PT Rajawali Gloves No.7 dated 16 July 2012.

According to progress Liquidator Report of PT Rajawali Gloves Corporation No.77/RNI.02.2/I/14, dated 14 January 2014, during year 2013 there has been conducted auctions for moving assets through KPKNL Sidoarjo with total amounting to Rp 418,650,000, while unmoving fixed assets which consisting of one unit of land and factory building and 1 unit of official building will be sold to PT RNI according to taxable item market value price amounting to Rp 5,398,920,000.

The licenses of PT Rajawali Gloves Corporation have been revoked in 2012, among others approval from the Investment Coordinating Board (BKPM) and the Company has submitted Request of Revocation taxpayer identification number to Sidoarjo Tax Office which is still awaiting the completion of Taxation Audit.

31 Desember 2021

31 December 2021

2. Penyertaan (lanjutan)

b. Penyertaan pada perusahaan asosiasi

1) PT Madu Baru

PT Madu Baru adalah Perusahaan yang bergerak di bidang industri gula, yang berlokasi di Yogyakarta. Pemerintah telah mengalihkan sahamnya di PT Madu Baru sebesar 35% atau senilai Rp 2.425.000.000 kepada Perusahaan sebagai tambahan penyertaan modal Negara melalui PP No. 3 tanggal 14 Januari 2004. Dengan demikian Perusahaan mempunyai investasi pada PT Madu Baru sebesar jumlah tersebut, namun tidak memiliki kendali langsung atas manajemen Perusahaan, sedangkan sisanya sebesar 65% dimiliki oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X (lihat Catatan 15).

2) PT Padi Energi Nusantara

PT Padi Energi Nusantara berkedudukan di Kota Jakarta Selatan merupakan Perusahaan yang melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ketahanan pangan dan energi untuk membantu pendapatan petani khususnya di bidang pertanian, perdagangan dan jasa.

Modal dasar PT Padi Energi Nusantara adalah sebesar Rp 29.000.000.000 yang terbagi dalam 29.000 saham dengan nilai nominal masing-masing saham adalah sebesar Rp 1.000.000. Dari modal tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 100% (seratus persen) atau sejumlah 29.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 29.000.000.000, dari jumlah tersebut PT RNI (Persero) mengambil bagian sebanyak Rp 4.000.000.000 atau sebesar 14,00%.

2. Investments (continued)

b. Investment in associate companies

1) PT Madu Baru

PT Madu Baru is a Company engaged in sugar industry, which is located in Yogyakarta. The government has transferred 35% of its shares at PT Madu Baru or Rp 2,425,000,000 to the Company as state additional investment through Government Regulation No. 3 dated 14 January 2004. Therefore, the Company has investments at PT Madu Baru, but does not have direct control over the management of the Company, while the remaining 65% is owned by Sri Sultan Hamengku Buwono X (see Note 15).

2) PT Padi Energi Nusantara

PT Padi Energi Nusantara domiciled in South Jakarta represents a Company to carry out and support the government policies and programs in the field of food and energy to support, the income of farmers particularly in agriculture, trade and services.

The authorized capital of PT Padi Energi Nusantara is amounting to Rp 29,000,000,000 divided into 29,000 shares with nominal value of each share is Rp 1,000,000. That capital has been subscribed and paid at 100% or consisting of 29,000 shares with total nominal value amounting to Rp 29,000,000,000, from the amount, PT RNI (Persero) took part amounting to Rp 4,000,000,000 or equivalent to 14.00%.

31 Desember 2021

31 December 2021

2. Penyertaan (lanjutan)

**b. Penyertaan pada perusahaan asosiasi
(lanjutan)**

3) PT Mitra BUMDes Nusantara

PT Mitra BUMDes Nusantara berkedudukan di Jakarta, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, distribusi, dan transportasi sesuai akta notaris Otty H.C. Ubayani, S.H No.41 tanggal 4 April 2017 dan perjanjian pemegang saham No. 100/S.Pj/RNI.01/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017 tentang pengelolaan PT Mitra BUMDes Nusantara yang diadendum dengan perjanjian No. 29/S.Pj/RNI.01/IX/2017 tanggal 18 September 2017. Modal dasar Perusahaan sebesar Rp 200.000.000.000 dengan modal yang telah disetor sebesar Rp 100.000.000.000 dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp 1.000.000. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebagai pihak keempat memiliki saham sebesar Rp 10.000.000.000 atau 10% dari total saham yang disetor.

4) PT PP Sinergi Banjaratma

PT PP Sinergi Banjaratma berkedudukan di Jakarta, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan, perdagangan dan jasa sesuai akta Notaris Ni Nyoman Rai Sumawiti S.H, M.Kn Nomor 02 tanggal 7 Februari 2019 dan perjanjian usaha patungan Nomor. L.56.1/ 8/ WK/ 2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Perjanjian Usaha Patungan Pengembangan Lahan Eks PG Banjaratma Rest Area Brexit KM 260B jalan tol Pejagan-Pemalang.

Modal dasar Perusahaan sebesar Rp 63.424.615.000 dan telah disetor penuh dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp 100,-. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebagai pihak keenam memiliki saham sebesar Rp 4.756.846.100 atau 7% dari total saham yang disetor.

2. Investments (continued)

b. Investment in associate companies (continued)

3) PT Mitra BUMDes Nusantara

PT Mitra BUMDes Nusantara is domiciled in Jakarta, engaged in trade, distribution, and transportation according to notarial deed of Otty H.C. Ubayani, S.H No.41 dated 4 April 2017 and shareholder agreement No. 100/S.Pj/RNI.01/VIII/2017 dated 2 August 2017 about management PT Mitra BUMDes Nusantara which then amended with agreement No. 29/S.Pj/RNI.01/IX/2017 dated 18 September 2017. The authorized capital of the Company is amounting to Rp 200,000,000,000 and capital paid amounting to Rp 100,000,000,000 with nominal value per share amounting to Rp 1,000,000. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) as the fourth party has shares amounting to Rp 10,000,000,000 or 10% from total shares paid.

4) PT PP Sinergi Banjaratma

PT PP Sinergi Banjaratma domiciled in Jakarta is engaged in the field of development, trade and services according to the Notarial deed of Ni Nyoman Rai Sumawiti SH, M.Kn Number 02 dated 7 February 2019 and the joint venture agreement Number: L.56.1 / 8 / WK / 2018 dated 30 October 2018 concerning a Joint Venture Agreement for the Development of Ex-PG Banjaratma Rest Area Brexit KM 260B on the Pejagan-Pemalang toll road.

The authorized capital of the Company is amounting to Rp 63,424,615,000 and has been fully paid with nominal value per share of Rp 100,-. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) as the sixth party has shares amounting to Rp 4,756,846,100 or 7% of the total shares paid up.

31 Desember 2021

31 December 2021

2. Penyertaan (lanjutan)

c. Ventura bersama

**PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero)
(PTPN XIV)**

Berdasarkan Persetujuan Pelaksanaan Kerjasama Operasi Peningkatan Kinerja Pabrik Gula PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dari Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. S-606/MBU/2007 tanggal 4 September 2007 dan perjanjian kerjasama pendanaan dan peningkatan kinerja pabrik gula di lingkungan PT Perkebunan XIV (Persero) antara PT Rajawali Nusantara dengan PT Perkebunan XIV (Persero) No. 139/S.Pj/RNI.01/X/07 tanggal 1 Oktober 2007 telah disepakati untuk melakukan kerjasama operasi antara PT RNI dan PTP XIV dalam rangka peningkatan kinerja pabrik gula milik PTP XIV, yaitu Pabrik Gula Camming, Pabrik Gula Bone dan Pabrik Gula Takalar.

Dalam perkembangannya, Menteri Negara BUMN memandang perlu untuk melibatkan PTP X bersama-sama dengan PT RNI untuk melakukan langkah-langkah penyelamatan sebagaimana diatur dalam surat BUMN No. S-549/MBU/2009 tanggal 31 Juli 2009. Dalam perjanjian pengelolaan PG tersebut diambil kesepakatan bahwa PTP XIV dan PT RNI mengalihkan pengelolaan PG Camming dan PG Bone kepada PTP X, BPPG tetap mengelola PG Takalar. Berdasarkan perjanjian No. UT/ PERJ/ VIII/ 09.023 dan No. 37/ S.Pj/ RNI.01/ VIII/ 09 serta No. XX-KONTR/09.09 tentang perjanjian pokok pengelolaan pabrik gula milik perkebunan PTP XIV dan PT RNI (Persero) disepakati bahwa PTP XIV dan PT RNI segera mengalihkan pengelolaan PG Camming dan PG Bone kepada PTP X, sedangkan PTP XIV dan PT RNI melalui BPPG tetap mengelola PG Takalar.

2. Investments (continued)

c. Joint venture

**PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero)
(PTPN XIV)**

Based on the Agreement on the Implementation of Operational Cooperation to Improve the Performance of Sugar Mills PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) with PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) from the State Minister for State-Owned Enterprises No. S-606/MBU/2007 dated 4 September 2007 and the cooperation agreement for funding and improvement the performance of the sugar factory in PT Perkebunan XIV (Persero) between PT Rajawali Nusantara and PT Perkebunan XIV (Persero) No. 139/S.Pj/RNI.01/X/07 dated 1 October 2007 it was agreed to carry out a joint operation between PT RNI and PTP XIV in order to improve the performance of sugar factories owned by PTP XIV, namely Camming Sugar Factory, Bone Sugar Factory and Takalar Sugar Factory.

In its development, the Minister of State for SOEs deemed it necessary to involve PTP X together with PT RNI to carry out rescue measures as regulated in SOE letter No. S-549/MBU/2009 dated 31 July 2009. In the PG management agreement, an agreement was reached that PTP XIV and PT RNI transferred the management of PG Camming and PG Bone to PTP X, BPPG continued to manage PG Takalar. Based on agreement No. UT/PERJ/VIII/09,023 and No. 37/S.Pj/RNI.01/VIII/09 and No. XX-KONTR/09.09 concerning the main agreement for the management of sugar mills owned by PTP XIV and PT RNI (Persero) it was agreed that PTP XIV and PT RNI immediately transferred the management of PG Camming and PG Bone to PTP X, while PTP XIV and PT RNI through BPPG continued to manage PG Takalar.

31 Desember 2021

31 December 2021

2. Penyertaan (lanjutan)

c. Ventura bersama

**PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero)
(PTPN XIV) (lanjutan)**

Modal kerja dan kredit investasi yang telah digunakan oleh PG Takalar dan PTP X akan menggantikan kedudukan PT RNI sebagai debitur dari BRI atas Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi yang telah digunakan oleh PG Takalar dan PTP X akan menggantikan kedudukan PT RNI sebagai debitur dari BRI atas Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi yang telah digunakan oleh PG Camming dan PG Bone. Kredit modal kerja dari PT Bank BRI (Persero) Tbk kepada Perusahaan telah dilakukan adendum dengan Akta No. 27 tanggal 12 April 2010 tentang Penurunan Plafon dan Perubahan Jangka Waktu Kredit Investasi. Adapun Plafon fasilitas kredit investasi diturunkan dari Rp 120.759.000.000 menjadi Rp 24.223.761.000, dan fasilitas kredit investasi bunga masa konstruksi (Interest During Construction) diturunkan dari Rp 8.217.616.000 menjadi Rp 997.711.000.

Selanjutnya sesuai surat Kementerian BUMN No. S-653/MBU/2011 tanggal 7 Desember 2011 perihal kerjasama pengelolaan pabrik gula PT Perkebunan XIV (Persero), untuk meningkatkan efektivitas serta mempercepat penyehatan, PT Perkebunan XIV (Persero) menetapkan pengelolaan PG Bone, PG Camming dan PG Takalar dilakukan oleh Perusahaan PT Perkebunan X (Persero) dan PT Perkebunan XIV (Persero) dengan kepemilikan mayoritas pada PT Perkebunan X (Persero).

Sehubungan dengan hal tersebut maka pengelolaan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) kepada PT Perkebunan X, sehingga seluruh kewajiban PT Rajawali Nusantara Indonesia kepada BRI terkait dengan pengelolaan PG Takalar dialihkan (novasi) kepada PT Perkebunan Nusantara X berdasarkan Akta perubahan (novasi) kredit BRI No. 38 dan No. 39 tanggal 17 September 2012. Dana talangan yang telah dikeluarkan PT RNI sebesar Rp 41.410.141.834 akan dibuatkan Perjanjian Penyelesaian tersendiri.

2. Investments (continued)

c. Joint venture

**PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero)
(PTPN XIV) (continued)**

Working capital and investment credits that have been used by PG Takalar and PTP X will replace PT RNI's position as debtor of BRI for the Working Capital Credit and Investment Credit that has been used by PG Takalar and PTP X will replace PT RNI's position as debtor of BRI on credit Working Capital and Investment Loans that have been used by PG Camming and PG Bone. The working capital loan from PT Bank BRI (Persero) Tbk to the Company has been added to the Deed No. 27 dated 12 April 2010 concerning Ceiling Reduction and Changes in Investment Credit Term. The investment credit facility ceiling was reduced from Rp 120,759,000,000 to Rp 24,223,761,000, and the Interest During Construction investment credit facility was reduced from Rp 8,217,616,000 to Rp 997,711,000.

Furthermore, according to the letter of the Ministry of SOEs No. S-653/MBU/2011 dated 7 December 2011 regarding cooperation in the management of the sugar factory PT Perkebunan XIV (Persero), to increase effectiveness and accelerate health, PT Perkebunan XIV (Persero) stipulates the management of PG Bone, PG Camming and PG Takalar is carried out by PT Perkebunan X (Persero) and PT Perkebunan XIV (Persero) with majority ownership in PT Perkebunan X (Persero).

In connection with this, the management of PG Takalar was transferred from PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) to PT Perkebunan X, so that all obligations of PT Rajawali Nusantara Indonesia to BRI related to the management of PG Takalar were transferred (novation) to PT Perkebunan Nusantara X based on the Deed of Amendment (Novation) BRI credit No. 38 and No. 39 dated 17 September 2012. The bailout fund that has been issued by PT RNI amounting to Rp 41,410,141,834 will be made into a separate Settlement Agreement.

31 Desember 2021

31 December 2021

2. Penyertaan (lanjutan)

c. Ventura bersama

**PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero)
(PTPN XIV) (lanjutan)**

Perusahaan masih mempunyai tagihan kepada PT Perkebunan Nusantara X berupa dana talangan operasional yang telah dikeluarkan PT RNI sebesar Rp 41.410.141.834 dan dana talangan pembayaran bunga kredit kepada BRI sebelum dilakukannya novasi perjanjian kredit sebesar Rp 8.217.616.000 yang akan dibuatkan perjanjian penyelesaian tersendiri.

Sampai saat ini penyelesaian dana talangan tersebut belum dilaksanakan, karena sesuai kesepakatan Perusahaan dan PT Perkebunan Nusantara X serta PT Perkebunan Nusantara XIV akan dilakukan reviu terlebih dahulu oleh BPKP atas validitas dana talangan tersebut.

PT Rajawali Stevia Indonesia

PT Rajawali Stevia Indonesia didirikan berdasarkan Akta Notaris Arif Handaya, Notaris di Jakarta, Nomor 04 tanggal 20 Desember 2018. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0000019.AH.01.01 tahun 2019 tertanggal 2 Januari 2019.

PT Rajawali Stevia Indonesia bergerak dalam bidang pertanian bit gula dan pemanis tanaman bukan tebu (Stevia) berkedudukan di Padang, dengan lokasi kebun di Desa Liki, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Pada saat ini PT Rajawali Stevia Indonesia masih dalam tahap pengembangan.

2. Investments (continued)

c. Joint venture

**PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero)
(PTPN XIV) (continued)**

The company still has claims to PT Perkebunan Nusantara X in the form of operational bailout funds that have been issued by PT RNI amounting to Rp 41,410,141,834 and loan interest payment bailouts to BRI prior to the novation of the credit agreement amounting to Rp 8,217,616,000 for which a separate settlement agreement will be made.

Until now, the completion of the bailout has not been implemented, because according to the agreement between the Company and PT Perkebunan Nusantara X and PT Perkebunan Nusantara XIV, BPKP will conduct a first review of the validity of the bailout.

PT Rajawali Stevia Indonesia

PT Rajawali Stevia Indonesia was established based on Notarial Deed of Arif Handaya, Notary in Jakarta, Number 04 dated 20 December 2018. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through his letter No. AHU-0000019.AH.01.01 year 2019 dated 2 January 2019.

PT Rajawali Stevia Indonesia is engaged in sugar beet farming and non-sugarcane sweetener (Stevia) domiciled in Padang, with the location of the farm in Liki Village, Sangir District, Solok Selatan Regency, West Sumatra. Currently, PT Rajawali Stevia Indonesia is still in the development stage.

31 Desember 2021

31 December 2021

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting

Kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut :

a. Pernyataan kepatuhan dan dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan Keuangan Konsolidasian Grup telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK-IAI), dan laporan keuangan konsolidasi tersebut telah disetujui oleh Direksi.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dan menyajikan sumber dan penggunaan kas dan setara kas yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha dengan konsep biaya perolehan dan dasar akrual (*accrual*), kecuali laporan arus kas dan akun-akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain seperti dijelaskan pada kebijakan akuntansi pada masing-masing akun tersebut.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan mengukur transaksinya dalam mata uang fungsional tersebut.

b. Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan baru

Standar akuntansi yang telah disahkan, namun belum berlaku efektif

Standar Akuntansi yang telah diterbitkan dan berlaku efektif tanggal 1 Januari 2022 adalah Amendemen PSAK 57 “Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi” tentang Kontrak Memberatkan – Biaya Memenuhi Kontrak.

Perusahaan masih mempelajari dampak yang mungkin timbul atas penerbitan standar akuntansi keuangan tersebut.

3. Summary of significant accounting policies

Significant accounting policies applied consistently in the preparation of the consolidated financial statements are as follows:

a. Statement of compliance and basis for the preparation of the consolidated financial statements

Consolidated Financial Statements of the Group have been prepared based on the Financial Accounting Standards in Indonesia, which include statements and interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board – the Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI), and the consolidated financial statements were approved by the Directors.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method and present the sources and uses of cash and cash equivalents classified into operating, investing and financing activities.

The consolidated financial statements have been prepared on the going concern assumption with the historical cost basis and accrual basis, except for statements of cash flows and certain accounts that are based on other measurements as described in accounting policy on each of those accounts.

Presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Rupiah, which is the functional currency of the Company and measure the transactions in the functional currency.

b. Changes to the new Statements of Financial Accounting Standards

Accounting standards that have been approved but has not effective

Accounting Standards that have been issued and effective on 1 January 2022 are Amendments to PSAK 57 “Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets” regarding Onerous Contracts – Cost of Fulfilling Contracts.

The company is still studying the impact that may arise from the issuance of these financial accounting standards.

31 Desember 2021

31 December 2021

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

b. Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan baru (lanjutan)

Standar akuntansi yang telah disahkan, namun belum berlaku efektif (lanjutan)

Penerapan dari perubahan standar dan interpretasi akuntansi atas standar akuntansi berikut, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2021, relevan bagi kelompok usaha dan menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan serta memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan periode berjalan:

- a) Penyesuaian tahunan PSAK 1: “Penyajian laporan keuangan”.
- b) Penyesuaian tahunan PSAK 13: “Properti Investasi”.
- c) Penyesuaian tahunan PSAK 48: “Penurunan nilai aset”.
- d) Amendemen PSAK 22 “Kombinasi bisnis”
- e) Amendemen PSAK 71: “Instrumen keuangan”
- f) Amendemen PSAK 55: “Instrumen keuangan: Pengakuan dan pengukuran”
- g) PSAK 62: “Kontrak asuransi”
- h) Amendemen PSAK 60: “Instrumen keuangan: Pengungkapan”
- i) Amendemen PSAK 73: “Sewa”

c. Prinsip-prinsip konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan entitas anak seperti yang disebutkan pada Catatan 2, yang dimiliki oleh Perusahaan (secara langsung atau tidak langsung) dengan kepemilikan saham lebih dari 50 persen dan dikendalikan oleh Perusahaan.

3. Summary of significant accounting policies (continued)

b. Changes to the new Statements of Financial Accounting Standards (continued)

Accounting standards that have been approved but has not effective (continued)

The application of the following revised accounting standards and interpretation of the accounting standards, which are effective from 1 January 2021 and relevant for the Group, but did not result in substantial changes to the Group’s accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current period financial statements:

- a) Annual improvement SFAS 1: “Presentation of financial statements”;
- b) Annual improvement SFAS 13: “Investment properties”;
- c) Annual improvement PSAK 48: “Asset impairment”
- d) Amendment of SFAS 22 “Business combination”;
- e) Amendment of SFAS 71: “Financial instrument”;
- f) Amendment of SFAS 55: “Financial instrument: Recognition and measurement”;
- g) SFAS 62: “Insurance contract”;
- h) Amendment of SFAS 60: “Financial instrument: Disclosure”;
- i) Amendment of SFAS 73: “Lease”.

c. Principles of consolidation

The consolidated financial statements include the financial statements of the subsidiaries as mentioned in Note 2, which are owned by the Company (directly or indirectly) with ownership of more than 50 percent and controlled by the Company.

31 Desember 2021

31 December 2021

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

Suatu pengendalian juga ada apabila Entitas Induk memiliki setengah atau kurang kekuasaan suara jika terdapat:

- a) Kekuasaan yang melebihi setengah hak suara sesuai perjanjian dengan investor lainnya;
- b) Kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;
- c) Kekuasaan untuk menunjuk atau memberhentikan sebagian besar dewan direksi atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui dewan atau organisasi tersebut;
- d) Kekuasaan untuk memberikan suara mayoritas pada rapat dewan direksi atau organisasi pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui dewan atau organ tersebut.

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Grup, yakni Grup terekspos, atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas *investee*).

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial yang dapat dilaksanakan oleh Grup (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Grup mengendalikan entitas lain.

Laporan keuangan Grup yang mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari Perusahaan dan seluruh entitas anak yang secara langsung dan tidak langsung dikendalikan oleh Entitas Anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Grup secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

3. Summary of significant accounting policies (continued)

c. Principles of consolidation (continued)

A control also exists when the Parent Entity has half or less of the voting power if there is:

- a) Power in over half of the voting rights based on agreement with other investors;
- b) Power to govern the financial and operating policies of the entity under a statute or agreement;
- c) Power to appoint or dismiss the majority of the board of directors or equivalent governing board and control of the entity is by that board or organization;
- d) Power to give a majority vote at meetings of the board of directors or equivalent governing body and control of the entity is by that board or organization.

Subsidiaries are entities controlled by the Group, the Group is exposed, or has rights to variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through the current ability to direct the relevant activities of the entity (power over the *investee*).

The existence and effect of potential voting rights which the Group has the practical ability to execute (substantive rights) are considered when assessing whether the Group controls another entity.

The financial statements of the Group which include the results of operations, cash flows, assets and liabilities of the Company and all its subsidiaries that directly and indirectly controlled by the Subsidiaries are consolidated from the effective date of acquisition, i.e. the date on which the Group effectively obtained control over the acquired business, up to the date when control ceases.

31 Desember 2021

31 December 2021

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, laba, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam grup dieliminasi secara penuh. Laporan keuangan konsolidasian harus disusun dengan basis yang sama yaitu, kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi, peristiwa dan keadaan yang sama. Kebijakan tersebut telah ditetapkan secara konsisten oleh Entitas Anak, kecuali dinyatakan secara khusus.

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dan penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non pengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan non pengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan non pengendali berubah, Grup menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan non pengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah penyesuaian kepentingan non pengendali dan nilai wajar dari jumlah penerimaan atau pembayaran diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

3. Summary of significant accounting policies (continued)

c. Principles of consolidation (continued)

Parent entity prepares the consolidated financial statements using the same accounting policies for transactions and other events in similar circumstances. All transactions, balances, income, expenses, and cash flows associated with intra group transactions between entities within the group are eliminated in full. The consolidated financial statements should be prepared on the same basis, namely, the same accounting policy for transactions, events and circumstances which are the same. The policy has been defined consistently by the Subsidiaries, unless otherwise stated.

The Group attributes income and each component and other comprehensive income to the owners of the parent entity and non-controlling interests even though it results in the non-controlling interests have a deficit balance. The Group presents the non-controlling interest in equity in the consolidated statement of financial position, separately from the equity owners of the parent entity..

Changes in the ownership of the parent entity in subsidiaries that do not result in loss of control are equity transactions (i.e. transactions with owners in their capacity as owners). When the proportion of equity held by non-controlling interests change, the Group adjusts the carrying amount of non-controlling interest and the interests to reflect changes in the relative ownership of subsidiaries. The difference between the amount by which the non-controlling interests adjusted and the fair value of the amount received or paid are recognized directly in equity and attributed to owners of the parent entity.

31 Desember 2021

31 December 2021

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

Jika kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Grup :

- a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak;
- b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan non pengendali;
- c) Menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran yang tercatat di ekuitas, bila ada;
- d) Mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajar;
- e) Mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi; dan
- f) Mereklasifikasi bagian induk atau komponen yang sebelumnya diakui sebagai pendapatan komprehensif ke laporan laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba sebagaimana mestinya.

d. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank, dan investasi jangka pendek yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehan dan tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya.

e. Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya

Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya merupakan saldo bank berjangka dengan jatuh tempo lebih dari 3 bulan sejak tanggal penempatan dan digunakan sebagai jaminan serta dibatasi penggunaannya.

f. Piutang usaha dan piutang lain-lain

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali jika efek diskontonya tidak material, setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan bukti objektif bahwa saldo piutang mengalami penurunan nilai.

3. Summary of significant accounting policies (continued)

c. Principles of consolidation (continued)

In the case of loss of a subsidiary, the Group:

- a) *Derecognizes assets (including each goodwill) and liabilities of subsidiaries;*
- b) *Derecognizes the carrying amount of each non controlling interest;*
- c) *Derecognizes the accumulated difference in translation recorded in equity, if any;*
- d) *Recognizes any remaining investment at fair value;*
- e) *Recognizes any resulting differences as gains or losses in the income statement; and*
- f) *Reclassifies parent or component parts previously recognized as comprehensive income to the income statement, or transfer directly to retained earnings as appropriate.*

d. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash, bank and short-term investments maturing within three months or less from the date of acquisition and are not used as collateral and not restricted in use.

e. Restricted cash and cash equivalent

Restricted cash and cash equivalent represents bank account balance with maturities of more than 3 months from the date of placement and is used as collateral and restricted in use.

f. Trade and other receivables

Trade receivables and other receivables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, unless the effect of discounting is immaterial, net of allowance for impairment which is established based on objective evidence that a receivable balance is impaired.

31 Desember 2021

31 December 2021

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

g. Penyisihan piutang usaha dan piutang lain-lain

Penyisihan penurunan nilai piutang dibentuk bila terdapat bukti objektif bahwa Perseroan tidak dapat menagih sesuai dengan persyaratan awal piutang karena debitur mengalami kesulitan keuangan, wanprestasi atau sudah dinyatakan pailit. Jumlah penyisihan adalah sebesar selisih antara jumlah tercatat dengan nilai kini arus kas di masa mendatang yang didiskontokan dengan bunga efektif di pasar. Indikasi penurunan nilai ditetapkan pada setiap individu secara selektif dengan mempertimbangkan risiko dari tertagihnya aset keuangan tersebut.

Setiap akhir tahun dilakukan pencadangan penghapusan piutang ragu-ragu dan dibebankan ke laba (rugi) tahun berjalan. Terhadap piutang yang sudah tidak dapat ditagih, Direksi menetapkan penghapusannya untuk dikompensasikan dengan cadangan penghapusan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris/Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

h. Beban dibayar dimuka

Beban dibayar dimuka merupakan beban yang mempunyai masa manfaat satu tahun yang akan disajikan sebagai beban dibayar dimuka dalam kelompok aset lancar.

i. Kombinasi bisnis dan goodwill

Kombinasi bisnis dicatat dengan metode akuisisi. Imbalan yang diambil alih dan instrumen ekuitas yang diterbitkan sebagai pertukaran atas pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, kepentingan pengendali diukur pada nilai wajar atau pada proporsi kepemilikan non pengendali atas aset neto teridentifikasi dari aset yang diakuisisi. Pilihan dasar pengakuan dibuat berdasarkan basis tiap transaksi. Biaya terkait akuisisi dicatat sebagai beban ketika terjadi. Aset dan liabilitas yang teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi dicatat pada nilai wajar pada tanggal akuisisi.

3. Summary of significant accounting policies (continued)

g. Allowance for trade and other receivables

Allowance for impairment of receivables is established when there is objective evidence that the Company is not able to charge in accordance with the requirements of the initial receivables because the debtor is experiencing financial difficulties, default or has been declared bankrupt. The allowance is equal to the difference between the carrying amount and the present value future cash flows discounted at the effective interest on the market. Indications of impairment are assigned to each individual selectively by considering the risk of uncollectible financial assets.

Each end of the year a backup deletion for doubtful accounts are done and charged to income (loss) for the year. For receivables that are uncollectible, the Board of Directors set the bad debt to be compensated by the elimination of reserves after gaining approval from the Board of Commissioners/General Meeting of Shareholders (RUPS).

h. Prepaid expenses

Prepaid expenses represent expenses which has a useful life of one year to be presented as prepaid expenses in the current assets group.

i. Business combinations and goodwill

Business combinations accounted for by the acquisition method. Foreclosed benefits and equity instruments issued in exchange for control of the acquiree. For each business combination, the controlling interest is measured at fair value or at the non-controlling interest's proportionate share of the identifiable net assets of the assets acquired. The choice of basis for recognition is made on the basis of each transaction. Acquisition-related costs are recorded as expenses when incurred. The acquiree's identifiable assets and liabilities are at fair value at the acquisition date.

31 Desember 2021

31 December 2021

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

i. Kombinasi bisnis dan goodwill (lanjutan)

Goodwill awalnya diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih dari nilai agregat imbalan yang dialihkan dan nilai yang diakui oleh kepentingan nonpengendali dan nilai kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya atas jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika nilai wajar dari jumlah aset neto yang diakuisisi melebihi dari nilai agregat imbalan yang telah dialihkan, grup menilai kembali apakah asumsi aset yang diakuisisi dan liabilitas yang diambil alih sudah diidentifikasi dengan benar dan memeriksa prosedur yang digunakan untuk mengukur nilai yang harus diakui pada tanggal akuisisi. Jika hasil penilaian kembali tersebut masih menghasilkan selisih lebih atas nilai wajarnya dari aset neto yang diakuisisi atas nilai agregat imbalan yang dialihkan maka keuntungan diakui pada laba atau rugi.

Saat penentuan imbalan dari kombinasi bisnis termasuk imbalan kontinjensi, imbalan kontinjensi ini diakui pada nilai wajar saat tanggal akuisisi. Imbalan kontinjensi ini diklasifikasikan sebagai ekuitas atau liabilitas keuangan. Jumlah yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan selanjutnya diukur kembali pada nilai wajar dimana perubahan pada nilai wajar tersebut diakui dalam laba atau rugi atau ketika penyesuaian dicatat di luar periode pengakuan. Perubahan pada nilai wajar imbalan kontinjensi yang memenuhi persyaratan sebagai penyesuaian periode pengukuran, disesuaikan secara retrospektif dengan penyesuaian terkait terhadap *goodwill*. Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang timbul dari informasi tambahan yang didapat selama periode pengeluaran yang tidak boleh melebihi satu tahun dari tanggal akuisisi, tergantung fakta dan kondisi yang ada pada saat tanggal akuisisi.

3. Summary of significant accounting policies (continued)

i. Business combinations and goodwill (continued)

Goodwill is initially measured at cost, which is the difference in excess of the aggregate value of the consideration transferred and the value recognized by non-controlling interests and the value of previously held equity interests over the net amount of identifiable assets acquired and liabilities assumed. If the fair value of the total net assets acquired exceeds the aggregate value of the consideration transferred, the group reassesses whether the assumptions of the acquired assets and the liabilities assumed were identified correctly and examines the procedures used to measure the amounts to be recognized at the acquisition date. If the results of the revaluation still result in an excess of the fair value of the net assets acquired over the aggregate value of the consideration transferred, the gain is recognized in profit or loss.

When determining the consideration of a business combination including contingent consideration, the contingent consideration is recognized at fair value at the date of acquisition. The contingent consideration is classified as equity or financial liabilities. Amounts classified as financial liabilities are subsequently remeasured at fair value where changes in fair value are recognized in profit or loss or when the adjustment is recorded outside the period of recognition. Changes in the fair value of contingent consideration that qualify as measurement period adjustments are adjusted retrospectively for the related adjustments to goodwill. Measurement period adjustments are adjustments arising from additional information obtained during the expenditure period which should not exceed one year from the acquisition date, depending on facts and conditions existing at the acquisition date.

31 Desember 2021

31 December 2021

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

i. Kombinasi bisnis dan goodwill (lanjutan)

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi bisnis terjadi, maka grup akan melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangan konsolidasian. Selama periode pengukuran, grup menyesuaikan secara retrospektif jumlah sementara yang diakui pada tanggal akuisisi untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan jika diketahui telah berdampak pada pengakuan jumlah yang diakui pada tanggal tersebut, periode pengakuan berakhir segera setelah perusahaan menerima informasi yang dicari tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi bahwa informasi tambahan tidak dapat diperoleh namun demikian periode pengakuan tidak boleh melebihi satu tahun dari tanggal akuisisi.

Dalam PSAK 38 (Revisi 2012) "kombinasi bisnis entitas sependangali" pengalihan aset, liabilitas, saham, dan instrumen kepemilikan lain antara entitas sependangali tidak akan menghasilkan suatu laba atau rugi bagi perusahaan atau entitas individual yang berada dalam grup yang sama, oleh karena transaksi restrukturisasi antara entitas sependangali tidak menambah atau mengubah substansi ekonomi atas kepemilikan aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lain yang dipertukarkan, aset atau liabilitas yang dialihkan harus dicatat berdasarkan nilai buku yang menggunakan metode penyatuan kepentingan (*pooling of interest*).

Dalam pelaksanaan metode penyatuan kepentingan, komponen-komponen laporan keuangan selama restrukturisasi terjadi disajikan seolah-olah restrukturisasi tersebut telah terjadi sejak awal periode penyajian paling awal. Selisih imbalan yang dibayar atau diterima dengan nilai buku historis terkait dengan nilai tercatat dari kepentingan yang diperoleh setelah ada perhitungan dampak pajak penghasilan diakui secara langsung di ekuitas dan disajikan sebagai tambahan modal disetor pada bagian ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian.

3. Summary of significant accounting policies (continued)

i. Business combinations and goodwill (continued)

If the initial accounting for the business combination was not completed at the end of the reporting period when the business combination occurred, then the group will report the number of temporary posts for the accounting process has not been completed in the consolidated financial statements. During the measurement period, the group retrospectively adjusts the provisional amount recognized at the acquisition date to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed at the acquisition date and if it is found to have impacted the recognition of the amount recognized at that date, the recognition period ends immediately after the company received the information sought about facts and circumstances that existed at the acquisition date that additional information could not be obtained, however the recognition period should not exceed one year from the acquisition date.

In SFAS 38 (Revised 2012) "business combination of entities under common control", the transfer of assets, liabilities, shares and other ownership instruments between entities under common control will not result in a profit or loss for the company or individual entities that are in the same group, because of the restructuring transaction between entities under common control does not add or change the economic substance of the ownership of assets, liabilities, shares or other ownership which are exchanged, assets or liabilities transferred must be recorded based on book values using the pooling of interest method.

In the implementation of pooling of interest method, the components of the financial statements during the restructuring are presented as if such restructuring has occurred since the beginning of the earliest period presentation. The difference between the consideration paid or received and the historical book value relating to the carrying value of the interest acquired after calculating the impact of income tax is recognized directly in equity and presented as additional paid-in capital in the equity section of the consolidated statement of financial position.

31 Desember 2021

31 December 2021

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

i. Kombinasi bisnis dan goodwill (lanjutan)

Pada saat penerapan awal PSAK 38 (Revisi 2012) seluruh saldo selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali direklasifikasikan ke akun "tambahan modal disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pernyataan pada Entitas Asosiasi

Asosiasi adalah entitas dimana grup (sebagai investor) memiliki pengaruh yang signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan terkait kebijakan keuangan dan operasional investor, tapi tidak termasuk kendali atau kendali bersama atas kebijakan operasional tersebut. Pertimbangan dalam menentukan pengaruh signifikan sama dengan pertimbangan saat menentukan pengendalian atas entitas anak.

Grup menghitung investasi pada entitas asosiasi dengan menggunakan metode ekuitas. Aset-aset ini termasuk dalam penyertaan jangka panjang dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

j. Piutang pengembangan perkebunan rakyat (plasma)

Biaya-biaya yang terjadi dalam pengembangan perkebunan plasma sampai perkebunan tersebut siap diserahkan dikapitalisasi sebagai aset pada akun Piutang Pengembangan Perkebunan Rakyat. Pengembangan perkebunan plasma dibiayai oleh kredit investasi perkebunan plasma dari bank atau pembiayaan sendiri. Akumulasi biaya pengembangan perkebunan plasma disajikan dengan nilai bersih setelah dikurangi dengan kredit investasi perkebunan plasma yang diterima sebagai aset/piutang pengembangan perkebunan rakyat - bersih atau liabilitas/utang pengembangan perkebunan rakyat - bersih.

Selisih antara akumulasi biaya pengembangan perkebunan plasma dengan nilai kredit investasi perkebunan plasma yang diterima dibebankan pada laporan laba - rugi komprehensif.

3. Summary of significant accounting policies (continued)

i. Business combinations and goodwill (continued)

At the time of the initial application of SFAS 38 (Revised 2012) the entire balance of the difference in value from restructuring transactions of entities under common is reclassified into "additional paid-in capital" account on the consolidated statement of financial position.

Statements to Associates

Associates are entities in which the group (as an investor) has significant influence. Significant influence is the power to participate in decisions regarding the financial and operational policies of investors, but does not include control or joint control over these operational policies. Considerations in determining the significant influence are the same considerations when determining control over its subsidiaries.

The Group calculates the investment in associates using the equity method. These assets are included in long-term investments in the consolidated statement of financial position.

j. Development of smallholder plantations (plasma) receivable

Costs incurred in the development of plasma plantations until the estate is ready for handover are capitalized as assets on receivable plasma development account. The development of plasma plantations is financed by plasma plantation investment credits from banks or finance themselves. Accumulated development costs of plasma plantations are presented net of the value of plantation investment credits received as asset/receivable plasma plantation development - net or liabilities/ debts community plantation development - net.

The difference between the accumulated development costs of plasma plantations with the value of plantation investment credits earned are charged to comprehensive income statements.

31 Desember 2021

31 December 2021

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

k. Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau perjanjian yang mengandung sewa didasarkan atas substansi perjanjian pada tanggal awal sewa dan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi, jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset kepada penyewa. Sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset, diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Untuk sewa operasi, Perusahaan mengakui pembayaran sewa sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

l. Aset sewa

Aset tetap yang diperoleh dengan sewa guna usaha pembiayaannya disajikan sejumlah uang tunai dari pembayaran minimum sewa guna usaha ditambah dengan harga opsi pada awal periode sewa. Kewajiban yang terkait juga diakui dan setiap pembayaran angsuran dialokasikan sebagai pelunasan hutang dan pembayaran beban bunga. Aset sewa guna usaha disusutkan dengan metode yang sama dengan aset yang dimiliki, dan pada saat aset sewa guna usaha tersebut lunas dibayar, maka aset sewa guna usaha tersebut dipindahkan ke kelompok aset tetap, demikian juga dengan akumulasi penyusutan sewa guna usaha dipindahkan ke akumulasi penyusutan aset tetap.

m. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Perusahaan menerapkan PSAK No. 7 (Revisi 2015), "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi" PSAK revisi ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi dalam laporan keuangan. Tidak terdapat dampak signifikan dari penerapan PSAK yang direvisi tersebut terhadap laporan keuangan.

3. Summary of significant accounting policies (continued)

k. Lease

In determining whether an agreement is a lease agreement or agreements containing leases is based on the substance of the agreement at inception date and whether the fulfillment of the agreement depends on the use of an asset and the agreement provides a right to use the asset. A lease is classified as an operating lease, if the lease does not transfer substantially all the risks and rewards associated with ownership of the asset to the lessee. Leases that transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership are classified as finance leases. For an operating lease, the Company recognizes lease payments as an expense on a straight-line basis over the lease term.

l. Lease asset

Fixed assets acquired by leasing their financing are presented as cash sum of the minimum lease payments plus the purchase option at the beginning of the lease period. Related liabilities are also recognized and each installment is allocated as debt repayment and interest payments. Leased assets are depreciated using the same method with the owned assets, and at the time of the leased asset is paid, then the assets of the lease are transferred to the group of fixed assets, as well as accumulated depreciation of lease transferred to accumulated depreciation of fixed assets.

m. Transaction with related parties

The Company adopted SFAS No. 7 (Revised 2015), "Related Party Disclosures" This revised SFAS requires disclosure of relationships, transactions and balances of related party commitments in the financial statements. There is no significant impact from the adoption of the revised SFAS to the financial statements.

31 Desember 2021

31 December 2021

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

**m. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi
(lanjutan)**

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangan (dalam hal ini dirujuk sebagai “entitas pelapor”).

1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - v. Entitas tersebut menyelenggarakan suatu program imbalan kerja karyawan untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor

**3. Summary of significant accounting policies
(continued)**

m. Transaction with related parties (continued)

A related party is a person or entity related to the entity that prepares financial statements (in this case referred to as the “reporting entity”).

1. The person or the person’s family member is related to a reporting entity if that person:
 - i. Have control or joint control over the reporting entity;
 - ii. Have significant influence over the reporting entity; or
 - iii. Key management personnel of the reporting entity or the parent entity of the reporting entity.
2. An entity is related to a reporting entity if it meets one of the following:
 - i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
 - ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group, which the other entity is a member).
 - iii. Both entities are joint ventures of the same third party.
 - iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
 - v. The entity is conducting an employee benefits program for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.

31 Desember 2021

31 December 2021

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

m. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: (lanjutan)
 - vi. Entitas dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (1).
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (1)(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
 - viii. Entitas, atau anggota dari kelompok di mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan tingkat bunga atau harga, persyaratan dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam laporan keuangan.

n. Transaksi dengan Petani Tebu Rakyat (PTR)

Pola kerjasama antara Perseroan dengan PTR adalah bagi hasil dimana petani menanam tebu di lahan sendiri dengan dibiayai pinjaman Bank dan pinjaman dana Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) yang dahulu Bernama Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lain. Perseroan sebagai avalis (Penjamin) menyediakan sarana dan prasarana. Hasil tebu PTR digiling di pabrik gula berdasarkan sistem bagi hasil sesuai dengan tingkat rendemen yang diperoleh.

Pencatatan transaksi pinjaman/ pelunasan kepada/ oleh PTR untuk keperluan pelaksanaan tanaman tebu dalam rangka ketahanan pangan dari pemberi dana (bank) yang dilakukan melalui Perseroan dicatat sebagai Piutang PTR pada akun piutang lain-lain. Sedangkan transaksi penerimaan/ pembayaran dana dari/ ke pemberi dana untuk keperluan pinjaman PTR disajikan sebagai Paket Kredit Modal Kerja pada akun utang lain-lain.

3. Summary of significant accounting policies (continued)

m. Transaction with related parties (continued)

2. An entity is related to a reporting entity if it meets one of the following: (continued)
 - vi. Entities controlled or jointly controlled by a person identified in (1).
 - vii. A person identified in letter (1)(i) has significant influence over the entity or key management personnel of the entity (or the parent of the entity).
 - viii. An entity, or a member of a group of which the entity is part of the group, provides key management personnel services to the reporting entity or to a parent of the reporting entity.

All transactions with related parties, whether or not made at the rate or price, terms and conditions as those with third parties, are disclosed in the financial statements.

n. Transaction with Sugarcane Farmers (PTR)

The pattern of cooperation between the Company and PTR is profit sharing where farmers grow sugarcane on their own land with bank loans and loan funds from the Micro and Small Business Funding Program which was formerly known as the Partnership and Community Development Program of other State-Owned Enterprises (SOE's). The Company as avalist (Guarantor) provides facilities and infrastructure. PTR's harvest is milled in sugar factory based on profit sharing system in accordance with the yield rate obtained.

Recording of loan/repayment transaction to/by the PTR from the financing firms (banks) for the purpose of the planting of sugarcane crop in order to strengthen the food security, which conducted through the Company is recorded as PTR receivable on other receivable. While the transaction receipt/ payment of funds from/ to the donors for lending purposes of PTR is presented as Working Capital Loan Package on other payables.

31 Desember 2021

31 December 2021

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

o. Persediaan

1) Persediaan barang perlengkapan, pembantu, pertanian, suku cadang, dan distribusi

Persediaan barang gudang adalah persediaan barang material, bahan perlengkapan/ suku cadang, bahan barang bulk/ bahan pembantu proses dan suku cadang alat pertanian untuk keperluan pabrik. Pemakaian persediaan bahan barang perlengkapan dicatat dengan menggunakan metode harga rata-rata tertimbang bergerak (*weighted moving average method*).

Setiap akhir tahun buku diadakan *stock opname* atas persediaan bahan/ barang dan apabila terdapat barang yang tidak dapat dipakai karena rusak, maka persediaan tersebut dipindahkan ke akun persediaan bahan pada kelompok aset tidak lancar lain dengan membuka akun penyisihannya. Penghapusan persediaan bahan tersebut dari pembukuan dilakukan setelah bahan/barang tersebut laku dijual dan atau telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris/ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2) Persediaan barang jadi

Persediaan gula, tetes, minyak sawit (CPO), inti sawit, dan teh

Persediaan gula (gula jadi dan kemasannya), minyak sawit (CPO), inti sawit, dan teh dinilai berdasarkan harga/ nilai yang lebih rendah antara harga pokok produksi rata-rata dibandingkan dengan nilai realisasi bersih, yaitu harga jual rata-rata per satuan dikurangi biaya untuk menjual masing-masing pabrik.

3. Summary of significant accounting policies (continued)

o. Inventories

1) Inventories of equipment, supporting equipment, agriculture, spare parts, and distribution

Warehouse inventory is inventory of material goods, materials equipment/ spareparts, bulk goods/ supporting material for processing and agricultural spare parts for factory/mill. The use of supplies of goods is accounted for the weighted moving average method.

Each end of the financial year, stock opname was held on supplies of materials/ goods and if there are items that cannot be used because it is broken, then the stock is transferred to the account of inventory of materials in other noncurrent assets group by making the allowance accounts. Elimination of supplies from bookkeeping is done after the material/ goods are sold or have been approved by the Board of Commissioners/ General Meeting of Shareholders (RUPS).

2) Finished goods

Inventories of sugar, molasses, crude palm oil (CPO), palm kernel, and tea

Inventories of sugar (sugar finished product and packaging), crude palm oil (CPO), palm kernel, and tea are assessed based on the price/ value of the lower of the cost of production on average compared with the net realizable value, which is the average selling price per unit less costs to sell of each factory.

31 Desember 2021

31 December 2021

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

o. Persediaan (lanjutan)

2) Persediaan barang jadi (lanjutan)

Persediaan gula

Persediaan gula (gula jadi dan kemasannya) dinilai berdasarkan harga/nilai yang lebih rendah antara harga pokok produksi rata-rata dibandingkan dengan nilai realisasi bersih, yaitu harga jual rata-rata per satuan.

Persediaan gula dalam proses (gula sisa) dijabarkan setara dengan gula SHS I dan dinilai sesuai harga pokok produksi rata-rata masing-masing pabrik gula.

Persediaan tetes

Persediaan tetes dinilai berdasarkan harga/nilai yang lebih rendah antara harga pokok produksi rata-rata dibandingkan dengan nilai realisasi bersih, yaitu harga jual rata-rata per satuan.

Persediaan CPO

Persediaan CPO dinilai berdasarkan harga/nilai yang lebih rendah antara harga pokok produksi rata-rata dibandingkan dengan nilai realisasi bersih, yaitu harga jual rata-rata per satuan.

Persediaan inti sawit

Persediaan inti sawit dinilai berdasarkan harga/nilai yang lebih rendah antara harga pokok produksi rata-rata dibandingkan dengan nilai realisasi bersih, yaitu harga jual rata-rata per satuan.

3. *Summary of significant accounting policies (continued)*

o. *Inventories (continued)*

2) *Finished goods (continued)*

Inventories of sugar

Inventories of sugar (sugar finished goods and packaging) are assessed based on the price/ value of the lower of the cost of production on average compared with the average net realizable value, i.e. the average selling price per unit.

Inventories of the work in process products are recorded equivalent to sugar SHS I and assessed according to the cost of the average production of each sugar mill.

Inventories of molasses

Inventories of molasses are assessed based on the price/ value of the lower of the cost of production on average compared with the average net realizable value, which is the average selling price per unit.

Inventories of CPO

CPO inventories are assessed based on the price/ value of the lower of the cost of production on average compared with the average net realizable value, which is the average selling price per unit.

Inventories of palm kernel

Inventories of palm kernel are assessed based on the price/ value of the lower of the cost of production on average compared with the average net realizable value, which is the average selling price per unit.

31 Desember 2021

31 December 2021

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

o. Persediaan (lanjutan)

2) Persediaan barang jadi (lanjutan)

Persediaan teh

Persediaan teh dinilai berdasarkan harga/nilai yang lebih rendah antara harga pokok produksi rata-rata dibandingkan dengan nilai realisasi bersih, yaitu harga jual rata-rata per satuan.

Persediaan obat-obatan, hasil bumi, alkohol, spiritus, dan arak.

Persediaan obat-obatan, hasil bumi, alkohol, spiritus, arak, dan peternakan sapi dinilai berdasarkan harga nilai yang lebih rendah antara harga pokok produksi rata-rata dibandingkan dengan nilai realisasi bersih, yaitu harga jual rata-rata per satuan.

Terhadap saldo persediaan barang dagangan, manajemen telah melakukan penelaahan atas kemungkinan terjadinya barang rusak (*expired*). Pada akhir tahun dilakukan pencadangan penghapusan persediaan barang rusak sebesar 1% dari saldo rata-rata persediaan dan pembebanannya dicatat ke laba (rugi) tahun berjalan. Setelah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi menetapkan penghapusannya untuk dikompensasikan dengan cadangan penghapusannya.

3) Persediaan bahan baku

Persediaan bahan baku dicatat dengan menggunakan metode buku dengan penilaian rata-rata (*moving average*).

p. Beban panen yang akan datang

Beban panen yang akan datang merupakan biaya tanaman yang telah dikeluarkan untuk tanaman tebu berupa biaya pembibitan, biaya tanaman, pemeliharaan tanaman, dan peralatan-peralatan pabrik yang digunakan dalam penanaman yang akan panen dalam satu tahun yang akan datang maupun dua tahun yang akan datang untuk siap digiling sebagai bahan baku gula.

3. *Summary of significant accounting policies (continued)*

o. Inventories (continued)

2) Finished goods (lanjutan)

Inventories of tea

Inventories of tea are assessed based on the price/ value of the lower of the average cost of production compared with the net realizable value, which is the average selling price per unit.

Inventories of medicine, agricultural products, alcohols, spirituous, and arrack.

Medical supplies, agricultural products, alcohol, spirituous, arracks, and cattle farms are assessed based on the lower of the average cost of production compared with the net realizable value, which is the average selling price per unit.

*On the balance of net merchandise inventory, management has conducted a review of the possibility of damaged goods (*expired*). At the end of the year allowance for damaged goods inventory was made at 1% of the average balance of inventories and the expense is recorded to income (loss) for the year. After obtaining the approval in the General Meeting of Shareholders (RUPS), the Board of Directors determine the disposal to be compensated with bad debt allowance.*

2) Raw materials

Inventories of raw materials are accounted for using the perpetual method with moving average.

p. Future harvest expense

Future harvest expense is the cost of plant that has been expensed for the sugarcane crop in the form of the cost of seedling, the cost of the plant, plant maintenance, and manufacturing equipment used in planting that will be harvested in the coming year or two years to come to be ready to be processed as raw material of sugar.

31 Desember 2021

31 December 2021

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

p. Beban panen yang akan datang (lanjutan)

Untuk masa panen satu tahun yang akan datang dicatat sebagai aset lancar dan masa panen dua tahun yang akan datang dicatat sebagai aset tidak lancar.

Biaya tanaman yang dikeluarkan untuk tanaman tebu yang digiling dalam tahun berjalan dibukukan sebagai biaya tahun berjalan.

Sedangkan biaya pembibitan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk tanaman tebu yang akan digiling dalam tahun-tahun berikutnya dibukukan sebagai berikut :

- i. Beban panen satu tahun yang akan datang (kelompok aset lancar) untuk tanaman tebu yang akan digiling pada tahun berikutnya.
- ii. Beban yang ditangguhkan (kelompok aset tidak lancar) untuk biaya tanaman tebu yang akan digiling dalam jangka waktu lebih dari 2 tahun.
- iii. Biaya pabrik yang dikeluarkan sampai hari giling berakhir dibukukan pada biaya pabrik berjalan. Sedangkan biaya pabrik yang dikeluarkan sejak selesai masa giling sampai dengan akhir tahun buku dibukukan sebagai biaya dibayar dimuka.

q. Properti investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) untuk menghasilkan sewa (*lease*) atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya.

Pada tahun 2016 Perusahaan dan entitas anak melakukan perubahan kebijakan akuntansi atas properti investasi tanah dari model biaya menjadi model nilai wajar. Perubahan kebijakan akuntansi tersebut diterapkan secara prospektif sesuai dengan PSAK 25.

3. Summary of significant accounting policies (continued)

p. Future harvest expense (continued)

The coming year harvest is recorded as current assets and two years harvest is recorded as non-current assets.

Costs incurred to process sugarcane pressed in the current year is recorded as expense for the year.

Meanwhile, seedling fees and other costs incurred to process sugarcane in the subsequent years are recorded as follows:

- i. Harvest expenses for the following year (group of current assets) for sugarcane to be processed in the next year.*
- ii. Deferred expenses (groups of non-current assets) for the cost of sugarcane to be processed in a period of more than two years.*
- iii. Factory costs incurred until the end of the processed day are recorded in the current year factory cost. While the factory costs incurred since the completion of processing period until the end of the fiscal year are recorded as a prepaid expense.*

q. Investment property

Investment property is property (land or building or part of a building or both) held to earn leases or for capital appreciation or both.

In 2016 the Company and its subsidiaries made a change in accounting policy of investment property in the form of land from the cost model into the fair value model. Changes in accounting policy is applied prospectively in accordance with SFAS 25.

31 Desember 2021

31 December 2021

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

q. Properti investasi (lanjutan)

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi properti investasi yang menggunakan model nilai wajar dikreditkan pada "Selisih Nilai Wajar Properti Investasi" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Penurunan yang menghapus nilai kenaikan sebelumnya atas aset yang sama dibebankan terhadap "Selisih Nilai wajar Properti Investasi" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

r. Aset tetap dan aset tanaman tahunan

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perusahaan dan entitas anak melakukan perubahan kebijakan akuntansi atas kelas aset tanah dari model biaya menjadi model revaluasi. Perubahan kebijakan akuntansi tersebut diterapkan secara prospektif sesuai dengan PSAK No. 25.

Tanah disajikan sebesar nilai wajar. Penilaian terhadap tanah tersebut dilakukan oleh penilai independen eksternal yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya. Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dieliminasi terhadap nilai tercatat bruto aset, dan nilai netonya disajikan kembali sebesar nilai revaluasian aset tetap.

Semua kelompok aset tetap dinyatakan berdasarkan harga perolehan (model biaya) dikurangi akumulasi penyusutan, kecuali tanah tidak disusutkan. Beban yang timbul sehubungan perolehan hak atas tanah untuk yang pertama kali diakui sebagai bagian dari harga perolehan tanah. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat ekonomis sebagai berikut :

3. Summary of significant accounting policies (continued)

q. Investment property (continued)

The increase in the carrying amount arising from the revaluation of investment property using the fair value model is credited to "Difference in Fair Value of Investment Property" in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Decrease which offset the previous increase of the same asset is charged against "Difference in Fair Value of Investment Property" in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

r. Fixed assets and annual plant assets

On 31 December 2016, the Company and its subsidiaries changes their accounting policy on asset of land from the cost model to the revaluation model. Changes in accounting policy is applied prospectively in accordance with SFAS No. 25.

Land are stated at fair value. Assessment of the land is carried out by an external independent appraiser registered with the Financial Services Authority (OJK). Assessment of these assets is conducted regularly to ensure that the fair value revaluation of assets is not materially different from their carrying values. Accumulated depreciation at the date of revaluation is eliminated against the gross carrying value of the asset, and the net value is restated in the amount of revaluated fixed asset.

All groups of fixed assets are stated at acquisition cost (cost model) less accumulated depreciation, except for land which is not depreciated. Expenses incurred in respect of acquisition of land for the first time are recognized as part of the acquisition cost of land. Depreciation is computed using the straight-line method over the estimated useful lives as follows:

31 Desember 2021

31 December 2021

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

3. Summary of significant accounting policies (continued)

r. Aset tetap dan aset tanaman tahunan (lanjutan)

r. Fixed assets and annual plant assets (continued)

Jenis aset tetap	Masa manfaat ekonomis/ Economic useful lives	Type of fixed assets
Gedung dan penataran	20 tahun/ years	Building and improvement
Jalan dan jembatan	20 tahun/ years	Road and bridge
Mesin dan Instalasi	10 tahun/ years	Machine and installation
Aset benda lain	10 tahun/ years	Other assets
Sumur dan pompa	8 tahun/ years	Deepwell and pump
Alat pengangkut	4 tahun/ years	Carrier
Alat pertanian	4 tahun/ years	Farming equipment
Inventaris kantor/rumah	4 tahun/ years	Office/home furniture & fixtures

Jenis aset tetap tanaman tahunan	Masa manfaat ekonomis/ Economic useful lives	Type of annual plants
Teh	50 tahun/ years	Tea
Kelapa sawit dan kelapa hibrida	25 tahun/ years	Palm oil and hybrid coconut
Karet	25 tahun/ years	Rubber

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan rugi laba pada saat periode berjalan, sedangkan perluasan, pemugaran dan peningkatan daya guna dalam jumlah besar dikapitalisasi.

The costs of repairs and maintenance are charged to the income statement during the period, while the expansion, renovation and improvement of efficiency in large amounts are capitalized.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan, serta keuntungan dan kerugian yang dihasilkan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya pada tahun berjalan.

When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values and related accumulated depreciation are removed from the financial statements, and the resulting gains and losses are recognized in the statement of comprehensive income for the year.

Nilai residu dan masa manfaat ekonomis aset tetap ditinjau kembali dan disesuaikan, jika perlu, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan.

The residual value and useful lives of the assets are reviewed and adjusted, if necessary, at each balance sheet date.

Biaya-biaya setelah perolehan awal diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset tetap atau sebagai aset yang terpisah hanya apabila kemungkinan besar manfaat ekonomis sehubungan dengan aset tersebut di masa mendatang akan mengalir ke Perusahaan dan biaya perolehannya dapat diukur secara handal.

Costs after the initial acquisition is recognized as part of the carrying value of fixed assets or as a separate asset only when it is possible that economic benefits with respect to those assets in the future will flow to the Company and its cost can be measured reliably.

31 Desember 2021

31 December 2021

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

r. Aset tetap dan aset tanaman tahunan (lanjutan)

Perusahaan melakukan penelaahan atas kemungkinan adanya indikasi penurunan nilai aset. Apabila terdapat indikasi, Perusahaan mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset, dan jika nilai tercatat dari aset lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, dimana nilai tersebut ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual bersih atau nilai pakai.

Dalam akun ini dibukukan akumulasi beban tanaman perkebunan yang dikeluarkan mulai persiapan tanam sampai dengan tanaman tersebut menghasilkan. Tanaman yang telah menghasilkan dipindahbukukan sebagai tanaman menghasilkan dan disajikan dalam kelompok aset tetap. Umur ekonomis dari tanaman menghasilkan adalah 25 tahun. Beban yang terkait dengan tanaman tersebut yang sifatnya pemeliharaan dibebankan pada laba rugi komprehensif tahun berjalan.

s. Aset dalam penyelesaian

Biaya-biaya yang berhubungan dengan aset dalam penyelesaian yang meliputi biaya perolehan tanah, biaya konstruksi dan biaya pinjaman yang terjadi selama masa pembangunan akan dikapitalisasi. Kapitalisasi biaya pinjaman akan dihentikan apabila dalam suatu periode yang cukup lama aset dalam penyelesaian tersebut ditangguhkan atau dihentikan.

ISAK 25, "Hak atas Tanah", menetapkan bahwa biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha ("HGU"), Hak Guna Bangunan ("HGB") dan Hak Pakai ("HP") ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap" dan tidak diamortisasi.

3. Summary of significant accounting policies (continued)

r. Fixed assets and annual plant assets (continued)

The Company performs a review for possible indications of impairment of assets. If any such indication exists, the Company estimates the value of the recoverable amount of the asset, and if the carrying amount of the asset is greater than the recoverable amount, the carrying amount may be lowered down to a value which can be recovered, where the value is determined as the higher of the net selling price or value in use.

The accumulated expenses of plantation crops incurred starting from the preparation of planting until harvesting are recorded in this account. Plants which already harvesting are reclassified to mature plantation and are presented in the fixed asset account. The economic life of mature plantation is 25 years. Expenses related with these plants for maintenance purpose are charged to comprehensive income for the year.

s. Construction in progress

The costs associated with the construction in progress which include land acquisition costs, construction costs and loan expenses during construction will be capitalized. The capitalization of borrowing costs will be suspended if within long enough period the construction in progress may be suspended or terminated.

IFAS 25, "Land Rights", established that the cost of obtaining legal rights on land in the form of Leasehold ("HGU"), Building Rights ("HGB") and the Rights of Use ("HP") when the land acquired for the first time was recognized as part of the cost of land in the account "Fixed Assets" and was not amortized.

31 Desember 2021

31 December 2021

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

3. Summary of significant accounting policies (continued)

s. Aset dalam penyelesaian (lanjutan)

Sementara biaya pengurusan atau perpanjang atau pembaruan legal hak atas tanah dalam bentuk HGU, HGB dan HP diakui sebagai bagian dari akun "Aset Tidak Berwujud Bersih" pada laporan posisi keuangan konsolidasian dan diamortisasi sepanjang mana yang lebih pendek antara umur hukum hak dan umur ekonomis tanah.

s. Construction in progress (continued)

While the cost of obtaining or renew or update legal land rights in the form of HGU, HGB and HP is recognized as part of "Net Intangible Assets" in the consolidated statements of financial position and amortized whichever is shorter between the age of legal rights and economic life of the land.

t. Aset biologis

Aset biologis terdiri atas produk agrikultur dari tanaman produktif, yang terutama terdiri atas tebu, tandan buah segar dan teh. Aset biologis dinyatakan sebesar nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Keuntungan atau kerugian yang timbul pada pengakuan awal produk agrikultur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis pada setiap tanggal pelaporan dimasukkan dalam laba rugi pada periode di mana keuntungan atau kerugian tersebut terjadi. Nilai wajar dari produk agrikultur, termasuk produk yang masih tumbuh dan sudah dipanen dari tanaman produktif kelapa sawit dan karet ditentukan menggunakan pendekatan pasar (*market approach*) dengan menerapkan estimasi volume produksi dengan estimasi harga pasar yang berlaku pada tanggal pelaporan. Biaya untuk menjual adalah biaya inkremental yang diatribusikan secara langsung untuk pelepasan aset, tidak termasuk beban pembiayaan dan pajak penghasilan.

t. Biological assets

Biological assets consist of agricultural products from productive plants, which mainly consist of sugarcane, fresh fruit bunches and tea. Biological assets are stated at fair value less costs to sell. Gains or losses arising from the initial recognition of agricultural products at fair value less costs to sell and from changes in fair value less costs to sell biological assets at each reporting date are included in profit or loss in the period in which such gains or losses occur. The fair value of agricultural products, including products that are still growing and already harvested from oil palm and rubber productive crops, is determined using a market approach by applying estimates of production volume with estimated market prices at the reporting date. The cost of selling is an incremental cost that is directly attributable to the disposal of assets, excluding financing costs and income taxes.

u. Aset tidak berwujud

Aset tidak berwujud dicatat berdasarkan nilai perolehan dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan masa manfaat masing-masing aset tidak berwujud, dengan penjelasan sebagai berikut :

u. Intangible asset

Intangible assets are recorded based on the acquisition cost and amortized using the straight-line method based on the useful life of the respective intangible assets, with the following explanation:

Jenis aset tidak berwujud	Masa manfaat ekonomis/ Economic useful lives	Type of intangible assets
Lisensi WARF	10 tahun/ years	WARF License
ISO 9001	3 tahun/ years	ISO 9001
ISO 14001	3 tahun/ years	ISO 14001
Hak atas tanah	30 tahun/ years	Land rights
Perangkat lunak IT MFG/PRO	5 tahun/ years	MFG/PRO IT Software
Biaya pengembangan	3 tahun/ years	Development expense

31 Desember 2021

31 December 2021

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

u. Aset tidak berwujud (lanjutan)

Berdasarkan PSAK No. 19 tentang aset tidak berwujud paragraf 39, suatu aset tidak berwujud yang timbul dari pengembangan (atau dari tahap pengembangan pada suatu proyek intern) diakui jika, dan hanya jika, Perusahaan dapat menunjukkan semua hal berikut ini:

1. Kelayakan teknis penyelesaian aset tidak berwujud tersebut sehingga aset tersebut dapat digunakan atau dijual.
2. Niat untuk menyelesaikan aset tidak berwujud tersebut dan menggunakannya atau menjualnya.
3. Kemampuan untuk menggunakan atau menjual aset tidak berwujud tersebut.
4. Cara aset tidak berwujud menghasilkan kemungkinan manfaat ekonomis masa depan, yaitu antara lain Perusahaan harus mampu menunjukkan adanya pasar bagi keluaran aset tidak berwujud itu sendiri, atau jika aset tidak berwujud itu akan digunakan secara intern, Perusahaan harus mampu menunjukkan kegunaan aset tidak berwujud itu sendiri.
5. Tersedianya sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya untuk menyelesaikan pengembangan aset tidak berwujud dan menggunakan atau menjual aset tersebut.
6. Kemampuan untuk mengukur secara andal pengeluaran yang terkait dengan aset tidak berwujud selama pengembangannya.

v. Aset non produktif

Aset non produktif disajikan sebesar nilai tercatat, yaitu biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan penurunan nilai. Akun ini digunakan untuk menampung aset-aset yang secara teknis sudah tidak mempunyai manfaat ekonomis pada masa yang akan datang. Pemindahbukuan nilai aset dikategorikan tidak produktif didasarkan pada Berita Acara Penghapusan Aset setelah diteliti oleh Bidang Teknis kantor Direksi dan dicatat sebesar nilai buku dengan membuka akun penyisihannya (100%).

3. Summary of significant accounting policies (continued)

u. Intangible asset (continued)

Under SFAS No. 19 on intangible assets paragraph 39, an intangible asset arising from development (or from the development stage to an internal project) is recognized if, and only if, the Company can demonstrate all of the followings:

- 1. The technical feasibility of completion of intangible assets so that those assets can be used or sold.*
- 2. The intention to complete the intangible asset and use or sell it.*
- 3. The ability to use or sell the intangible asset.*
- 4. How the intangible asset will generate future economic benefits, among others, the Company should be able to demonstrate the existence of a market for the output of intangible assets itself, or if the intangible assets will be used internally, the Company should be able to demonstrate the usefulness of the intangible assets itself.*
- 5. The availability of technical resources, financial and other resources to complete the development of an intangible asset and use or sell the assets.*
- 6. The ability to measure reliably the expenditure associated with the intangible asset during its development.*

v. Non-productive asset

Non-earning assets are presented at carrying value, that is acquisition cost net of accumulated amortization and impairment losses. This account is used to hold assets that are technically no longer have an economic benefit in the future. Transfer of account of unproductive asset value is based on the Minutes of the Asset Removal after investigation by the office of the Technical Division Director and recorded at book value by opening an allowance account (100%).

31 Desember 2021

31 December 2021

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

v. Aset non produktif (lanjutan)

Penghapusan aset non produktif dilakukan setelah aset tersebut laku dijual dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri BUMN melalui Dewan Komisaris.

w. Penurunan nilai aset

Aset tetap, aset tanaman dan aset tidak lancar lainnya, termasuk aset tak berwujud ditelaah untuk mengetahui apakah telah terjadi penurunan nilai bilamana terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tersebut tidak dapat diperoleh kembali. Kerugian akibat penurunan nilai diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut. Nilai yang dapat diperoleh kembali adalah nilai yang lebih tinggi antara harga jual bersih dan nilai pakai aset. Dalam rangka mengukur penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah.

x. Utang usaha dan liabilitas lain-lain

Utang usaha dan liabilitas lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali jika efek diskontonya tidak material.

Utang yang berumur lebih dari lima tahun dan setelah dikonfirmasi berulang-ulang tidak ada jawaban, dihapuskan dan diakui sebagai pendapatan lain-lain.

y. Jasa produksi

Jasa produksi bagi karyawan staf dan non staf pabrik dibukukan sebagai biaya produksi sedangkan untuk karyawan Kantor Direksi diperlakukan sebagai biaya usaha. Pencadangan jasa produksi untuk karyawan staf pabrik dan karyawan kantor Direksi didasarkan atas surat ketetapan dari Direksi.

3. Summary of significant accounting policies (continued)

v. Non-productive asset (continued)

Elimination of non-productive assets is made after the assets are sold and has received approval from the Minister of SOEs through Board of Commissioners.

w. Impairment of assets

Fixed assets, plant assets and other non-current assets, including intangible assets are reviewed to determine whether there has been a decline in value whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of the asset may not be recoverable. Impairment losses are recognized as the difference between the carrying values of assets with recoverable value of these assets. Values of recoverable is the higher value between the net sale price and the value in use of assets. For the purpose of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which separate identifiable cash flows are generated.

x. Accounts payable and other liabilities

Accounts payable and other liabilities are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, unless the effect of discounting is immaterial.

Debt outstanding for more than five years and after confirmed repeatedly has no response, are written off and recognized as other income.

y. Bonus

Bonus for factory employees both staff and non-staff are recorded as cost of production, while for employees of the Office of Directors is treated as business expenses. Bonus allowance for the employees of the factory staff and employees of the office of Directors is based on decision letter from the Directors.

31 Desember 2021

31 December 2021

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

z. Pajak penghasilan

1. Pajak penghasilan (PPh)

Perusahaan menghitung pajak penghasilan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46, "Akuntansi Pajak Penghasilan".

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, kecuali pajak penghasilan tersebut sehubungan dengan transaksi atau kejadian yang diakui secara langsung di entitas dimana pajak penghasilan diakui secara langsung di ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak kini dihitung sebesar jumlah yang diperkirakan dapat diperoleh atau dibayar dengan menggunakan tarif dan ketentuan pajak yang sesuai dengan kebijakan atau secara normatif ditetapkan pada setiap tanggal pelaporan. Manajemen secara periodik mengevaluasi perlakuan pajak yang diterapkan dalam SPT Tahunan.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan kewajiban. Kewajiban pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa mendatang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

Aset dan pajak tangguhan disajikan dalam laporan posisi keuangan dan dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan kewajiban kini.

3. Summary of significant accounting policies (continued)

z. Income tax

1. Income tax (PPh)

The Company calculates income tax based on Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 46, "Accounting for Income Tax".

Current tax and deferred tax are recognized as income or expense in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, except for income tax in connection with transactions or events that are recognized directly in an entity where the income tax is recognized directly in equity.

Current tax assets and liabilities are calculated at the amount that is expected to be obtained or paid using tax rates and provisions that are in accordance with policy or normatively determined at each reporting date. Management periodically evaluates the tax treatment applied in the Annual Tax Return.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting and the tax bases of assets and liabilities. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences, to the extent that it is probable that they can be utilized to reduce future taxable profit.

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the statement of financial position date. Deferred tax is charged or credited in the income statement, unless the deferred tax is charged or credited directly to equity.

Deferred tax and assets are presented in the statement of financial position and the basis of compensation is in accordance with the presentation of current assets and liabilities.

31 Desember 2021

31 December 2021

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

z. Pajak penghasilan (lanjutan)

1. Pajak penghasilan (PPH) (lanjutan)

Pajak tangguhan dihitung dengan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Perubahan nilai tercatat aset dan kewajiban pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

2. Pemeriksaan pajak

Pemeriksaan terhadap liabilitas perpajakan dicatat pada saat diterimanya Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau apabila dilakukan keberatan dan banding, ketika keputusan banding sudah diputuskan. Jumlah atas tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan SKP diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laba rugi periode berjalan, kecuali jika diajukan upaya penyelesaian selanjutnya. Jumlah tambahan pokok pajak dan denda yang ditetapkan dengan SKP ditangguhkan pembebanannya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset. Perubahan dikarenakan kesalahan akan disajikan berdasarkan PSAK 25: Kebijakan Akuntansi Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan.

3. Ketidakpastian dalam perlakuan pajak penghasilan

Sesuai dengan ISAK 34: ketidakpastian dalam perlakuan pajak penghasilan yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2019. Pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas pajak yang mengandung ketidakpastian perlakuan pajak penghasilan diperlakukan dengan mempertimbangkan apakah diperlakukan secara terpisah atau bersamaan, penggunaan asumsi tentang pemeriksaan atau perlakuan pajak tidak pasti oleh otoritas perpajakan pertimbangan apakah besar kemungkinan otoritas pajak akan menerima perlakuan pajak tidak pasti dan penilaian kembali pertimbangan atau estimasi yang disyaratkan jika terjadi perubahan fakta dan keadaan.

3. Summary of significant accounting policies (continued)

z. Income tax (continued)

1. Income Tax (PPH) (continued)

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the statement of financial position date. Changes in the carrying value of deferred tax assets and liabilities due to changes in tax rates are charged during the current year, except for transactions that have previously been charged or credited directly to equity.

2. Tax audits

Examination of taxation liabilities is recorded at the time of receipt of a Tax Assessment (SKP) or if objections and appeals are made, when the appeal decision has been decided. The amount of additional principal and tax penalties determined by SKP is determined to be recognized as income or expense in the current period's profit or loss, unless further settlement is filed. The amount of additional tax principal and penalties determined by the SKP is deferred as long as it meets the criteria for asset recognition. Changes due to errors will be presented in accordance with SFAS 25: Accounting Policies Changes in Accounting Estimates and Errors.

3. Uncertainty in the treatment of income tax

In accordance with IFAS 34: uncertainties in income tax treatment that will be effective on 1 January 2019. The recognition and measurement of tax assets and liabilities are income tax treatment of uncertainty is treated by considering whether treated separately or together, the use of assumptions regarding the audit or uncertain tax treatment judging by the tax authorities whether it is probable that the tax authorities will receive uncertain tax treatment and the reassessment of judgments or estimates required if the facts and circumstances change.

31 Desember 2021

31 December 2021

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

aa. Dana pensiun

Perusahaan menyelenggarakan dana pensiun manfaat pasti untuk seluruh karyawan tetapnya berdasarkan gaji pokok terakhir dan masa kerja karyawan. Pengelolaan dana pensiun di lingkungan Perusahaan ditangani oleh Dana Pensiun Rajawali Nusindo (Dapen Nusindo). Perusahaan telah menerapkan penilaian terakhir sesuai dengan PSAK No. 24.

Perusahaan mempunyai program imbalan kerja karyawan berupa program Tunjangan Pesangon, Tunjangan Tanda Jasa dan Tunjangan Pensiun.

Berdasarkan peraturan dana pensiun pasal 24 mengenai usia pensiun peserta ditetapkan bahwa usia pensiun normal adalah 56 tahun, usia pensiun dipercepat ditetapkan 10 tahun sebelum mencapai usia pensiun normal, usia pensiun wajib ditetapkan 60 tahun, usia peserta untuk penetapan manfaat pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebut pada pengangkatan pertama sebagai pegawai menurut bukti-bukti yang sah.

Dana pensiun Perusahaan merupakan jenis dana pensiun pemberi kerja. Maksud dan tujuan dibentuknya Dapen RNI adalah untuk mengelola dan mengembangkan dana guna menjamin dan memelihara kesinambungan penghasilan bagi peserta dan keluarganya dengan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti.

Pengelolaan dana pensiun di lingkungan Perusahaan dan Entitas Anak ditangani oleh dua pengelolaan dana pensiun yaitu :

**3. Summary of significant accounting policies
(continued)**

aa. Pension fund

The Company maintains a defined benefit pension fund for all of its permanent employees based on the latest basic salary and years of service of the employees. The management of pension funds within the Company is handled by the Rajawali Nusindo Pension Fund (Dapen Nusindo). The Company has applied the latest assessment in accordance with PSAK No. 24.

The Company has employee benefits programs in the form of Severance Allowance, Service Signs Allowance and Pension Allowance.

Based on the pension regulation of article 24 regarding the retirement age of participants it is determined that the normal retirement age is 56 years, the retirement age is accelerated 10 years before reaching normal retirement age, the obligatory retirement age shall be determined at 60 years, the age of the participants for the determination of pension benefits are determined on the basis of date of birth mentioned for the first time as an employee according to valid evidence.

The Company's pension fund is a type of employer pension fund. The intent and purpose of the establishment pension fund RNI is to manage and develop the funds to ensure and maintain the continuity of income for participants and their families with defined benefit pension plans.

Pension fund management for the Company and Subsidiaries is handled by two pension fund managements, which are:

31 Desember 2021

31 December 2021

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

aa. Dana pensiun (lanjutan)

Pengelolaan dana pensiun di lingkungan Perusahaan dan Entitas Anak ditangani oleh dua pengelolaan dana pensiun yaitu :

1. Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia (Dapen RNI) yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. Kep-014/KM.17/2000 tanggal 12 Januari 2000. Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia (Dapen RNI) sejak tahun 1948 dikelola oleh Yayasan Dana Pensiun Mitraraga. Mitra pendiri Dapen RNI berasal dari Induk Perusahaan (PT RNI) dan cabangnya, eks karyawan staf PT PG Rajawali I dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).
2. Dana Pensiun Rajawali Nusindo (Dapen RN) telah disahkan oleh Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. Kep-067/KM.6/2003 tanggal 28 Februari 2003. Mitra pendiri Dapen RN berasal dari Induk Perusahaan (PT RNI) dan cabangnya, eks karyawan staf PG Rajawali II dan PG Madu Baru yang kepesertaannya sebelumnya dari dana pensiun perkebunan.

Sejak tahun 1954 Perusahaan menyelenggarakan program pensiun dengan jenis Program Manfaat Pasti, yang pengelolaannya dilakukan oleh Yayasan Dana Pensiun Mitraraga, dan kemudian disesuaikan melalui surat permohonan No. DP/94NI/94 tanggal 17 Juni 1994 yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-207/KM.17/1994 tanggal 18 Juni 1994 menjadi Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia (Dapen RNI).

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan No. 011/SK.DIRU/IV/2002 tentang Peraturan Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia, yang disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Surat No. Kep-173/KM.6/2002 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia, memutuskan :

3. Summary of significant accounting policies (continued)

aa. Pension fund (continued)

Pension fund management for the Company and Subsidiaries is handled by two pension fund managements, which are:

1. *Since 1948, Pension Fund Rajawali Nusantara Indonesia (Dapen RNI) which has been approved by the Minister of Finance under his Decree No. Kep-014/KM.17/2000 dated 12 January 2000. Pension Fund Rajawali Nusantara Indonesia (RNI Pension Fund) is managed by the Pension Fund Foundation Mitraraga. RNI Pension Fund founding partners came from Parent Company (PT RNI) and its branches, the former employees of PT PG Rajawali I and PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).*
2. *Pension Fund Rajawali Nusindo (Dapen RN) has been approved by the Minister of Finance under his Decree No. Kep-067/KM.6/2003 dated 28 February 2003. Co-founders come from Parent Company (RNI) and its branches, the former employees of PG Rajawali II and PG Madu Baru whose membership are previously from the plantations pension fund.*

Since 1954 the Company established pension plan with Defined Benefit Program, which is managed by the Pension Fund Foundation Mitraraga, and then adjusted through the application letter No. DP/94NI/94 dated 17 June 1994 which was approved by the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. Kep-207/KM.17/1994 dated 18 June 1994 to change its name to Rajawali Nusantara Indonesia Pension Fund (RNI Pension Fund).

Based on the Decree of Director of the Company No. 011/SK.DIRU/IV/2002 on Pension Fund regulation of Rajawali Nusantara Indonesia, which was approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia through Letter No. Kep-173/KM.6/2002 on Ratification of the Pension Fund Regulation of Rajawali Nusantara Indonesia, It was decided:

31 Desember 2021

31 December 2021

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

aa. Dana pensiun (lanjutan)

Berdasarkan kontribusi dan pendanaan untuk setiap karyawan yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan dana pensiun pasal 27, besarnya iuran peserta yang wajib dibayar adalah 5% dari penghasilan dasar pensiun per bulan, yang dipungut langsung oleh pemberi kerja, sedangkan beban Perusahaan adalah sebesar selisih antara jumlah iuran yang diperlukan berdasarkan perhitungan aktuaris.

Rumus dan besarnya manfaat pensiun sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun pasal 29 dan 30 adalah sebagai berikut :

1. Besarnya manfaat pensiun normal dihitung dengan menggunakan rumus :
 $MP = MK \times F \times PHDP$, dimana
MP = Manfaat Pensiun,
MK = Masa Kerja,
F = Faktor penghargaan masa kerja per tahun,
PHDP = Penghasilan Dasar Pensiun, dengan ketentuan masa kerja dihitung sampai dengan sisa pensiun normal.
2. Besarnya manfaat pensiun dipercepat adalah pensiun yang dihitung dengan rumus seperti tersebut di atas dengan ketentuan masa kerja dihitung sampai dengan peserta berhenti bekerja.
3. Besarnya manfaat pensiun cacat adalah manfaat pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus seperti tersebut di atas, dengan ketentuan masa kerja.
4. Besarnya manfaat pensiun ditunda adalah nilai sekarang dari manfaat pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus tersebut di atas, dengan ketentuan masa kerja dihitung sampai dengan peserta berhenti bekerja.

3. Summary of significant accounting policies (continued)

aa. Pension fund (continued)

Based on the contributions and funding for each employee who has met the requirements in accordance with pension regulations article 27, the amount of participants' contributions that must be paid is 5% of pensionable earnings per month, which is levied directly by the employer, whereas the expenses of the Company is equal to the difference between the amount of contributions required by the actuarial calculation.

Formula and the amount of retirement benefits in accordance with the Regulations of the Pension Fund article 29 and 30 are as follows:

1. The amount of normal pension benefits is calculated using the formula:
 $MP = MK \times F \times PHDP$, where
MP = Pension benefit,
MK = Working period,
F = Appreciation working year per annum,
PHDP = Pensionable earnings with working year calculated up to remaining normal pension period.
2. The amount of accelerated retirement benefit is a pension calculated according to the above formula with the provisions of the working period is calculated up to the date of the resignation.
3. The amount of disability pension benefit is a retirement benefit calculated using the formula as mentioned above, with the provision of service year.
4. The amount of deferred retirement benefits is the present value of pension benefits calculated using the formula above, with working period calculated up to the date of the resignation.

31 Desember 2021

31 December 2021

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

aa. Dana pensiun (lanjutan)

Faktor penghargaan per tahun masa kerja ditetapkan 2,5% (dua setengah persen) dihitung mulai tanggal 1 Juli 2002. Manfaat pensiun peserta ditetapkan maksimum 80% (delapan puluh persen) dari penghasilan dasar pensiun per bulan.

PT Rajawali Nusantara Indonesia melalui surat No. 148/RNI.01/III/13 tanggal 31 Maret 2013 dan surat terakhir No. 109/RNI.05/IX/2014 tanggal 11 November 2014 telah mengajukan permohonan pembubaran Dana Pensiun Rajawali Nusindo. Otoritas Jasa Keuangan telah menyetujui Dana Pensiun Rajawali Nusindo melalui surat No. KEP-143/D.05/IX/2014 tanggal 3 Desember 2014. Selanjutnya Dapen RNI dan Dapen Nusindo digabung dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian BUMN sesuai surat No. S-691/MBU/2013 tanggal 14 November 2013 dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai surat No. S-5602/NB.111/2014 tanggal 4 Desember 2014 mengenai perubahan dana pensiun RNI dan pembubaran Dapen Rajawali Nusindo.

Selain program dana pensiun manfaat pasti terdapat juga program pensiun iuran pasti yang dilaksanakan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Peserta PPIP diberikan kepada karyawan yang diangkat menjadi karyawan tetap dihitung sejak 1 Januari 2013.

ab. Liabilitas imbalan kerja

Grup telah mencadangkan estimasi kewajiban penghargaan masa kerja dan ganti kerugian karyawan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan No. 13 tanggal 25 Maret 2003 mengenai Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, uang penggantian hak dan tanda jasa (*jubileum*). Kewajiban atas masa kerja lalu diestimasi dengan menggunakan metode *projected unit credit* berdasarkan asumsi aktuarial jangka panjang.

3. Summary of significant accounting policies (continued)

aa. Pension fund (continued)

Appreciation factors per working period are specified at 2.5% (two and a half percent) commencing on 1 July 2002. The pension benefits of participants assigned at maximum of 80% (eighty percent) of basic pension income per month.

PT Rajawali Nusantara Indonesia through letter No. 148/RNI.01/III/13 dated 31 March 2013 and the latest letter No. 109/RNI.05/IX/2014 dated 11 November 2014 have applied for the dissolution of the Pension Fund Rajawali Nusindo. Financial Services Authority has approved the Pension Fund Rajawali Nusindo through letter No. KEP-143/ D.05/IX/2014 dated 3 December 2014. Subsequently Pension Fund RNI and Pension Fund Nusindo are merged and has received approval from the Ministry of SOEs based on letter No. S-691/MBU/2013 dated 14 November 2013 and the Financial Services Authority (FSA) through letter No. S-5602/NB.111/2014 dated 4 December 2014 regarding changes in RNI pension fund and dissolution of Rajawali Nusindo Pension Fund.

In addition to the defined benefit pension program there is also a defined contribution pension program implemented by the Financial Institution Pension Fund (DPLK). PPIP participants are given to employees who are appointed as permanent employees effective 1 January 2013.

ab. Employee benefit obligations

*The Group has reserved the estimated appreciation and compensation liabilities in accordance with the Law of the Republic of Indonesia on Labour No. 13 dated 25 March 2003 regarding the Settlement of Work Dismissal and Determination of Severance, Compensation Pay and appreciation of past service years (*jubileum*). Liability for employee benefit is estimated using the projected unit credit method based on the long-term actuarial assumptions.*

31 Desember 2021

31 December 2021

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

ab. Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)

Kewajiban atas masa kerja lalu diestimasi dengan menggunakan metode *projected unit credit cost* berdasarkan asumsi aktuarial jangka panjang. Aplikasi PSAK No. 24 (Revisi 2018) mengatur akuntansi dan pengungkapan imbalan kerja karyawan yang mengharuskan Perusahaan untuk mengakui kewajiban jika pekerja telah memberikan jasanya kepada Perusahaan dan berhak memperoleh imbalan kerja yang akan dibayarkan di masa depan, seterusnya merupakan beban Perusahaan jika menikmati manfaat ekonomi yang akan dihasilkan dan diberikan oleh karyawan yang berhak memperoleh imbalan kerja. Program manfaat karyawan tersebut dikelompokkan dalam akun liabilitas imbalan kerja.

Kewajiban program imbalan paska kerja dan imbalan jangka panjang lainnya yang diakui dalam laporan posisi keuangan adalah nilai kini kewajiban imbalan tersebut pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program, serta disesuaikan dengan keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Besarnya kewajiban imbalan pasti ditentukan berdasarkan perhitungan aktuarial independen yang dilakukan secara tahunan menggunakan metode *projected unit credit*.

Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskonto estimasi arus kas keluar masa depan menggunakan tingkat suku bunga obligasi korporat berkualitas tinggi dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo imbalan yang bersangkutan. Di negara-negara yang tidak terdapat pasar aktif untuk obligasi korporasi tersebut, digunakan tingkat suku bunga Obligasi Pemerintah.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba rugi, kecuali perubahan program pensiun bergantung kepada sisa masa kerja karyawan untuk jangka waktu tertentu (periode hak atau *vested*). Dalam kasus ini, biaya jasa lalu diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama periode hak.

3. Summary of significant accounting policies (continued)

ab. Employee benefit obligations (continued)

Employee benefit liabilities are estimated using the projected unit credit method based on the long-term actuarial assumptions. Application of SFAS No. 24 (revised 2018) prescribes the accounting and disclosure of employee benefits which requires the Company to recognize a liability when an employee has rendered service to the Company and the right to obtain employment benefits to be paid in the future, so it continues to become the liability for the Company if the economic benefits to be generated and given by employees entitled to employee benefits flows to the Company. Employee benefits program is grouped into employee benefits liabilities account.

Post-employment benefit plan obligations and other long-term benefits recognized in the statement of financial position is the present value of benefit obligations at the end of the reporting period less the fair value of plan assets, adjustments for actuarial gains or losses and past service costs not yet recognized. The defined benefit obligation is determined based on the calculations of independent actuary on an annual basis using the projected unit credit method.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rate of high quality corporate bonds in the same currency with the currency of remuneration to be paid and similar maturity time. In countries where there is no active market for such corporate bonds, the interest rate used is the Government Bonds.

Past service cost is recognized immediately in profit or loss, unless the changes in the pension plan depend on the remaining working period of the employees for definite period (vested). In this case, past service costs are amortized using the straight-line method over the period of the rights.

31 Desember 2021

31 December 2021

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

3. Summary of significant accounting policies (continued)

ab. Liabilitas imbalan kerja

ab. Employee benefit obligations

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui pendapatan komprehensif lainnya dan dilaporkan di saldo laba.

Gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognized immediately through other comprehensive income and reported in retained earnings.

Amendemen PSAK 24 (2018) memberikan panduan yang lebih jelas bagi entitas dalam mengakui biaya jasa lalu, keuntungan dan kerugian penyelesaian, biaya jasa kini dan bunga neto setelah adanya amendemen, kurtailmen, atau penyelesaian program karena menggunakan asumsi aktuarial terbaru (sebelumnya menggunakan asumsi aktuarial pada awal periode pelaporan tahunan). Selain itu, Amendemen PSAK 24 juga mengklarifikasi bagaimana persyaratan akuntansi untuk amendemen, kurtailmen, atau penyelesaian program dapat mempengaruhi persyaratan batas atas aset yang terlihat dari pengurangan surplus yang menyebabkan dampak batas atas aset berubah.

The amendments to PSAK 24 (2018) provide clearer guidance for entities in recognizing past service costs, settlement gains and losses, current service costs and net interest after amendments, curtailments, or program completion because they use the latest actuarial assumptions (previously used actuarial assumptions at the beginning, annual reporting period). In addition, the Amendments to PSAK 24 also clarify how the accounting requirements for amendments, curtailments, or plan settlements can affect the asset ceiling requirements as seen from a reduction in the surplus that causes the effect of the asset ceiling to change.

Penyesuaian Tahunan 2018 diadopsi dari *Annual Improvements to IFRSs 2015–2017 Cycle* yang berlaku 1 Januari 2019 dengan opsi penerapan dini diperkenankan.

Penyesuaian Tahunan 2018 adopted on the Annual Improvements to IFRSs 2015-2017 Cycle in force 1 January 2019 with earlier application permitted option

ac. Transaksi mata uang asing

ac. Transactions in foreign currencies

Berdasarkan PSAK No.10 mengenai “Transaksi dalam Mata Uang Asing” semua transaksi dalam mata uang asing dicatat ke dalam Rupiah berdasarkan kurs pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing disesuaikan dengan kurs tengah BI. Selisih kurs yang timbul dari penyelesaian atau pelaporan aset dan kewajiban moneter diakui sebagai keuntungan atau kerugian selisih kurs tahun berjalan.

Under SFAS No. 10 on "Transactions in Foreign Currencies" all transactions in foreign currencies are recorded in rates of exchange prevailing at the transaction date. At statement of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated using BI middle rate. Exchange differences arising on the settlement or reporting of monetary assets and liabilities are recognized as foreign exchange gains or losses for the year.

Kurs yang digunakan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

The exchange rate used as of 31 December 2021 and 2020 is as follows:

	2021	2020
1 GBP	19.200	19.085
1 EURO	16.127	17.330
1 USD	14.269	14.105

31 Desember 2021

31 December 2021

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

ad. Pengakuan pendapatan dan biaya

Pada dasarnya pengakuan pendapatan dan beban menganut sistem akrual. Biaya diakui pada saat terjadinya kewajiban atau pembebanan biaya yang menyangkut beban pokok produksi/pendapatan.

Pengakuan pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut :

- Pendapatan sewa ruangan dan kantor diakui berdasarkan metode garis lurus sesuai dengan jangka waktu sewa.
- Pendapatan dividen tunai yang berasal dari laba Entitas Anak yang kepemilikan sahamnya dibawah 50% diakui sebagai pendapatan Perusahaan sesuai keputusan RUPS Entitas Anak yang bersangkutan.

Pendapatan dari penjualan barang jadi diakui pada saat risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan telah berpindah pelanggan.

Gula

Hasil produksi gula yang dijual dengan sistem tender diakui sebagai pendapatan pada saat penyerahan barang atau adanya pemindahan hak kepada pembeli.

Tetes

Hasil produksi tetes yang dijual dengan sistem tender diakui sebagai pendapatan pada saat penyerahan barang atau adanya pemindahan hak kepada pembeli.

Alkohol, Spiritus, Etanol, dan Arak

Pendapatan dari penjualan alkohol, spiritus, etanol dan arak diakui pada saat penyerahan barang atau adanya perpindahan hak kepada pembeli.

**3. Summary of significant accounting policies
(continued)**

ad. Revenue and expense recognition

Basically, the recognition of revenue and expense is using accrual system. Costs are recognized when liabilities incurred or there are, charges relating to the of production/ revenue.

Recognition of revenue can be described as follows:

- *Lease income of office space is recognized based on a straight-line basis over the term of the lease.*
- *Revenue from the cash dividend of Subsidiaries' profit whose share owned by the Company is below 50% are recognized as revenue in accordance with GMS of Subsidiary concerned.*

Revenue from sales of finished goods is recognized when the risks and rewards of ownership of goods has significantly transferred to the customer.

Sugar

The production of sugar sold by bidding system are recognized as revenue upon delivery of the goods to the buyer.

Molasses

The production of molasses sold by bidding system are recognized as revenue upon delivery of the goods are delivered to the buyer.

Alcohol, spirituous, ethanol, and arrack

Revenues from the sales of alcohol, spirituous, ethanol and arrack are recognized when the goods or there are transfer of rights to the buyer.

31 Desember 2021

31 December 2021

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

ad. Pengakuan pendapatan dan biaya (lanjutan)

Minyak Sawit, Inti Sawit, dan Karet

Pendapatan dari penjualan CPO, Kernel, dan Karet diakui pada saat penyerahan berdasarkan Surat Perintah Penyerahan Barang (*Delivery Order*) atau saat risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan telah berpindah kepada pelanggan.

1) Beban produksi

Beban diakui pada saat terjadinya atau sesuai dengan masa manfaatnya.

Beban produksi untuk masa tahun berjalan yang terdiri dari biaya umum, biaya tanaman tebu, biaya tebang dan angkut, biaya pabrik, dan biaya pengolahan yang berhubungan dengan proses giling dibebankan pada tahun berjalan sebagai unsur harga pokok produksi.

Alokasi beban bersama untuk gula dan tetes.

Beban bersama (*joint cost*) meliputi beban untuk :

- Pimpinan dan tata usaha
- Pembibitan
- Tebu giling
- Tebang dan angkut tebu
- Pabrik
- Pengemasan dan angkut gula
- Eksploitasi alat pengangkutan
- Eksploitasi alat pertanian
- Penyusutan/ amortisasi

3. Summary of significant accounting policies (continued)

ad. Revenue and expense recognition (continued)

CPO, Palm Kernel, and Rubber

Revenues from sales of CPO, Kernel and Rubber are recognized upon delivery based on *Delivery Order* or when the risks and rewards of ownership of the goods has been significantly transferred to the customer.

1) Production cost

Expenses are recognized when incurred or according to their useful lives.

Production expenses for the current year which consist of general costs, the cost of the sugarcane planting, cutting and transport costs, factory costs, and processing costs associated with the pressing process is charged to the current year as a component of cost of production.

The allocation of the expenditures of joint cost for sugar and molasses.

Cost sharing (*joint cost*) includes cost for:

- Management and administration
- Seedling
- Sugarcane pressing
- Cutting and transport of sugarcane
- Factory
- Packaging and delivery of sugar
- Exploitation means of transport
- Exploitation of agricultural equipment
- Depreciation/ amortization

31 Desember 2021

31 December 2021

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

ad. Pengakuan pendapatan dan biaya (lanjutan)

1) Beban produksi (lanjutan)

Beban bersama (*joint cost*) yang terdiri dari beban pengelolaan, beban tanaman, beban tebang dan angkut tebu, beban pembuatan gula, beban pembungkusan, beban pemeliharaan, dan beban penyusutan akan dialokasikan sebagai beban terhadap hasil penjualan gula dan tetes dengan menggunakan metode alokasi beban bersama atas dasar nilai pasar hipotesis dengan ketentuan sebagai berikut :

- Harga gula per unit diperoleh dengan membagi jumlah hasil penjualan selama tahun buku yang bersangkutan dengan jumlah kuantum penjualannya.
- Harga jual tetes per unit diperoleh dengan membagi jumlah hasil penjualan tetes selama tahun buku yang bersangkutan dengan jumlah kuantum yang terjual.
- Jumlah hasil produksi gula yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan adalah gula bagian pabrik gula baik eks Tebu Sendiri (TS), eks gula sisa tahun lalu maupun eks tebu rakyat bagian pabrik gula.
- Jumlah hasil produksi tetes yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan adalah seluruh produksi yang dihasilkan dalam tahun yang bersangkutan yang meliputi tetes dari tebu sendiri, eks tebu rakyat dan eks gula sisaan tahun lalu.

2) Beban usaha dan beban lain-lain

Beban usaha dan beban lain-lain Perusahaan terdiri dari biaya pegawai, biaya umum dan administrasi, biaya penjualan, beban keuangan serta pendapatan dan biaya lain-lain. Pembebanan biaya didasarkan atas tahun takwim dan eks gula sisa tahun lalu.

3. Summary of significant accounting policies (continued)

ad. Revenue and expense recognition (continued)

1) Production cost (continued)

Cost sharing (joint cost) consisting of management cost, planting cost, the cost of cutting and transporting of sugarcane, the cost of sugar production, the cost of packing, maintenance expenses, and depreciation expenses will be allocated as expenses on the sale of sugar and molasses by using the method of allocation expenses on the basis of the market value of the hypothesis with the following conditions:

- *Sugar price per unit is obtained by dividing the amount of sales revenue during the fiscal year concerned with the quantum number of sales.*
- *The selling price per unit of molasses obtained by dividing the amount of sales revenue of molasses during the financial year concerned by the number of quantum sold.*
- *Total production of sugar that is used as the basis for calculation is the sugar from either ex sugarcane factory (TS), the former residual sugars from last year or farmers' sugarcane as part of factory.*
- *Total production of molasses used as the basis for calculation is the whole production produced during the year which include molasses from sugarcane owned by the Company, residual sugarcane from farmers and residual sugar from last year.*

2) Operating and other expenses

Operating expenses and other expenses of the Company consist of personnel costs, general and administrative expenses, sales costs, financial expenses and income and other costs. Expenses charged is based on the calendar year and former residual sugar last year.

31 Desember 2021

31 December 2021

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

ae. Modal saham

Penyajian modal dalam laporan posisi keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan pada akta pendirian Perusahaan dan peraturan yang berlaku serta menggambarkan hubungan keuangan yang ada, modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor, nilai nominal dan banyaknya saham untuk setiap jenis saham.

af. Laba perusahaan

Laba Perusahaan dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

ag. Dividen

Pembagian kewajiban dividen final diakui ketika dividen tersebut disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pembagian dividen interim diakui sebagai kewajiban ketika dividen disetujui berdasarkan keputusan rapat Dewan Direksi dan Komisaris.

ah. Aset dan liabilitas keuangan

Efektif tanggal 1 Januari 2015, Perusahaan menerapkan PSAK No. 50 (revisi 2014), Instrumen Keuangan: "Penyajian", PSAK No. 55 (revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan PSAK No. 60 (revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Pengungkapan". PSAK No. 50 direvisi sehingga hanya mengatur penyajian instrumen keuangan, sedangkan prinsip pengungkapan instrumen keuangan dipindahkan ke PSAK No. 60.

Revisi PSAK No. 50 tersebut tidak memberikan pengaruh bagi laporan keuangan pada saat penerapan awal, sedangkan penerapan PSAK No. 50 dan PSAK No. 60 yang direvisi tersebut memberikan pengaruh bagi pengungkapan dalam laporan keuangan.

**3. Summary of significant accounting policies
(continued)**

ae. Share capital

Presentation of capital in the statement of financial position is done in accordance with the provisions of the deed of incorporation of the Company and applicable laws and describes financial relation that exist, the authorized, issued and paid-up capital, nominal value and number of shares for each type of stock.

af. Corporate profit

The Company's profits are calculated by dividing net income by the weighted average number of outstanding shares during the year.

ag. Dividend

Final dividend obligation is recognized when the dividends are approved in the General Meeting of Shareholders (RUPS). Interim dividend distributions are recognized as a liability when the dividends are approved based on meeting result Board of the Directors and Commissioners.

ah. Asset and financial liabilities

Effective on 1 January 2015, the Company adopted SFAS No. 50 (revised 2014), Financial Instruments: "Presentation", SFAS No. 55 (revised 2014), "Financial Instruments: Recognition and Measurement" and SFAS No. 60 (revised 2014), "Financial Instruments: Disclosures". SFAS No. 50 is revised so that it only regulates the presentation of financial instruments, while the principle of disclosure of financial instruments were transferred to SFAS No. 60.

Revised SFAS No. 50 did not have any impact to the financial statements upon initial adoption, while the adoption of SFAS No. 50 and SFAS No. 60 which were revised give effect to the disclosure in the financial statements.

31 Desember 2021

31 December 2021

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

ah. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Aset keuangan

Pengakuan awal

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori: (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset tersebut pada awal pengakuannya.

(i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah aset keuangan yang diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti adanya kecenderungan ambil untung dalam jangka pendek. Piutang derivatif dikategorikan sebagai aset keuangan yang diperdagangkan kecuali ditetapkan sebagai lindung nilai.

Tidak ada aset keuangan Perusahaan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diperdagangkan kecuali piutang derivatif.

Keuntungan dan kerugian yang timbul atas perubahan nilai wajar derivatif, diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai bagian dari biaya keuangan atau penghasilan keuangan.

(ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

3. *Summary of significant accounting policies (continued)*

ah. Asset and financial liabilities (continued)

Financial asset

Initial recognition

The Company classifies its financial assets in the following categories: (i) financial assets measured at fair value through profit or loss, (ii) loans and receivables. The classification depends on the purpose of the financial assets acquisition. Management determines the classification of such assets at initial recognition.

(i) *Financial assets at fair value through profit or loss*

Financial assets measured at fair value through profit or loss are financial assets held for trading. Financial assets are classified as financial assets held for trading if its acquisition is intended to be sold or repurchased in the near future and there is evidence of short-term profit taking. Derivative receivables are categorized as an asset held for trading unless they are designated as hedging instrument.

There are no financial assets of the Company that are classified as financial assets held for trading except for derivative receivables.

Gains and losses arising on changes in fair value of derivatives are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income as part of the financial costs or financial income.

(ii) *Loans and receivables*

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and have not quoted in an active market. At the time of initial recognition, loans and receivables are measured at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

31 Desember 2021

31 December 2021

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

ah. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Pengakuan awal (lanjutan)

(iii) **Pinjaman yang diberikan dan piutang**
(lanjutan)

Pinjaman yang diberikan dan piutang Perusahaan meliputi kas dan setara kas, piutang usaha, investasi bersih dalam sewa pembiayaan, piutang lain-lain dan aset lain-lain.

Penurunan nilai aset keuangan - pinjaman yang diberikan dan piutang

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Bukti obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai meliputi:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami pihak peminjam atau penerbit instrumen keuangan;
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadi wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- Pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;

3. *Summary of significant accounting policies*
(continued)

ah. *Asset and financial liabilities* (continued)

Financial asset (continued)

Initial recognition (continued)

(iii) **Loans and receivables** (continued)

Loans and receivables of the Company include cash and cash equivalents, accounts receivable, net investment in finance leases, other receivables and other assets.

Impairment of financial assets - loans and receivables

At each reporting date, the Company assesses whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. Financial asset or group of financial assets is impaired and impairment losses are incurred if, and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (adverse events), and the adverse events impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be estimated reliably.

The objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired includes:

- *Significant financial difficulty of the borrower or issuer of financial instruments;*
- *Breach of contract, such as the event of default or delinquency in principal payments or interest;*
- *The lender, for economic or legal reasons in connection with the financial difficulties experienced by the borrower, provides debt relief (concessions) to the borrower who might not be given if the borrower does not experience such difficulties;*

31 Desember 2021

31 December 2021

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

ah. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan - pinjaman yang diberikan dan piutang (lanjutan)

Bukti obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai meliputi: (lanjutan)

- Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
- Data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:
 - i. Memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut, dan
 - ii. Kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi dan jumlah kerugian diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Jika pinjaman yang diberikan dan piutang memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak. Sebagai panduan praktis, Perusahaan dapat mengukur penurunan terhadap nilai wajar instrumen dengan menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi.

3. Summary of significant accounting policies (continued)

ah. Asset and financial liabilities (continued)

Financial asset (continued)

Impairment of financial assets - loans and receivables (continued)

The objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired includes: (continued)

- There is a possibility that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization;
- The loss of an active market for that financial asset because of financial difficulties; or
- Observable data indicating a measurable decrease in the estimated future cash flows of a group of financial assets since the initial recognition of the asset in question, although the decrease cannot be identified on individually in financial assets in the asset group, including:
 - i. The deterioration of the payment status of borrower in the group, and
 - ii. National or local economic conditions that correlate with defaults on the assets in the group.

The amount of the loss is measured as the difference between the carrying value of the asset and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred) discounted at the original effective interest rate of the asset. The carrying value of the asset is reduced and the amount of the loss is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

If loan and receivable have a variable interest rate, the discount rate for measuring any impairment loss is the current effective interest rate determined under the contract. As a practical guidance, the Company may measure impairment of the fair value of the instrument using observable market prices.

31 Desember 2021

31 December 2021

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

ah. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan - pinjaman yang diberikan dan piutang (lanjutan)

Jika pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara objektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur), maka pembalikan atas kerugian penurunan nilai yang sebelumnya telah diakui dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya.

Liabilitas keuangan

Perseroan mengklasifikasikan liabilitas keuangannya dalam kategori:

- (i) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; dan
 - (ii) Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.
- (i) **Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi**

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi komprehensif adalah liabilitas keuangan yang diperdagangkan. Utang derivatif dikategorikan sebagai liabilitas keuangan yang diperdagangkan kecuali ditetapkan sebagai lindung nilai. Tidak ada liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diperdagangkan kecuali hutang derivatif. Keuntungan dan kerugian yang timbul atas perubahan nilai wajar derivatif, diakui dalam laporan laba rugi komprehensif sebagai bagian dari penghasilan atau biaya keuangan.

3. *Summary of significant accounting policies (continued)*

ah. Asset and financial liabilities (continued)

Financial asset (continued)

Impairment of financial assets - loans and receivables (continued)

If in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the reduction can be attributed objectively on events occurring after the impairment was recognized (such as increase in debtor's credit rating), the reversal of impairment losses previously recognized is recorded in the statement of profit and loss and other comprehensive income.

Financial liabilities

The Company classifies its financial liabilities in the following category:

- (i) Financial liabilities at fair value through profit or loss; and*
 - (ii) Financial liabilities measured at amortized cost.*
- (i) ***Financial liabilities at fair value through profit or loss***

Financial liabilities at fair value through profit or loss are financial liabilities held for trading. Derivative payables are classified as financial liabilities held for trading unless designated as hedging instrument. No financial liabilities are classified as financial liabilities held for trading except for derivative payables. Gains and losses arising from changes in fair value of derivatives are recognized in the statement of comprehensive income as part of income or financial costs.

31 Desember 2021

31 December 2021

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

ah. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

(ii) **Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi**

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diklasifikasikan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi antara lain hutang usaha dan hutang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, pinjaman dan obligasi.

Instrumen keuangan saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah bersihnya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Instrumen keuangan derivatif dan aktivitas lindung nilai

Derivatif pada awalnya diakui sebagai nilai wajar pada tanggal kontrak derivatif disepakati dan selanjutnya diukur kembali sebesar nilai wajarnya.

ai. **Biaya pinjaman**

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan akuisisi atau konstruksi aset kualifikasian, dikapitalisasi sehingga aset tersebut selesai secara substansial. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada periode terjadinya.

3. *Summary of significant accounting policies (continued)*

ah. Asset and financial liabilities (continued)

Financial asset (continued)

(ii) **Financial liabilities carried at amortized cost**

Financial liabilities that are not classified as financial liabilities at fair value through profit or loss are classified in this category and measured at amortized cost. Financial liabilities are measured at amortized cost include trade payables and other payables, accrued expenses, loans and bonds.

Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities were offset and the net amount is reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Derivative financial statements and hedging activities

Derivatives are initially recognized as fair value on the date the derivative contract is agreed and subsequently measured at fair value.

ai. Loan expenses

At the time of initial recognition, loans are recognized at fair value, net of transaction costs that occur. Subsequently, loans are measured at amortized cost using the effective interest rate method.

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition or construction of qualifying assets are capitalized therefore the asset is substantially completed. Other borrowing costs are recognized as an expense in the period incurred.

31 Desember 2021

31 December 2021

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

ai. Biaya pinjaman (lanjutan)

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan.

aj. Akuntansi hibah dan bantuan pemerintah

Perusahaan telah menerapkan kebijakan PSAK No. 61 tentang Akuntansi Hibah Pemerintah dan bantuan Pemerintah. Adapun uraian kebijakan tersebut sebagai berikut :

- a. Hibah Pemerintah yang terkait dengan aset, termasuk hibah non moneter pada nilai wajar, disesuaikan dalam laporan posisi keuangan dan disajikan sebagai kredit dalam penghasilan ditangguhkan atau dicatat sebagai nilai tercatat aset.
- b. Penyajian hibah yang terkait dengan penghasilan disajikan sebagai kredit dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain .
- c. Pembayaran kembali hibah terkait dengan penghasilan disajikan sebagai kredit dalam laporan kredit ditangguhkan yang belum diamortisasi terkait dengan hibah. Jika pembayaran kembali melebihi saldo kredit ditangguhkan atau tidak ada lagi saldo kredit ditangguhkan maka pembayaran kembali diakui dalam laba rugi.

ak. Penggunaan estimasi

Penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi terhadap jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset, liabilitas dan pengungkapan liabilitas kontinjensi pada akhir periode pelaporan.

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perseroan secara spesifik menelaah apakah terdapat bukti objektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai. Penyisihan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang didefinisikan secara spesifik telah mengalami penurunan nilai.

3. Summary of significant accounting policies (continued)

ai. Loan expenses (continued)

Loans are classified as current liabilities unless maturing in more than 12 months after the reporting period.

aj. Accounting for Government grants and assistance

The Company has implemented SFAS No. 61 on Accounting for Government Grants and Government assistance. The description of the policy is as follows:

- a. Government grants related to assets, including non-monetary grants at fair value are adjusted in the statement of financial position and presented as a credit in deferred income or recorded as the carrying value of the asset.*
- b. Presentation of grants related to income is presented as a credit in the statements of profit or loss and other comprehensive income.*
- c. Repayment of a grant related to income is presented as a credit in a unamortized deferred credit report related to the grant. If the payment exceeds the deferred credit balance or no balance are available, the deferred loan repayment is recognized in profit or loss.*

ak. Use of estimates

Presentation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets, liabilities and disclosure of contingent liabilities at the end of the reporting period.

At each balance sheet date, the Company specifically examines whether there is objective evidence that a financial asset is impaired. Allowance for impairment losses was made on accounts that are defined specifically has impaired.

31 Desember 2021

31 December 2021

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

ak. Penggunaan estimasi (lanjutan)

Estimasi dan pertimbangan terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lain, termasuk ekspektasi peristiwa masa depan yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada. Pertimbangan, estimasi dan asumsi memiliki dampak yang signifikan terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas seperti klasifikasi aset dan liabilitas, sewa, penyisihan kerugian piutang, penyisihan persediaan usang, dan lainnya.

Oleh karena adanya ketidakpastian di dalam membuat estimasi, maka terdapat kemungkinan hasil akhir yang dilaporkan pada masa yang akan datang akan berbeda dengan estimasi tersebut.

3. *Summary of significant accounting policies (continued)*

ak. Use of estimates (continued)

Estimates and judgments are continually evaluated based on historical experience and other factors, including expectations of future events believed to be reasonable under the circumstances. Considerations, estimates and assumptions that have a significant impact on the carrying values of assets and liabilities such as the classification of assets and liabilities, leases, provision for impairment, provision for obsolete inventory, and more.

Due to the uncertainty in making estimates, it is possible that the final results reported in the future will differ from those estimates.

31 Desember 2021

31 December 2021

4. Kas dan setara kas

4. Cash and cash equivalents

	2021	2020	
Kas – IDR			Cash – IDR
Kas	3.566.609.508	3.816.385.577	Cash
Jumlah kas - IDR	3.566.609.508	3.816.385.577	Total cash – IDR
Bank – IDR			Bank - IDR
Pihak Berelasi			Related Parties
PT BPD Jawa Barat & Banten Tbk	134.336.735.389	32.644.003.060	PT BPD Jawa Barat & Banten, Tbk
PT Bank DKI	124.020.453.361	3.140.741.630	PT Bank DKI
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	98.207.405.841	68.562.805.981	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah	70.890.007.535	51.463.029.227	PT Bank Pembangunan Daerah
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	35.787.123.733	32.356.205.474	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	21.519.621.504	37.644.848.865	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	18.438.580.038	10.426.911.870	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	15.174.714.286	557.483.826	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT BPD Jawa Timur Tbk	2.212.851.042	954.895	PT BPD Jawa Timur Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk	207.871.202	7.223.849.119	PT Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	46.359.961	11.982.048	PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
PT BPD Sumatera Barat	-	4.419.324	PT BPD Sumatera Barat
Pihak Ketiga			Third Parties
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	52.677.058.031	-	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank Danamon Tbk	9.342.357.674	150.059.659	PT Bank Danamon Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	728.351.896	736.892.071	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Tabungan Pensiunan Negara Tbk	480.169.797	605.658.884	PT Bank Tabungan Pensiunan Negara Tbk
PT Bank Panin Tbk	317.329.174	53.450.369	PT Bank Panin Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	229.606.957	197.293.657	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank UOB Buana Tbk	82.748.934	78.147.810	PT Bank UOB Buana Tbk
PT Bank Nationalnobu Tbk	58.775.982	115.697.799	PT Bank Nationalnobu Tbk
PT Bank Mega Tbk	56.055.749	56.478.190	PT Bank Mega Tbk
PT Bank Bukopin Tbk	37.583.889	109.978.768	PT Bank Bukopin Tbk
Sub jumlah bank – IDR	584.851.761.975	246.140.892.526	Subtotal bank – IDR

31 Desember 2021

31 December 2021

4. Kas dan setara kas (lanjutan)

4. Cash and cash equivalents (continued)

	2021	2020	
Bank – mata uang asing			Bank – foreign currencies
Pihak berelasi			Related parties
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (USD 242.648 di 2021 dan USD 325.027 di 2020)	3.462.352.193	4.584.511.888	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (USD 242,648 in 2021 and USD 325,027 in 2020)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (USD 127.722 di 2021 dan USD 124.922 di 2020)	1.822.462.636	1.762.028.481	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (USD 127,722 in 2021 and USD 124,922 in 2020)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (USD 6.524 di 2021 dan USD 7.319 di 2020)	93.089.510	103.232.981	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (USD 6,524 in 2021 and USD 7,319 in 2020)
PT Bank Danamon Indonesia Tbk (USD 2.012 di 2021 dan USD 2.072 di 2020)	28.715.659	29.231.928	PT Bank Danamon Indonesia Tbk (USD 2,012 in 2021 and USD 2,072 in 2020)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Euro 8.901 di 2021 dan Euro 6.670 di 2020)	143.550.486	115.597.859	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Euro 8,901 in 2021 and Euro 6,670 in 2020)
Sub jumlah bank - mata uang asing	5.550.170.484	6.594.603.137	Subtotal – foreign currencies
Sub jumlah bank	590.401.932.459	252.735.495.663	Subtotal bank
Deposito – IDR			Time deposits - IDR
Pihak berelasi			Related parties
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	55.000.000.000	16.000.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	5.500.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT BPD Jabar dan Banten Tbk	-	5.115.000.000	PT BPD Jabar dan Banten Tbk
PT Bank DKI	-	5.000.000.000	PT Bank DKI
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank Bukopin Tbk	25.000.000.000	-	PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank Panin Tbk	102.153.077	-	PT Bank Panin Tbk
PT Capital Indonesia Tbk	-	10.000.000.000	PT Capital Indonesia Tbk
PT Bank Muamalat Tbk	-	9.132.387.130	PT Bank Muamalat Tbk
Sub jumlah deposito	80.102.153.077	50.747.387.130	Subtotal time deposits
Jumlah kas dan setara kas	674.070.695.044	307.299.268.370	Total cash and cash equivalents

31 Desember 2021

31 December 2021

5. Kas dan setara kas dibatasi penggunaannya

5. Restricted cash and cash equivalent

	2021	2020	
Kas yang dibatasi penggunaannya			Restricted cash
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	122.624.737.649	75.321.861.360	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT BPD Jabar dan Banten Tbk	27.000.000.000	27.000.000.000	PT BPD Jabar dan Banten Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	16.000.000.000	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	14.032.435.619	313.561.002	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Deposito berjangka (lebih dari 3 bulan)			Time deposit (more than 3 months)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	365.000.000.000	365.000.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank BNI Syariah	258.552.631.579	258.552.631.579	PT Bank BNI Syariah
PT Bank DKI	158.400.000.000	150.000.000.000	PT Bank DKI
PT BPD Jabar dan Banten Tbk	115.591.000.000	115.591.000.000	PT BPD Jabar dan Banten Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	89.300.000.000	90.000.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Jumlah kas dan setara kas dibatasi penggunaannya	1.166.500.804.847	1.081.779.053.941	Total restricted cash and cash equivalent

Per 31 Desember 2020, kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp 979.143.631.579 digunakan sebagai jaminan/ CCF (*Cash Collateral Financing*) dengan jangka waktu lebih dari 3 bulan. Saldo PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp 365.000.000.000, PT Bank BNI Syariah total Rp 258.552.631.579 masing-masing sebesar Rp 221.052.631.579 dengan No. Seri: SAA9707771 tanggal 10 April 2019 (lihat Catatan 25) dan Rp 37.500.000.000 dengan No. Seri: SAB038800 tanggal 26 November 2019 digunakan untuk jaminan, PT Bank DKI sebesar Rp 150.000.000.000 dengan No. Agunan Tunai: 1891/GKM/XI/2019 Tanggal 27 November 2019, PT BPD Jawa Barat & Banten Tbk sebesar Rp 115.591.000.000 masing-masing digunakan sebagai jaminan kredit untuk bank bersangkutan, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 90.000.000.000 dengan Nomor Perjanjian CCF :01/S.Pj-Hkm/RNI.01/I/2020 tanggal 9 Januari 2020 digunakan untuk jaminan.

As of 31 December 2020, restricted cash and cash equivalents of Rp 979,143,631,579 were used as collateral/ CCF (*Cash Collateral Financing*) with a period of more than 3 months. Balance of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounting to Rp 365,000,000,000, PT Bank BNI Syariah totaling Rp 258,552,631,579 each of Rp 221,052,631,579 with Serial Number: SAA9707771 dated 10 April 2019 (see Note 25) and Rp 37,500,000,000 with Serial Number: SAB038800 dated 26 November 2019 used for collateral, PT Bank DKI amounting to Rp 150,000,000,000 with Cash Collateral No. 1891/GKM/XI/2019 on 27 November 2019, PT BPD Jawa Barat & Banten Tbk amounting to Rp 115,591,000,000 respectively used as credit collateral for the bank concerned, and PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp. 90,000,000,000 with the CCF Agreement Number. 01/S.Pj-Hkm/RNI.01/I/2020 dated 9 January 2020 used for guarantee.

31 Desember 2021

31 December 2021

**5. Kas dan setara kas dibatasi penggunaannya
(lanjutan)**

Saldo kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya tahun 2021 PT PG Rajawali I di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 1.001.787.693 dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 98.336.350.505 adalah saldo bank yang dibentuk untuk menyalurkan dana kelompok tani/koperasi dari hasil pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada kelompok tani dan koperasi primer yang pengelolaannya diserahkan kepada Unit Pabrik Gula Rejo Agung Baru dan Unit Pabrik Gula Kribet Baru.

Saldo kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya tahun 2021 PT PG Rajawali I di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebesar Rp 27.000.000.000 didasarkan pada Akta No. 914 di hadapan Widawati, S.H., M.Kn., tertanggal 9 Agustus 2019, yang terakhir kali diubah berdasarkan perjanjian No.237/S.Pj-Hkm/RNI.01/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021, di mana Entitas, bersama kelompok usaha PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), menempatkan saldo bank yang digunakan sebagai jaminan oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atas penerimaan fasilitas kredit modal kerja - cash collateral.

Saldo kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya tahun 2021 PT PG Rajawali I pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait dengan penerimaan fasilitas utang bank jangka panjang yang diterima oleh Entitas, di mana Entitas disyaratkan untuk mengendapkan dana escrow di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebesar Rp 12.500.000.000.

5. Restricted cash and cash equivalent (continued)

The restricted cash and cash equivalents in 2021 of PT PG Rajawali I which found in PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Rp 1,001,787,693 and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp 98,336,350,505 are bank balances established to channel funds farmer groups/cooperatives from the disbursement of People's Business Credit (KUR) to farmer groups and primary cooperatives whose management is handed over to the Rejo Agung Baru Sugar Factory Unit and the Kribet Baru Sugar Factory Unit.

The restricted cash and cash equivalents in 2021 of PT PG Rajawali I at PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten Tbk amounting to Rp 27,000,000,000 based on Deed No. 914 before Widawati, SH, M.Kn., dated 9 August 2019, which was last amended by agreement No. 237/S.Pj-Hkm/RNI.01/VIII/2021 dated 20 August 2021, where the Entity, together with the business group of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), placed a bank balance used as collateral by PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) for the receipt of working capital credit facilities - cash collateral.

The restricted cash and cash equivalents in 2021 of PT PG Rajawali I at PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk is related to the receipt of long-term bank loan facilities received by the Entity, in which the Entity is required to deposit escrow funds in PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk in the amount of Rp 12,500,000,000.

31 Desember 2021

31 December 2021

6. Piutang usaha

6. Account receivables

	2021	2020	
Piutang usaha pihak ketiga			Account receivables third parties
Piutang obat-obatan dan alat kesehatan	478.380.978.420	421.101.462.166	Medicines and healthy tools receivable
Piutang gula dan tetes	120.573.010.261	181.389.057.177	Sugar and molasses receivable
Piutang perdagangan umum	19.487.410.954	22.409.501.407	General trade receivable
Piutang teh	15.143.255.198	19.038.421.005	Tea receivable
Piutang karung plastik	11.088.418.607	2.934.853.760	Plastic bag receivable
Piutang kondom dan alat suntik sekali pakai	10.058.320.424	10.996.660.582	Condom and disposable syringe receivable
Piutang penjualan sapi	4.307.749.257	4.307.749.257	Cattle sales receivable
Piutang minyak sawit mentah	3.390.207.967	858.284.176	Crude palm oil receivable
Piutang asuransi	-	318.000.000	Insurance receivable
Sub jumlah piutang usaha pihak ketiga	662.429.351.088	663.353.989.530	Subtotal account receivables third parties
Piutang usaha pihak berelasi			Account receivables related parties
PT Berdikari (Persero)	5.525.850.001	-	PT Berdikari (Persero)
PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)	1.355.814.826	-	PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)
PT Kimia Farma (Persero) Tbk	11.925.885	11.925.885	PT Kimia Farma (Persero) Tbk
PK Rosella Baru	5.713.092	89.335.750	PK Rosella Baru
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	-	1.885.541.175	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
PT Pupuk Kalimantan Timur	-	1.829.145.000	PT Pupuk Kalimantan Timur
Lain-lain	27.108.636.228	17.954.594.607	Others
Sub jumlah piutang usaha pihak berelasi	34.007.940.032	21.770.542.417	Subtotal account receivables related parties
Cadangan penurunan nilai piutang usaha	(72.645.567.488)	(56.790.145.202)	Allowance for impairment of account receivables
Jumlah piutang usaha	623.791.723.632	628.334.386.745	Total account receivables

31 Desember 2021

31 December 2021

6. Piutang usaha (lanjutan)

6. Account receivables (continued)

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang usaha sebagai berikut :

Movements of allowance for impairment of account receivables are as follows:

	2021	2020	
Saldo awal	56.790.145.202	50.027.988.008	<i>Beginning balance</i>
Penambahan/pengurangan	15.855.422.286	6.762.157.194	<i>Addition/deduction</i>
Saldo akhir	72.645.567.488	56.790.145.202	<i>Ending balance</i>

Entitas telah menerapkan metode yang disederhanakan untuk menghitung Kerugian Kredit Ekspektasian (KKE) sesuai dengan PSAK 71 yang mengizinkan penggunaan cadangan kerugian ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang usaha tanpa komponen pendanaan yang signifikan. Untuk mengukur KKE, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan waktu jatuh tempo yang serupa.

The Entity has implemented a simplified method for calculating Expected Credit Losses (KKE) in accordance with PSAK 71 which allows the use of lifetime expected loss allowance for all trade receivables without a significant funding component. To measure KKE, trade receivables have been grouped based on similar characteristics of credit risk and maturity.

Piutang usaha obat-obatan dan alat kesehatan kepada pihak ketiga merupakan piutang yang terjadi di entitas anak PT Rajawali Nusindo.

Account receivables of medicines and medical equipment to third parties are receivables that occurred in the subsidiaries of PT Rajawali Nusindo.

Piutang usaha gula dan tetes kepada pihak ketiga merupakan piutang yang terjadi di entitas anak PT PG Rajawali I, PT Rajawali II, dan PT PG Candi Baru.

Sugar and molasses account receivables to third parties represent receivables that occurred in the subsidiaries of PT PG Rajawali I, PT Rajawali II, and PT PG Candi Baru.

Piutang usaha teh kepada pihak ketiga merupakan piutang yang terjadi di entitas anak PT Mitra Kerinci.

Tea account receivables to third parties represent receivables that occurred in the subsidiary of PT Mitra Kerinci.

Piutang karung plastik kepada pihak ketiga merupakan piutang yang terjadi di entitas anak PT Rajawali Citramass

Receivables plastic bag to the subsidiary of third parties are receivables that occurred in PT Rajawali Citramass

Piutang minyak sawit mentah kepada pihak ketiga merupakan piutang yang terjadi di entitas anak PT Perkebunan Mitra Ogan.

Account receivables of crude palm oil to third parties represent receivables that occurred in the subsidiary of PT Perkebunan Mitra Ogan.

Piutang usaha kondom/ ASSP kepada pihak ketiga merupakan piutang yang terjadi di entitas anak PT Mitra Rajawali Banjaran.

Account receivables of condom/ ASSP to third parties represent receivables that occurred in the subsidiary of PT Mitra Rajawali Banjaran.

Piutang penjualan sapi kepada pihak ketiga merupakan piutang yang terjadi di induk Perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia.

Cattle account receivables represent receivables to third parties that occurred in the parent Company of PT Rajawali Nusantara Indonesia.

31 Desember 2021

31 December 2021

7. Piutang lain-lain		7. Other receivables	
a. Piutang lain-lain lancar		a. Other current receivables	
	2021	2020	
Pihak berelasi :			Related parties :
PT Sang Hyang Seri (Persero)	24.332.352.785	26.570.374.000	PT Sang Hyang Seri (Persero)
PT Sawit Menang Sejahtera	17.790.455.586	17.790.455.585	PT Sawit Menang Sejahtera
PT Brantas Energi	10.690.333.363	10.497.694.444	PT Brantas Energi
PT PG Madu Baru	3.481.362.454	3.504.692.355	PT PG Madu Baru
Pinjaman pegawai	1.228.829.030	1.445.446.561	Employee loans
PT Kawasan Berikat Nusantara Perusahaan Perdagangan Indonesia	1.164.030.000 - 937.447.431	- -	PT Kawasan Berikat Nusantara Perusahaan Perdagangan Indonesia
PT JIEP Pulogadung	661.504.000	308.224.000	PT JIEP Pulogadung
PT Kawasan Industri Medan	502.588.000	234.178.000	PT Kawasan Industri Medan
PT SIER Rungkut	470.580.000	-	PT SIER Rungkut
Perum Perikanan Indonesia	436.943.948	-	Perum Perikanan Indonesia
PT Perikanan Nusantara (Persero)	386.946.685	-	PT Perikanan Nusantara (Persero)
PT Bhanda Ghana Reksa (Persero)	351.178.271	-	PT Bhanda Ghana Reksa (Persero)
PT Pertani (Persero)	288.125.410	-	PT Pertani (Persero)
Kokarindo	256.773.807	-	Kokarindo
PT Kawasan Industri Makassar	175.260.000	152.908.000	PT Kawasan Industri Makassar
PT Rajawali Insurance Broker	171.938.499	115.788.718	PT Rajawali Insurance Broker
PT Kawasan Industri Wijayakusuma	171.810.000	149.898.000	PT Kawasan Industri Wijayakusuma
PT Garam (Persero)	111.756.524	-	PT Garam (Persero)
PT Phapros Tbk	-	772.216.911	PT Phapros Tbk
PTPN (I-XIV)	-	682.850.816	PTPN (I-XIV)
PT Rajawali Gloves	-	362.750.155	PT Rajawali Gloves
Lain-lain	55.529.168.941	18.955.092.558	Others
Sub jumlah pihak berelasi	119.139.384.734	81.542.570.103	Subtotal related parties
Cadangan penurunan nilai piutang pihak berelasi	(793.334.221)	(447.642.553)	Allowance for impairment of receivables of related parties
Jumlah piutang lain-lain pihak berelasi	118.346.050.513	81.094.927.550	Total other receivables related parties
Pihak ketiga :			Third parties :
Piutang KUD/PTR/Plasma	238.801.637.286	234.785.190.345	KUD/PTR/Plasma receivable
Uang muka pembelian	66.583.744.749	668.526.000	Down payment
Uang muka pihak lain	41.587.867.966	154.403.098.781	Other parties advance
Piutang instansi pihak ketiga	5.421.935.630	3.751.602.437	Receivable of third parties
Piutang pegawai	1.710.861.721	1.429.743.206	Employees receivable
KSO Particle Board	422.123.530	422.123.530	KSO Particle Board
Tebang angkut	107.545.880	142.734.928	Freight handling
Lain-lain	339.594.749.552	83.926.638.923	Others
Sub jumlah pihak ketiga	694.230.466.314	479.529.658.150	Subtotal third parties
Cadangan penurunan nilai piutang pihak ketiga	(2.493.498.285)	(3.328.337.198)	Allowance for impairment of receivables of third parties
Jumlah piutang lain-lain pihak ketiga	691.736.968.029	476.201.320.952	Total other receivables third parties

31 Desember 2021

31 December 2021

7. Piutang lain-lain (lanjutan)

7. Other receivables (continued)

a. Piutang lain-lain lancar (lanjutan)

a. Other current receivables (continued)

Pihak berelasi

Related parties

Piutang berelasi kepada PT Phapros Tbk merupakan saldo klaim PT Rajawali Nusindo kepada PT Phapros Tbk.

Receivables related to PT Phapros Tbk represent claim PT Rajawali Nusindo to PT Phapros Tbk.

Piutang berelasi kepada PT Sawit Menang Sejahtera merupakan tagihan atas pinjaman modal kerja yang diberikan oleh entitas anak PT Perkebunan Mitra Ogan.

Receivables related to PT Sawit Menang Sejahtera represent bills on working capital loans granted by subsidiary of PT Perkebunan Mitra Ogan.

Pinjaman pegawai merupakan fasilitas pinjaman tanpa bunga kepada pegawai, yang dilunasi melalui pemotongan gaji karyawan yang bersangkutan.

Employee loan is a loan bearing no interest to employees, which is repaid through payroll deductions of related employees.

Pihak ketiga

Third parties

Piutang KUD/PTR/Plasma merupakan pinjaman yang diberikan kepada petani tebu rakyat/ petani plasma berupa pinjaman pupuk, biaya garap, biaya tebang, dan lain-lain yang akan dilunasi pada saat pencairan gula bagian petani/ penjualan Tandan Buah Segar (TBS) plasma.

Receivables of KUD/PTR/Plasma represent loans given to sugarcane farmers in the form of a loan of fertilizer, the cost of working, the cost of cutting, and others which will be repaid at the time of disbursement of the sugar which is part of the farmer portion/ Fresh Fruit Bunches (FFB) of plasma sales.

Rincian Piutang KUD/PTR/Plasma per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Details of receivables KUD/PTR/Plasma as of 31 December 2021 and 2020 are as follows:

	2021	2020	
PT PG Rajawali II	183.934.950.354	140.712.430.909	PT PG Rajawali II
PT PG Rajawali I	23.394.981.581	62.904.301.025	PT PG Rajawali I
PT Laras Astra Kartika	18.014.493.193	16.658.714.252	PT Laras Astra Kartika
PT Perkebunan Mitra Ogan	13.422.937.408	13.422.937.409	PT Perkebunan Mitra Ogan
PT PG Candi Baru	34.274.750	1.086.806.750	PT PG Candi Baru
Jumlah piutang KUD/PTR/ Plasma	238.801.637.286	234.785.190.345	Subtotal account receivables KUD/ PTR/ Plasma

Piutang KUD/TRI (Tebu Rakyat Intensif) merupakan pinjaman yang diberikan berdasarkan pemberian KKPE (Kredit Ketahanan Pangan Energi), merupakan program pemerintah untuk membantu kegiatan petani tebu. Penyaluran pinjaman dilakukan melalui Perusahaan yang pembayarannya akan diperhitungkan dengan hasil gula petani, terkait dengan utang titipan TRI KSU (Kerjasama Usaha). Piutang KUD/ TRI terdapat di PT PG Rajawali I, PT PG Rajawali II, dan di PT PG Candi Baru.

Receivables of KUD/TRI (Smallholders' Sugarcane Intensification) represent loan granted by giving KKPE (Energy and Food Resistance Loan), a government program to assist the sugarcane farmers. Corporate lending is done through the payment will be taken into account by the sugar results of farmers, associated with loan entrusted on TRI KSU (Joint Business). Receivables of KUD/TRI contained in PT PG Rajawali I, PT PG Rajawali II, and PT PG Candi Baru.

31 Desember 2021

31 December 2021

7. Piutang lain-lain (lanjutan)

a. Piutang lain-lain lancar (lanjutan)

Pihak ketiga (lanjutan)

Piutang plasma di PT Perkebunan Mitra Ogan merupakan bagian piutang jangka panjang yang jatuh tempo atas pembiayaan kebun KKPA seluas 397,17 Ha, piutang pupuk dan pemeliharaan jalan/ tanaman petani plasma di kebun PPL melalui KUD yang akan diperhitungkan dengan pembayaran TBS dan piutang pemeliharaan kebun petani KKPA di kebun RL yang akan diperhitungkan dengan pembayaran TBS.

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang plasma per tanggal laporan posisi keuangan yang berasal dari pengalihan HGU Inti berikut tanamannya seluas 1.172,59 Ha dan terjadi ganti rugi oleh Perusahaan seluas 523,89 Ha sehingga mulai April 2013 menjadi seluas 648,7 Ha. Pengembalian piutang adalah dipotong dari hasil penjualan Tandan Buah Segar kelapa sawit para petani plasma setiap bulan berdasarkan pengikatan (perjanjian) antara masing-masing petani yang berhak yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur. Di dalam perjanjian tersebut para petani dinyatakan berhutang untuk biaya pembangunan kebun plasma kepada perusahaan inti sebesar Rp 10.500.000 per hektar dan dibebani bunga pinjaman sebesar 14% per tahun.

Piutang plasma merupakan pinjaman yang diberikan kepada petani plasma untuk pemeliharaan kebun kelapa sawit yang akan diperhitungkan pada saat petani menyerahkan hasil produksi TBS kepada entitas anak PT Perkebunan Mitra Ogan dan PT Laras Astra Kartika.

Piutang lain-lain lancar pihak berelasi kepada PT Madu Baru merupakan piutang modal kerja untuk keperluan operasional.

7. Other receivables (continued)

a. Other current receivables (continued)

Third parties (continued)

Receivables plasma of PT Perkebunan Mitra Ogan represent part of long-term receivables maturing on financing of KKPA plantation in the area of 397.17 Ha, accounts receivables on fertilizer and maintenance of roads/ plasma farmers at PPL through KUD which will be taken into account by the payment of TBS receivables and plantation maintenance of KKPA farmer in the RL plantation to be accounted for FFB payment.

The amount represents the outstanding amounts of plasma per the statement of financial position date are derived from the plant following the transfer of HGU core area of 1,172.59 Ha and occur indemnification by the Company covering an area of 523.89 Ha and began in April 2013, into an area of 648.7 Ha. Payment of receivables is deducted from the sale of fresh fruit bunches of oil palm from smallholders every month based on the binding (agreement) between each farmer is entitled under Decision Regent of Ogan Komering Ulu Timur. The new agreement is declared that farmers owed for plasma plantation development costs to the Company's core amounting to Rp 10,500,000 per hectare and bears interest rate at 14% per year.

Plasma receivables present loans given to farmers for maintenance of oil palm plantations that will be taken into account when farmers deliver their yields of FFB to subsidiaries of PT Perkebunan Mitra Ogan and PT Laras Astra Kartika.

Other current receivables from related parties to PT Madu Baru represent working capital receivables for operational purposes.

31 Desember 2021

31 December 2021

7. Piutang lain-lain (lanjutan)

7. Other receivables (continued)

b. Piutang lain-lain tidak lancar

b. Other non current receivables

	2021	2020	
Pihak berelasi			Related parties
PT Perkebunan Nusantara X (Persero)	49.298.819.712	49.298.819.712	PT Perkebunan Nusantara X (Persero)
PT Phapros Tbk	772.216.911	-	PT Phapros Tbk
PT Perkebunan Nusantara XIV	682.850.817	-	PT Perkebunan Nusantara XIV
PT Rajawali Gloves	362.750.155	-	PT Rajawali Gloves
Sub jumlah pihak berelasi	51.116.637.595	49.298.819.712	Subtotal related parties
Pihak ketiga			Third parties
PT Abadi Guna Papan Plasma Sawit	96.955.083.602	96.955.083.602	PT Abadi Guna Papan Plasma of oil palm
Pajak KSO Waskita	16.800.000.000	16.800.000.000	KSO Waskita Tax
PT PG Gorontalo	4.822.002.679	4.822.002.679	PT PG Gorontalo
PBSTA Loka	2.841.789.509	2.841.789.509	PBSTA Loka
Lain-lain	135.200.000	135.200.000	Others
Sub jumlah pihak ketiga	192.662.413.815	192.662.413.816	Subtotal third parties
Penyisihan penurunan nilai	(27.771.140.407)	(27.577.230.240)	Provision for impairment value
Jumlah pihak ketiga	164.891.273.408	165.085.183.576	Total third parties

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang lain-lain tidak lancar sebagai berikut :

The movement for allowance for impairment of non current receivables as follows :

	2021	2020	
Saldo awal	27.577.230.240	27.383.320.073	Beginning balance
Penambahan penyisihan	193.910.167	193.910.167	Additional provision
Saldo akhir	27.771.140.407	27.577.230.240	Ending balance

PT Perkebunan Nusantara X (Persero)

Piutang PT Perkebunan Nusantara X (Persero) awalnya merupakan piutang KSO-BPPG yang merupakan piutang modal kerja dan piutang hubungan rekening koran PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dengan KSO-BPPG, berdasarkan persetujuan pelaksanaan kerjasama operasi peningkatan kinerja Pabrik Gula PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dari Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

PT Perkebunan Nusantara X (Persero)

Receivables of PT Perkebunan Nusantara X (Persero) was originally receivables of KSO-BPPG which is working capital receivable and cash standing loan of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) with KSO-BPPG, based on Joint Operation Agreement on Implementation of Performance Improvement on Sugar Factory of PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) and PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) of the State Minister for State-Owned Enterprises.

31 Desember 2021

31 December 2021

7. Piutang lain-lain (lanjutan)

b. Piutang lain-lain tidak lancar (lanjutan)

**PT Perkebunan Nusantara X (Persero)
(lanjutan)**

Sejak September 2009 KSO ini telah diubah dengan mengikutsertakan PTPN X untuk mengelola PG Camming dan PG Bone sehingga Perusahaan hanya mengelola PG Takalar. Sebagai realisasi dari perubahan ini kredit modal kerja dari Bank BRI kepada Perusahaan akan dilakukan novasi sebagian kepada PTPN X dengan adanya addendum perjanjian pinjaman KMK No. 26 tanggal 12 April 2010 dan KI No. 27 tanggal 12 April 2010.

PT RNI telah menandatangani Perjanjian Transisi pada tanggal 27 Desember 2011 dengan PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X) untuk Pengalihan Pengelolaan Pabrik Gula Takalar. Selanjutnya pada tanggal 23 April 2012, perjanjian tersebut dilanjutkan dengan Perjanjian Pengalihan Pengelolaan Pabrik Gula Takalar yang dibuat PT RNI, PTPN X dan PTPN XIV, untuk mengalihkan Pengelolaan PG Takalar dari PT RNI kepada PT Perkebunan Nusantara X.

1. Di dalam perjanjian pengalihan pengelolaan tersebut disyaratkan untuk membuat: pengalihan/ pembaharuan (novasi) kredit Bank BRI dari PT RNI kepada PTPN X, dan
2. Perjanjian penyelesaian dana talangan yang telah dikeluarkan PT RNI untuk Pabrik Gula Bone, Camming dan Takalar, sebesar lebih dari Rp 47.862.863.556.

Pengalihan/ pembaharuan (novasi) kredit Bank BRI telah dilakukan didalam Akta No. 38 untuk novasi Kredit Investasi dan No. 39 untuk novasi Kredit Modal Kerja, tanggal 17 September 2012.

Sampai saat ini perjanjian penyelesaian tersebut masih belum dibuat, karena sesuai kesepakatan Perusahaan dan PT Perkebunan Nusantara X akan dilakukan revidu oleh BPKP Pusat atas validitas dana talangan tersebut.

7. Other receivables (continued)

b. Other non current receivables (continued)

**PT Perkebunan Nusantara X (Persero)
(continued)**

Since September 2009 KSO has been amended to include PTPN X for managing PG Camming and PG Bone so the Company only manages PG Takalar. As the realization of this change in working capital loan from BRI to the Company will do part of novation to PTPN X with their loan agreement under Working Capital Loan Addendum No. 26 dated 12 April 2010 and Investment Loan No. 27 dated 12 April 2010.

PT RNI has signed a transition agreement on 27 December 2011 with PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X) for Management Transfer of Pabrik Gula Takalar. Furthermore, on 23 April 2012, the agreement was followed by the Management Transfer Agreement of Pabrik Gula Takalar made to PT RNI, PTPN X and PTPN XIV, to transfer the management of PG Takalar from PT RNI to PT Perkebunan Nusantara X.

1. In the management transfer agreement it is required to make: the renewal (novation) of Bank BRI loan from PT RNI to PTPN X, and
2. The bailout settlement agreement issued by PT RNI for Pabrik Gula Bone, Camming and Takalar amounted to more than Rp 47,862,863,556.

The transfer/ renewal (novation) of Bank BRI's loan has been done in the Deed No. 38 for the credit investment and No. 39 for the novation of Working Capital Loan, 17 September 2012.

Until now the settlement agreement is still not amended, because according to the agreement of the Company and PT Perkebunan Nusantara X it will be reviewed by the BPKP on the validity of the bailout funds.

31 Desember 2021

31 December 2021

7. Piutang lain-lain (lanjutan)

7. Other receivables (continued)

b. Piutang lain-lain tidak lancar (lanjutan)

b. Other non current receivables (continued)

KSO PT Waskita Karya Realty

KSO PT Waskita Karya Realty

Piutang KSO Waskita merupakan piutang pajak atas KSO Waskita pada saat mendirikan Gedung Waskita Rajawali Tower. Penyertaan pada KSO RNI - Waskita ("KSO") merupakan kontribusi penyertaan modal Perusahaan dalam KSO berupa tanah milik Perusahaan seluas 7.025 m2 yang berlokasi di Jl MT. Haryono Kav. 12-13 Jakarta Timur berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasi antara PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) No. 128/S.Pj/RNI.01/X/2016 dan PT Waskita Karya Realty No. 001/KSO/WKR/X/2016, tanggal 10 Oktober 2016 dalam rangka kerjasama proyek pengembangan properti pada aset tanah milik PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).

KSO Waskita receivables represent tax receivables from KSO Waskita at the time of establishing the Waskita Rajawali Tower Building. Participation in KSO RNI - Waskita ("KSO") represents the Company's equity contribution in the KSO in the form of the Company's land area of 7,025 m2 located on Jl MT. Haryono Kav. 12-13 East Jakarta based on the Joint Operation Agreement between PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) No. 128/S.Pj/RNI.01/X/2016 and PT Waskita Karya Realty No.001/KSO/WKR/X/2016, dated 10 October 2016 in the framework of a joint property development project on land assets owned by PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).

PT Abadi Guna Papan (AGP)

PT Abadi Guna Papan (AGP)

Piutang lain-lain tidak lancar pihak ketiga atas PT Abadi Guna Papan (AGP) merupakan piutang atas terjadinya pembubaran Badan Kerjasama Proyek Pengembangan Lingkungan Kuningan (BKS-PPLK) Jakarta dengan AGP yang sebelumnya didirikan berdasarkan pada Persetujuan Kerjasama antara Perusahaan dengan AGP yang tertuang dalam akta Notaris Ny. H. A. Prajitno Nitisastro, SH, No. 27 tanggal 20 Maret 1989, yang dirubah dengan akta Notaris Sutjipto, SH, No. 155 tanggal 23 April 1996.

Other non-current receivables from third parties on PT Abadi Guna Papan (AGP) represent receivable for the dissolution of the Jakarta Joint Agreement of Environmental Development Project (BKS-PPLK) with AGP which was established based on the Agreement of Cooperation between the Company and AGP as stipulated in the deed of Notary Mrs. H. A. Prajitno Nitisastro, SH, No. 27 dated 20 March 1989, which was amended by notarial deed of Sutjipto, SH, No. 155 dated 23 April 1996.

Besarnya modal dalam rangka pembiayaan proyek BKS-PPLK sesuai dengan akta Notaris Ny. H.A Prajitno Nitiastro, SH sebesar Rp 63.281.163.750 dengan komposisi kepemilikan sebagai berikut:

The amount of capital in the framework of project financing of BKS-PPLK in accordance with notarial deed of Mrs. H.A Prajitno Nitiastro, SH amounting to Rp 63,281,163,750 with the following composition of ownership:

Investor	Penyertaan (Rp)/ Investments (Rp)	% Kepemilikan/ % Ownership	Investor
PT Abadi Guna Papan	32.284.207.000	51	PT Abadi Guna Papan
PT Rajawali Nusantara Indonesia	30.996.956.750	49	PT Rajawali Nusantara Indonesia
Jumlah	63.281.163.750	100	Total

31 Desember 2021

31 December 2021

7. Piutang lain-lain (lanjutan)

b. Piutang lain-lain tidak lancar (lanjutan)

PT Abadi Guna Papan (AGP) (lanjutan)

Pada tahun 2010, Badan Kerjasama PPLK telah dibubarkan dan telah dibuat perhitungannya tentang aset bersih yang harus diterima masing-masing pendiri, baik Perusahaan maupun AGP dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh pihak Independen yaitu KAP Roebiandini dan Rekan dan dituangkan dalam nota kesepahaman yang telah disepakati pada tanggal 22 Juni 2010 tentang nota kesepahaman skema pengakhiran Badan Kerjasama Proyek Pengembangan Lingkungan Kuningan dengan harga pengalihan hak penyertaan Perusahaan dari AGP pada tanggal 31 Agustus 2010.

Atas pengalihan hak kepemertaan Perusahaan, Perusahaan akan menerima sisa saldo laba BKS-PPLK sebesar Rp 171.423.555.793 yang merupakan porsi kepemilikan Perusahaan sebesar 49% dari total saldo laba sebesar Rp 349.843.991.413. Dengan demikian, Perusahaan telah mengakhiri BKS-PPLK dengan AGP, dengan cara pengalihan seluruh hak penyertaan Perusahaan dalam BKS-PPLK kepada AGP dan AGP akan memberikan kompensasi pembayaran atas nilai penyertaan Perusahaan serta menyelesaikan seluruh hutang BKS-PPLK kepada Perusahaan.

Dengan demikian Perusahaan dari hasil pembubaran BKS-PPLK menerima pendapatan penyerahan aset bersih sebesar Rp 171.423.555.793 dan tagihan kepada AGP per 31 Desember 2016 sebesar Rp 94.430.300.089.

Berdasarkan surat No. 123/RNI.02/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 dan perhitungan kewajiban pembayaran angsuran pinjaman non pokok PT Abadi Guna Papan memiliki saldo piutang sebesar Rp 97.649.548.867 termasuk denda di tahun 2018.

7. Other receivables (continued)

b. Other non current receivables (continued)

PT Abadi Guna Papan (AGP) (continued)

In 2010, the PPLK Cooperation Agency has been dissolved and has made calculations about net assets that must be received by each of the founders, both the Company and AGP with audited financial statements by the independent party that is KAP Roebiandini and Partners and set forth in the memorandum of understanding that has been agreed on 22 June 2010 on the memorandum of understanding of the termination scheme of the Kuningan Development Project Cooperation Agency with the price of the transfer of the Company's share of investment rights from AGP as of 31 August 2010.

Upon the transfer of the Company's share of ownership, the Company will receive the remaining balance of BKS-PPLK's income amounting to Rp 171,423,555,793 which represents 49% of the Company's total retained earnings amounting to Rp 349,843,991,413. Accordingly, the Company has terminated BKS-PPLK with AGP, by transferring all of the Company's entitlements in BKS-PPLK to AGP and AGP will compensate the Company's investment value and settle all the debts of the BKS-PPLK to the Company.

Therefore, the Company's result from the dissolution of BKS-PPLK received net asset revenues amounting to Rp 171,423,555,793 and billing to AGP as of 31 December 2016 amounting to Rp 94,430,300,089.

Based on letter No. 123/RNI.02/VII/2017 on 17 July 2017 and loan calculation of PT Abadi Guna Papan own receivable balance of Rp 97,649,548,867 include penalty 2018.

31 Desember 2021

31 December 2021

7. Piutang lain-lain (lanjutan)

b. Piutang lain-lain tidak lancar (lanjutan)

Plasma sawit

Saldo piutang plasma sebesar Rp 71.108.338.026 dan Rp 71.108.338.026 pada tahun 2021 dan 2020 merupakan piutang eks KKPA tahun 2001 dan 2003 atas areal seluas 397,17 Ha di kebun Rambang Lubai. Untuk piutang petani plasma (didanai perbankan) merupakan angsuran Pokok dan Bunga atas KI Plasma yang akan dipotong dari hasil produksi TBS petani plasma yang dikelola oleh Perusahaan, terdapat di kebun Muba dan kebun Sebidang Aji PT Perkebunan Mitra Ogan.

PT PG Gorontalo (eks PT PG Rajawali III)

Piutang pada PT PG Gorontalo (eks PT PG Rajawali III) merupakan pinjaman yang diberikan untuk kepentingan modal kerja dan lainnya. Namun pada akhir tahun 2008 saham milik PT RNI di PT PG Rajawali III Gorontalo dengan kepemilikan saham sebesar 33,33% telah dijual dan saldo piutang menjadi piutang lain-lain pihak ketiga. Saldo piutang lain-lain sebesar Rp 4.822.002.679 telah dilakukan penyisihan penurunan nilai piutang tersebut sebesar 100%.

**Pabrik Batu dan Semen Tahan Api "LOKA"
(PBSTA Loka)**

Berdasarkan perjanjian kerjasama operasi antara Perusahaan Daerah Sarana Bangunan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, yaitu Perjanjian Kerjasama No. 57 tanggal 11 April 1987, dari notaris Soehartono, di Surabaya, bahwa Perusahaan Daerah Sarana Bangunan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Perseroan sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dalam bentuk Kontrak Manajemen, untuk melaksanakan rehabilitasi dan pengelolaan Perusahaan Daerah Sarana Bangunan Unit Pabrik Batu dan Semen Tahan Api "LOKA" (PD PBSTA Loka) di Surabaya.

Perjanjian berlaku 5 tahun, dapat diperpanjang untuk 5 tahun berikutnya. Selanjutnya perjanjian tersebut diperpanjang dengan perjanjian No. 65, tanggal 26 Februari 1992 dengan masa berlaku 5 tahun atau sampai dengan dibentuknya oleh kedua belah pihak suatu perusahaan patungan.

7. Other receivables (continued)

b. Other non current receivables (continued)

Plasma of oil palm

The balance of plasma receivables amounted to Rp 71,108,338,026 and Rp 71,108,338,026 in 2021 and 2020 were ex-KKPA accounts in 2001 and 2003 for an area of 397.17 Ha in the Rambang Lubai estate. Receivables for plasma farmers (bank-funded) represent principal and interest installments on plasma KI which will be deducted from the plasma farmers' FFB production managed by the Company, located in Muba plantation and Sebidang Aji plantation at PT Perkebunan Mitra Ogan.

PT PG Gorontalo (ex PT PG Rajawali III)

Receivables of PT PG Gorontalo (formerly PT PG Rajawali III) represent loans granted for working capital purpose and others. However, at the end of 2008 shares owned by PT RNI in PT PG Rajawali III Gorontalo with ownership at 33.33% have been sold and the balance of receivables became other third parties receivables. The balance of other receivables amounting to Rp 4,822,002,679 has provided an allowance for impairment of the receivables of 100%.

**Pabrik Batu dan Semen Tahan Api "LOKA"
(PBSTA Loka)**

Based on the cooperation agreement between the Company of Regional Building Facilities of East Java Province, namely Cooperation Agreement No. 57 dated 11 April 1987, from notary Soehartono, in Surabaya, that the Company of Regional Building Facilities of East Java Province and the Company agreed to enter into a cooperation agreement in the form of Management Contract, in order to carry out the rehabilitation and management of Regional Company of Building Facilities of Pabrik Batu and Semen Tahan Api "LOKA" (PD PBSTA Loka) in Surabaya.

The agreement is valid for 5 years, can be extended for the next 5 years. Furthermore, the agreement was extended by agreement No. 65, dated 26 February 1992 with a validity period of 5 years or until the establishment of a joint venture by both parties.

31 Desember 2021

31 December 2021

7. Piutang lain-lain (lanjutan)

7. Other receivables (continued)

b. Piutang lain-lain tidak lancar (lanjutan)

b. Other non current receivables (continued)

**Pabrik Batu dan Semen Tahan Api “LOKA”
(PBSTA Loka) (lanjutan)**

**Pabrik Batu dan Semen Tahan Api “LOKA”
(PBSTA Loka) (continued)**

Kemudian diperpanjang lagi, terakhir dengan Perjanjian Kerjasama No. 16 tanggal 10 Maret 1999 yang akan berakhir pada 26 Februari 2000. Kemudian di tahun 2000 Perusahaan mengirimkan surat No. Dir/2000/06/MPM tanggal 4 Januari 2000 kepada PT Panca Wira Usaha Jawa Timur yang selanjutnya membawahi Pabrik Batu dan Semen Tahan Api Loka untuk menghentikan KSO.

Then extended again, most recently with the Cooperation Agreement No. 16 dated 10 March 1999 which will expire on 26 February 2000. Then in 2000 the Company sent a letter No. Dir/2000/06/MPM dated 4 January 2000 to PT Panca Wira Usaha East Java which subsequently oversees Pabrik Batu dan Semen Tahan Api Loka to stop KSO operation.

PT Panca Wira Usaha berdasarkan surat No. 009/PWU/02/2000 tanggal 25 Januari 2000 menyetujui penghentian KSO serta akan membuat surat pengakuan utang. Berdasarkan memorandum No. AKT/M/OONIII/16, saldo piutang RNI kepada PT Panca Wira Usaha atas PBSTA Loka berdasarkan hasil rekonsiliasi adalah sebesar Rp 2.841.789.509. Perusahaan telah mencadangkan penyisihan piutang KSO PBSTA Loka sebesar Rp 2.841.789.509.

PT Panca Wira Usaha based on letter No. 009/PWU/02/2000 dated 25 January 2000 approved the termination of KSO and will make a letter of debt recognition (promissory note). Based on memorandum No. AKT/M/OONIII/16, the balance of RNI receivables to PT Panca Wira Usaha on PBSTA Loka based on the reconciliation result amounted to Rp 2,841,789,509. The Company has reserved an allowance of KSO PBSTA Loka amounting to Rp 2,841,789,509.

8. Persediaan

8. Inventories

	2021	2020	
Barang jadi	725.497.945.037	1.407.561.900.007	Finished goods
Bahan pembantu	49.563.031.728	63.960.104.839	Sporting materials
Alat-alat/suku cadang	38.754.499.319	34.159.096.668	Tools/spare parts
Barang dalam proses	21.777.374.426	13.770.064.652	Goods in process
Bahan baku	15.453.839.007	3.875.800.308	Raw materials
Bahan pertanian	10.466.847.420	13.813.938.127	Agricultural materials
Bahan lain-lain	11.101.525.183	8.007.992.083	Other materials
Subjumlah persediaan	872.615.062.120	1.545.148.896.684	Sub total inventories
Cadangan penghapusan persediaan barang	(68.068.742.299)	(53.185.403.032)	Allowance for inventories obsolescence
Jumlah persediaan	804.546.319.821	1.491.963.493.652	Total inventories

Cadangan penghapusan persediaan barang untuk periode per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp 68.068.742.299 dan Rp 53.185.403.032 yang terutama merupakan cadangan penurunan nilai persediaan sehubungan dengan pencadangan persediaan barang rusak yang disisihkan pada periode berjalan.

Allowance for inventories obsolescence for the period of 31 December 2021 and 2020 amounting to Rp 68,068,742,299 and Rp 53,185,403,032 which mainly represents allowance for decline in value of inventories in connection with the provision for damaged goods which was set aside in the current period.

31 Desember 2021

31 December 2021

8. Persediaan (lanjutan)

8. Inventories (continued)

Rincian persediaan barang jadi, barang dalam proses,
bahan baku, dan bahan pembantu, sebagai berikut:

*Details of finished goods inventory, goods in-
process, raw materials and auxiliaries, are as
follows:*

	2021	2020	
Persediaan barang jadi			Finished goods
Obat-obatan dan alat kesehatan	513.546.520.847	541.089.077.706	<i>Medicines and healthy tools</i>
Barang dagangan	127.691.262.691	84.017.940.099	<i>Merchandises</i>
Gula	25.698.033.010	711.039.354.169	<i>Sugar</i>
Tetes	6.952.528.051	12.029.994.874	<i>Molasses</i>
Arak	6.940.394.878	5.721.126.420	<i>Arracks</i>
Kulit hewan dan barang-barang dari kulit	6.566.333.760	6.329.377.217	<i>Animal leather and leather goods</i>
Minyak kelapa sawit	2.658.509.401	6.917.664.480	<i>Palm oil</i>
Ampas	2.508.372.732	2.239.076.042	<i>Dregs</i>
Karung plastik	2.385.932.492	7.280.402.808	<i>Plastic bags</i>
Teh	1.701.184.314	6.936.078.137	<i>Tea</i>
Alkohol/spiritus	837.400.945	9.408.273.047	<i>Alcohol/spirituous</i>
Alat Suntik Sekali Pakai (ASSP)	517.661.316	308.399.600	<i>Disposable syringe (ASSP)</i>
Barang apotik	226.409.171	162.585.780	<i>Pharmacies</i>
<i>Hand sanitizer gel</i>	118.423.618	440.010.799	<i>Hand sanitizer gel</i>
Kondom	32.982.042	54.773.614	<i>Condoms</i>
Lain-lain	27.115.995.769	13.587.765.215	<i>Others</i>
Jumlah persediaan barang jadi	725.497.945.037	1.407.561.900.007	Total finished goods
Persediaan bahan pembantu			Auxiliary materials
Bahan-bahan kimia dan pabrikasi	32.246.775.922	41.059.814.803	<i>Chemical and processing materials</i>
Bahan produksi	8.896.082.537	8.791.971.073	<i>Production materials</i>
Bahan bakar/pelumas	4.037.763.711	3.739.916.939	<i>Fuel/lubricants</i>
Bahan pembungkus	1.828.092.047	7.967.886.551	<i>Packaging materials</i>
Bahan pembantu lainnya	2.554.317.511	2.400.515.473	<i>Other auxiliary materials</i>
Jumlah persediaan bahan pembantu	49.563.031.728	63.960.104.839	Total inventory of auxiliary materials
Persediaan barang dalam proses			Goods in process
Kulit hewan dan barang-barang dari kulit	8.383.997.120	8.007.947.627	<i>Animal leather and leather goods</i>
Karung plastik	6.296.754.093	4.052.829.653	<i>Plastic bags</i>
Alat suntik sekali pakai (ASSP)	3.525.441.066	576.717.372	<i>Disposable syringe (ASSP)</i>
<i>Oxygen Generator</i>	1.568.211.810	-	<i>Oxygen Generator</i>
Kondom	1.522.537.755	1.132.570.000	<i>Condoms</i>
Lain-lain	480.432.582	-	<i>Others</i>
Jumlah persediaan barang dalam proses	21.777.374.426	13.770.064.652	Total goods in process

31 Desember 2021

31 December 2021

8. Persediaan (lanjutan)

8. Inventories (continued)

Rincian persediaan barang jadi, barang dalam proses, bahan baku, dan bahan pembantu, sebagai berikut (lanjutan):

Details of finished goods inventory, goods in process, raw materials and auxiliaries, are as follows (continued):

	2021	2020	
Persediaan bahan baku			Raw materials
Bahan baku			<i>Raw materials of</i>
Alat suntik sekali pakai (ASSP)	6.780.058.424	-	<i>Disposable syringe (ASSP)</i>
Bahan baku plastik	5.908.917.136	766.057.672	<i>Raw plastic materials</i>
Bahan baku kondom	1.205.582.441	-	<i>Raw condoms materials</i>
Bahan baku tetes	1.033.147.206	-	<i>Raw molasses materials</i>
Bahan baku kulit	526.133.800	1.823.698.318	<i>Raw leather materials</i>
Bahan baku minyak kelapa sawit (TBS)	-	1.286.044.318	<i>Raw materials of palm oil (TBS)</i>
Jumlah persediaan bahan baku	15.453.839.007	3.875.800.308	Total raw materials inventory
Persediaan bahan lain-lain			Miscellaneous materials
Bahan-bangunan	607.410.162	286.893.073	<i>Building material</i>
Bahan tekstil dan pakaian dinas	403.390.956	267.086.629	<i>Textiles and official clothing materials</i>
Bahan-distribusi	-	59.585.000	<i>Distribution material</i>
Lain-lain	10.090.724.065	7.394.427.381	<i>Auxiliary materials</i>
Jumlah persediaan bahan pembantu	11.101.525.183	8.007.992.083	Total inventory of auxiliary materials

Persediaan barang jadi berupa gula per 31 Desember 2021 sebesar Rp 25.698.033.010 merupakan persediaan gula yang terdapat di PT PG Rajawali I, PT PG Rajawali II, dan PT PG Candi Baru. Persediaan tersebut telah diasuransikan terhadap semua resiko kerusakan atau kebakaran.

The supply of finished products in the form of sugar as of 31 December 2021 amounting to Rp 25,698,033,010 represent sugar inventories in PT PG Rajawali I, PT PG Rajawali II, and PT PG Candi Baru. The inventories are covered by insurance against any risk of damage or fire.

Persediaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 513.546.520.847 terdiri dari produk kesehatan, diagnostik laboratorium, dan barang dagangan produk kesehatan diseluruh cabang PT Rajawali Nusindo, Persediaan tersebut telah diasuransikan terhadap semua resiko kerusakan atau kebakaran.

The supply of medicines and medical equipment as of 31 December 2021 amounting to Rp 513,546,520,847 consists of healthcare product, diagnostic lab, and healthcare trading product in all branches of PT Rajawali Nusindo, The inventories are covered by insurance against any risk of damage or fire.

Persediaan barang dalam proses, bahan baku, alat-alat suku cadang, bahan pertanian dan bahan pembungkus telah diasuransikan dari kemungkinan adanya kerugian atau bencana alam kepada PT Asuransi Jasa Tani Tbk dan PT Asuransi Jasindo (Persero). Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah pertanggungjawaban tersebut cukup memadai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul.

Inventories of goods in process, raw materials, spare parts, agricultural materials and packaging materials are covered by insurance against possible losses or natural disasters to PT Asuransi Jasa Tani Tbk and PT Asuransi Jasindo (Persero). Management believes that the sum insured is sufficient to cover occurred possible losses.

31 Desember 2021

31 December 2021

8. Persediaan (lanjutan)

Persediaan barang dagangan merupakan persediaan yang terdapat pada PT Rajawali Nusindo dan PT GIEB Indonesia.

Persediaan bahan bangunan merupakan persediaan bahan bangunan untuk keperluan perkebunan dan pabrik-pabrik gula.

Persediaan bahan pertanian merupakan persediaan bahan pertanian keperluan perkebunan dan pabrik-pabrik gula.

Persediaan barang distribusi utamanya persediaan gula, tekstil, pakaian dinas, minyak tanah, teh, kopi, beras, dan garam serta persediaan obat-obatan untuk keperluan karyawan Perusahaan, disamping juga untuk memenuhi kebutuhan di luar Perusahaan.

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan persediaan cukup memadai untuk menutup kerugian karena penurunan nilai persediaan.

9. Beban panen satu tahun yang akan datang

Beban panen satu tahun yang akan datang merupakan biaya tanaman tebu dan biaya pemeliharaan mesin-mesin dalam rangka persiapan musim giling tebu panen tahun 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut:

	2021	2020	
Tanaman	68.843.328.541	75.348.054.648	<i>Plantation</i>
Pemeliharaan	7.166.172.937	7.794.308.818	<i>Maintenance</i>
Pengelolaan	3.428.991.044	41.274.000	<i>Management</i>
Pembuatan gula pasir	1.626.003.881	1.001.139.921	<i>Sugar production</i>
Tebang dan angkut	4.394.050	142.488.788	<i>Cutting and transport</i>
Eksplorasi alat pertanian	-	74.000	<i>Exploitation of agricultural equipment</i>
Lain-lain	70.540.023	41.274.000	<i>Others</i>
Jumlah beban panen satu tahun yang akan datang	81.139.430.476	84.327.340.175	<i>Total future one year's harvest expense</i>

8. Inventories (continued)

Merchandise inventories represent inventories in PT Rajawali Nusindo and PT GIEB Indonesia.

Building materials inventories represent supply of building materials for plantation and sugar factories.

The supply of agricultural materials represent the supply of agricultural materials for plantation and sugar factories.

Inventories of distribution goods are mainly sugar, textile, uniform, kerosene, tea, coffee, rice and salt supplies as well as medical supplies for the Company's employees, as well as to meet the needs outside of the Company.

Management believes that the allowance for inventories is sufficient to cover losses due to decline in value of inventories.

9. Future one year's harvest expense

The one year's harvest expense represents the cost of sugarcane crops and machine maintenance costs in preparation for the pressing season of sugarcane harvest in 2021 and 2020 with details as follows:

31 Desember 2021

31 December 2021

10. Aset biologis

Aset biologis terdiri atas produk agrikultur yang tumbuh pada tanaman produktif yang disajikan dalam akun "Aset Lancar - Aset Biologis" dalam laporan posisi keuangan. Mutasi aset biologis adalah sebagai berikut:

10. Biological assets

Biological assets consist of agricultural products that grow on productive plants which are presented in the account "Current Assets - Biological Assets" in the statement of financial position. Mutations of biological assets are as follows:

	2021	2020	
Nilai Wajar			Fair value
Saldo Awal	82.011.539.679	64.145.640.041	<i>Beginning balance</i>
Laba (rugi) bersih yang timbul dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual yang diakui pada laba rugi	28.374.700.000	17.865.899.638	<i>Gain (loss) arising from changes in fair value less costs to sell that are recognized in profit or loss</i>
Saldo akhir	110.386.239.679	82.011.539.679	Ending balance

Produk agrikultur yang tumbuh berupa tebu panen, tandan buah segar dan teh. Nilai wajar atas produk agrikultur ditentukan menggunakan pendekatan pasar berdasarkan harga pasar dari produk sebagaimana diterapkan pada estimasi volume produk.

Agricultural products that grow are sugarcane harvesting, fresh fruit bunches and tea. The fair value of agricultural products is determined using a market approach based on the market price of the product as applied to the estimated volume of the product.

11. Pendapatan yang akan diterima

	2021	2020	
Bonus jasa pemasaran	3.832.281.351	2.538.356.164	<i>Marketing bonus</i>
Sewa gedung	220.697.756	515.030.731	<i>Building lease</i>
Lain-lain	-	1.352.205	<i>Others</i>
Jumlah pendapatan yang akan diterima	4.052.979.107	3.054.739.100	Accrued income

11. Accrued income

31 Desember 2021

31 December 2021

12. Uang muka

12. Advances

	2021	2020	
Uang muka pembelian obat dan alat kesehatan	326.671.948.405	197.859.979.660	<i>Medicines and healthy tools purchasing advance</i>
Uang muka pemborong/leveransir	1.274.090.023	5.707.309.788	<i>Supplier advance</i>
Lain-lain	21.785.793.080	9.429.136.537	<i>Others</i>
Jumlah uang muka	349.731.831.508	212.996.425.985	<i>Total advances</i>

Uang muka pembelian obat dan alat kesehatan serta impor mesin-mesin merupakan pemberian uang muka kepada pemborong pemasok terkait pengadaan barang impor atau bahan baku obat impor oleh entitas anak PT Rajawali Nusindo.

Advance payment of medicines and healthy tools and machines import represents the advance payment to leveransir wholesaler related to the procurement of imported goods or raw materials of imported drugs by subsidiaries of PT Rajawali Nusindo.

Uang muka pemborong/leveransir merupakan pemberian uang muka kepada pemborong atau leveransir terkait pengadaan barang investasi/eksploitasi oleh entitas anak PT PG Rajawali II, PT Mitra Kerinci, PT Perkebunan Mitra Ogan dan PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring.

Advance payment of the supplier represents an advance payment to the contractor or supplier related to the procurement of investment goods/exploitation by the subsidiary of PT PG Rajawali II, PT Mitra Kerinci, PT Perkebunan Mitra Ogan and PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring.

13. Biaya dibayar dimuka

13. Prepaid expenses

	2021	2020	
Biaya sewa rumah, gedung dan tanah	29.333.712.235	25.958.240.518	<i>House, building, and land lease expenses</i>
Premi asuransi	3.342.268.189	2.471.523.901	<i>Insurance premium</i>
Biaya sewa kendaraan	2.622.066.028	2.471.832.234	<i>Rent vehicle expenses</i>
Biaya dibayar dimuka lainnya	14.916.218.734	6.158.369.336	<i>Other prepaid expense</i>
Jumlah biaya dibayar dimuka	50.214.265.186	37.059.965.989	<i>Total prepaid expenses</i>

Biaya dibayar dimuka sewa rumah, gedung dan tanah merupakan pembayaran dimuka atas sewa rumah, gedung dan tanah untuk keperluan operasional PT Mitra Kerinci, PT Rajawali Nusindo, PT Laras Astra Kartika dan PT GIEB Indonesia.

Prepaid expenses for lease of houses, buildings and land represent advance payments on the rent of houses, buildings and land for operations of PT Mitra Kerinci, PT Rajawali Nusindo, PT Laras Astra Kartika dan PT GIEB Indonesia.

31 Desember 2021

31 December 2021

14. Perpajakan

14. Taxations

a. Pajak dibayar dimuka

a. Prepaid taxes

Akun ini merupakan uang muka pajak yang dipungut oleh pihak ketiga dan pajak yang dibayar sendiri, serta kelebihan setor dari tahun lalu dengan rincian sebagai berikut:

This account represents tax advances imposed by third parties and taxes paid on their own, as well as the excess of payments from last year with details as follows:

	2021	2020	
Pajak Pertambahan Nilai	183.869.263.732	440.923.326.275	<i>Value Added Tax</i>
Pajak Penghasilan pasal 28 A	52.493.187.942	36.309.335.668	<i>Income tax art 28 A</i>
Pajak Penghasilan pasal 25	1.861.266.226	1.620.311.870	<i>Income tax art 25</i>
Pajak Penghasilan pasal 22	1.675.077.793	2.035.716.847	<i>Income tax art 22</i>
Pajak Penghasilan pasal 21	850.543.783	107.186	<i>Income tax art 21</i>
Pajak Penghasilan pasal 23	568.818.935	46.406.347	<i>Income tax art 23</i>
Pajak Penghasilan pasal 4 (2)	117.565.102	-	<i>Income tax art 4(2)</i>
Lain-lain	-	1.401.433.064	<i>Others</i>
Jumlah pajak dibayar dimuka	241.435.723.513	482.336.637.257	<i>Total prepaid taxes</i>

SKPKB PPN tahun 2018

Tax Assessment of Underpayment for VAT year 2018

Pada tahun 2020, Entitas menerima beberapa Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas Pajak Pertambahan Nilai tahun 2018 senilai total Rp 21.491.438.446 dan mencatat pembayarannya sebagai beban pajak pada laba rugi tahun berjalan.

On 2020, the Entity received several Tax Collection Letters and Tax Assessment Letter of Underpayment of Value Added Tax Year 2018 with the total amount of Rp 21,491,438,446 and recorded the payment as tax expense on the current year's profit or loss.

SKPLB PPN tahun 2019 dan 2020

Tax Assessment of Underpayment for VAT year 2019 and 2020

Pada tahun 2020, Entitas menerima beberapa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atas PPN Masa lebih bayar tahun 2019 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 127.552.003.996 dan Rp 269.110.624.268, Perusahaan telah menerima hasil restitusi tersebut sebesar Rp 258.889.423.541, selisih antara jumlah yang ditagihkan dengan yang diterima dicatat sebagai beban pajak dan dikompensasi dengan utang pajak tahun 2021.

On 2020, the Entity received several tax assessment letters overpayment of VAT overpayment period in 2019 and 2020 amounting to Rp 127,552,003,996 and Rp 269,110,624,268, respectively. The Company has received the refund amounting to Rp 258,889,423,541, the difference between the total Billed and received are recorded as tax expense and compensated with tax payable in 2021.

SKPLB PPN tahun 2021

Tax Assessment of Underpayment for VAT year 2021

Pada tahun 2021, Perusahaan telah menerima pengembalian pendahuluan atas kelebihan PPN masa Maret 2021 dan PPN masa Juni 2021 sebesar Rp 38.622.233.863.

On 2021, the Company has received a preliminary refund of the excess VAT for March 2021 and VAT for June 2021 amounting to Rp 38,622,233,863.

31 Desember 2021

31 December 2021

14. Perpajakan (lanjutan)

14. Taxations (continued)

a. Pajak dibayar dimuka (lanjutan)

a. Prepaid taxes (continued)

SKPLB PPh Badan tahun 2019

**Tax Assessment of Underpayment for Corporate
Income Tax year 2019**

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) No. 00024/406/19/051/21 tanggal 28 April 2021, Entitas memperoleh restitusi atas lebih bayar PPh Badan tahun 2019 sebesar Rp 977.500.706.

Based on the Tax Assessment Letter (SKPLB) No. 00024/406/19/051/21 dated 28 April 2021, the Entity received restitution for the overpayment of corporate income tax in 2019 amounting to Rp 977,500,706.

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	2021	2020	
Pajak Penghasilan pasal 23	63.742.012.566	64.240.643.429	<i>Income tax art 23</i>
Utang pajak yang belum disetor	24.120.900.290	21.127.612.807	<i>Unpaid tax payable</i>
Pajak Pertambahan Nilai	13.116.267.705	14.945.660.975	<i>Value Added Tax</i>
Pajak PBB	12.404.234.820	11.672.357.814	<i>Land & building tax</i>
Pajak Penghasilan pasal 29	9.136.320.728	4.327.534.600	<i>Income tax art 29</i>
Pajak Penghasilan pasal 22	7.629.272.556	1.577.677.810	<i>Income tax art 22</i>
Pajak Penghasilan pasal 21	5.503.594.069	5.725.628.289	<i>Income tax art 21</i>
Pajak Pertambahan Nilai (Kepres No. 56/1988)	3.736.001.026	7.987.840.312	<i>Value Added Tax (President decision No. 56/1988)</i>
Pajak Penghasilan pasal 25	692.708.970	2.019.451.766	<i>Income tax art 25</i>
Pajak Penghasilan pasal 4 (2)	458.483.515	477.011.941	<i>Income tax art 4(2)</i>
Jumlah utang pajak	140.539.796.245	134.101.419.743	<i>Total taxes payable</i>

SKPKB PPh 21 tahun 2018

**Tax Assessment of Underpayment for Income
Tax Art 21 year 2018**

Pada tahun 2020, Entitas menerima beberapa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2018 senilai total Rp 3.105.547.426 dan mencatatnya sebagai beban pajak pada laba rugi tahun berjalan.

On 2020, the Entity received several Tax Collection Letters and Tax Assesment Letter of Underpayment of Value Added Tax Year 2018 with the total amount of Rp 3,105,547,426 and recorded the payment as tax expense on the current year's profit or loss.

SKPKB tahun 2016

Tax Assessment of Underpayment for year 2016

Pada tanggal 12 November 2019, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk tahun pajak 2016 dari KPP No 00008/206/16/051/19 sebesar Rp 2.456.943.560. Atas SKPKB ini pada tanggal 17 Februari 2020, melalui surat No. 261/S.Pmh/RWII.02/II/2020 Perusahaan mengajukan keberatan wajib pajak ke KPP Wajib Pajak Besar Tiga sebesar Rp 2.254.062.106.

On 12 November 2019, the Company received an underpaid tax assessment letter (SKPKB) for the fiscal year 2016 from KPP No. 00008/206/16/051/19 for IDR 2,456,943,560. On this SKPKB in 17 February 2020, through letter No. 261/S.Pmh/RWII.02/II/2020 The company filed a taxpayer's objection to the KPP for Large Three Taxpayers in the amount of Rp 2,254,062,106.

31 Desember 2021

31 December 2021

14. Perpajakan (lanjutan)

b. Utang pajak (lanjutan)

SKPKB tahun 2016 (lanjutan)

Pada tanggal 12 Januari 2021 perusahaan menerima surat dari KPP dengan No. 00011/KEB/WPJ.19/2021 yang mengabulkan sebagian keberatan wajib pajak sebesar Rp 2.254.062.106, sehingga sisa kurang bayar pajak tahun 2016 sebesar Rp 202.881.454. Sampai dengan 31 Desember 2021 perusahaan belum membayar sisa kurang bayar tersebut.

SKPKB PPN tahun 2018 dan 2019

Pada tahun 2018 Perusahaan menerima STP atas PPN yang terbit pada tanggal 16 April 2018 dan jatuh tempo pada tanggal 15 Mei 2018 sebesar Rp 1.020.054.908 dengan nomor STP 00221/107/16/904/18 dan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai tahun 2019 sebesar Rp 6.967.785.404.

Kemudian pada bulan Agustus 2019, Perusahaan melakukan banding ke pengadilan atas keberatan SKPKB PPN tahun 2019, dan mendapatkan hasil putusan sidang tanggal 4 November 2021 terkait keberatan tersebut pengadilan menolak sebagian SKPKB PPN sebesar Rp 1.697.466.324, ditambah sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 7 tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan pasal 27 ayat 5d sebesar 60%. Berdasarkan UU No 7 2021 maka utang PPN menjadi Rp 2.715.946.118, serta STP atas PPN sebesar Rp 1.020.054.908.

SKPKB tahun 2019

Pada tahun 2019 Perusahaan menerima hasil keberatan atas SKPKB Pajak Penghasilan 21 sebesar Rp 1.405.088.409, dan SKPKB Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp 700.543.772.

14. Taxations (continued)

b. Taxes payable (continued)

**Tax Assessment of Underpayment for year 2016
(continued)**

On 12 January 2021 the company received a letter from KPP with No. 00011/KEB/WPJ.19/2021 which partially granted the taxpayer's objection amounting to Rp 2,254,062,106, so that the remaining tax underpayment in 2016 was Rp 202,881,454. As of 31 December 2021, the company has not paid the remaining underpayment.

**Tax Assessment of Underpayment for VAT year
2018 and 2019**

On 2018 the Company received tax bill for VAT issued on 16 April 2018 and due on 15 May 2018 amounting to Rp 1,020,054,908 with tax bill number 00221/107/16/904/18 and Tax Assessment of Underpayment for VAT for 2019 amounting to Rp 6,967,785,404.

Then in August 2019, the Company appealed to the court against the 2019 Tax Assessment of Underpayment for VAT objection, and received the result of the trial decision on 4 November 2021 regarding the objection, the court rejected a portion of the Tax Assessment of Underpayment for VAT amounting to Rp 1,697,466,324, plus administrative sanctions in the form of fines in accordance with the provisions of the Law. Law No. 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations article 27 paragraph 5d by 60%. Based on Law No. 7 2021, the VAT debt is Rp 2,715,946,118, and the STP for VAT is Rp 1,020,054,908.

Tax Assessment of Underpayment for year 2019

On 2019 the Company received the results of the objection to the Tax Assessment of Underpayment of Income Tax 21 amounting to Rp 1,405,088,409, and the Tax Assessment of Underpayment of Corporate Income Tax of Rp 700,543,772.

31 Desember 2021

31 December 2021

14. Perpajakan (lanjutan)

14. Taxations (continued)

b. Utang pajak (lanjutan)

b. Taxes payable (continued)

SKPKB tahun 2019 (lanjutan)

Tax Assessment of Underpayment for year 2019 (continued)

Kemudian pada bulan Agustus 2019, Perusahaan melakukan banding ke pengadilan atas keberatan SKPKB tahun 2019, dan mendapatkan hasil putusan sidang tanggal 4 November 2021 terkait keberatan tersebut pengadilan mengabulkan sebagian yaitu ditolak seluruhnya SKPKB PPh 21 sebesar Rp 1.405.088.409, dan ditolak seluruhnya SKPKB PPh badan sebesar Rp 700.543.772, ditambah sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 7 tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan pasal 27 ayat 5d sebesar 60%. Berdasarkan UU No 7 2021 maka PPh 21 Rp 2.248.141.454, dan PPh badan Rp 1.120.870.035.

Then in August 2019, the Company appealed to the court against the 2019 Tax Assessment of Underpayment objection, and received the results of the court's decision on 4 November 2021 regarding the objection, the court partially granted the rejection of the Tax Assessment of Underpayment of Income Tax 21 in the amount of Rp 1,405,088,409, and the Tax Assessment of Underpayment for Corporate Income Tax was rejected entirely, amounting to Rp 700,543,772, plus an administrative sanction in the form of a fine in accordance with the provisions of Law No. 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations article 27 paragraph 5d of 60%. Based on Law No. 7 2021, PPh 21 is Rp 2,248,141,454, and Corporate Income Tax is Rp 1,120,870,035.

c. Piutang pajak

c. Tax receivables

Piutang pajak terdiri dari:

Tax receivables consisted of:

	2021	2020	
Pajak penghasilan badan	28.649.708.949	15.982.715.704	Corporate income tax
PPH pasal 28A	3.795.411.029	1.570.161.518	Income tax art 28A
Pajak Pertambahan Nilai	1.045.356.038	850.061.529	Value Added Tax
PPH pasal 29	-	993.635.335	Income tax art 29
Jumlah	33.490.476.016	19.396.574.086	Total

d. Pajak kini

d. Current tax

Rekonsiliasi laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan menurut laporan laba (rugi) adalah sebagai berikut:

The reconciliation income before income tax of the Company according to the statements of income (loss) is as follows:

	2021	2020	
Laba (rugi) konsolidasi sebelum pajak penghasilan	82.938.987.407	88.303.816.938	Consolidated profit (loss) before income tax
Laba (rugi) entitas anak dan eliminasi	64.977.049.748	168.974.937.586	Subsidiaries profit (loss) and elimination
Laba (rugi) induk Perusahaan sebelum pajak penghasilan	147.916.037.155	257.278.754.524	Parent entity profit (loss) before income tax

31 Desember 2021

31 December 2021

14. Perpajakan (lanjutan)

14. Taxations (continued)

d. Pajak kini (lanjutan)

d. Current tax (continued)

	2021	2020	
Beda Temporer			Temporary differences
Jasa produksi karyawan	680.000.000	1.012.067.196	Production service of employee
Penyisihan piutang	193.910.167	1.805.860.739	Allowance for accounts receivable
Penyusutan aset tetap	(1.013.503.104)	(7.132.654.235)	Depreciation of fixed asset
Kewajiban imbalan paska kerja	(1.644.446.685)	2.854.223.777	Post employment benefits obligation
Jumlah beda temporer	(1.784.039.622)	(1.460.502.523)	Total temporary differences
Beda Tetap			Permanent differences
Tunjangan PPh/PPh ditanggung Perusahaan	8.188.452.343	5.683.134.974	Income tax borne by the Company
Beban PPh jasa giro	3.000.822.000	1.712.110.445	Income tax of current account
Beban sosial/CSR	1.724.828.542	3.402.372.461	Social/ CSR expenses
Jamuan dan representasi	1.066.880.139	474.302.155	Entertainment & representation
Olahraga dan hubungan industrial	789.687.202	474.750.891	Sports and industrial relations
Sumbangan, bingkisan dan cinderamata	311.462.846	292.660.900	Souvenir gifts and donations
Beban asuransi jabatan	304.738.446	-	Job insurance expense
Beban premi asuransi (JPKI DOL)	-	4.398.041.950	Insurance premium expenses (JPKI DOL)
Beban kerohanian	52.450.000	121.125.107	Spiritual expenses
Beban koordinasi keamanan	-	-	Security coordination expenses
Sewa gedung	(22.233.293.036)	(26.780.088.379)	Building lease
Bunga deposito dan jasa giro	(26.044.473.969)	(39.215.839.443)	Interest on deposits and checking services
Dividen entitas anak	(61.992.608.387)	(109.615.337.705)	Dividend of subsidiaries
Penjualan aset	(62.337.023.333)	-	Building lease
Lain-lain	1.479.757.475	1.661.470.312	Others
Jumlah beda tetap	(155.688.319.732)	(157.391.296.332)	Total permanent differences
Laba (rugi) fiskal Induk Perusahaan	(9.556.322.199)	98.426.955.000	Parent entity fiscal profit (loss)
Laba (rugi) kena pajak	(9.556.322.000)	98.426.955.000	Taxable profit (loss)
Pajak kini Induk Perusahaan	-	(21.717.712.720)	Current tax – Parent Entity
Pajak kini Entitas Anak	(39.610.983.284)	(33.987.684.582)	Current tax – Subsidiaries
Jumlah pajak kini	(39.610.983.284)	(55.705.397.302)	Total current tax

31 Desember 2021

31 December 2021

14. Perpajakan (lanjutan)

14. Taxations (continued)

e. Pajak tangguhan

e. Deferred tax

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara perhitungan aset dengan akuntansi yang meliputi akun-akun beban cadangan penghapusan (penurunan) persediaan, beban amortisasi serta pajak tangguhan atas kerugian aset yang dapat dikompensasikan. Rincian dari aset dan liabilitas pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

Deferred tax is calculated based on the effect of temporary differences between assets accounting and accounting calculations which include inventory losses, amortization expenses and deferred tax expense of the assets that can be utilized. The details of deferred tax assets and liabilities are as follows:

	2021	2020	
Induk Perusahaan	64.062.291.260	64.683.119.126	Holding Company
Entitas Anak	459.337.898.418	436.260.917.208	Subsidiaries
Aset pajak tangguhan	523.400.189.678	500.944.036.334	Deferred tax assets
Liabilitas pajak tangguhan	(59.870.073.470)	(54.407.551.867)	Deferred tax liabilities
Jumlah aset (liabilitas) pajak tangguhan	463.530.116.208	446.536.484.467	Total deferred tax assets
Rincian dari manfaat (beban) pajak tangguhan adalah sebagai berikut :			Detail of deferred tax assets (liabilities) are as follows:
Induk Perusahaan			Holding company
Aset (kewajiban) pajak tangguhan :			Deferred tax assets (liabilities):
Jasa produksi	(149.600.000)	(222.654.783)	Production service
Penyusutan aset tetap	222.970.683	1.569.183.932	Fixed assets depreciations
Penurunan nilai piutang	(361.778.271)	(397.289.363)	Impairment of accounts receivable
Provisi diestimasi imbalan kerja karyawan	(1.547.281.593)	627.929.231	Estimated provision of employee benefits
Rugi fiskal	(2.102.390.840)	-	Fiscal loss
Taksiran (beban) penghasilan pajak tangguhan	(3.938.080.021)	1.577.169.017	Estimated deferred income tax (expense)
Dikurangi :			Less :
Penyesuaian pajak tangguhan	(700.968.206)	(1.208.664.276)	Deferred tax adjustment
Jumlah manfaat (beban) pajak tangguhan tahun berjalan	(4.639.048.227)	368.504.741	Total deferred tax benefit (expenses) for current year
Aset pajak tangguhan awal tahun	71.313.648.857	66.298.512.649	Deferred tax assets at the beginning of the period
Manfaat pajak tangguhan tahun berjalan	(4.639.048.227)	368.504.741	Deferred tax benefit of current year
Pendapatan komprehensif lain	(2.625.462.907)	4.646.631.467	Other comprehensive income
Aset pajak tangguhan akhir tahun	64.049.137.723	71.313.648.857	Deferred tax assets at the end of period
Entitas anak:			Subsidiaries:
Manfaat pajak tangguhan	20.568.560.853	34.352.844.015	Deferred tax benefit
Beban pajak tangguhan	(13.304.049.719)	(21.679.801.380)	Deferred tax expense
Jumlah – neto Entitas Anak	7.264.511.134	12.673.042.635	Total – net subsidiaries
Manfaat (beban) pajak tangguhan Induk Perusahaan	(4.639.048.227)	(8.026.411.168)	Deferred tax income (expense) Parent company
Manfaat (beban) pajak tangguhan konsolidasian – bersih	2.625.462.907	4.646.631.467	Consolidated deferred tax benefit (expense) – net

31 Desember 2021

31 December 2021

14. Perpajakan (lanjutan)

e. Pajak tangguhan

Pada bulan Mei 2020, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang Undang No. 2 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* ("pandemi COVID-19") yang di antara lain, mengubah tarif pajak penghasilan badan dari 25% menjadi 22% untuk tahun fiskal 2020-2021 dan 20% untuk tahun fiskal 2022 dan seterusnya.

Pada tanggal 7 Oktober 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengesahkan Rancangan Undang Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang merevisi 6 peraturan perpajakan: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak, Pajak Karbon, dan Cukai. Undang-undang ini mengubah tarif pajak penghasilan badan dari 20% menjadi 22%. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tahun 2022.

14. Taxations (continued)

e. Deferred tax

In May 2020, the Government of Indonesia issued Law No. 2 of 2020 concerning state financial policies and financial system stability for handling the Corona Virus Disease pandemic ("COVID-19 pandemic") which, among other things, changes the corporate income tax rate from 25% to 22% for the 2020-2021 fiscal year and 20% for fiscal year 2022 and beyond.

On 7 October 2021, the Indonesian House of Representatives ratified the Bill on the Harmonization of Tax Regulations revising 6 tax regulations: General Provisions and Tax Procedures, Income Tax, Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods, Taxpayer Voluntary Disclosure Program, Carbon Tax, and Excise. This law changes the corporate income tax rate from 20% to 22%. This law will come into effect in 2022.

31 Desember 2021

31 December 2021

15. Investasi jangka panjang

15. Long term investment

	2021	2020	
Saham PT Madu Baru	36.604.666.932	36.979.623.916	<i>Shares of PT Madu Baru</i>
Saham PT Mitra BUMDes Nusantara	10.000.000.000	10.000.000.000	<i>Shares of PT Mitra BUMDes Nusantara</i>
Saham PT PP Sinergi Banjaratma	4.756.846.100	4.756.846.100	<i>Shares of PT PP Sinergi Banjaratma</i>
Saham PT Padi Energi Nusantara	4.000.000.000	4.000.000.000	<i>Shares of PT Padi Energi Nusantara</i>
Saham PT GIEB Indonesia pada perusahaan lain	47.590.800	47.530.800	<i>Shares of PT GIEB Indonesia in other companies</i>
Saham PT Rajawali Insurance Brokers – Nusindo	3.717.472	3.717.472	<i>Shares PT Rajawali Insurance Brokers - Nusindo</i>
Jumlah investasi jangka panjang	55.412.821.304	55.787.718.288	<i>Total long term investments</i>

Saham PT PG Madu Baru

Shares of PT PG Madu Baru

PT PG Madu Baru adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang industri gula yang berlokasi di Yogyakarta. Pada tahun 2004, pemerintah telah mengalihkan sahamnya di PT PG Madu Baru sebesar 35% atau senilai Rp 2.425.000.000 kepada Perusahaan sebagai tambahan penyertaan modal Negara melalui PP No. 3 tanggal 14 Januari 2004. Dengan demikian Perusahaan mempunyai investasi pada PT PG Madu Baru sebesar jumlah tersebut, namun tidak memiliki kendali langsung atas manajemen Perusahaan, sedangkan sisanya sebesar 65% dimiliki oleh Sri Sultan Hamengkubuwana X.

PT PG Madu Baru is a Company engaged in the sugar industry located in Yogyakarta. In 2004, the government transferred its stake in PT PG Madu Baru at 35% or amounting to Rp 2,425,000,000 to the Company in addition to state capital through PP No. 3 dated 14 January 2004. Therefore, the Company has investments in PT PG Madu Baru at that amount, but does not have direct control over the Company's management, while the remaining at 65% is owned by Sri Sultan Hamengkubuwana X.

Nilai penyertaan Perusahaan atas kepemilikan saham PT PG Madu Baru sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagaimana perhitungan sebagai berikut:

The Company's investment value of PT PG Madu Baru's share ownership up to 31 December 2021 is as follows:

Komponen	Nilai/ Value	% Kepemilikan/ % Ownership	Hak RNI/ RNI's rights	Components
Modal saham	10.000.000.000	35%	3.500.000.000	<i>Share capital</i>
Agio saham	4.081.670.000	35%	1.428.584.500	<i>Additional paid-in capital</i>
Cadangan umum	85.754.769.188	35%	30.014.169.216	<i>General reserve</i>
Selisih penilaian kembali aset tetap	448.255.504	35%	156.889.426	<i>Difference in fixed assets revaluation</i>
Laba tahun berjalan	4.300.067.974	35%	1.505.023.791	<i>Net profit of current year</i>
Nilai Penyertaan Saham	104.584.762.666		36.604.666.933	<i>The value of investments</i>

31 Desember 2021

31 December 2021

15. Investasi jangka panjang (lanjutan)

Saham PT Mitra Bumdes Nusantara

PT Mitra BUMDes Nusantara berkedudukan di Jakarta, merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, distribusi, dan transportasi sesuai akta notaris Otty H.C. Ubayani, S.H No. 41 tanggal 4 April 2017 kemudian perjanjian pemegang saham No. 100/S.Pj/RNI.01/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017 tentang pengelolaan PT Mitra BUMDes Nusantara yang diadendum dengan perjanjian No. 29/S.Pj/RNI.01/IX/2017 tanggal 18 September 2017.

Modal dasar Perusahaan sebesar Rp 200.000.000.000 dengan modal yang telah disetor sebesar Rp 100.000.000.000 dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp 1.000.000. Selanjutnya PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebagai pihak keempat memiliki saham sebesar Rp 10.000.000.000 atau 10% dari total saham yang disetor.

Saham PT PP Sinergi Banjaratma

PT Pembangunan Perumahan Sinergi Banjaratma (PT PP Sinergi Banjaratma) merupakan Perusahaan patungan dalam rangka pengembangan sebagian lahan eks PG Banjaratma seluas ± 100.000 m² untuk Area Operasional Jalan Tol (Rest Area). Berdasarkan Akta Notaris Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn No. 2 tanggal 7 Februari 2019 tentang Pendirian PT Pembangunan Perumahan Sinergi Banjaratma, bahwa modal dasar Perseroan berjumlah Rp 63.424.615.000 terbagi atas 634.246.150 lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 100,-. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 100%. Akta tersebut telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008361.AH.01.01.TAHUN 2019 pada tanggal 15 Februari 2019.

15. Long term investment (continued)

Shares of PT Mitra Bumdes Nusantara

PT Mitra BUMDes Nusantara domiciled in Jakarta, is a company engaged in trading, distribution, and transportation according to the notarial deed of Otty H.C. Ubayani, S.H No. 41 dated 4 April 2017 then shareholder agreement No. 100/S.Pj/RNI.01/VIII/2017 dated 2 August 2017 regarding the management of PT Mitra BUMDes Nusantara which was amended by agreement No. 29/S.Pj/RNI.01/IX/2017 dated 18 September 2017.

The authorized capital of the Company is Rp 200,000,000,000 with paid-up capital of Rp 100,000,000,000 with a par value per share of Rp 1,000,000. Furthermore, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) as the fourth party has shares of Rp 10,000,000,000 or 10% of the total paid-up shares.

Shares of PT PP Sinergi Banjaratma

PT Pembangunan Perumahan Sinergi Banjaratma (PT PP Sinergi Banjaratma) is a joint venture company in the context of developing a portion of the ex-PG Banjaratma land area of ± 100,000 m² for the Toll Road Operational Area (Rest Area). Based on the Notarial Deed of Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn No. 2 dated 7 February 2019 concerning the Establishment of PT Pembangunan Perumahan Sinergi Banjaratma, that the authorized capital of the Company is Rp 63,424,615,000 divided into 634,246,150 shares, each share has a nominal value of Rp 100,-. Of the Authorized Capital, 100% has been issued and fully paid. The deed has been ratified through the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-0008361.AH.01.01.TAHUN 2019 on 15 February 2019.

31 Desember 2021

31 December 2021

15. Investasi jangka panjang (lanjutan)

15. Long term investment (continued)

Saham PT Padi Energi Nusantara

Shares of PT Padi Energi Nusantara

PT Padi Energi Nusantara berkedudukan di Kota Jakarta Selatan merupakan Perusahaan yang melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ketahanan pangan dan energi pada umumnya, antara lain pendapatan petani dan khususnya di bidang perdagangan dan jasa. Modal dasar PT Padi Energi Nusantara adalah sebesar Rp 29.000.000.000 (dua puluh sembilan milyar rupiah) yang terbagi dalam 29.000 (dua puluh sembilan ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham adalah sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Dari modal tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 100% (seratus persen) atau sejumlah 29.000 (dua puluh sembilan ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 29.000.000.000 dari jumlah tersebut PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) mengambil bagian sebanyak Rp 4.000.000.000 atau sebesar 14,00%.

PT Padi Energi Nusantara based in South Jakarta municipality represents a Company that implement and support Government policies and programs in the field of food and energy security in general, among others the income of farmers and especially in the field of trade and services. The authorized capital of PT Padi Energi Nusantara amounting to Rp 29,000,000,000 (twenty nine billion rupiah) divided into 29,000 (twenty nine thousand) shares with par value of each share amounting to Rp 1,000,000 (one million rupiah). Of such capital has been issued and paid up at 100% (one hundred percent) or 29,000 (twenty nine thousand) shares with a nominal value of Rp 29,000,000,000 from the amount, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) taking part amounting to Rp 4,000,000,000 or at 14.00%.

16. Tanaman tahunan

16. Annual plantation

Akun ini merupakan aset tanaman tahunan yang ada di entitas anak PT Perkebunan Mitra Ogan, PT Mitra Kerinci dan PT Laras Astra Kartika per 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari:

This account represents annual crops assets in subsidiaries of PT Perkebunan Mitra Ogan, PT Mitra Kerinci and PT Laras Astra Kartika as of 31 December 2021 and 2020 consist of:

2021					
	1 Januari/ <i>January</i> 2021	Penambahan/ <i>Addition</i>	Pengurangan/ <i>Deduction</i>	31 Desember/ <i>December</i> 2021	
Harga perolehan					Acquisition cost
Tanaman menghasilkan	394.423.257.415	-	-	394.423.257.415	<i>Mature plantations</i>
Tanaman belum menghasilkan	622.258.167.370	62.753.281.153	-	685.011.448.523	<i>Immature plantations</i>
Pembibitan	21.417.452.264	-	-	21.417.452.264	<i>Nursery</i>
Sub jumlah	1.038.098.877.049	62.753.281.153	-	1.100.852.158.202	Subtotal
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Tanaman menghasilkan	115.781.933.151	15.166.258.177	-	130.948.191.328	<i>Mature plantations</i>
Sub jumlah	115.781.933.151	15.166.258.177	-	130.948.191.328	Subtotal
Cadangan penurunan nilai pembibitan	21.417.452.264	-	-	21.417.452.264	<i>Allowance for Impairment of Nurseries</i>
Nilai buku	900.899.491.634			948.486.514.610	Book value

31 Desember 2021

31 December 2021

16. Tanaman tahunan (lanjutan)

16. Annual plantation (continued)

Akun ini merupakan aset tanaman tahunan yang ada di entitas anak PT Perkebunan Mitra Ogan, PT Mitra Kerinci dan PT Laras Astra Kartika per 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari: (lanjutan)

This account represents annual crops assets in subsidiaries of PT Perkebunan Mitra Ogan, PT Mitra Kerinci and PT Laras Astra Kartika as of 31 December 2021 and 2020 consist of: (continued)

2020					
	1 Januari/ January 2020	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	31 Desember/ December 2020	
Harga perolehan					Acquisition cost
Tanaman menghasilkan	244.251.067.155	150.172.190.260	-	394.423.257.415	Mature plantations
Tanaman belum menghasilkan	721.485.978.255	50.944.379.375	150.172.190.260	622.258.167.370	Immature plantations
Pembibitan	21.417.452.264	-	-	21.417.452.264	Nursery
Sub jumlah	987.154.497.674	201.116.569.635	150.172.190.260	1.038.098.877.049	Subtotal
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Tanaman menghasilkan	101.608.015.894	14.173.917.257	-	115.781.933.151	Mature plantations
Sub jumlah	101.608.015.894	14.173.917.257	-	115.781.933.151	Subtotal
Cadangan penurunan nilai pembibitan	18.476.975.258	2.940.477.006	-	21.417.452.264	Allowance for Impairment of Nurseries
Nilai buku	867.069.506.522			900.899.491.634	Book value

Pada tahun 2020, penambahan jumlah tanaman tahunan sebesar Rp 150.172.190.260 merupakan penambahan biaya tanaman kelapa sawit yang ada di kebun pengembangan PT Perkebunan Mitra Ogan, penambahan tersebut termasuk kapitalisasi bunga pinjaman kredit investasi yang digunakan untuk pengembangan kebun inti maupun plasma kelapa sawit.

In 2020, the increase in the number of annual plants of Rp 150,172,190,260 is an additional cost of oil palm plantations in the PT Perkebunan Mitra Ogan development plantation, this addition includes the capitalization of investment credit loan interest used for the development of nucleus and plasma oil palm plantations.

Tanah beserta segala sesuatu yang ada di atas HGU atas nama PT Perkebunan Mitra Ogan yang berlokasi di Desa Lubuk Buah dan Tanjung Bali, Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan seluas 5.850 Ha dan Tanah beserta segala sesuatu yang ada di atas tanah Sertifikat Hak Milik atas nama masing-masing petani peserta Re Bun anggota koperasi Mitra Batanghari Leko yang berlokasi di Desa Lubuk Buah dan Tanjung Bali, Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dengan total seluas 3.150 Ha dijadikan agunan untuk memperoleh fasilitas kredit investasi dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero).

Land and everything that is above the HGU on behalf of PT Perkebunan Mitra Ogan which is located in Lubuk Buah and Tanjung Bali Villages, Batanghari Leko District, Musi Banyuasin Regency, South Sumatra covering an area of 5,850 Ha and Land and everything on the land Ownership Certificate on behalf of each farmer participating in Re Bun, a member of Mitra Batanghari Leko cooperative located in Lubuk Buah Village and Tanjung Bali, Batanghari Leko District, Musi Banyuasin Regency, South Sumatra with a total area of 3,150 hectares as collateral to obtain investment credit facilities from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero).

31 Desember 2021

31 December 2021

17. Aset tetap

17. Fixed assets

	2021					
	1 Januari/ <i>January 2021</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	31 Desember/ <i>December 2021</i>	
Harga perolehan						Acquisition cost
Kepemilikan langsung						Direct ownership
Persil dan bangunan	2.266.595.986.547	10.626.080.351	-	10.667.353.728	2.287.889.420.626	<i>Plots and buildings</i>
Pabrik dan mesin	2.594.539.723.400	97.967.365.194	-	151.529.416	2.692.658.618.010	<i>Plants and machines</i>
Kendaraan	118.273.558.492	604.760.000	2.606.471.923	642.341.720	116.914.188.289	<i>Vehicles</i>
Inventaris	175.496.254.533	5.690.183.904	-	109.909.091	181.296.347.528	<i>Furniture & fixtures</i>
Alat pertanian	129.453.136.999	110.631.947	-	-	129.563.768.946	<i>Farming tools</i>
Jalan dan jembatan	134.282.075.551	182.987.558	-	-	134.465.063.109	<i>Road and bridges</i>
Peternakan sapi	1.413.412.661	-	-	-	1.413.412.661	<i>Cattle farm</i>
Lain-lain	6.809.154.334	37.400.000	-	-	6.846.554.334	<i>Others</i>
Sub jumlah	5.426.863.302.517	115.219.408.954	2.606.471.923	11.571.133.955	5.551.047.373.503	Subtotal
Sewa pembiayaan						
Kendaraan	16.170.726.641	1.362.461.487	-	(642.341.720)	16.890.846.408	<i>Vehicles leased</i>
Aset dalam Penyelesaian	337.531.060.989	16.810.958.820	1.452.086.223	(281.738.538.858)	71.151.394.728	<i>Construction in progress</i>
Jumlah harga perolehan	5.780.565.090.147	133.392.829.261	4.058.558.146	(270.809.746.623)	5.639.089.614.639	Total acquisition cost
Akumulasi						Accumulated depreciation
Penyusutan						Direct ownership
Kepemilikan langsung						Direct ownership
Persil dan bangunan	190.871.941.000	22.342.964.091	1.620.496.481	(77.713.835)	211.516.694.775	<i>Plots and buildings</i>
Pabrik dan mesin	1.639.574.048.763	94.459.751.986	-	(170.369.877)	1.733.863.430.872	<i>Plants and machines</i>
Kendaraan	108.706.933.391	2.314.609.188	2.731.670.067	587.050.866	108.876.923.378	<i>Vehicles</i>
Inventaris	144.602.390.873	8.338.966.977	296.013.103	(101.895)	152.645.242.852	<i>Furniture & fixtures</i>
Alat pertanian	114.001.720.030	682.234.872	355.482.621	-	114.328.472.281	<i>Furniture & fixtures</i>
Jalan dan jembatan	76.983.874.219	4.781.727.991	-	-	81.765.602.210	<i>Road and bridges</i>
Peternakan sapi	1.413.412.661	-	-	-	1.413.412.661	<i>Cattle farm</i>
Lain-lain	5.905.314.976	-	282.871.890	-	5.622.443.086	<i>Others</i>
Sub jumlah	2.282.059.635.913	132.920.255.105	5.286.534.162	338.865.259	2.410.032.222.115	Subtotal
Sewa pembiayaan						
kendaraan	7.593.479.465	3.323.944.364	-	(642.341.720)	10.275.082.109	<i>Vehicles leased</i>
Jumlah akumulasi Penyusutan	2.289.653.115.378	136.244.199.469	5.286.534.162	(303.476.461)	2.420.307.304.224	Total accumulated depreciation
Cadangan penurunan nilai aset dalam pelaksanaan	10.852.051.314	-	-	-	10.852.051.314	<i>Allowance for impairment of asset in progress</i>
Nilai buku	3.480.059.923.455				3.207.930.259.101	Book value

31 Desember 2021

31 December 2021

17. Aset tetap (lanjutan)

17. Fixed assets (continued)

	2020					
	1 Januari/ January 2020	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember/ December 2020	
Harga perolehan						Acquisition cost
Kepemilikan langsung						Direct ownership
Persil dan bangunan	2.910.928.326.833	50.966.656.838	3.772.000	(695.295.225.124)	2.266.595.986.547	Plots and buildings
Pabrik dan mesin	2.564.675.348.494	170.404.322.088	4.002.213.267	(136.537.733.915)	2.594.539.723.400	Plants and machines
Kendaraan	122.855.644.528	5.079.198.519	5.356.583.512	(4.304.701.043)	118.273.558.492	Vehicles
Inventaris	160.645.271.886	16.012.214.682	3.217.805	(1.158.014.230)	175.496.254.533	Furniture & fixtures
Alat pertanian	128.522.615.130	12.773.220.429	-	(11.842.698.560)	129.453.136.999	Farming tools
Jalan dan jembatan	136.540.937.035	-	-	(2.258.861.484)	134.282.075.551	Road and bridges
Peternakan sapi	1.413.412.661	-	-	-	1.413.412.661	Cattle farm
Lain-lain	8.985.396.710	1.426.982.130	-	(3.603.224.506)	6.809.154.334	Others
Sub jumlah	6.034.566.953.277	256.662.594.686	9.365.786.584	(855.000.458.862)	5.426.863.302.517	Subtotal
Sewa pembiayaan						
Kendaraan	15.685.073.436	989.400.000	-	(503.746.795)	16.170.726.641	Vehicles leased
Aset dalam penyelesaian	401.666.420.180	13.558.131.695	443.404.610	(77.250.086.276)	337.531.060.989	Construction in progress
Jumlah harga perolehan	6.451.918.446.893	271.210.126.381	9.809.191.194	(932.754.291.933)	5.780.565.090.147	Total acquisition cost
Akumulasi Penyusutan						Accumulated depreciation
Kepemilikan langsung						Direct ownership
Persil dan bangunan	194.503.175.293	24.312.275.497	38.578.289	(27.904.931.501)	190.871.941.000	Plots and buildings
Pabrik dan mesin	1.586.149.254.062	128.107.985.036	1.310.776.310	(73.372.414.025)	1.639.574.048.763	Plants and machines
Kendaraan	110.541.323.906	3.283.749.439	5.316.395.004	198.255.050	108.706.933.391	Vehicles
Inventaris	137.638.454.462	9.143.219.387	2.896.023	(2.176.386.953)	144.602.390.873	Furniture & fixtures
Alat pertanian	110.417.977.902	5.867.930.933	-	(2.284.188.805)	114.001.720.030	Farming tools
Jalan dan jembatan	73.519.340.581	5.236.094.932	-	(1.771.561.294)	76.983.874.219	Road and bridges
Peternakan sapi	1.413.412.661	-	-	-	1.413.412.661	Cattle farm
Lain-lain	7.835.864.430	1.152.422.490	-	(3.082.971.944)	5.905.314.976	Others
Sub jumlah	2.222.018.803.297	177.103.677.714	(6.668.645.626)	(110.394.199.472)	2.282.059.635.913	Subtotal
Sewa pembiayaan kendaraan	5.439.218.642	2.658.007.623	-	(503.746.800)	7.593.479.465	Vehicles leased
Jumlah akumulasi Penyusutan	2.227.458.021.939	179.761.685.337	(6.668.645.626)	(110.897.946.272)	2.289.653.115.378	Total accumulated depreciation
Cadangan penurunan nilai aset dalam pelaksanaan	10.852.051.314	-	-	-	10.852.051.314	Allowance for impairment of asset in progress
Nilai buku	4.213.608.373.640				3.480.059.923.455	Book value

Aset Perusahaan berupa bangunan kantor, pabrik, mesin dan instalasi, kendaraan dan lain-lain tahun 2021 dan 2020 telah diasuransikan dari risiko kebakaran/ kerusakan dan gempa bumi dengan nilai pertanggungan yang cukup. Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah nilai pertanggungan tersebut di atas cukup memadai untuk menutupi kemungkinan terjadinya kerugian karena risiko kebakaran, gempa bumi dan sebagainya.

Company's assets in the form of office buildings, factories, machineries and installations, vehicles and others in 2021 and 2020 are covered by insurance against risks of fire/ damage and earthquakes with sufficient coverage. Management believes that the above sum insured is sufficient to cover possible losses due to fire, earthquake and other risks.

31 Desember 2021

31 December 2021

17. Aset tetap (lanjutan)

17. Fixed assets (continued)

Rincian aset dalam penyelesaian per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The details of the underlying assets as of 31 December 2021 and 2020 are as follows:

	2021	2020	
Tanah dan bangunan	38.954.568.893	297.228.693.794	<i>Land and building</i>
Bangunan pabrik, mesin, dan instalasi	28.131.825.217	24.635.147.763	<i>Factory, machine, and instalation</i>
Perabot dan sarana IT	4.065.000.618	14.524.244.539	<i>Furniture and IT equipments</i>
Penyisipan	-	1.142.974.893	<i>Insertion</i>
Jumlah aset dalam penyelesaian	71.151.394.728	337.531.060.989	<i>Total construction in progress</i>

Aset dalam penyelesaian tahun 2021 dan 2020 terutama sebagian besar berasal dari:

Construction in progress in 2021 and 2020 primarily come mainly from:

- Aset tetap dalam pelaksanaan pabrik dan perluasan merupakan investasi mesin pabrik pada PT Perkebunan Mitra Ogan, PT Mitra Kerinci, serta PT PG Rajawali I.
 - Di PT Mitra Kerinci aset dalam penyelesaian merupakan pekerjaan dalam pelaksanaan yang dibayarkan untuk biaya perijinan, pengurusan *feasibility study*, biaya infrastruktur dan jasa proyek.
 - Pada tahun 2021, pengurangan aset dalam penyelesaian sebesar Rp 268.617.465.875 adalah pembayaran uang muka penggantian lahan PTPN VIII yang di reclass ke piutang lain-lain.
 - Seiring dengan adanya undang-undang cipta kerja No.11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan peraturan pelaksanaannya yaitu PP 23 tahun 2021, PP 24 tahun 2021 serta Permen LHK No. 7 tahun 2021 maka penggunaan areal Kawasan hutan tidak lagi menggunakan skema Tukar-Menukar Kawasan Hutan (TMKH), tetapi bisa dengan opsi skema permohonan pelepasan Kawasan hutan melalui pembayaran kepada negara (KLHK) baik dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) maupun tanpa PNBP.
 - Penambahan aset tetap pada tahun 2021 adalah penggantian sparepart mesin pabrik serta perbaikan prasarana.
 - Pengurangan akumulasi penyusutan alat-alat pertanian dan benda lain merupakan dampak dari penyesuaian nilai residu dari 10% ditahun 2020 menjadi 12% ditahun 2021.
- *Fixed assets in plant implementation and expansion are investment in factory machinery at PT Perkebunan Mitra Ogan, PT Mitra Kerinci, and PT PG Rajawali I.*
 - *In PT Mitra Kerinci, assets under construction are work in progress paid for licensing fees, processing of feasibility studies, infrastructure costs and project services.*
 - *In 2021, the reduction of construction in progress of Rp 268,617,465,875 is an advance payment for the replacement of PTPN VIII's land which was reclassified to other receivables.*
 - *Along with the job creation act No. 11 of 2020 regarding job creation and its implementing regulations, namely PP 23 of 2021, PP 24 of 2021 and Minister of Environment and Forestry Regulation No. 7 of 2021, the use of forest area areas will no longer use the forest area swap scheme (TMKH), but can use the option of a request for forest area release scheme through payments to the state (KLHK) both with non-tax state revenues (PNBP) or without PNBP.*
 - *The addition of fixed assets in 2021 is the replacement of factory machine spare parts and infrastructure improvements.*
 - *The reduction in accumulated depreciation of agricultural tools and other objects is the impact of adjusting the residual value from 10% in 2020 to 12% in 2021.*

31 Desember 2021

31 December 2021

17. Aset tetap (lanjutan)

Aset dalam penyelesaian tahun 2021 dan 2020 terutama sebagian besar berasal dari: (lanjutan)

- Di PT Perkebunan Mitra Ogan terdapat saldo pembebasan tanah sebesar Rp 12.619.363.566 merupakan biaya pembebasan tanah dan pengurusan tanah di kebun pengembangan Muba 2. Dengan saldo pengurusan SHGU sebesar Rp 11.741.807.826 merupakan biaya pengurusan SHGU untuk areal pengganti di kebun PIN Peninjauan. Saldo pabrik dan perlengkapan mesin sebesar Rp 11.468.211.909 merupakan biaya pembangunan PKS-3 yang telah dilakukan penurunan nilai sebesar Rp 10.852.051.314.
- Aset tetap dalam pelaksanaan perabot dan sarana IT merupakan investasi di RNI holding dan PT Rajawali Nusindo.

Pada tahun 2020, aset mesin dari unit PG Jatitujuh yang berasal dari aset titipan sebesar Rp 46.521.000.000 di reklasifikasi ke aset tetap tidak produktif disebabkan oleh aset tersebut tidak dipergunakan lagi sebagai mesin produksi.

Tanah Hak Guna PT PG Rajawali II

Dalam rangka memenuhi kebutuhan gula nasional, pada tahun 1976 Departemen Pertanian yang pada waktu itu masih membawahi bidang kehutanan, mengeluarkan areal kawasan hutan di wilayah Jatitujuh dan sekitarnya seluas 12.022,5 Ha (Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 481/Kpts/Um/8/1976 tanggal 9 Agustus 1976) yang kemudian ditambah lagi seluas 8.156,30 Ha (Surat Keputusan Menteri No. 107/Kpts/Um/2/1983 tanggal 18 Februari 1983) untuk dicadangkan sebagai lahan tanaman tebu dalam rangka membangun Pabrik Gula milik PTPN XIV (Persero). Selanjutnya atas lahan seluas 12.022,5 Ha tersebut telah terbit Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama PTPN XIV (Persero).

Dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian tersebut, mensyaratkan liabilitas yang harus dipenuhi oleh PTPN XIV (Persero) sebagai berikut :

- a. Mengganti areal hutan secara bertahap selama 10 tahun.
- b. Membayar ganti rugi tanaman.
- c. Membayar biaya pengukuran batas.

17. Fixed assets (continued)

Construction in progress in 2021 and 2020 primarily come mainly from: (continued)

- *At PT Perkebunan Mitra Ogan there is a balance of land acquisition of Rp 12,619,363,566 which is the cost of land acquisition and land management in the Muba 2 development plantation. The balance of Cultivation Right Certificate amounting to Rp 11,741,807,826 represents the cost of developing Cultivation Right Certificate in review garden PIN. PKS-3 which has been impaired by Rp 10,852,051,314. The balance of plant and machinery equipment amounting to Rp 11,468,211,909 represents the cost of developing PKS-3 which has been impaired by Rp 10,852,051,314.*
- *Fixed assets in the implementation of furniture and IT facilities represent investments in RNI holding and PT Rajawali Nusindo.*

In 2020, machine assets from the PG Jatitujuh unit originating from entrusted assets amounting to Rp 46,521,000,000 were reclassified to non-productive fixed assets because these assets were no longer used as production machines.

Rights on land of PT PG Rajawali II

In order to fulfill the national sugar requirement, in 1976 the Department of Agriculture, which at that time was still in charge of forestry, issued forest area in Jatitujuh and surrounding in the area of 12,022.5 Ha (Minister of Agriculture Decree No.481/Kpts/Um/8/ 1976 dated 9 August 1976), which was further supplemented with an area of 8,156.30 Ha (Ministerial Decree No. 107/Kpts/Um/2/1983 dated 18 February 1983) to be reserved as sugarcane field in order to build Sugar Factory owned by PTPN XIV (Persero). Furthermore, on land in area of 12,022.5 Ha has been issued Leasehold on behalf of PTPN XIV (Persero).

The Decree of the Minister of Agriculture required liability which must be fulfilled by PTPN XIV (Persero) as follows:

- a. Replacing forest area gradually over 10 years.*
- b. Pay for plant compensation.*
- c. Pay a borderline measurement fee*

31 Desember 2021

31 December 2021

17. Aset tetap (lanjutan)

Tanah Hak Guna PT PG Rajawali II (lanjutan)

Berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 129/Kpts/Ekku/2/1978 tanggal 28 Februari 1978, ditetapkan besarnya ganti rugi atas tanaman dan aset yang berada di atas lahan sebesar Rp 397.500.000 sesuai dengan persyaratan dalam SK Menteri Pertanian tersebut. PTPN XIV (Persero) telah melaksanakan liabilitas sebagai berikut:

- a. Upaya Penggantian Lahan.
PTPN XIV (Persero) mengajukan lahan penggantian seluas 7.000 Ha, akan tetapi hanya 4.000 Ha yang dianggap memenuhi syarat oleh Departemen Pertanian, sehingga akhirnya belum sempat diserahkan.
- b. Membayar ganti rugi tanaman dan aset lainnya yang berada di atas lahan sebesar Rp 397.500.000 sesuai dengan SK Menteri Pertanian tersebut.

Pada tahun 1984, Perum Perhutani meminta kepada PTPN XIV (Persero) untuk segera menyelesaikan areal pengganti dan membayar ganti rugi sebesar Rp 24.000.000.000 (Surat No.044.2/III tanggal 29 November 1984). Dalam perkembangan selanjutnya, mulai tahun 1989 manajemen PTPN XIV diserahkan kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia, yang kemudian pada tahun 1993 kepemilikan sahamnya oleh Pemerintah dialihkan kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), sehingga sejak saat itu PTPN XIV (Persero) menjadi entitas anak PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan namanya diubah menjadi PT PG Rajawali II.

Departemen Kehutanan (yang sudah terpisah dengan Departemen Pertanian) dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 343/Kpts/1989 tanggal 7 Juli 1989 membatalkan pencadangan lahan seluas 8.156,30 Ha, atas lahan yang telah dicadangkan itu diantaranya telah ditanami tebu seluas 1.402,50 Ha.

17. Fixed assets (continued)

Rights on land of PT PG Rajawali II (continued)

Based on the Decree of the Minister of Agriculture No. 129/Kpts/Ekku/2/1978 dated 28 February 1978, stipulated the amount of compensation for plants and assets located on land amounting to Rp 397,500,000 in accordance with the requirements of the Minister of Agriculture Decree. PTPN XIV (Persero) has performed the following liabilities:

- a. Land Replacement Efforts.
PTPN XIV (Persero) proposed a replacement land of 7,000 Ha, but only 4,000 Ha were deemed eligible by the Ministry of Agriculture, and so had not yet been delivered.
- b. Pay compensation for crops and other assets located on the land amounting to Rp 397,500,000 in accordance with the Minister of Agriculture's decree.

In 1984, Perum Perhutani requested PTPN XIV (Persero) to immediately complete the replacement area and pay compensation amounting to Rp 24,000,000,000 (Letter No.044.2/III dated 29 November 1984). In further events, starting in 1989 the management of PTPN XIV was handed over to PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), which later in 1993 its share ownership by the Government was transferred to PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), so that PTPN XIV (Persero) became a subsidiary of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and its name was changed to PT PG Rajawali II.

Ministry of Forestry (which has been separated from the Ministry of Agriculture) by Decree of the Minister of Forestry No. 343/Kpts/1989 dated 7 July 1989 cancelled land reserves covering an area of 8,156.30 Ha, on the reserved land, which has been planted with sugarcane in area of 1,402.50 Ha.

31 Desember 2021

31 December 2021

17. Aset tetap (lanjutan)

Tanah Hak Guna PT PG Rajawali II (lanjutan)

Menteri Kehutanan dengan suratnya No.666/Menhut-II/1998 yang ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Ekonomi yang meminta lahan penggantian dan pembayaran ganti rugi. Menteri Keuangan dalam Suratnya No.S-1204/MK.013/1989 tanggal 28 November 1989 yang ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Ekonomi menyampaikan pendapatnya bahwa:

- a. Tanah di kawasan hutan seluas 13.425 Ha (12.022,5 dan 1.402,5 Ha) dihibahkan atau dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada PTPN XIV (Persero).
- b. PTPN (Persero) tidak perlu membayar ganti rugi yang diusulkan Perum Perhutani sebesar Rp 24.000.000.000 karena PTPN (Persero) sudah membayar ganti rugi tanaman dan biaya pengukuran.

Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dengan surat No.S-213/M.EKUIIN/1989 tanggal 18 Desember 1989 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan memberikan persetujuan kepada Menteri Keuangan tersebut.

Menteri Keuangan dengan Surat No.S-213/MK.013/1990 tanggal 2 Maret 1990 yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan menyampaikan persetujuan dari Menteri Koordinator Bidang Ekonomi yang isinya sebagai berikut:

- a. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi menyetujui pengibahan lahan seluas 13.425 Ha kepada PTPN XIV (Persero).
- b. Tagihan sebesar Rp 24.000.000.000 tidak dapat dipenuhi karena telah dilunasi berdasarkan dengan SK Menteri Pertanian No.129/Kpts/Ekku/2/1978.
- c. Hibah tersebut sebagai tambahan penyertaan modal Pemerintah dalam PTPN XIV (Persero).
- d. Lahan seluas 1.091 Ha (Semula 1.402,50 Ha dan sudah diserahkan seluas ± 300 Ha) agar tetap ditanami tebu.

17. Fixed assets (continued)

Rights on land of PT PG Rajawali II (continued)

Minister of Forestry in his letter No. 666/Menhut-II/1998 addressed to the Coordinating Minister for Economic Affairs who requested replacement land and compensation payments. Minister of Finance in his Letter No.S-1204/MK.013/1989 dated 28 November 1989 addressed to Coordinating Minister of Economy expressed his opinion that:

- a. Land in forest area of 13,425 Ha (12,022.5 and 1,402.5 Ha) was granted or inserted as Government Equity Participation (PMP) to PTPN XIV (Persero).
- b. PTPN (Persero) does not have to pay the compensation proposed by Perum Perhutani amounting to Rp 24,000,000,000 because PTPN (Persero) has paid plant compensation and cost of measurement.

Coordinating Minister for Economic Affairs with letter No.S-213/M.EKUIIN/1989 dated 18 December 1989 addressed to the Minister of Finance has approved to the Minister of Finance.

Minister of Finance with Letter No.S-213/MK.013/1990 dated 2 March 1990 addressed to the Minister of Forestry conveyed approval from the Coordinating Minister for Economy, which is as follows:

- a. Coordinating Minister of Economic Affairs approved the grant of 13,425 hectares of land to PTPN XIV (Persero).
- b. The claim amounting to Rp 24,000,000,000 cannot be fulfilled because it has been paid based on the Minister of Agriculture Decree No.129/Kpts/Ekku/2/1978.
- c. The grant was in addition to the Government's investment in PTPN XIV (Persero).
- d. Land area of 1,091 Ha (originally 1,402.50 Ha and already handed over an area of ± 300 Ha) to remain planted with sugarcane.

31 Desember 2021

31 December 2021

17. Aset tetap (lanjutan)

Proses Perpanjangan HGU (lanjutan)

Proses Perpanjangan HGU

- a. Sertifikat tanah:
- Seluas 5.729,08 Ha dengan status kepemilikan Hak Guna Usaha dengan sertifikat HGU No.1 Desa Sumber, Jatiraga, Pilangsari, Penyingkiran, Pasiripis, Iyawak, dan Bantarjati tertanggal 26 Juli 1979.
 - Seluas 6.328,15 dengan status kepemilikan Hak Guna Usaha dengan Sertifikat HGU No.1 Kerticala dan Rajasinga tertanggal 27 Juli 1979.
 - Seluas ± 1.091 Ha dengan status kepemilikan Kerjasama Operasi dengan Perum Perhutani.

Sertifikat HGU habis masa berlakunya pada tahun 2004.

- b. Proses pembaruan sertifikat tidak dapat berjalan dengan lancar karena adanya hambatan dari pihak Departemen Kehutanan, namun mendapat dukungan dari BPN, Pemerintah Daerah Jawa Barat dan DPR-RI.
- c. Lahan tersebut terdiri dari areal untuk tanaman tebu seluas ± 8.309 Ha dan sisanya untuk prasarana jalan dan sarana lainnya, termasuk aliran sungai dan tanah marginal lain (lereng dan bukit) yang tidak bisa ditanami tebu.
- d. Tanah atau lahan yang tidak dapat ditanami tebu (pinggiran sungai dan lereng/bukit) telah dibudidayakan dengan menghutankan kembali dengan tanaman keras dan buah mangga. Penghutanan ini sudah sesuai dengan maksud dari Perum Perhutani untuk menjaga kelestarian alam sebagaimana yang selama ini dibahas secara bersama-sama. Disamping penanaman tebu, tanaman keras dan tanaman buah, di atas sebagian lahan tersebut telah pula dikembangkan tanaman agro *medicine* (tanaman bahan baku obat herbal) yang pada saat ini dan kedepannya mempunyai prospek sangat baik.

17. Fixed assets (continued)

Rights on Business Rights extention process (continued)

Rights on Business Rights extention process

- a. Land certificates:
- An area of 5,729.08 Ha with ownership status of Business Rights with HGU Certificate No. 1 Sumber Village, Jatiraga, Pilangsari, Penyingkiran, Pasiripis, Iyawak and Bantarjati dated 26 July 1979.
 - An area of 6,328.15 with ownership status of Business Rights with HGU Certificate No.1 Kerticala and Rajasinga dated 27 July 1979.
 - An area of ± 1,091 Ha with ownership status of Joint Operation with Perum Perhutani.

The HGU certificate expired in 2004.

- b. The certificate renewal process cannot run smoothly due to obstacles from the Department of Forestry, but has received support from National Land Agency, West Java Regional Government and Parliament of the Republic of Indonesia.
- c. The land consists of area for sugarcane in the area of ± 8,309 Ha and the rest for road infrastructure and other facilities, including river and other marginal land (slope and hill) that cannot be planted with sugarcane.
- d. Land that can not be planted with sugarcane (riverbanks and slopes/hills) has been cultivated with reforestation with hard plants and mango. This forestry is in accordance with the intent of Perum Perhutani to preserve nature as it has been discussed together. Besides the planting of sugarcane, hard plants and fruit crops, on the land has also been developed with agro-medicine plant (plant raw material of herbal medicine), which at the moment and the future has a very good prospect.

31 Desember 2021

31 December 2021

17. Aset tetap (lanjutan)

Proses Perpanjangan HGU (lanjutan)

- e. Berkaitan dengan proses pembaharuan sertifikat HGU yang sedang berjalan pada saat itu, Menteri Kehutanan dengan surat No.S-205/Menhut-11/2004 tertanggal 18 Juni 2004, meminta kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar mencabut dan tidak memperpanjang sertifikat HGU dan menyerahkan kepada Departemen Kehutanan untuk dikembalikan menjadi kawasan hutan.
- f. Pemerintah Daerah Jawa Barat dan Masyarakat sangat mendukung keberadaan lahan PG Jatitujuh yang telah nyata-nyata memberikan manfaat kepada daerah dan masyarakat sekitar, sehingga sangat keberatan apabila lahan tersebut tersebut ditarik kembali oleh pihak Kehutanan.
- g. Kunjungan kerja Komisi V DPR RI tanggal 10-11 Juli 2004.

Pada tanggal 10-11 Juli 2004, Anggota Komisi V DPR yang dipimpin oleh Dr. HM Azwir Dainy Tara, MBA dengan 10 anggota dan 2 orang staf sekretariat Komisi V DPR RI melihat secara langsung kinerja PG Jatitujuh yang mengelola lahan HGU seluas kurang lebih 12.000 Ha dan lahan Kerja Sama Operasional (KSO) seluas 1.091 Ha Setelah mendengar paparan dari Direksi PT PG Rajawali II dan *General Manager* PG Jatitujuh dilanjutkan dengan diskusi yang dihadiri juga oleh Kepala Dinas Perkebunan Jawa Barat, Wakil Petani sekitar PG, pengurus DPP Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTRI) Jawa Barat, staf PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).

Dari hasil diskusi seluruh anggota Komisi V dan peserta diskusi sependapat agar areal HGU maupun KSO tetap dikelola seperti semula demi terjaminnya kelangsungan produksi gula oleh PG Jatitujuh. PG Jatitujuh diharapkan tetap membangun kemitraan dengan petani dan masyarakat sekitar dengan prinsip saling menguntungkan.

17. Fixed assets (continued)

**Rights on Business Rights extention process
(continued)**

- e. *In relation to the process of renewal of the current HGU certificate, the Minister of Forestry by letter No.S-205/Menhut-11/2004 dated 18 June 2004, requested the National Land Agency (BPN) to revoke and not renew the HGU certificate and submit to the Department of Forestry to be returned to forest areas.*
- f. *Local Government of West Java and Community strongly supports the existence of PG Jatitujuh land which has obviously provide benefits to the region and the surrounding community, so they have objection if the land is returned to the Forestry department.*
- g. *Working visit of House of Representatives Commission V on 10-11 July 2004.*

On 10-11 July 2004, a member of Commission V of the House of Representatives led by DR. HM Azwir Dainy Tara, MBA with 10 members and 2 staffs of the secretariat of Commission V DPR RI saw directly the performance of PG Jatitujuh which manages HGU area of approximately 12,000 Ha and Land Cooperation Operations (KSO) of 1,091 Ha. After hearing the exposure from the Board of Directors of PT PG Rajawali II and General Manager of PG Jatitujuh followed by a discussion attended also by the Head of Plantation Office of West Java, Representative of Farmers surrounding of PG, DPP Board of Association of Smallholder Farmer (APTRI) West Java, staff of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).

From the discussion of all members of Commission V and discussion participants agreed that the HGU and KSO areas will be managed as they were for the sustainability of sugar production by PG Jatitujuh. PG Jatitujuh is expected to keep having partnerships with farmers and surrounding communities on the principle of mutual benefit.

31 Desember 2021

31 December 2021

17. Aset tetap (lanjutan)

Proses Perpanjangan HGU (lanjutan)

h. Tindak lanjut hasil kunjungan DPR

Proses perpanjangan sertifikat HGU yang berakhir pada bulan Desember 2004 yang semula mengalami hambatan karena Departemen Kehutanan mengajukan pengembalian lahan, mulai diproses kembali dengan dukungan berbagai pihak termasuk anggota DPR.

- i. Pihak BPN tetap akan memperpanjang 2 (dua) sertifikat HGU tersebut, dengan pertimbangan bahwa permasalahan lahan tersebut bukan masalah yang menyangkut kepemilikan hak, tetapi semata-mata masalah yang menyangkut ganti rugi (Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional) dengan Surat No. 540.1-523 tanggal 16 Februari 1999. BPN juga menegaskan bahwa permasalahan lahan pengganti tersebut telah diputuskan oleh Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dan Menteri Keuangan untuk dihibahkan kepada PT PG Rajawali II. Pelaksanaan hibah tersebut telah berkali-kali diajukan oleh PT Rajawali Nusantara (Persero), namun sampai saat ini belum dapat direalisasikan.

- j. Setelah dilakukan berbagai langkah koordinasi dan pembicaraan yang intensif dengan Menteri Kehutanan dengan dukungan dari berbagai instansi terkait di Pusat maupun di Daerah, Menteri Kehutanan dengan suratnya kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) No. S - 410/Menhut -VII/2004 tanggal 8 Oktober 2004 menyetujui perpanjangan HGU tersebut disertai persyaratan:

1. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) membuat pernyataan kesanggupan secara tertulis di depan notaris untuk menyediakan calon lahan pengganti seluas 12.022,50 Ha di Propinsi Jawa Barat selambat-lambatnya 10 tahun (1 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2014).
2. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) melaporkan proses perolehan calon pengganti kepada Menteri Kehutanan secara berkala 3 (tiga) bulan.

17. Fixed assets (continued)

**Rights on Business Rights extension process
(continued)**

h. Follow-up of the results of the DPR visit

The process of extending the HGU certificate which ended in December 2004 which was initially has obstruction by the Ministry of Forestry which required to return the land, it began to be processed again with the support of various parties including members of the House of Representative.

- i. The BPN will continue to extend the 2 (two) HGU certificates, considering that the land issue is not a matter of ownership of rights, but merely a matter of compensation (Letter of the Head of the National Land Agency) by letter No. 540.1-523 dated 16 February 1999. BPN also confirmed that the replacement land issue has been decided by the Coordinating Minister for Economy and Finance to be granted to PT PG Rajawali II. The implementation of the grant has been repeatedly filed by PT Rajawali Nusantara (Persero), but until now it has not been able to be realized.

- j. Following various coordination and intensive discussions with the Minister of Forestry with support from various relevant agencies at the Central and Regional, the Minister of Forestry with his letter to the Head of the National Land Agency (BPN) No. S-410/Menhut-VII/2004 dated 8 October 2004 approved the extension of the HGU with the following requirements:

1. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) shall make a statement of its ability in writing in front of a notary to provide a prospective replacement land of 12,022.50 Ha in West Java Province not later than 10 years (1 January 2005 until 31 December 2014).
2. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) reports the process of obtaining a prospective replacement land to the Minister of Forestry periodically every 3 (three) months.

31 Desember 2021

31 December 2021

17. Aset tetap (lanjutan)

Proses Perpanjangan HGU (lanjutan)

k. Pernyataan kesanggupan di depan Notaris sebagaimana disebutkan dalam butir (a) di atas belum sepenuhnya dilaksanakan oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) karena menyangkut masalah finansial yang sangat besar dan ketersediaan lahan. Sehingga memerlukan koordinasi terlebih dahulu dengan Gubernur Jawa Barat tentang keberadaan calon lahan pengganti dan persetujuan anggaran dan pemegang saham dan komisaris dalam kedudukan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebagai BUMN.

l. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) melalui surat No. 280/RNI.01/X/2004 tanggal 14 Oktober 2004 yang ditunjukkan kepada BPPN pusat menyatakan kesediaan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) memenuhi ketentuan yang diajukan Departemen Kehutanan sebagai persyaratan perpanjangan HGU.

m. Atas dasar persetujuan perpanjangan HGU dari Menteri Kehutanan tersebut dan setelah prosedur dan persyaratan yang berlaku dalam bidang pertanahan dipenuhi, Kepala BPN Pusat telah menerbitkan SK Perpanjangan HGU atas tanah tersebut masing-masing:

1. SK No. 152/HGU/BPN/2004 tanggal 8 November 2004 untuk tanah di Kabupaten Majalengka.
2. SK No. 153/HGU/BPN/2004 tanggal 8 November 2004 untuk tanah di Kabupaten Indramayu.

Kedua SK tersebut berlaku untuk perpanjangan HGU selama 25 tahun sejak 31 Desember 2004, SK tersebut telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Indramayu dan telah terbit sertifikatnya, masing-masing HGU No. 00001 tanggal 7 Desember 2004 dan HGU No. 00002 tanggal 14 Desember 2004.

17. Fixed assets (continued)

**Rights on Business Rights extension process
(continued)**

k. The statement of the ability before the Notary as mentioned in point (a) above has not been fully implemented by PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) because it involves a very large financial problem and the availability of land. So it requires coordination with the Governor of West Java about the existence of prospective replacement land candidates and approval of the budget and shareholders and commissioners in the position of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) as State-Owned Company.

l. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) through letter No. 280/RNI.01/X/2004 dated 14 October 2004 which was shown to The Indonesian Bank Restructuring Agency stated that PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) complied with the provisions of the Ministry of Forestry as a condition of extension of HGU.

m. On the basis of approval of the extension of HGU from the Minister of Forestry and after the applicable procedures and requirements in the field of land are met, the Head of the Central BPN has issued a Decree of HGU Extension on the respective land:

1. Decision letter No. 152/HGU/BPN/2004 dated 8 November 2004 for land in Majalengka Regency.
2. Decision letter No. 153/HGU/BPN/2004 dated 8 November 2004 for land in Indramayu Regency.

Both decisions were valid to the extension of HGU for 25 years since 31 December 2004, the decree has been registered in the Land Office of Majalengka Regency and Regency of Indramayu and has been issued their respective certificates, No. 00001 dated 7 December 2004 and HGU No. 00002 dated 14 December 2004 respectively.

31 Desember 2021

31 December 2021

17. Aset tetap (lanjutan)

Terbitnya Sertifikat HGU

- a. Dalam upaya untuk dapat dilaksanakannya hibah lahan, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) telah menyampaikan kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan pengarahan. Dalam RUPS tanggal 7 Januari 2005, Pemegang Saham akan mengupayakan penyelesaian masalah lahan tersebut dengan instansi terkait.
- b. Disamping itu, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) juga menyampaikan permohonan kepada Menko Perekonomian dengan surat No.32/RNI.01/II/05 tanggal 7 Februari 2005 agar Keputusan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dan Menteri Keuangan tentang hibah dapat dilaksanakan.
- c. Atas dasar Surat PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), Menko Perekonomian melalui Sekretaris Menteri dengan Surat No. S-83/SES.M.EKON/03/2005 tanggal 9 Maret 2005 menginstruksikan kepada Menteri BUMN agar segera mengambil langkah-langkah dalam rangka penyelesaian masalah tersebut.
- d. Sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dalam penerbitan sertifikat HGU yang baru, oleh karena PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) belum menyampaikan "Pernyataan Tertulis" tentang kesediaan menyediakan lahan pengganti, maka Kepala Badan Planologi Departemen Kehutanan dengan Surat No. S.109NII-PW/2005 tanggal 22 Februari 2005 memberikan "Peringatan I" kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) agar segera menyampaikan "Pernyataan Tertulis".
- e. Berkaitan dengan peringatan I tersebut, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) menyampaikan jawaban kepada Kepala Badan Planologi Departemen Kehutanan dengan Surat No. 47/RNI.01/III/05 tanggal 3 Maret 2005 yang intinya belum disampaikannya Pernyataan Tertulis tersebut, semata-mata karena masih berkonsultasi dengan instansi-instansi terkait maupun Menteri BUMN selaku Pemegang Saham.

17. Fixed assets (continued)

The issuance of Business Rights Certificate

- a. In an effort to enable the grant of land, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) has submitted to Shareholders for a briefing. In the Shareholders General Meeting dated 7 January 2005, Shareholders will seek to resolve the land issue with the relevant agencies.
- b. In addition, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) also submitted an application to the Coordinating Minister for Economy Affairs with letter No.32/RNI.01/II/05 dated 7 February 2005 in order that the Decree of the Coordinating Minister for Economy Affairs and Minister of Finance on grant can be implemented.
- c. Based on Letter of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), Coordinating Minister of Economy through Secretary of Minister by letter No. S-83/SES.M.EKON/03/2005 dated 9 March 2005 instructed the Minister of SOE to take immediate steps in order to solve the problem.
- d. In accordance with the requirements stipulated by the Minister of Forestry in the issuance of the new HGU certificate, since PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) has not submitted a "Written Statement" concerning the willingness to provide replacement land, the Head of the Planology Agency of the Ministry of Forestry in his letter No. S.109NII-PW/2005 dated 22 February 2005 gave "First Warning" to PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) to promptly submit "Written Statement".
- e. In connection with the first warning, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) conveyed the answer to the Head of Planology Agency of the Ministry of Forestry in his letter No. 47/RNI.01/III/05 dated 3 March 2005 which essentially has not submitted the Written Statement, solely because it was still in consultation with the related agencies and the Minister of SOEs as the Shareholder.

31 Desember 2021

31 December 2021

17. Aset tetap (lanjutan)

Terbitnya Sertifikat HGU (lanjutan)

Sampai saat itu Departemen Kehutanan tetap meminta agar PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) menyerahkan lahan pengganti dengan luas yang sama dan sama sekali tidak memberikan peluang untuk dilaksanakannya Penyertaan Modal Pemerintah atas Lahan HGU PG Jatitujuh sesuai Keputusan Menko Ekuin dan Menteri Keuangan.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan RUPS tanggal 30 Januari 2007, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dengan Surat No. 155/RNI.01N/07 tanggal 30 Mei 2007 telah menyampaikan usulan kepada Menteri BUMN tentang rencana penyelesaian lahan HGU PG Jatitujuh dengan pola penyelesaian sebagai berikut :

1. Sebagai penambahan penyertaan modal Negara dalam PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebagaimana persetujuan Menteri Ekuin No. S-613/M.EKUIN/1989 tanggal 18 Desember 1989 atas usulan Menteri Keuangan dengan Surat No. S-1204/MK.013/1989 tanggal 28 November 1989.
2. Dengan Program Penghijauan areal hutan kritis milik Departemen Kehutanan atau Pemerintah Daerah Jawa Barat seluas 12.000 Ha.

Usulan kepada Menteri BUMN tersebut masih belum mendapat persetujuan dan/atau arahan, sehingga PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) belum dapat melakukan pendekatan dengan pihak Departemen Kehutanan, karena menyangkut aspek hukum maupun finansial yang sangat besar yang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Pemegang Saham.

Tahun 2008 telah dibentuk tim survei Rencana Pengadaan Lahan Pengganti Tanah HGU PG Jatitujuh sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) No. 422/RNI.01.1/Tim-Hgu/IV/08 tanggal 11 Juni 2008.

17. Fixed assets (continued)

***The issuance of Business Rights Certificate
(continued)***

Until then, the Forestry Department has requested that PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) handed over replacement land in the same width and did not at all provide an opportunity for the implementation of Government Capital Investment on HGU PG Jatitujuh Land according to the Decree of the Coordinating Minister for Economy and Finance.

As a follow up to the resolutions of the GMS on 30 January 2007, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) with letter No. 155/RNI.01N/07 dated 30 May 2007 has submitted a proposal to the Minister of State-Owned Enterprises regarding the proposed settlement of HGU PG Jatitujuh land with the pattern of completion as follows:

1. *In addition to the participation of State capital in PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) as approved by the Coordinating Minister of Economy Affairs No. S-613/M.EKUIN/1989 dated 18 December 1989 on the proposal of the Minister of Finance with letter No. S-1204/MK.013/1989 dated 28 November 1989.*
2. *With reforestation program of critical forest area owned by Ministry of Forestry or Local Government of West Java in the area of 12,000 Ha.*

The proposal to the Minister of State-Owned Enterprises has not been approved and/or directed so that PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) has not been able to approach the Ministry of Forestry, because it involves the big legal and financial aspects of which must be approved by the Shareholders.

In 2008, a survey team of Acquisition Land replacement of HGU PG Jatitujuh has been formed in accordance with the Decree of the Board of Directors of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) No. 422/RNI.01.1/Tim-Hgu/IV/08 dated 11 June 2008.

31 Desember 2021

31 December 2021

17. Aset tetap (lanjutan)

Terbitnya Sertifikat HGU (lanjutan)

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tentang pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2009 PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) No. RIS 12/DA.MBU/2009 bahwa adanya persetujuan penyediaan lahan pengganti kawasan hutan yang telah dialih fungsikan sebagai HGU PG Jatitujuh seluas 12.000 Ha di Jawa Barat secara bertahap sampai akhir tahun 2014.

Kementerian BUMN secara prinsip menyetujui penyelesaian masalah PT RNI melalui pola kerjasama secara *Bussiness to Bussiness*, dimana lahan cadangan PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) dapat digunakan untuk mengganti kewajiban PT PG Rajawali II dan untuk merealisasikan kerjasama tersebut PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) pada tanggal 27 Juli 2009 telah menandatangani MoU No. NKIIV.02/260NII/2009 dan No. 30/MoU/RNI.01NII/09 yang menyatakan telah dilakukan perubahan pada tanggal 25 Januari 2010.

PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) melalui surat Direktur Utama No. SBN.3/2990/X/2009 tanggal 6 Oktober 2009 telah menyetujui lahan seluas ± 5.250 Ha untuk dikerjasamakan sebagai lahan pengganti HGU Jatitujuh. Lahan tersebut berdasarkan penilaian sementara oleh Tim Perhutani secara teknis layak untuk dijadikan sebagai lahan pengganti HGU Jatitujuh.

Progres sampai dengan 31 Desember 2014

Sesuai hasil rapat dengar pendapat dengan Panitia Kerja Aset Komisi VI DPR Republik Indonesia pada tanggal 15 September 2014 bertempat di Ruang Rapat Komisi VI Gedung Nusantara DPR RI, merumuskan bahwa proses rencana pembelian lahan oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dari PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) untuk kepentingan penggantian lahan HGU PG Jatitujuh diminta untuk dihentikan.

17. Fixed assets (continued)

***The issuance of Business Rights Certificate
(continued)***

Based on the Minutes of Shareholders' General Meeting on Ratification of the Company's Working Plan and 2009 Budget of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) No. RIS 12/DA.MBU/2009 that the approval of substitution of forest area that has been converted function as HGU PG Jatitujuh area of 12,000 Ha in West Java gradually until the end of 2014.

The Ministry of State-Owned Enterprises in principle approved the settlement of PT RNI issues through the cooperation pattern of Bussiness to Bussiness, where the reserved land of PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) can be used to replace PT PG Rajawali II obligations and to realize the cooperation of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) on 27 July 2009 has signed MoU No. NKIIV.02/260NII/2009 and No. 30/MoU/RNI.01NII/09 stated that the change was made on 25 January 2010.

PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) through the letter of President Director No. SBN.3/2990/X/2009 dated 6 October 2009 has approved an area of ± 5,250 Ha for cooperation as a replacement land for HGU Jatitujuh. The land is based on a temporary assessment by Perhutani Team technically feasible to be used as replacement land for HGU Jatitujuh.

Progress until 31 December 2014

In accordance with the result of the hearing with the Committee of Asset Work Committe VI of the House of Representatives of the Republic of Indonesia on 15 September 2014 held at the Meeting Room of Commission VI of the Nusantara Building of the House of Representatives of the Republic of Indonesia, formulated that the process of land purchase plan by PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) from PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) for the purpose of replacement of land HGU PG Jatitujuh was requested to be stopped.

31 Desember 2021

31 December 2021

17. Aset tetap (lanjutan)

17. Fixed assets (continued)

Progres sampai dengan 31 Desember 2020

Progress until 31 December 2020

Proses rencana pembelian lahan oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dari PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) untuk kepentingan penggantian lahan HGU PG Jatitujuh belum ada kemajuan secara signifikan sampai dengan saat laporan keuangan ini diterbitkan.

The process of land purchase plan by PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) from PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) for the purpose of replacement of HGU PG Jatitujuh land no significant progress until the time of this financial report is published.

Progres sampai dengan 31 Desember 2021

Progress until 31 December 2021

Berdasarkan surat PTPN VIII No. SB/I.1/8625/XI/2021 tanggal 29 November 2021 perihal : tindak lanjut pengembalian uang muka kepada perusahaan. Dalam surat tersebut PTPN VIII Menyerahkan aset PTPN VIII (swap aset) berupa tanah dan bangunan untuk penggantian atas uang muka senilai Rp 269.145.065.875 tersebut akan diganti dengan tanah dan bangunan milik PTPN VIII yang terletak di Desa Cilenggang, Kecamatan Serpong, kabupaten Tangerang yang dibuktikan dengan Sertifikat SHGB No. 00053 tanggal 14 Oktober 2004 seluas 73.265m².

Based on PTPN VIII's letter No. SB/I.1/8625/XI/2021 dated 29 November 2021 regarding: follow-up to return the down payment to the company. In the letter, PTPN VIII handed over the assets of PTPN VIII (asset swap) in the form of land and buildings for replacement of the down payment of Rp 269,145,065,875 which would be replaced with land and buildings belonging to PTPN VIII located in Cilenggang Village, Serpong Sub-District, Tangerang district as evidenced with SHGB Certificate No. 00053 dated 14 October 2004, covering an area of 73,265m².

18. Beban panen dua tahun yang akan datang

18. Future two years harvest expense

Akun ini merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pabrik-pabrik gula yang menjadi beban panen dua tahun yang akan datang (dua atau lebih) yang terdiri atas biaya produksi tanaman tebu sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 yang beban panen dua tahun yang akan datang (dua atau lebih) yang terdiri dari :

This account represents costs incurred by sugar mills subject to future two-years harvest (two or more) expense comprising the costs of producing sugarcane up to 31 December 2021 and 2020 with future two-years' harvest expense (two or more) consisting of :

	2021	2020	
Biaya produksi tanaman tebu	16.954.708.359	21.545.363.060	Sugarcane production cost
Jumlah beban panen dua tahun yang akan datang	16.954.708.359	21.545.363.060	Total future two years' harvest expense

31 Desember 2021

31 December 2021

19. Properti investasi

19. Investment property

Akun ini merupakan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku properti investasi dengan rincian sebagai berikut :

This account represents the cost, accumulated depreciation and book value of investment property with details as follows :

2021						
	1 Januari/ <i>January 2021</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	31 Desember/ <i>December 2021</i>	
Harga perolehan						<i>Acquisition cost</i>
Tanah	3.826.746.947.076	-	74.637.586.043	-	3.752.109.361.033	<i>Land</i>
Bangunan	80.217.948.525	-	-	-	80.217.948.525	<i>Buildings</i>
Jumlah	3.906.964.895.601	-	74.637.586.043	-	3.832.327.309.558	<i>Subtotal</i>
Akumulasi Penyusutan						<i>Accumulated depreciation</i>
Bangunan	48.893.946.854	2.037.886.517	-	-	50.931.833.371	<i>Buildings</i>
Jumlah	48.893.946.854	2.037.886.517	-	-	50.931.833.371	<i>Total</i>
Nilai buku	3.858.070.948.747				3.781.395.476.187	<i>Book value</i>

2020						
	1 Januari/ <i>January 2020</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	31 Desember/ <i>December 2020</i>	
Harga perolehan						<i>Acquisition cost</i>
Tanah	3.182.633.747.076	-	-	644.113.200.000	3.826.746.947.076	<i>Land</i>
Bangunan	55.305.530.548	-	-	24.912.417.977	80.217.948.525	<i>Buildings</i>
Jumlah	3.237.939.277.624	-	-	669.025.617.977	3.906.964.895.601	<i>Subtotal</i>
Akumulasi Penyusutan						<i>Accumulated depreciation</i>
Bangunan	31.513.481.910	1.741.503.034	-	15.638.961.910	48.893.946.854	<i>Buildings</i>
Jumlah	31.513.481.910	1.741.503.034	-	15.638.961.910	48.893.946.854	<i>Total</i>
Nilai buku	3.206.425.795.714				3.858.070.948.747	<i>Book value</i>

Nilai properti investasi merupakan tanah dan bangunan milik Perusahaan yang terdapat di beberapa daerah. Nilai tersebut juga termasuk aset milik PT PG Rajawali II yang merupakan hak tanah dan bangunan Gedung Gula yang berlokasi di Jl. H. Fachrudin No. 14, Jakarta, dimana kepemilikan atas aset tersebut diberikan kepada 4 (empat) perusahaan yaitu PT PG Rajawali II, PTPN IX (Persero), PTPN X (Persero) dan PTPN XI (Persero) dengan porsi kepemilikan yang sama masing-masing sebesar 25% atas nilai tanah dan bangunan Gedung Gula.

The value of investment property represents the Company's land and buildings located in several areas. The value also includes assets owned by PT PG Rajawali II which is the right of land and building of Sugar Building located on Jl. H. Fachrudin No. 14, Jakarta, where the ownership of such assets is given to 4 (four) companies namely PT PG Rajawali II, PTPN IX (Persero), PTPN X (Persero) and PTPN XI (Persero) with the same ownership at 25% of the value of land and building of Sugar Building.

31 Desember 2021

31 December 2021

19. Properti investasi (lanjutan)

Berdasarkan surat pernyataan direksi tentang pencatatan properti investasi berupa tanah PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan entitas anak dalam penyajian nilai properti investasi pada laporan keuangan tahun buku 2021 menyatakan bahwa PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan entitas anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menyajikan nilai wajar atas properti investasi berupa tanah pada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan anak perusahaan dicatat sama dengan nilai wajarnya pada tahun buku 2020.

Adapun pertimbangan manajemen menyajikan nilai wajar properti investasi berupa tanah pada laporan keuangan tahun buku 2021 terhadap entitas tersebut masih sama dengan nilai wajar pada tahun buku 2020 adalah karena selama tahun 2021 belum terealisasinya pengembangan yang signifikan terhadap properti investasi tersebut dan mempengaruhi kenaikan nilai properti investasi.

20. Aset non operasional

Nilai buku aset tetap mesin dan instalasi PT PG Rajawali II merupakan aset tetap mesin-mesin yang tidak dioperasikan, dengan rincian sebagai berikut :

	2021	2020	
Nilai perolehan mesin	251.754.594.022	448.554.328.077	<i>Acquisition cost of machine</i>
Penyisihan aset non operasional	(72.440.160)	(196.822.763.987)	<i>Allowance for non-operating assets</i>
Nilai buku	251.682.153.862	251.731.564.090	<i>Book value</i>

Aset non operasional merupakan nilai bersih atas mesin pabrik dan bangunan unit bisnis Mitra Cane Top yang sudah tidak beroperasi lagi dan dialihkan ke PG Jatitujuh. Penghentian operasional unit bisnis pakan ternak Mitra Cane Top berdasarkan keputusan Direksi No. XX SURKP/UM/010.012A tanggal 1 November 2010 dengan nilai bersih sebesar Rp 1.048.459.954.

19. Investment property (continued)

Based on the directors' statement regarding the recording of investment property in the form of land of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and its subsidiaries in the presentation of investment property values in the financial statements of 2021 declare that PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and its subsidiaries for the year ended 31 December 2021 presents the fair value of investment property in the form of land in PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and its subsidiaries recorded the same as its fair value in fiscal year 2020.

As for management's consideration, presenting the fair value of investment property in the form of land in the financial statements of 2021 for the entity is still the same as the fair value in fiscal year 2020, because during 2021 significant developments have not been realized for the investment property and affected the increase in investment property values.

20. Non-operational assets

The book value of machinery and installation assets of PT PG Rajawali II represent fixed asset of non-operational machinery, with details as follows :

Non-operating assets represent the net value of the factory machinery and the building of the business unit of Mitra Cane Top that is no longer in operations and transferred to PG Jatitujuh. The termination of operational business unit of Mitra Cane Top's cattle feed business based on Board of Directors decision No. XX SURKP/UM/010.012A dated 1 November 2010 with a net value of Rp 1,048,459,954.

31 Desember 2021

31 December 2021

20. Aset non operasional (lanjutan)

Mesin Pabrik Gula Subang dialihkan ke unit PG Jatitujuh. Pengalihan tersebut berdasarkan Keputusan Direksi No. 10.1/SK/RW-II.01/V/2018 tentang Penggabungan PG Subang ke PG Jatitujuh menjadi Unit Pabrik Gula Hak Guna Usaha (Jatitujuh dan Subang) tanggal 17 Mei 2018 dengan nilai bersih sebesar Rp 110.552.074.275, pada tahun 2020 dilakukan pemanfaatan mesin-mesin tersebut ke unit-unit usaha di lingkungan PT PG Rajawali II sebesar Rp 16.328.569.541, serta terdapat reklasifikasi dari aset tetap berupa aset titipan mesin yang berada di Subang yang tidak beroperasi dengan nilai perolehan Rp 46.521.000.000. Tahun 2021 dilakukan penjualan kendaraan dari PG Subang dengan nilai bersih sebesar Rp 49.410.228 sehingga nilai bersih Aset Tetap Tidak Produktif Mesin Pabrik Gula Subang menjadi sebesar Rp 94.174.094.506.

Mesin pabrik gula Karangsuwung yang sudah tidak beroperasi lagi, dan dialihkan ke unit PG Sindang Laut. Penghentian atas mesin operasional unit PG. Karangsuwung berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Nomor :012/SK/RW-II.01/V/2015 tanggal 5 Mei 2015 dengan nilai bersih sebesar Rp 29.682.411.806. Posisi per 31 Desember 2018 sebesar Rp 32.018.009.864 sehubungan dengan dijualnya aset turbin ke PG Candi Baru.

Aset non produktif per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 merupakan nilai bersih atas mesin pabrik Inti Bagas Perkasa (IBP) yang sudah tidak beroperasi lagi. Penghentian atas mesin operasional PT Inti Bagas Perkasa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan No. 916/S.PMh/RW-II.01/VII/2015 tanggal 31 Desember 2015 dengan nilai bersih sebesar Rp 1.287.138.103.

Mesin pabrik gula Sindanglaut yang sudah tidak beroperasi lagi dialihkan ke unit PG Tersana Baru. Penghentian atas mesin operasional PG Sindanglaut berdasarkan keputusan Direksi Perusahaan No. 06/SK/RW-II.01/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 dengan nilai bersih sebesar Rp 78.969.049.492.

20. Non-operational assets (continued)

Subang Sugar Factory Machine which was transferred to the Jatitujuh PG unit. The transfer was based on the decision of the Company's Board Directors No. 10.1/SK/RW-II.01/V/2018 concerning the merger of PG Subang to PG Jatitujuh to become a Sugar Factory unit for Business Use Right (Jatitujuh and Subang) dated 17 May 2018 with a net value of Rp. 110,552,074,275, in 2020, the utilization of these machines was carried out to business units within PT PG Rajawali II for Rp 16,328,569,541, and there was a reclassification of fixed assets in the form of machine-entrusted assets which located in Subang which is not operating with an acquisition value of Rp 46,521,000,000. In 2021, the sale of vehicles from PG Subang with a net value of Rp 49,410,228 so that the net value of Non-Productive Fixed Assets of Subang Sugar Factory Machines becomes Rp 94,174,094,506.

The Karangsuwung sugar factory machines are no longer operating, and have been transferred to the Sindang Laut PG unit. Termination of PG unit operational machines. Karangsuwung based on the Decree of the Directors of the Company Number: 012/SK/RW-II.01/V/2015 dated 5 May 2015 with a net value of Rp 29,682,411,806. The position as of 31 December 2018 was Rp 32,018,009,864 in connection with the sale of turbine assets to PG Candi Baru.

Non-productive assets as of 31 December 2021 and 31 December 2020 represent the net value of the Inti Bagas Perkasa (IBP) factory machinery that is no longer operating. Termination of the operational machinery of PT. Inti Bagas Perkasa based on the Decree of the Board of Directors of the Company No. 916/S.PMh/RW-II.01/VII/2015 dated 31 December 2015 with a net value of Rp 1,287,138,103.

The machine for the Sindanglaut sugar factory, which was no longer in operation, was transferred to the Tersana Baru PG unit. Termination of the PG Sindanglaut operational machine based on the decision of the Board of Directors of the Company No. 06/SK/RW-II.01/III/2020 dated 9 March 2020 with a net value of Rp 78,969,049,492.

31 Desember 2021

31 December 2021

21. Uang Jaminan

Akun ini merupakan uang jaminan kerjasama distribusi alat kesehatan, disamping penggunaan jasa pihak ketiga berupa telepon, gas, air minum, PLN, cukai alkohol, dan arak, dan jaminan fasilitas kredit serta *Corporate Members* (keanggotaan) Golf di Finna Golf Surabaya. Saldo pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 1.971.019.906 dan Rp 2.240.259.906.

21. Security deposits

This account represents security deposit for guarantee distribution of medical devices. The third-party deposit represents a security deposit for the use of services in the form of telephone, gas, drinking water, electricity, customs duty of alcohol and arrack, also credit facility and Corporate Members (Golf Membership) at Finna Golf Surabaya. The balance as of 31 December 2021 and 2020 amounted to Rp 1,971,019,906 and Rp 2,240,259,906, respectively.

22. Aset tidak berwujud

22. Intangible assets

	2021	2020	
Selisih lebih nilai perolehan terhadap nilai wajar - akuisisi saham			<i>The excess of acquisition over fair value – stock acquisition</i>
PT Sumber Wangi Alam	30.770.279.590	30.770.279.590	<i>PT Sumber Wangi Alam</i>
Hak atas tanah (HGU)	14.370.782.755	14.370.782.755	<i>Land rights</i>
Perangkat lunak IT	7.760.494.417	6.797.604.417	<i>Software</i>
Biaya pengembangan	7.199.720.454	13.259.052.727	<i>Development costs</i>
Lisensi Microsoft	4.514.927.727	3.424.018.636	<i>Microsoft License</i>
Sertifikasi HGB dan lain-lain	1.176.731.435	38.609.225	<i>Building rights certificate and others</i>
Sub jumlah	65.792.936.378	68.660.347.350	Subtotal
Akumulasi amortisasi	(18.018.732.146)	(16.828.164.244)	<i>Accumulated amortization</i>
Jumlah aset tidak berwujud	47.774.204.232	51.832.183.106	Total intangible assets

Pada tahun 2019 selisih perubahan nilai buku terhadap nilai wajar akuisisi saham milik PT Sumber Wangi Alam atas PT Laras Astra Kartika merupakan selisih perubahan nilai buku aset dan kewajiban yang dapat diidentifikasi diakui sebagai selisih lebih nilai buku terhadap nilai wajar. Penilaian atas nilai wajar aset dan kewajiban yang dapat diidentifikasi dilakukan oleh manajemen, dengan hasil sebagai berikut:

In 2019, The difference between changes in book value to the fair value of the acquisition of shares owned by PT Sumber Wangi Alam on PT Laras Astra Kartika is the difference in the book value changes of assets and liabilities that can be identified are recognized as differences in book value over fair value. An assessment of the fair value of identifiable assets and liabilities is carried out by management, as follows:

	2021	2020	
Aset lancar	6.799.888.576	6.799.888.576	<i>Current assets</i>
Aset tidak lancar	40.581.211.323	40.581.211.323	<i>Non-current assets</i>
Sub jumlah	47.381.099.899	47.381.099.899	Subtotal
Liabilitas lancar	5.424.418.716	5.424.418.716	<i>Current liabilities</i>
Liabilitas tidak lancar	226.960.773	226.960.773	<i>Non-current liabilities</i>
Sub jumlah	5.651.379.489	5.651.379.489	Subtotal
Aset bersih	(41.729.720.410)	(41.729.720.410)	<i>Net asset</i>
Nilai wajar	72.500.000.000	72.500.000.000	<i>Fair value</i>
Selisih lebih nilai buku terhadap nilai wajar	30.770.279.590	30.770.279.590	The excess of book value over fair value

31 Desember 2021

31 December 2021

22. Aset tidak berwujud (lanjutan)

Biaya pengembangan merupakan biaya *Strategic Transformation Office* (STO) yang merupakan program PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sesuai dengan arahan Kementerian BUMN untuk mengantisipasi pengelompokan bisnis perusahaan berdasarkan potensi yang dimiliki Perusahaan dan peluang bisnis yang ada.

Manajemen berpendapat tidak terdapat penurunan nilai atas *Goodwill* sehubungan dengan transaksi akuisisi saham PT Laras Astra Kartika milik PT Sumber Wangi Alam oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero). PT Laras Astra Kartika sampai saat ini terus melakukan investasi atas tanaman kebun dan lahan yang diharapkan nilai ekuitas PT Laras Astra Kartika akan meningkat dimasa yang akan datang.

Biaya pengembangan piranti lunak merupakan biaya pengembangan IT di entitas anak yaitu PT Rajawali Nusindo dan PT Laras Astra Kartika.

Hak atas tanah (HGU) merupakan biaya pengurusan HGU di entitas anak PT PG Rajawali II yang merupakan pengurusan yang kedua dan tidak bisa dikapitalisasi.

Investasi IT merupakan pengadaan lisensi program Microsoft di PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Group sebesar Rp 3.149.018.636 berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 113/SPKIRNI.01NIII/07 tanggal 30 Agustus 2007 dan berdasarkan Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Lisensi Program Microsoft No. 112/S.Pj/RNI.01NIII/07 tanggal 30 Agustus 2007 dan pengadaan/ pembuatan *Website Platform E-Commerce* Pasarprodukbumn.com (www.pasarprodukbumn.com) oleh PT Light Media Inovasi Teknologi sebesar Rp 275.000.000 berdasarkan surat No. 47/PBJ-PP/RNI.04.1.1/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015 perihal Pelaksanaan Pekerjaan, SPK No. 20/SPK/RNI.04.1.1/X/2015. Kemudian pengadaan Master Plan TI klaster pangan oleh PT RSM Indonesia Konsultan sebesar Rp 1.090.909.091 berdasarkan surat perjanjian kerja No. 02/S.Pj-UP/RNI.03/XI/2020 tanggal 3 November 2020 perihal jasa penyusunan rencana strategis teknologi informasi (TI) terintegrasi BUMN klaster pangan.

22. Intangible assets (continued)

Development costs are the costs of the Strategic Transformation Office (STO) which is a program of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) in accordance with the direction of the Ministry of SOEs to anticipate grouping the company's business based on the potential of the Company and existing business opportunities.

Management believes that there is no impairment in value of Goodwill regarding with the acquisition of PT Laras Astra Kartika shares owned by PT Sumber Wangi Alam by PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero). PT Laras Astra Kartika continues to invest in garden plants and land, so it is expected that the equity value of PT Laras Astra Kartika will increase in the future.

Software development costs represents the cost of developing IT in subsidiaries that is PT Rajawali Nusindo and PT Laras Astra Kartika.

Building rights (HGU) represents the cost of obtaining HGU in a subsidiary of PT PG Rajawali II which is the second arrangement and cannot be capitalized.

IT investment is the procurement of a Microsoft program license at PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Group in the amount of Rp 3,149,018,636 based on a Work Order No. 113/SPKIRNI.01NIII/07 dated 30 August 2007 and based on the Microsoft Program License Procurement Work Agreement No. 112/S.Pj/RNI.01NIII/07 dated 30 August 2007 and procurement/creation of the E-Commerce Platform Website Pasar Produkbumn.com (www.pasarprodukbumn.com) by PT Light Media Innovation Technology in the amount of Rp 275,000,000 based on letter No. 47/PBJ-PP/RNI.04.1.1/X/2015 dated 2 October 2015 regarding Work Implementation, SPK No. 20/SPK/RNI.04.1.1/X/2015. Then the procurement of the food cluster IT Master Plan by PT RSM Indonesia Consultant in the amount of Rp 1,090,909,091 based on the work agreement letter No. 02/S.Pj-UP/RNI.03/XI/2020 dated 3 November 2020 regarding services for the preparation of information technology strategic plans (IT) integrated SOE food cluster.

31 Desember 2021

31 December 2021

23. Aset lain-lain

23. Other assets

	2021	2020	
Investasi mesin – PT RNI	24.141.010.000	24.141.010.000	<i>Machine investment – PT RNI</i>
Aset Kerjasama Operasi laboratorium PT Rajawali Nusindo	20.690.843.716	15.334.679.083	<i>Laboratory cooperation of PT Rajawali Nusindo</i>
Bank Garansi	12.487.816.140	6.832.978.584	<i>Guarantee Bank</i>
Biaya investasi tanaman PT Mitra Kerinci	12.151.203.872	12.054.637.159	<i>Plantation investment cost of PT Mitra Kerinci</i>
Investasi Konsultan	9.358.484.040	1.877.804.040	<i>Investment Consultants</i>
Aset non produktif PG RW II dan PT RW I	2.852.650.097	2.883.337.431	<i>Non-productive assets of PG RW II and PT RW I</i>
Biaya pengembangan PT RNI Holding	1.732.326.935	1.732.326.934	<i>Development cost of PT RNI Holding</i>
Transformasi Bisnis	1.203.931.186	1.203.931.186	<i>Business transformation</i>
Investasi sawah	1.058.289.469	516.909.100	<i>Field investment</i>
Aset non operasional	630.954.784	630.954.784	<i>Non operational assets</i>
Biaya Hak Guna Usaha	438.658.886	438.658.886	<i>Business rights cost</i>
Investasi pada PT Rajawali Citramass	1.000.000	1.000.000	<i>Investments in PT Rajawali Citramass</i>
Investasi pada PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring	1.000.000	1.000.000	<i>Investments in PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring</i>
Lain-lain	33.129.059.129	32.939.469.687	<i>Others</i>
Sub jumlah	119.877.228.254	100.588.696.874	<i>Subtotal</i>
Akumulasi amortisasi	(28.807.708.554)	(17.480.301.501)	<i>Accumulated amortization</i>
Jumlah aset lain-lain	91.069.519.700	83.108.395.373	<i>Total other assets</i>

Investasi mesin senilai Rp 24.141.010.000 merupakan penambahan aset yang berasal dari pengalihan barang milik negara pada Kementerian Perindustrian yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 yang dicatat sebagai penyertaan modal negara sesuai dengan akta Surat Keputusan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham No. S-302/MBU/04/2018 tanggal 4 Mei 2018 yang diaktakan dengan Akta Notaris No. 14 Tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0011424.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 23 Mei 2018.

Aset Kerjasama Operasi laboratorium PT Rajawali Nusindo merupakan peralatan laboratorium yang ditempatkan di rumah sakit pada 18 daerah/cabang dengan ketentuan sesuai dengan perjanjian kerjasama masing-masing.

Machine investment worth Rp 24,141,010,000 is an additional asset originating from the transfer of state-owned goods to the Ministry of Industry, the procurement of which is sourced from the State Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Year 2010 which is recorded as state equity participation in accordance with the deed of Decree of the Minister of SOEs as Shareholder No. S-302/MBU/04/2018 dated 4 May 2018 which is notarized by Notary Deed No. 14 dated 22 May 2018 drawn up by Notary Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn and has been ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with a letter Decision No. AHU-0011424.AH.01.02.Tahun 2018 dated 23 May 2018.

Laboratory collaborative PT Rajawali Nusindo are laboratory equipment placed in hospitals in 18 regions/branches with provisions in accordance with their respective cooperation agreements.

31 Desember 2021

31 December 2021

23. Aset lain-lain (lanjutan)

Investasi konsultan adalah biaya konsultan yang masih ditangguhkan atas pembangunan kawasan industri Subang dan pembentukan holding kawasan.

Investasi Properti tower PT Rajawali Nusantara Indonesia merupakan biaya konsultan rencana pembangunan tower PT Rajawali Nusantara Indonesia yang berlokasi di Mega Kuningan.

Transformasi Bisnis merupakan biaya yang dikeluarkan dalam rangka proses/kegiatan untuk percepatan transformasi bisnis di PT PG Rajawali II (RNI Grup). Berdasarkan rencana manajemen, langkah perbaikan perusahaan yang akan ditempuh dalam waktu 1 (satu) tahun kedepan salah satunya dengan optimalisasi lahan yang tidak ditanami tebu bekerja sama dengan mitra strategis. Perusahaan menangguhkan biaya-biaya yang dikeluarkan dengan harapan akan memperoleh manfaat ekonomi dari rencana proyek optimalisasi lahan tersebut.

Investasi sawah merupakan biaya atas konsultan proyek strategis nasional dalam rangka ketahanan pangan yang berlokasi di Sukamandi dan Kalimantan Tengah.

23. Other assets (continued)

Investment Consultants is a consultant fee that is still deferred for the construction of the Subang industrial area and the establishment of a holding area.

Property investment in the tower of PT Rajawali Nusantara Indonesia is a consultant fee for the construction plan of the tower of PT Rajawali Nusantara Indonesia which is located in Mega Kuningan.

Business Transformation is a cost incurred in the context of processes/activities to accelerate business transformation at PT PG Rajawali II (RNI Group). Based on the management plan, the company's improvement steps that will be taken within the next 1 (one) year are by optimizing land that is not planted with sugar cane in collaboration with strategic partners. The company defers the costs incurred in the hope that it will obtain economic benefits from the land optimization project plan.

Field investment is the cost of a national strategic project consultant in the context of food security located in Sukamandi and Central Kalimantan.

31 Desember 2021

31 December 2021

**24. Aset dan liabilitas tidak lancar yang
diklasifikasikan aset dalam penghentian**

**a. Aset tidak lancar yang diklasifikasikan
sebagai aset dalam penghentian**

Posisi aset dan liabilitas PT Rajawali Gloves

Berdasarkan rapat umum pemegang saham pada tanggal 21 Desember 2011 yang telah dituangkan dalam akta No. 3 tanggal 23 Desember 2011 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan SH MKn notaris di Jakarta diantaranya berisi pembubaran PT Kebun Grati Agung, penunjukan likuidator, dan persetujuan atas kerugian PT Kebun Grati Agung akan ditanggung oleh PT PG Rajawali I. RUPS-LB tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dengan No. AHU-AH.01.10-02409 Tanggal 24 Januari 2012, dan telah diumumkan dalam 2 surat kabar tanggal 12 Januari 2012.

PT Rajawali Gloves berdasarkan Surat Permohonan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) No. 367/RNI/01/XII/09 tanggal 17 Desember 2009 selaku pemegang saham terbesar Perusahaan untuk meminta persetujuan atas perubahan pola divestasi saham dengan cara dilikuidasi kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan pemegang saham sudah tidak lagi mempunyai keinginan untuk melanjutkan kegiatan usahanya. Sampai dengan 31 Desember 2021, PT Rajawali Gloves masih dalam tahap proses likuidasi.

PT Rajawali Gloves merupakan entitas yang dihentikan usahanya dengan akun-akunnya yang disajikan terpisah dalam Laporan Keuangan Konsolidasian sesuai dengan PSAK 58 (Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan).

**24. Non current assets and liabilities classified as
discontinued assets**

**a. Non current assets and classified as
discontinued assets**

**Asset and liability position of PT Rajawali
Gloves**

Based on the general meeting of shareholders on 21 December 2011 which has been documented in the deed No. 3 dated 23 December 2011 made in front of Nanda Fauz Iwan SH MKn notary in Jakarta regarding the dissolution of PT Kebun Grati Agung, liquidator appointment, and approval for loss of PT Kebun Grati Agung will be borne by PT PG Rajawali I. The Extraordinary Shareholders General Meeting has been notified to the Minister of Justice with No. AHU-AH.01.10-02409 dated 24 January 2012, and was published in 2 newspapers dated 12 January 2012.

PT Rajawali Gloves pursuant to the application letter of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) No. 367/RNI/01/XII/09 dated 17 December 2009 as the Company's largest shareholder to seek approval of changes in the pattern of the shares divestment by liquidation to the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) of the Republic of Indonesia. This indicates that shareholders no longer have the intention to continue their business activities. As of 31 December 2021, PT Rajawali Gloves is still in the process of liquidation process.

PT Rajawali Gloves is a discontinued entity whose accounts are presented separately in the Consolidated Financial Statements in accordance with SFAS 58 (Non-current assets held for sale and discontinued operations).

31 Desember 2021

31 December 2021

24. Aset dan liabilitas tidak lancar yang diklasifikasikan aset dalam penghentian (lanjutan)

24. Non current assets and liabilities classified as discontinued assets (continued)

a. Aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai aset dalam penghentian (lanjutan)

a. Non current assets and classified as discontinued assets (continued)

Posisi aset dan liabilitas PT Rajawali Gloves (lanjutan)

Asset and liability position of PT Rajawali Gloves (continued)

	2021	2020	
Laporan posisi keuangan PT Rajawali Gloves			Statements of financial position PT Rajawali Gloves
Aset tetap	431.725.891	431.725.891	Fixed assets
Jumlah aset tidak lancar	431.725.891	431.725.891	Total non-current assets
Jumlah aset	431.725.891	431.725.891	Total assets
Jumlah aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai aset dalam penghentian	431.725.891	431.725.891	The amount of non-current assets classified as discontinued asset in termination

b. Liabilitas tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai liabilitas dalam penghentian

b. Non current liabilities and classified as discontinued liabilities

	2021	2020	
Utang usaha	18.433.750	18.433.750	Trade payables
Utang pajak	15.000.000	15.000.000	Tax payables
Biaya yang masih harus dibayar	5.077.636	5.077.636	Accrued expenses
Jumlah liabilitas lancar	38.511.386	38.511.386	Total current liabilities
Jumlah liabilitas tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai aset dalam penghentian	38.511.386	38.511.386	Non current liabilities classified as discontinued assets

c. Investasi tersedia untuk dijual

c. Available for sales investments

	2021	2020	
PT Sawit Menang Sejahtera	15.000.000.000	15.000.000.000	PT Sawit Menang Sejahtera
PT Rajawali Gloves Corporation	431.725.891	431.725.891	PT Rajawali Gloves Corporation
Jumlah investasi tersedia untuk dijual	15.431.725.891	15.431.725.891	Total available for sales security

Pada tanggal 1 Mei 2011, PT Perkebunan Mitra Ogan melakukan penggabungan usaha berdasarkan Perjanjian Usaha Patungan antara Perusahaan dengan PT Sawit Menang Sejahtera yang diaktakan dengan Akta Notaris Anwar Junaidi, SH No. 63 tanggal 18 April 2011, masing-masing pihak sepakat untuk selanjutnya mengelola, mengembangkan dan meningkatkan kinerja serta menyediakan dana permodalan yang diperlukan Perusahaan.

On 1 May 2011, PT Perkebunan Mitra Ogan entered into a merger based on a Joint Venture Agreement between the Company and PT Sawit Menang Sejahtera which was notarized by Deed of Anwar Junaidi, SH No. 63 dated 18 April 2011, each party agreed to further manage, develop and improve their performance and provide capital funding required by the Company.

31 Desember 2021

31 December 2021

**24. Aset dan liabilitas tidak lancar yang
diklasifikasikan aset dalam penghentian (lanjutan)**

c. Investasi tersedia untuk dijual (lanjutan)

Untuk menindaklanjuti Perjanjian Usaha Patungan tersebut, telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sawit Menang Sejahtera yang diaktakan dengan Akta Notaris Anwar Junaidi, SH No. 61 tanggal 18 April 2011 diantaranya telah memutuskan dan menyetujui Pengeluaran Saham dalam simpanan sebanyak 15.000 (lima belas ribu) lembar dengan nilai nominal sebesar Rp 15.000.000.0000 (lima belas miliar rupiah) yang seluruhnya diambil bagian oleh PT Perkebunan Mitra Ogan.

Sesuai Risalah Hasil Pertemuan Para Pemegang Saham PT Sawit Menang Sejahtera pada tanggal 6 Juli 2012 para pemegang saham menyepakati :

1. Kerjasama antara Bapak Dedek Pranata dengan PT Perkebunan Mitra Ogan dalam pengelolaan PT Sawit Menang Sejahtera sepakat untuk diakhiri.
2. Seluruh saham PT Perkebunan Mitra Ogan dikembalikan kepada Bapak Dedek Pranata dengan harga sesuai hasil penilaian *Appraisal Independent*.
3. Seluruh dana yang sudah dikeluarkan oleh PT Perkebunan Mitra Ogan untuk keperluan PT Sawit Menang Sejahtera akan dikembalikan setelah dilakukan penilaian.
4. Bapak Dedek Pranata bersama dengan PT Perkebunan Mitra Ogan akan menunjuk Konsultan/Appraisal untuk menghitung nilai saham dan kewajiban PT Sawit Menang Sejahtera kepada PT Perkebunan Mitra Ogan.
5. Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan dibuat kesepakatan bersama antara Bapak Dedek Pranata dengan PT Perkebunan Mitra Ogan.
6. Selama proses pengembalian saham belum selesai, PT Perkebunan Mitra Ogan masih tetap berkewajiban mengelola dan membiayai kegiatan kebun untuk menjaga keberlangsungan usaha PT Sawit Menang Sejahtera.

**24. Non current assets and liabilities classified as
discontinued assets (continued)**

c. Available for sales investments (continued)

To follow up the Joint Venture Agreement, an Extraordinary General Shareholders Meeting of PT Sawit Menang Sejahtera was conducted which was notarized by Notarial Deed of Anwar Junaidi, SH No. 61 dated 18 April 2011 of which has decided and approved the issue of 15,000 (fifteen thousand) shares with a nominal value of Rp 15,000,000,000 (fifteen billion rupiahs) which is entirely subscribed by PT Perkebunan Mitra Ogan.

According to the Minutes of Meeting of Shareholders of PT Sawit Menang Sejahtera on 6 July 2012 the shareholders agreed :

1. Cooperation between Mr. Dedek Pranata and PT Perkebunan Mitra Ogan in the management of PT Sawit Menang Sejahtera agreed to be terminated.
2. All shares of PT Perkebunan Mitra Ogan Plantation are returned to Mr. Dedek Pranata at a price as per Independent Appraisal valuation.
3. All funds that have been issued by PT Perkebunan Mitra Ogan for the purposes of PT Sawit Menang Sejahtera will be returned after an assessment has been carried out.
4. Mr. Dedek Pranata together with PT Perkebunan Mitra Ogan will appoint a Consultant/ Appraisal to calculate the value of shares and liabilities of PT Sawit Menang Sejahtera to PT Perkebunan Mitra Ogan.
5. This agreement will be followed up with a mutual agreement between Mr. Dedek Pranata and PT Perkebunan Mitra Ogan.
6. As long as the share return process has not been completed, PT Perkebunan Mitra Ogan is still obliged to manage and finance plantation activities to maintain the business continuity of PT Sawit Menang Sejahtera.

31 Desember 2021

31 December 2021

**24. Aset dan liabilitas tidak lancar yang
diklasifikasikan aset dalam penghentian (lanjutan)**

c. Investasi tersedia untuk dijual (lanjutan)

Sehubungan dengan rencana pelepasan saham milik PT Perkebunan Mitra Ogan dengan nilai nominal sebesar Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar), telah dilakukan kajian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sugeng, Irwan, Gunawan & Rekan atas nilai pasar tanah seluas 5.300 Ha berikut tanaman kelapa sawit (kebun inti dan plasma), bangunan, infrastruktur, kendaraan, alat berat, dan peralatan kantor di desa Sungai Menang, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.

Dasar penilaian yang digunakan adalah nilai pasar atau estimasi sejumlah uang yang diperoleh dari hasil penukaran suatu aset atau kewajiban pada tanggal penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan. Penilaian aset dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2014 dan sesuai laporan dari KJPP Sugeng, Irwan, Gunawan dan Rekan No. 035-2014/LP/SIG tanggal 3 April 2014 diperoleh perhitungan analisis nilai pasar sebesar Rp 48.032.830.000.

Berdasarkan nilai pasar tersebut, manajemen berkeyakinan bahwa rencana pelepasan saham PT Perkebunan Mitra Ogan pada PT Sawit Menang Sejahtera sebesar Rp 15.000.000.000 dapat terealisasi. Namun sampai dengan tanggal laporan, proses pelepasan saham pada PT Sawit Menang Sejahtera belum selesai. Berdasarkan pernyataan Manajemen per 31 Desember 2018, Manajemen berkomitmen untuk tetap melepas investasi pada PT Sawit Menang Sejahtera meskipun terjadi kemunduran dalam realisasinya.

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 24 Januari 2017, RUPS menyetujui rencana penjualan aset tanah dan gedung kantor direksi dan sesuai surat pembayaran kewajiban PT Perkebunan Mitra Ogan kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) No. DIR-MO/RNI/243/VIII/2017, maka perusahaan melepas aset tanah dan penjualan gedung sebesar Rp 79.970.100.000 sesuai hasil penilaian dari KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik).

**24. Non current assets and liabilities classified as
discontinued assets (continued)**

c. Available for sales investments (continued)

In relation to the plan to release the shares owned by PT Perkebunan Mitra Ogan with a nominal value amounting to Rp 15,000,000,000 (fifteen billion), an assessment has been made by Sugeng, Irawan, Gunawan & Rekan, Public Service Assessment Office (KJPP) for the market value of 5,300 Ha Oil palm plantation (core and plasma plantations), buildings, infrastructure, vehicles, heavy equipment and office equipment in Sungai Menang village, Sungai Menang subdistrict, Ogan Komering Ilir district, South Sumatra.

The basis of the valuation used is the market value or the estimated amount of money derived from the exchange of an asset or liability on the date of valuation, between the buyer who is interested in buying with the seller who is interested in selling, in a non-binding transaction. Asset valuation was conducted on 22 March 2014 and according to report from KJPP Sugeng, Irwan, Gunawan and Partners No. 035-2014/LP/SIG dated 3 April 2014 obtained the calculation of market value analysis amounting to Rp 48,032,830,000.

Based on the market value, management believes that the plan to release the shares of PT Perkebunan Mitra Ogan in PT Sawit Menang Sejahtera amounting to Rp 15,000,000,000 can be realized. But until the report date, the share release process at PT Sawit Menang Sejahtera has not been completed. Based on Management's statement as of 31 December 2018, Management is committed to continue releasing investment in PT Sawit Menang Sejahtera despite a setback in its realization.

Based on the results of the General Meeting of Shareholders dated 24 January, 2017, the GMS approved the plan to sell the assets of the land and office buildings of the directors and according to the letter of payment of obligations. PT Perkebunan Mitra Ogan to PT. Rajawali Nusantara Indonesia No. DIR-MO/RNI/243/VIII/2017, the company releases land assets and building sales of Rp 79,970,100,000 according to the results of the assessment from KJPP (Appraisal firm).

31 Desember 2021

31 December 2021

25. Utang bank

25. Bank loans

	2021	2020	
Induk Perusahaan			 Holding Company
PT Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta	994.000.000.000	601.965.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	365.000.000.000	365.000.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	209.991.000.000	210.000.000.000	Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	121.191.000.000	157.654.206.346	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten Tbk
Jumlah induk Perusahaan	1.690.182.000.000	1.334.619.206.346	Total holding Company
Entitas Anak			 Subsidiaries
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk			PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Rajawali Nusindo	486.350.504.789	426.410.960.847	PT Rajawali Nusindo
Sub jumlah	486.350.504.789	426.410.960.847	Subtotal
PT Bank DKI			PT Bank DKI
PT PG Rajawali I	297.812.500.000	-	PT PG Rajawali I
PT Rajawali Nusindo	150.000.000.000	195.000.000.000	PT Rajawali Nusindo
Sub jumlah	447.812.500.000	195.000.000.000	Subtotal
PT Bank Syariah Indonesia Tbk			PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Rajawali Nusindo	338.261.388.788	465.542.162.971	PT Rajawali Nusindo
Sub jumlah	338.261.388.788	465.542.162.971	Subtotal
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Perkebunan Mitra Ogan	65.775.000.000	60.000.000.000	PT Perkebunan Mitra Ogan
PT PG Candi Baru	49.999.000.548	29.747.712.978	PT PG Candi Baru
PT Rajawali Citramass	22.466.438.740	24.181.780.667	PT Rajawali Citramass
PT Mitra Kerinci	1.711.886.339	3.021.359.866	PT Mitra Kerinci
Sub jumlah	139.952.325.627	116.950.853.511	Subtotal
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten			PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten
PT Rajawali Nusindo	102.561.975.890	30.000.000.000	PT Rajawali Nusindo
PT Mitra Rajawali Banjaran	7.600.000.000	7.600.000.000	PT Mitra Rajawali Banjaran
PT Laras Astra Kartika	2.000.000.000	2.000.000.000	PT Laras Astra Kartika
Sub jumlah	112.161.975.890	39.600.000.000	Subtotal
PT Bank Muamalat Indonesia			PT Bank Muamalat Indonesia
PT Rajawali Nusindo	68.045.094.347	-	PT Rajawali Nusindo
Sub jumlah	68.045.094.347	30.366.763.088	Subtotal
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT GIEB Indonesia	29.505.332.940	30.366.763.088	PT GIEB Indonesia
Sub jumlah	29.505.332.940	30.366.763.088	Subtotal
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk			PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
PT Laras Astra Kartika	-	6.993.369.007	PT Laras Astra Kartika
Sub jumlah	-	6.993.369.007	Subtotal
Jumlah entitas anak	1.622.089.122.381	1.280.864.109.424	Total subsidiaries
Jumlah utang bank	3.312.271.122.381	2.615.483.315.770	Total bank loan

31 Desember 2021

31 December 2021

25. Utang bank (lanjutan)

25. Bank loans (continued)

Induk Perusahaan

Holding company

**PT Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota
Jakarta**

**PT Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota
Jakarta**

Perusahaan memperoleh fasilitas KMK PT Bank DKI berdasarkan SPPK dengan No 3236/SPPK/910/XII/2021 pada tanggal 20 Desember 2021 dengan limit fasilitas kredit sebesar Rp 700.000.000.000 dengan sifat kredit *revolving* dengan ketentuan sebagai berikut :

The Company obtained KMK facility from PT Bank DKI based on SPPK No. 3236/SPPK/910/XII/2021 on 20 December 2021 with a credit facility limit of Rp 700,000,000,000 with a revolving credit character with the following conditions:

Keperluan : Tambahan modal kerja usaha perdagangan gula dan impor gula dan fasilitas ini dapat juga digunakan untuk anak Perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia yang disetujui oleh Bank.

Jenis kredit : KMK – Pinjaman tetap berjangka

Jangka waktu : 12 bulan terhitung mulai tanggal perjanjian kredit.

Provisi : 0,25 % per annum dari limit kredit dan dibayar selambat-lambatnya saat penandatanganan perjanjian kredit.

Suku bunga : 7,75% per tahun. Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan di Bank DKI dan akan diberitahukan kepada Debitur.

Biaya administrasi : Rp 50.000.000.

Pembayaran bunga : Setoran bunga dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 25.

Pembayaran pokok : Sesuai dengan tanggal jatuh tempo promes, maksimal sampai dengan tanggal jatuh tempo fasilitas kredit.

Purpose : Additional working capital for the sugar trading and sugar import business and this facility can also be used for a subsidiary company of PT Rajawali Nusantara Indonesia with bank approval.

Type of credit : KMK – Fixed term loans

Time period : 12 months from the date of the credit agreement.

Provision : 0.25% per annum of credit limit and to be paid no later than the signing of the credit agreement.

Interest rate : 7.75% per annum. The interest rate may change at any time according to the provisions at Bank DKI and will be notified to the debtor.

Administration expense : Rp 50,000,000

Interest payment : Interest is paid every month no later than the 25th.

Principal payment : In accordance with the maturity date of the promissory note, the maximum is up to the maturity date of the credit facility.

31 Desember 2021

31 December 2021

25. Utang bank (lanjutan)

25. Bank loans (continued)

Induk Perusahaan (lanjutan)

Holding companies (continued)

PT Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta (lanjutan)

PT Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta (continued)

Perusahaan memperoleh fasilitas KMK PT Bank DKI berdasarkan SPPK dengan No. 3236/SPPK/910/XII/2021 pada tanggal 20 Desember 2021 dengan limit fasilitas kredit sebesar Rp 700.000.000.000 dengan sifat kredit *revolving* dengan ketentuan sebagai berikut : (lanjutan)

The Company obtained KMK facility from PT Bank DKI based on SPPK No. 3236/SPPK/910/XII/2021 on 20 December 2021 with a credit facility limit of Rp 700,000,000,000 with a revolving credit character with the following conditions: (continued)

- a. Agunan utama
 Piutang usaha sebesar Rp 100.000.000.000 dan persediaan sebesar Rp 200.000.000.000 milik RNI atau milik anak perusahaan, diikat dengan fidusia dan didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia
- b. Agunan Tambahan
 Agunan fixed asset yang diikat dengan hak tanggungan I , dengan nilai pengikatan sesuai daftar rincian agunan sebagai berikut :
1. SHGB No. 463/Perak utara tanggal 29 Oktober 2012 berakhir tanggal 28 Oktober 2032 a.n PT PPEN Rajawali Nusantara Indonesia/ PT RNI (Persero).
 2. SHGB No. 462/Perak utara tanggal 28 Agustus 2012 berakhir tanggal 27 Agustus 2032 a.n PT PPEN Rajawali Nusantara Indonesia/ PT RNI (Persero).
 3. SHGB No. 461/Perak utara tanggal 28 Agustus 2012 berakhir tanggal 27 Agustus 2032 a.n PT PPEN Rajawali Nusantara Indonesia/PT RNI (Persero).

- a. Main collateral
 Trade receivables in the amount of Rp 100,000,000,000 and inventories of Rp 200,000,000,000 belonging to RNI or owned by subsidiaries, bound by fiduciary and registered with the fiduciary registration office.
- b. Additional Collateral
 Fixed asset collateral tied with mortgage I, with the value of the binding according to the detailed list of collateral as follows:
1. SHGB No. 463/Perak Utara dated 29 October 2012 ending on 28 October 2032 a.n PT PPEN Rajawali Nusantara Indonesia/ PT RNI (Persero).
 2. SHGB No. 462/Perak Utara dated 28 August 2012 ending on 27 August 2032 a.n PT PPEN Rajawali Nusantara Indonesia/ PT RNI (Persero).
 3. SHGB No. 461/Perak Utara dated 28 August 2012 ending on 27 August 2032 a.n PT PPEN Rajawali Nusantara Indonesia/PT RNI (Persero).

Perusahaan memperoleh fasilitas KMK PT Bank DKI berdasarkan SPPK dengan No 3236/SPPK/910/XII/2021 pada tanggal 20 Desember 2021 dengan limit fasilitas kredit sebesar Rp 400.000.000.000 dengan sifat kredit *revolving* dengan ketentuan sebagai berikut :

The Company obtained KMK facility from PT Bank DKI based on SPPK No. 3236/SPPK/910/XII/2021 on 20 December 2021 with a credit facility limit of Rp 400,000,000,000 with a revolving credit character with the following conditions:

Keperluan : Pembiayaan modal kerja PT RNI (Persero) dan Anak perusahaan yang disetujui Bank

Jenis kredit : KMK – *Aflop*end

Jangka waktu : 48 bulan terhitung mulai tanggal perjanjian kredit.

Provisi : 0,25% per tahun dari fasilitas kredit yang ditarik dan dibayar selambat-lambatnya saat penarikan kredit.

Purpose : Working capital financing of PT RNI (Persero) and its Subsidiaries approved by the Bank

Type of credit : KMK – *Aflop*end

Time period : 48 months from the date of the credit agreement.

Provision : 0.25% per annum of the credit facility drawn and paid no later than the time of credit withdrawal.

31 Desember 2021

31 December 2021

25. Utang bank (lanjutan)

Induk Perusahaan (lanjutan)

**PT Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota
Jakarta (lanjutan)**

Perusahaan memperoleh fasilitas KMK PT Bank DKI berdasarkan SPPK dengan No 3236/SPPK/910/XII/2021 pada tanggal 20 Desember 2021 dengan limit fasilitas kredit sebesar Rp 400.000.000.000 dengan sifat kredit *revolving* dengan ketentuan sebagai berikut: (lanjutan)

Suku bunga : 7,75% per tahun. Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan di Bank DKI dan akan diberitahukan kepada Debitur.

Biaya administrasi : Rp 50.000.000.

Pembayaran bunga : Setoran bunga dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 25.

Pembayaran pokok : Setoran pembayaran pokok dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 25 sesuai dengan jadwal pembayaran yang tertera pada perjanjian.

Denda tunggakan : 150% dari tingkat suku bunga yang berlaku untuk setiap keterlambatan pembayaran kewajiban.

Commitment fee : Debitur wajib menyetorkan dana sebesar 0,5% dari porsi KMK Aflopend yang tidak ditarik maksimal 30 hari semenjak jangka waktu availability period berakhir.

Asuransi untuk pinjaman ini, selama belum lunas, agunan yang dapat diasuransikan harus diasuransikan minimal asuransi kebakaran pada Perusahaan asuransi rekanan PT Bank DKI dengan syarat *banker's clause* PT Bank DKI dengan nilai pertanggungan minimal sebesar nilai wajar dengan jangka waktu asuransi minimal selama 12 (dua belas) bulan.

25. Bank loans (continued)

Holding companies (continued)

**PT Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota
Jakarta (continued)**

The Company obtained KMK facility from PT Bank DKI based on SPPK No. 3236/SPPK/910/XII/2021 on 20 December 2021 with a credit facility limit of Rp 400,000,000,000 with a revolving credit character with the following conditions: (continued)

Interest rate : 7.75% per year. The interest rate may change at any time according to the provisions at Bank DKI and will be notified to the debtor.

Administration expense : Rp 50,000,000

Interest payment : Interest is paid every month no later than the 25th.

Principal payment : The principal payment deposit is made every month no later than the 25th according to the payment schedule stated in the agreement.

Arrears fines : 150% of the applicable interest rate for any late payment of obligations.

Commitment fee : Debtors are required to deposit 0.5% of the portion of KMK Aflopend that is not withdrawn a maximum of 30 days after the end of the availability period.

Insurance for this loan, as long as it has not been paid off, the collateral that can be insured must be insured with a minimum of fire insurance at a partner insurance company of PT Bank DKI with the banker's clause conditions of PT Bank DKI with a minimum insured value of fair value with a minimum insurance period of 12 (twelve) month.

31 Desember 2021

31 December 2021

25. Utang bank (lanjutan)

Induk Perusahaan (lanjutan)

**PT Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota
Jakarta (lanjutan)**

Khusus untuk agunan mesin-mesin wajib disertai asuransi *machinery breakdown* sebesar nilai pengikatan mesin. Biaya penutupan asuransi menjadi beban debitur. Apabila agunan kredit yang dapat diasuransikan (*insurable*) tersebut telah ditutup di Perusahaan asuransi yang bukan rekanan di Bank DKI maka harus dilakukan endorsement dengan *Banker's Clause* PT Bank DKI dan setelah jatuh tempo harus diasuransikan pada Perusahaan asuransi rekanan PT Bank DKI.

Belum dilakukan pengikatan Hak tanggungan/ penandatanganan SKMHT, serta belum dilakukan addendum perjanjian kredit yang menyatakan bahwa antara fasilitas KMK Pinjaman tetap berjangka dan KMK *Aflop* berlaku *cross collateral* selama masa *availability period* (6 bulan), maka limit fasilitas KMK *Aflop* akan dibekukan sebesar Rp 100.000.000.000.

Limit fasilitas KMK *Aflop* yang dibekukan senilai Rp 100.000.000.000 dapat dipergunakan kembali dengan ketentuan:

- a. Dalam waktu maksimal 6 bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit, SHGB 461, 462, dan 463 yang berlokasi di perak utara, Surabaya telah selesai dilakukan pengikatan hak tanggungan dan dilakukan addendum perjanjian kredit yang menyatakan fasilitas KMK-PTB dan KMK-*Aflop* akan menjadi *cross collateral* atau;
- b. PT RNI (Persero) menyerahkan agunan pengganti dengan nilai minimal Rp 245.364.000.000 (sebesar nilai pasar agunan yang berlokasi di perak utara sesuai SHGB No 461, 462, dan 463 serta agunan yang berlokasi di OKU sesuai SHGB No 1 dan SHGU No 1) dan dapat diikat Hak Tanggungan dengan sempurna maksimal 6 bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit.

Saldo utang bank jangka pendek kepada PT Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 994.000.000.000 dan Rp 601.965.000.000.

25. Bank loans (continued)

Holding companies (continued)

**PT Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota
Jakarta (continued)**

In particular, collateral for machinery must be accompanied by machinery breakdown insurance in the amount of the binding value of the machine. Insurance closing costs are borne by the debtor. If the insurable credit collateral has been closed at an insurance company that is not a partner at Bank DKI, an endorsement must be made with the Banker's Clause PT Bank DKI and after maturity it must be insured at the partner insurance company PT Bank DKI.

*Mortgage rights have not been signed/SKMHT signed, and an addendum to the credit agreement has not been made which states that between the KMK fixed-term loan facility and KMK *Aflop*, cross collateral applies during the availability period (6 months), then the limit for the KMK *Aflop* facility will be frozen at Rp 100,000,000,000.*

*The frozen *Aflop* KMK facility limit of Rp. 100,000,000,000 can be reused with the following conditions:*

- a. *Within a maximum of 6 months from the signing of the credit agreement, SHGB 461, 462, and 463 located in Perak Utara, Surabaya have completed the binding of mortgage rights and an addendum to the credit agreement stating that the KMK-PTB and KMK-*Aflop* facilities will become cross collateral or;*
- b. *PT RNI (Persero) submitted replacement collateral with a minimum value of Rp 245,364,000,000 (amount to the market value of the collateral located in North Perak according to SHGB No. 461, 462, and 463 as well as collateral located in OKU according to SHGB No. 1 and SHGU No. 1) and Mortgage rights can be perfectly tied up to a maximum of 6 months from the signing of the credit agreement.*

Balance of short-term bank loan to PT Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta as of 31 December 2021 and 2020 amounted to Rp 994,000,000,000 and Rp 601,965,000,000, respectively.

31 Desember 2021

31 December 2021

25. Utang bank (lanjutan)

Induk Perusahaan (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit agunan surat berharga dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan perjanjian kredit agunan surat berharga No. CRO.KP/214/KASB/2019 tanggal 17 Juni 2019. Perjanjian kredit bank terdapat penambahan limit fasilitas kredit berdasarkan Addendum I (Pertama) dengan No. TIO.CRO/CCL.538/ADD/2019 tanggal 8 Oktober 2019. Pada tahun 2020 terdapat addendum II (Kedua) berdasarkan perjanjian kredit agunan No. OPT.WCO/CCL.415/ADD/2020 tanggal 15 Juni 2020. Pada tahun 2021 terdapat addendum III (Ketiga) berdasarkan perjanjian kredit agunan No. HBK.GII/SPPK.008/2021 tanggal 8 Juni 2021 dengan syarat dan ketentuan :

Limit kredit	: Rp 365.000.000.000
Keperluan	: Untuk tambahan modal kerja usaha perusahaan
Jenis Kredit	: Kredit agunan surat berharga
Jangka Waktu	: 12 bulan terhitung mulai tanggal perjanjian kredit.
Provisi	: 0% per annum dari limit kredit
Suku Bunga	: 0,5% per annum diatas tingkat suku bunga deposito tertinggi yang menjadi agunan, dibayar setiap bulan.
Agunan kredit	: No rekening 070-02-0609795-3 No seri 737743 atas nama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebesar Rp 365.000.000.000 dan diikat secara gadai dengan nomor WCO.CCL/115/PGD/2020.

Pelunasan kredit dilaksanakan satu kali sebesar baki debit/kredit yang ditarik, paling lambat pada saat fasilitas kredit jatuh tempo. Denda terhadap tunggakan pokok dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan biaya keterlambatan pembayaran kewajiban kredit, dikenakan denda sebesar 5% diatas suku bunga yang berlaku.

Saldo utang bank jangka pendek kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 365.000.000.000 dan Rp 365.000.000.000.

25. Bank loans (continued)

Holding companies (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

The Company obtained a securities collateral credit facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk based on the securities collateral credit agreement No. CRO.KP/214/KASB/2019 Dated 17 June 2019. The bank credit agreement has an additional credit facility limit based on Addendum I (First) with No. TIO.CRO/CCL.538/ADD/2019 8 October 2019. In 2020 there is an addendum II (Second) based on the collateral credit agreement No. OPT.WCO/CCL.415/ADD/2020 dated 15 June 2020. In 2021 there is an addendum III (Third) based on the collateral credit agreement No. HBK.GII/SPPK.008/2021 dated 8 June 2021 with the following terms and conditions:

<i>Credit line</i>	<i>: Rp 365,000,000,000</i>
<i>Purpose</i>	<i>: For additional working capital of company group</i>
<i>Type of Credit</i>	<i>: Collateral credit securities</i>
<i>Time period</i>	<i>: 12 Month starting from the date of agreement</i>
<i>Provision</i>	<i>: 0% per annum on credit limit</i>
<i>Interest Rate</i>	<i>: 0,5% per annum above the highest deposito interest rate for which collateral is paid every month.</i>
<i>Collateral credit</i>	<i>: Account number 070-020609795-3 serial number 737743 in the name of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) in the amount of Rp 365,000,000,000 and is pledged as a lien with the number WCO.CCL/115/PGD/2020.</i>

Repayment of credit is carried out once for debit/credit tray withdrawn no later than when the facility is due. Fines for arrears and other costs incurred in connection with late payment fees for credit obligation are subject to a pinalty of 5%

Balance of short-term bank loan to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as of 31 December 2021 and 2020 amounted to Rp 365,000,000,000 and Rp 365,000,000,000, respectively.

31 Desember 2021

31 December 2021

25. Utang bank (lanjutan)

Induk Perusahaan (lanjutan)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Tahun 2020 terdapat addendum atas perjanjian kredit dengan PT BNI Syariah sesuai dengan surat perjanjian no 064/MSY800/884/IV/2020 Tanggal 9 April 2020 atas perjanjian tahun 2019 sesuai dengan surat perjanjian kredit no BNISy/CRD/138/R Tanggal 8 April 2019 dengan maksimum pembiayaan sebesar Rp 210.000.000.000. Jenis fasilitas pembiayaan ini adalah *Cash Collateral Financing*. Tujuan dari perjanjian kredit untuk penambahan modal kerja PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero). Total Nilai Syirkah atau *share* untuk pembiayaan ini pada tahun 2021 dan 2020 adalah Rp 5.802.948.000.000 dan Rp 7.106.295.513.943.

Perjanjian kredit dengan Bank Syariah Indonesia Tbk ini memiliki jangka waktu 12 bulan sejak penandatanganan akad pembiayaan yaitu terhitung sejak 10 April 2019 sampai dengan 10 April 2020 dan diperpanjang menjadi 10 April 2020 sampai dengan 10 April 2021. Akad yang digunakan adalah akad Musyarakah dengan nisbah bagi hasil untuk PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2019 sebesar 1,70% dan PT Rajawali Nusantara Indonesia sebesar 98,30% sedangkan pada tahun 2020 PT Bank Syariah Indonesia Tbk mendapatkan nisbah bagi hasil sebesar 00,91% dan PT Rajawali Nusantara Indonesia sebesar 99,09%, sedangkan pada bulan November tahun 2021 Bank Syariah Indonesia Tbk posisi nisbah bagi hasil deposito sebesar equivalent 3% p.a. dan nisbah bagi hasil agunan tunai sebesar 3,5% p.a.

Agunan pada perjanjian kredit berupa *cash collateral*/ uang tunai sebesar Rp 221.052.631.579 dalam bentuk deposito di PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang akan diikat gadai. Pelunasan pokok dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo fasilitas.

Saldo utang bank jangka pendek kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 209.991.000.000 dan Rp 210.000.000.000.

25. Bank loans (continued)

Holding companies (continued)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

In 2020 there is extended with credit agreement PT BNI Syariah in accordance with letter no 064/MST800/884/IV/2020 dated 9 April 2020 on 2019 credit agreement with BNI Syariah in accordance with letter no BNISy/CRD/138/R dated 8 April 2019 with maximum financing of Rp 210,000,000,000. This type of financing facility is cash guarantee financing. The purpose of the credit agreement is to increase the working capital of PT Rajawali Nusantara (Persero). Total value of syirkah or share for financing as of 2021 and 2020 amounting to Rp 5,802,948,000,000 and Rp 7,106,295,513,943.

This credit agreement with Bank Syariah Indonesia Tbk has a period of 12 months from the signing of the financing contract, starting from 10 April 2019 to 10 April 2020 and extended to 10 April 2020 until 10 April 2021. The contract used is a Musyarakah contract with a profit sharing ratio for PT Bank Syariah Indonesia Tbk in 2019 it was 1.70% and PT Rajawali Nusantara Indonesia was 98.30% while in 2020 PT Bank Syariah Indonesia Tbk got a profit sharing ratio of 00.91% and PT Rajawali Nusantara Indonesia was 99.09 %, while in November 2021 Bank Syariah Indonesia Tbk positioned the profit-sharing ratio for deposits of equivalent 3% p.a. and cash collateral profit sharing ratio of 3.5% p.a.

The collateral in the credit agreement is in the form of cash collateral in the amount of Rp 221,052,631,579 in the form of a time deposit at PT Bank Syariah Indonesia Tbk which will be tied as a pledge. Principal repayment is paid at once at the maturity date of the facility.

Balance of short-term bank loan to PT Bank Syariah Indonesia Tbk as of 31 December 2021 and 2020 amounted to Rp 209,991,000,000 and Rp 210,000,000,000, respectively.

31 Desember 2021

31 December 2021

25. Utang bank (lanjutan)

Induk Perusahaan (lanjutan)

**PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan
Banten Tbk**

Tahun 2021 terdapat addendum perjanjian dengan No. 001/PK-COMM/KCK/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 atas perjanjian kredit dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk dengan akta No. 914 tanggal 9 Agustus 2019. Tahun 2020 terdapat addendum perjanjian dengan no. 0056/PK-CC/KOM/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 atas perjanjian kredit dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk dengan akta No. 914 tanggal 9 Agustus 2019. Jenis fasilitas kredit yang diberikan adalah Cash Collateral maksimal Rp 1.000.000.000.000. Tujuan penambahan kredit tersebut untuk modal kerja debitur dan grup usaha. Pencairan dapat dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan, dengan *Loan to Value* sebesar 100% dari nilai penempatan giro yang dijadikan agunan. Sifat kredit pada perjanjian kredit ini bersifat *Revolving* dengan ketentuan tidak melebihi plafon yang telah ditetapkan.

Pembiayaan yang diberikan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk jaminannya dalam bentuk deposito, tabungan dan/atau giro pada PT Bank BJB dimana apabila debitur melakukan wanprestasi maka agunan akan dicairkan untuk melunasi seluruh kewajiban debitur. Jangka waktu perjanjian kredit mulai tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan 9 Agustus 2021 dan diperpanjang mulai tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan 9 Agustus 2022 dan dengan bunga yang dibayarkan tanggal 23 setiap bulannya. Pokok akan dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo. Debitur akan bayarkan angsuran bunga tersebut sesuai dengan jadwal angsuran yang telah diberikan. Nilai Provisi dan Administrasi masing-masing sebesar Rp 2.000.000 dengan komitmen 0,25% dari plafon kredit dan spread 0,5% diatas tingkat suku bunga giro yang menjadi jaminan dibayar efektif setiap bulan.

25. Bank loans (continued)

Holding companies (continued)

**PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan
Banten Tbk**

In 2021 there is an addendum to the agreement with No. 001/PK-COMM/KCK/VIII/2021 dated 20 August 2021 on a credit agreement with PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten Tbk with deed No. 914 dated 9 August 2019. In 2020 there is an addendum to the agreement with no. 0056/PK-CC/KOM/VIII/2020 dated 27 August 2020 on a credit agreement with PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten Tbk with deed No. 914 dated 9 August 2019. The type of credit facility provided is Cash Collateral with a maximum of Rp 1,000,000,000,000. The purpose of the additional credit is for working capital for debtors and business groups. The disbursement can be done in stages as needed, with a Loan to Value of 100% of the value of the demand deposit that is used as collateral. The nature of the credit in this credit agreement is revolving with the provision that it does not exceed the predetermined ceiling.

The financing provided by PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten Tbk is guaranteed in the form of deposits, savings and/or current accounts at PT Bank BJB where if the debtor defaults, the collateral will be disbursed to pay off all debtor obligations. The term of the credit agreement starts on 9 August 2020 until 9 August 2021 and is extended from 9 August 2021 until 9 August 2022 and with interest paid on the 23rd of each month. Principal will be paid in one lump sum at maturity. The debtor will pay the interest installments according to the installment schedule that has been given. Provisions and Administration amounted to Rp 2,000,000 each with a commitment of 0.25% of the credit limit and a spread of 0.5% above the interest rate of demand deposits which became collateral to be paid effectively every month.

31 Desember 2021

31 December 2021

25. Utang bank (lanjutan)

Induk Perusahaan (lanjutan)

**PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan
Banten Tbk (lanjutan)**

Terdapat penambahan pinjaman untuk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk pada tahun 2020 dengan perjanjian No. 144/KKO-KO2/SPPK/2020 tanggal 1 April 2020 dengan limit fasilitas sebesar Rp 300.000.000.000 maksimum. Jenis fasilitas KMK R/C Terbatas. Jangka waktu fasilitas kredit adalah 12 bulan sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan 1 April 2021. Bunga untuk fasilitas kredit ini adalah 9,75% per tahun dan biaya provisi sebesar 0,25%. Biaya administrasi dibayarkan sekaligus pada saat penandatanganan perjanjian kredit sebesar Rp 30.000.000. Untuk perjanjian dengan No. 144/KKO-KO2/SPPK/2020 sudah dilunasi pada tahun buku 2021.

Saldo pinjaman bank jangka pendek kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp 121.191.000.000 dan Rp 157.654.206.346.

25. Bank loans (continued)

Holding companies (continued)

**PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan
Banten Tbk (continued)**

There is an additional loan for PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten Tbk in 2020 with agreement No. 144/KKO-KO2/SPPK/2020 dated 1 April 2020 with a maximum facility limit of Rp 300,000,000,000. Limited type of R/C KMK facility. The term of the credit facility is 12 months from 1 April 2020 until 1 April 2021. The interest for this credit facility is 9.75% per annum and the provision fee is 0.25%. The administration fee is paid in one lump sum at the time of signing the credit agreement in the amount of Rp 30,000,000. For agreement with No. 144/KKO-KO2/SPPK/2020 has been paid off in the 2021 financial year.

Balance of short-term bank loan to PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk as of 31 December 2021 and 2020 amounted to Rp 121,191,000,000 and Rp 157,654,206,346, respectively.

31 Desember 2021

31 December 2021

25. Utang bank (lanjutan)

Entitas anak

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

PT Rajawali Nusindo

- a. Kredit Modal Kerja (07)
Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) dengan plafon pinjaman sebesar Rp 90.000.000.000 sesuai Perjanjian Kredit No. 07 tertanggal 15 April 2010. Ketentuan dalam perjanjian telah mengalami beberapa kali perubahan, berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. 07 tertanggal 26 April 2017, perihal perpanjangan jangka waktu kredit sampai dengan tanggal 14 April 2018 dan perubahan tingkat bunga efektif menjadi 10% per tahun. Jangka waktu kredit tersebut telah diperpanjang selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2019 berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (13) 07 pada tanggal 28 September 2018. Berdasarkan perubahan perjanjian kredit No (14) 07 tanggal 24 Juni 2019, jangka waktu perjanjian diperpanjang selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2020 dengan tingkat bunga efektif sebesar 9,75% per tahun. Berdasarkan Perjanjian No. (15) 16 tanggal 28 Mei 2020, jangka waktu kredit diperpanjang sampai dengan tanggal 14 April 2021 dan tingkat bunga efektif menjadi 9,25% per tahun. Berdasarkan Perjanjian No. (17) 7 tanggal 14 Juli 2021, jangka waktu kredit diperpanjang sampai dengan tanggal 14 April 2022 (termasuk perpanjangan sementara 3 bulan sampai dengan 14 Juli 2021) dan bunga 9,25% per tahun..
- b. Kredit Modal Kerja (16)
Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) dengan plafond pinjaman sebesar Rp 25.000.000.000 sesuai Perjanjian Kredit No. 16 tertanggal 11 Juni 2010. Ketentuan dalam perjanjian telah mengalami beberapa kali perubahan, Jangka waktu kredit tersebut telah diperpanjang selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2019 berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (13) 16 pada tanggal 28 September 2018.

25. Bank loans (continued)

Subsidiaries

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

PT Rajawali Nusindo

- a. Working Capital Loan (07)
The Company obtained a Working Capital Loan facility (KMK) with credit limit amounted to Rp 90,000,000,000 in accordance to Credit Agreement No. 07 dated 15 April 2010. The provisions of the agreement have been amended several times, based on the approval of credit agreement amendment No. 07 dated 26 April 2017, regarding extension of credit terms up to 14 April 2018 and effective interest rate changes at 10% per annum. The credit period has been extended for 12 months from 15 April 2018 to 14 April 2019 based on the Agreement to Amend the Credit Agreement Number: (13) 07 on 28 September 2018. Based on the approval of credit agreement amendment No 7 dated 24 June 2019 The credit period has been extended for 12 month from 15 April 2019 to 14 April 2020 and effective interest rate changes at 9,75% per annum. Based on agreement No. (15) 07 dated 28 May 2020, the loan period was extended to 14 April 2021 and the effective interest rate was 9.25%. Based on Agreement No. (17) 7 dated 14 July 2021, the credit period was extended until 14 April 2022 (including a temporary extension of 3 months until 14 July 2021) and the effective interest rate was 9.25% per annum.
- b. Working Capital Loan (16)
The Company obtained a Working Capital Loan (KMK) facility with a loan limit of Rp 25,000,000,000 in accordance to Credit Agreement No. 16 dated 11 June 2010. The provisions in the agreement have been amended several times, The credit period has been extended for 12 months from 15 April 2018 to 14 April .2019 based on the Agreement to Amend the Credit Agreement Number: (13) 16 on 28 September 2018.

31 Desember 2021

31 December 2021

25. Utang bank (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

PT Rajawali Nusindo (lanjutan)

- b. Kredit Modal Kerja (16) (lanjutan)
Perubahan terakhir dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (14) 16 tanggal 24 Juni 2019 dengan jangka waktu kredit diperpanjang selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo kredit yaitu sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2020 dengan tingkat bunga efektif sebesar 9,75% per tahun.

Berdasarkan Perjanjian No. (15) 16 tanggal 28 Mei 2020, jangka waktu kredit diperpanjang sampai dengan tanggal 14 April 2021 dan tingkat bunga efektif menjadi 9,25% per tahun. Berdasarkan Perjanjian No. (17) 16 tanggal 14 Juli 2021, jangka waktu kredit diperpanjang sampai dengan tanggal 14 April 2022 (termasuk perpanjangan sementara 3 bulan sampai dengan 14 Juli 2021) dan tingkat bunga efektif menjadi 9,25% per tahun.

- c. Kredit Modal Kerja (35)
Pada tanggal 27 Juni 2011, Perusahaan kembali memperoleh fasilitas pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) dengan plafon pinjaman sebesar Rp 150.000.000.000 sesuai Perjanjian Kredit Nomor 35. Ketentuan dalam perjanjian telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.35, tertanggal 26 April 2017, perihal perpanjangan jangka waktu kredit sampai dengan tanggal 14 April 2018 dan perubahan tingkat bunga efektif menjadi 10% per tahun. Jangka waktu kredit tersebut telah diperpanjang selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2019. Berdasarkan perubahan perjanjian No.(13) 35, tanggal 24 Juni 2019, jangka waktu pinjaman diperpanjang sampai dengan tanggal 14 April 2020 dan tingkat bunga efektif menjadi 9,75% per tahun. Berdasarkan Perjanjian No. (15) 16 tanggal 28 Mei 2020, jangka waktu kredit diperpanjang sampai dengan tanggal 14 April 2021 dan tingkat bunga efektif menjadi 9,25% per tahun. Penurunan tingkat suku bunga efektif menjadi 9,25% per tahun sesuai surat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. BIN/3.3/667 tanggal 26 November 2020.

25. Bank loans (continued)

Subsidiaries (continued)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (continued)

PT Rajawali Nusindo (continued)

- b. Working Capital Loan (16) (continued)
Based on the approval of credit agreement amendment No. (14) 16 dated 24 June 2019, The credit period has been extended for 12 month from 15 April 2019 to 14 April 2020 and effective interest rate changes at 9,75% per annum.

Based on agreement No. (15) 16 dated 28 May 2020, the loan period was extended to 14 April 2021 and the effective interest rate was 9.25%. Based on Agreement No. (17) 16 dated 14 July 2021, the credit period was extended until 14 April 2022 (including a temporary extension of 3 months until 14 July 2021) and the effective interest rate was 9.25% per annum.

- c. Working Capital Loan (35)
On 27 June 2011, the Company obtained again the Working Capital Loan (KMK) facility with a credit limit amounted to Rp 150,000,000,000 under the Credit Agreement Number 35. The terms of the agreement have been amended several times, based on the final approval of the amendment No.35 credit agreement, on 26 April 2017, regarding the extension of the period credit until the date of 14 April 2018 and change in interest rates effective at 10 % per year. The credit period has been extended for 12 months from 15 April 2018 to 14 April 2019. Based on the amendments No.(13) 35. dated 24 June 2019, the loan period was extended until 14 April 2020 and the effective interest rate became 9.75% per annum. Based on agreement No. (15) 16 dated 28 May 2020, the loan period was extended to 14 April 2021 and the effective interest rate was 9.25%. Reducing the effective interest rate to 9.25% per year in accordance with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk letter No. BIN/3.3/667 dated 26 November 2020.

31 Desember 2021

31 December 2021

25. Utang bank (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

PT Rajawali Nusindo (lanjutan)

- c. Kredit Modal Kerja (35) (lanjutan)
Berdasarkan Perjanjian No. (15) 16 tanggal 28 Mei 2020, jangka waktu kredit diperpanjang sampai dengan tanggal 14 April 2021 dan tingkat bunga efektif menjadi 9,25% per tahun.

- d. Kredit Modal Kerja (21)
Pada tanggal 26 Oktober 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) dengan plafond pinjaman sebesar Rp 235.000.000.000 sesuai Perjanjian Kredit No. 21. Perubahan terakhir dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (5) 21 tanggal 24 Juni 2019 dengan jangka waktu kredit diperpanjang selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo kredit atau sejak 15 April 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2020 dengan tingkat bunga efektif sebesar 9,75% (sembilan koma lima persen) per tahun.

Pada tanggal 26 Oktober 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) dengan plafond pinjaman sebesar Rp 235.000.000.000 sesuai Perjanjian Kredit No. 21. Perubahan terakhir dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (5) 21 tanggal 24 Juni 2019 dengan jangka waktu kredit diperpanjang selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo kredit atau sejak 15 April 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2020 dengan tingkat bunga efektif sebesar 9,75% (sembilan koma lima persen) per tahun. Berdasarkan Perjanjian No. (6) 21 tanggal 28 Mei 2020, jangka waktu kredit diperpanjang sampai dengan tanggal 14 April 2021 dan tingkat bunga efektif menjadi 9,25% per tahun. Berdasarkan Perjanjian No. (8) 21 tanggal 14 Juli 2021, jangka waktu kredit diperpanjang sampai dengan tanggal 14 April 2022 (termasuk perpanjangan sementara 3 bulan sampai dengan 14 Juli 2021) dan tingkat bunga efektif menjadi 9,25% per tahun.

25. Bank loans (continued)

Subsidiaries (continued)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (continued)

PT Rajawali Nusindo (continued)

- c. Working Capital Loan (35) (continued)
Based on agreement No. (15) 16 dated 28 May 2020, the loan period was extended to 14 April 2021 and the effective interest rate was 9.25% per annum.

- d. Working Capital Loan (21)
On 26 October 2016, the Company obtained again the Working Capital Loan (KMK) facility with a credit limit amounted to Rp 235,000,000,000 under the Loan Agreement No. 21. Last amendment with Approval of Amendment to Credit Agreement (5) 21 dated 24 June 2019 with credit term extended for 12 (twelve) months from the due date of the credit or from 15 April 2019 until 14 April 2020 with an effective interest rate of 9.75% per year.

On 26 October 2016, the Company obtained again the Working Capital Loan (KMK) facility with a credit limit amounted to Rp 235,000,000,000 under the Loan Agreement No. 21. Last amendment with Approval of Amendment to Credit Agreement (5) 21 dated 24 June 2019 with credit term extended for 12 (twelve) months from the due date of the credit or from 15 April 2019 until 14 April 2020 with an effective interest rate of 9.75% per year. Based on agreement No. (6) 21 dated 28 May 2020, the loan period was extended to 14 April 2021 and the effective interest rate was 9.25%. Based on Agreement No. (8) 21 dated 14 July 2021, the credit period was extended until 14 April 2022 (including a temporary extension of 3 months until 14 July 2021) and the effective interest rate was 9.25% per annum.

31 Desember 2021

31 December 2021

25. Utang bank (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

PT Rajawali Nusindo (lanjutan)

- e. Kredit Modal Kerja (22)
Pada tanggal 26 Oktober 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) dengan plafond pinjaman sebesar Rp 100.000.000.000 (seratus milyar Rupiah) sesuai Perjanjian Kredit No. 22. Ketentuan dalam perjanjian telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.22, tertanggal 24 Juni 2019 perihal perpanjangan jangka waktu kredit diperpanjang selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 15 April 2019 sampai 14 April 2020 dengan tingkat bunga 9,75% per tahun. Berdasarkan Perjanjian No. (8) 22 tanggal 14 Juli 2021, jangka waktu kredit diperpanjang sampai dengan tanggal 14 April 2022 (termasuk perpanjangan sementara 3 bulan sampai dengan 14 Juli 2021) dan tingkat bunga efektif menjadi 9,75% per tahun.
- f. Penerbitan Garansi Bank
Perusahaan juga memperoleh fasilitas Penerbitan Garansi Bank (PGB) dengan nilai maksimum sebesar Rp 100.000.000.000 sesuai Perjanjian Penerbitan Garansi Bank (PPGB) No. 07 tertanggal 14 Mei 2010. Ketentuan dalam perjanjian telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Penerbitan Bank Garansi No. 7, tertanggal 15 April 2018 perihal perpanjangan jangka waktu kredit dengan jangka waktu dari tanggal 15 April 2017 sampai dengan tanggal 14 April 2019. Jangka waktu kredit tersebut telah diperpanjang selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2019 berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (13) 07 pada tanggal 28 September 2018.

25. Bank loans (continued)

Subsidiaries (continued)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (continued)

PT Rajawali Nusindo (continued)

- e. Working Capital Loan (22)
On 26 October 2016, the Company obtained again the Working Capital Loan (KMK) facility with a credit limit amounted to Rp 100,000,000,000 (one hundred billion Rupiah) under the Loan Agreement No. 22. The terms of the agreement have been amended several times, based on the final approval of the amendment No. 22 credit agreement, dated on 24 June 2019 regarding the extension of the credit for period extended for 12 month from 15 April 2019 to 14 April 2020 with an interest rate of 9,75% per annum. Based on Agreement No. (8) 22 dated 14 July 2021, the credit period was extended until 14 April 2022 (including a temporary extension of 3 months until 14 July 2021) and the effective interest rate was 9.75% per annum.
- f. Issuance of Bank Guarantee
The Company also obtained a Bank Guarantee Issuance Facility (PGB) with a maximum amount of Rp 100,000,000,000 under the Bank Guarantee Issuance Agreement (PPGB) No. 07 dated 14 May 2010. The term of the agreement have been amended several times, the latest based on approval the amendment of the Bank Guarantee Issuance Agreement No. 7, dated 15 April 2018 regarding the extension of the period a loan with the tenor from 15 April 2017 until the date of 14 April 2019. The credit period has been extended for 12 months from 15 April 2018 to 14 April 2019 based on the Agreement to Amend the Credit Agreement No. (13) 07 on 28 September 2018.

31 Desember 2021

31 December 2021

25. Utang bank (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

PT Rajawali Nusindo (lanjutan)

- f. Penerbitan Garansi Bank (lanjutan)
Perubahan terakhir dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Penerbitan Garansi Bank (P4GB) Nomor (14) 07 tanggal 24 Juni 2019 maksimum Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) dengan batas waktu penerbitan Garansi Bank diperpanjang selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo atau terhitung sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2020. Perubahan terakhir perjanjian penerbitan fasilitas garansi bank Nomor (15) 07 tanggal 28 Mei 2020 dengan jangka waktu yang diperpanjang selama 12 bulan dari tanggal 15 April 2020 sd 14 April 2021. Berdasarkan perjanjian No. (15) 07 tanggal 14 Juli 2021, jangka waktu pinjaman diperpanjang sampai dengan tanggal 14 April 2022 (termasuk perpanjangan sementara 3 bulan sampai dengan 14 Juli 2021).

g. *Letter of Credit (L/C)*

Perusahaan memperoleh fasilitas Pembukaan *Letter of Credit (PLC)* dengan nilai maksimum sebesar USD 3,315.650 sesuai Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembukaan *Letter of Credit (P4LC)* No. 08 tertanggal 14 Mei 2010. Ketentuan dalam perjanjian telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Penerbitan Bank Garansi No.8, tertanggal 26 April 2017 perihal perpanjangan jangka waktu kredit dari 15 April 2017 sampai dengan tanggal 14 April 2018.

Batas waktu pembukaan L/C tersebut telah diperpanjang selama 12 bulan sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2019, termasuk perpanjangan sementara 3 bulan sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018 berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembukaan L/C No. (12) 08 tanggal 28 September 2018. Jangka waktu fasilitas L/C diperpanjang selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo kredit yaitu sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2020.

25. Bank loans (continued)

Subsidiaries (continued)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (continued)

PT Rajawali Nusindo (continued)

- f. *Issuance of Bank Guarantee (continued)*
The latest amendment to the Approval to Amendment of the Bank Guarantee Issuance Agreement (P4GB) Number (14) 07 dated 24 June 2019 a maximum of Rp 100,000,000,000 (one hundred billion rupiahs) with the deadline for issuing Bank Guarantees extended for 12 (twelve) months from the due date or from 15 April 2019 to 14 April 2020. The latest amendment to the agreement for the issuance of bank guarantee facility Number (15) 07 dated 28 May 2020 with a period extended for 12 months from 15 April 2020 to 14 April 2021. Based on agreement No. (15) 07 dated 14 July 2021, the loan term was extended until 14 April 2022 (including a temporary extension of 3 months until 14 July 2021).

g. *Letter of Credit (L/C)*

The Company obtained an Opening Letter of Credit (PLC) facility with maximum value of USD 3,315,650 in accordance with Opening Letter of Credit Agreement (P4LC) No. 08 dated 14 May 2010. The term of the agreement have been amended several times, the latest based on approval of the amendment of the Bank Guarantee Issuance Agreement No. 8, dated 26 April 2017 regarding the extension of the period a loan with the tenor from 15 April 2017 until the date of 14 April 2018.

The deadline for opening L/C has been extended for 12 months from 15 April 2018 to 14 April 2019, including a temporary extension of 3 months from 15 April 2018 to 14 July 2018 based on the Agreement to Amend the L/C Opening Facility Agreement. No. (12) 08 dated 28 September 2018. The term of the L/C facility has been extended for 12 (twelve) months since the credit due date on 15 April 2019 until 14 April 2020.

31 Desember 2021

31 December 2021

25. Utang bank (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

PT Rajawali Nusindo (lanjutan)

g. *Letter of Credit (L/C)* (lanjutan)

Berdasarkan Perjanjian Perpanjangan Plafond L/C impor atau SKBDN No. BIN/3.3/272/R tanggal 15 April 2020, jangka waktu pinjaman diperpanjang sampai dengan tanggal 14 April 2021.

Berdasarkan perubahan perjanjian pemberian fasilitas pembukaan *letter of credit (L/C)* No. (15) 08 tanggal 28 Mei 2020 senilai maksimal USD 3.315.650 diperpanjang sampai dengan tanggal 14 April 2021.

Berdasarkan Perjanjian Perpanjangan Plafond L/C impor atau SKBDN No. (17) 08 tanggal 14 Juli 2021, jangka waktu pinjaman diperpanjang sampai dengan tanggal 14 April 2022 (termasuk perpanjangan sementara 3 bulan selama 15 April 2021 sampai dengan 14 Juli 2021).

Jaminan atas fasilitas-fasilitas pinjaman tersebut di atas (jaminan silang) berupa tanah dan bangunan kantor serta gudang yang terletak di Kota Bogor dan Kabupaten Bekasi yang telah dibebankan hak tanggungan peringkat pertama senilai Rp 41.749.240.000, persediaan barang senilai Rp 369.985.040.456 serta jaminan perusahaan dari PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), sebagai induk Perusahaan.

Saldo Pinjaman Modal Kerja tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 486.350.504.789 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp 426.410.960.847.

PT Bank DKI

PT Rajawali Nusindo

Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman Kredit *Cash Collateral* dengan plafond pinjaman sebesar Rp 140.000.000.000 sesuai Perjanjian Kredit No. 0784/GKM/V/2019 tanggal 27 Mei 2019.

Berdasarkan akta pengakuan utang No. 2018/GKM/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019, plafon sebesar Rp 140.000.000.000 telah diubah menjadi Rp 150.000.000.000. Pinjaman ini dijamin dengan deposito sebesar Rp 150.000.000.000 atas nama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).

25. Bank loans (continued)

Subsidiaries (continued)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (continued)

PT Rajawali Nusindo (continued)

g. *Letter of Credit (L/C)* (continued)

Based on the Import L/C Ceiling Extension Agreement or SKBDN No. BIN/3.3/272/R dated 15 April 2020, the loan period will be extended until 14 April 2021.

Based on the amendment to the agreement for the granting of letter of credit (L/C) No. (15) 08 opening facility dated 28 May 2020, with a maximum value of USD 3,315,650, extended until 14 April 2021.

Based on the Import L/C Ceiling Extension Agreement or SKBDN No. (17) 08 dated 14 July 2021, the loan term was extended until 14 April 2022 (including a temporary extension of 3 months from 15 April 2021 to 14 July 2021).

Collaterals for the loan facilities mentioned above (cross collaterals) consist of land and office buildings and warehouses located in Bogor City and Bekasi Regency, which have been charged with the first rank mortgages valued at Rp. 41,749,240,000, inventory valued at Rp. 369,985,040,456 and corporate guarantee from PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), as the parent company.

The balance of working capital loan dated 31 December 2021 amounting Rp 486,350,504,789 and 31 December 2020 amounting to Rp 426,410,960,847.

PT Bank DKI

PT Rajawali Nusindo

The Company obtained a Cash Collateral Loan facility with a loan ceiling of Rp 140,000,000,000 in accordance with Credit Agreement No. 0784/GKM/V/2019 dated 27 May 2019.

Based on the debt recognition deed No. 2018/GKM/XII/2019 dated 13 December 2019, the ceiling of Rp 140,000,000,000 has been changed to Rp 150,000,000,000. This loan is secured by deposit amounted to Rp 150,000,000,000 on behalf of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).

31 Desember 2021

31 December 2021

25. Utang bank (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

PT Bank DKI (lanjutan)

PT Rajawali Nusindo (lanjutan)

Jangka waktu pinjaman ini adalah selama 12 bulan dengan suku bunga 0,75% dari suku bunga deposito. Jatuh tempo pinjaman ini tanggal 24 Mei 2020.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. (4) tanggal 27 Agustus 2020, jangka waktu pinjaman diperpanjang sampai dengan tanggal 27 April 2021 dan tingkat bunga efektif menjadi 9,25% per tahun.

Berdasarkan addendum perjanjian kredit No.04 tanggal 16 Juli 2021, jangka waktu diperpanjang sampai dengan 16 Juli 2022 dan tingkat bunga efektif menjadi 9,25% per tahun.

Saldo utang bank jangka pendek PT Rajawali Nusindo dari PT Bank DKI pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 150.000.000.000 dan Rp 195.000.000.000.

PT PG Rajawali I

Entitas memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dari PT Bank DKI berdasarkan perjanjian No. R.IV.08.CRO/BCO/03/2021 tanggal 22 Maret 2021, sebagai berikut:

Plafon : Rp 260.000.000.000
Bunga : 9,50% per tahun
Jangka waktu : 6 Maret 2021 sampai dengan 6 Juni 2021

Per 31 Desember 2020, Entitas tidak menggunakan fasilitas ini. Entitas telah melunasi fasilitas ini pada 22 Juni 2021 berdasarkan surat No. B.227-CRO/BCD/06/2021.

Entitas memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dari PT Bank DKI berdasarkan perjanjian No.1026/SPPK/910/V/2021 tanggal 6 Mei 2021 dan telah diaktakan melalui Akta No.09 tanggal 25 Mei 2021 di hadapan Dr. Agung Iriantoro SH.,MH., Notaris di Jakarta Selatan, sebagai berikut:

Plafon : Rp 300.000.000.000
Bunga : 8,25% per tahun
Jangka waktu : 12 bulan sampai dengan 24 Mei 2022

25. Bank loans (continued)

Subsidiaries (continued)

PT Bank DKI (continued)

PT Rajawali Nusindo (continued)

This loan period is 12 months with a interest rate of 0,75% of the deposit interest rate. The loan maturity is dated 24 May 2020.

Based on the Credit Agreement No. (4) dated 27 August 2020, the loan term was extended until 27 April 2021 and the effective interest rate is 9.25% per annum.

Based on the addendum to the credit agreement No. 04 dated 16 July 2021, the term was extended until 16 July 2022 and the effective interest rate is 9.25% per annum.

The balance of PT Rajawali Nusindo short-term bank loans from PT Bank DKI per 31 December 2021 and 2020 amounted to Rp 150,000,000,000 and Rp 195.000.000.000, respectively.

PT PG Rajawali I

The Entity obtained a working capital loan facility from PT Bank DKI based on agreement No. R.IV.08.CRO/BCO/03/2021 dated 22 March 2021, as follows:

*Credit line : Rp 260,000,000,000
Interest : 9,50% per annum
Time period : 6 March 2021 until 6 June 2021*

Per 31 Desember 2020, Entitas tidak menggunakan fasilitas ini. Entitas telah menikmati fasilitas ini pada 22 Juni 2021 berdasarkan surat No. B.227-CRO/BCD/06/2021.

The Entity obtained a working capital loan facility from PT Bank DKI based on agreement No. 1026/SPPK/910/V/2021 dated 6 May 2021 and has been notarized through Deed No. 09 dated 25 May 2021 in the presence of Dr. Agung Iriantoro SH., MH., Notary in South Jakarta, as follows:

*Credit line : Rp 300,000,000,000
Interest : 8,25% per annum
Time period : 12 months to 24 May 2022.*

31 Desember 2021

31 December 2021

25. Utang bank (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

PT Bank DKI (lanjutan)

PT PG Rajawali I (lanjutan)

Pinjaman tersebut dijamin dengan:

- a. Piutang dagang dan/ atau persediaan senilai Rp 100.000.000.000.
- b. Tanah yang berlokasi di unit-unit Entitas (Unit Krebet Baru dan Unit Rejo Agung Baru) yang dijamin dengan Hak Tanggungan I sebesar Rp 468.102.300.000.

Saldo utang bank jangka pendek PT PG Rajawali I dari PT Bank DKI pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 297.812.500.000 dan Nihil.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

PT Rajawali Nusindo

Berdasarkan akad plafon No. 06 tanggal 24 April 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Arminawan, SH, Notaris di Jakarta, Perusahaan telah menerima fasilitas pembiayaan dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk dengan maksimum plafond sebesar Rp 250.000.000.000.

Berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 11 Juli 2019 Notaris Arminawan, SH. perihal Perubahan Plafon Pembiayaan, nilai fasilitas pembiayaan ditingkatkan menjadi Rp 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) dengan jangka waktu fasilitas 12 (dua belas) bulan terhitung dari tanggal 24 April 2019 sampai dengan 23 April 2020.

Berdasarkan Adendum Akad Plafon Pembiayaan Nomor 190/ADD-ADMP/2020 tanggal 09 September 2020 yang dibuat dibawah tangan dengan perpanjangan jangka waktu selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan 23 April 2021.

Jaminan atas fasilitas pinjaman tersebut diatas berupa piutang senilai Rp 150.000.000.000, persediaan barang senilai 150 Miliar, tanah terletak di Minahasa, Sulawesi Utara yang telah dibebankan diperingkat pertama, tanah terletak di Denpasar serta Lampung dan diikat gadai.

25. Bank loans (continued)

Subsidiaries(continued)

PT Bank DKI (continued)

PT PG Rajawali I (continued)

The loan is secured by:

- a. Accounts receivable and/ or inventories worth Rp 100,000,000,000.
- b. Land located in units of the Entity (Unit Krebet Baru and Unit Rejo Agung Baru) which are guaranteed by Mortgage I amounting to Rp 468,102,300,000.

The balance of PT PG Rajawali I short-term bank loans from PT Bank DKI per 31 December 2021 and 2020 amounted to Rp 297,812,500,000 and Nil, respectively.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

PT Rajawali Nusindo

Based on the ceiling agreement No. 06 dated 24 April 2018 made by and before Arminawan, SH, a Notary in Jakarta, the Company has received a financing facility from PT Bank Syariah Indonesia Tbk with a maximum ceiling of Rp 250,000,000,000.

Based on Deed Number 03 dated 11 July 2019 Notary Arminawan, SH. Regarding the Change in Financing Ceiling, the value of the financing facility is increased to Rp 500,000,000,000 (five hundred billion rupiah) with a facility period of 12 (twelve) months starting from 24 April 2019 to 23 April 2020.

Based on the Financing Ceiling Agreement Addendum Number 190/ADD-ADMP/2020 dated 9 September 2020 which was made under hand with an extension of the period of 12 months from 24 April 2020 to 23 April 2021.

Collateral for the loan facility is in the form of receivables worth Rp 150,000,000,000, inventory of goods worth 150 billion, land is in Minahasa, North Sulawesi, which has been charged at the first rank, land is in Denpasar and Lampung and tied up with pawns.

31 Desember 2021

31 December 2021

25. Utang bank (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (lanjutan)

PT Rajawali Nusindo

Saldo utang Bank PT Rajawali Nusindo dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 338.261.388.788 dan Rp 465.542.162.971.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

PT Perkebunan Mitra Ogan

Perjanjian Kredit KMK PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk beberapa kali mengalami perpanjangan. Pada tanggal 8 Januari 2018 berdasarkan Surat dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. R.II.05-OKD/DKR-2/01/2018 terkait perubahan syarat-syarat dan ketentuan fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

Plafon kredit	: Rp 60.000.000.000
Keperluan	: Untuk tambahan modal kerja PT Perkebunan Mitra Ogan dalam rangka mendukung operasional 2 PMKS dengan total kapasitas 90 Ton TBS/Jam
Jenis Kredit	: Kredit Modal Kerja
Jangka Waktu	: 24 November 2017 s.d 24 November 2018. Sampai dengan 31 Desember 2019, tidak ada perjanjian baru atau perpanjangan.
Provisi	: 0,1% dari total plafond dan dipungut sekaligus pada saat penandatanganan kredit
Suku Bunga	: 10,5% per tahun, dibayarkan secara tertib setiap bulan setiap tanggal realisasi. Suku bunga ini bersifat akan direviu (<i>reviewable</i>) setiap saat ketentuan suku bunga berlaku di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Perubahan suku bunga diberitahukan secara tertulis dan merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kredit serta mengikat debitur.

25. Bank loans (continued)

Subsidiaries(continued)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (continued)

PT Rajawali Nusindo

The balance of PT Rajawali Nusindo short-term bank loans from PT Bank Syariah Indonesia Tbk per 31 December 2021 and 2020 amounted to Rp 338,261,388,788 and Rp 465,542,162,971, respectively.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

PT Perkebunan Mitra Ogan

Loan Agreement from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk for several times experienced extensions. On 8 January 2018 based on a letter from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. R.II.05-OKD/DKR-2/01/2018 regarding changes to the terms and conditions of credit facilities as follows :

<i>Credit line</i>	<i>: Rp 60,000,000,000</i>
<i>Purpose</i>	<i>: For additional working capital of PT Perkebunan Mitra Ogan in order to support 2 PMKS operations with total capacity of 90 Ton TBS/Hour</i>
<i>Type of Credit</i>	<i>: Working Capital Loan</i>
<i>Time period</i>	<i>: 24 November 2017 up to 24 November 2018. As of 31 December 2019, there are no new agreements or extensions.</i>
<i>Provision</i>	<i>: 0.1% of the total plafond and collected at the same time at the signing of the credit</i>
<i>Interest Rate</i>	<i>: 10.5% per annum, paid on an orderly manner every month on every realization date. This interest rate will be reviewed at any time the interest rate provisions applied at PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Interest rate changes are notified in writing and constitute a unity with the credit agreement and bind the debtor.</i>

31 Desember 2021

31 December 2021

25. Utang bank (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

PT Perkebunan Mitra Ogan (lanjutan)

Agunan :

- a. Agunan pokok proyek MUBA 1
- Kebun inti, HGU inti seluas 4.430 Ha (saat ini seluas 1.852,56 Ha telah terbit HGU dan seluas 2.577,44 Ha masih dalam proses sertifikasi).
 - Kebun plasma, SHM masing-masing petani untuk luasan 2.900 Ha masih dalam proses sertifikasi.
 - Persediaan, berupa fidusia persediaan bahan dengan nilai penjaminan sebesar Rp 74.755.000.000.
- b. Agunan tambahan proyek MUBA 1
- Tanah beserta segala sesuatu yang ada di atas HGU No.2 seluas 2.513,5 Ha yang terletak di Desa Pagar Gunung dan Kota Baru Kec. Lubai, Kab. Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan atas nama PT Perkebunan Mitra Ogan. Atas tanah tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebesar Rp 76.625.000.000 dan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Kedua sebesar Rp 79.375.000.000.
- c. Agunan pokok proyek MUBA 2 dan Semidang Aji serta PMKS
- Kebun inti:
- MUBA tahap 2 (Kelapa Sawit), HGU inti (saat ini masih izin lokasi) seluas 585 Ha.
 - MUBA tahap 2 (Karet), HGU Inti (saat ini masih izin lokasi) seluas 294,18 Ha.
 - Semidang Aji (Kelapa Sawit), HGU inti (saat ini sudah HGU seluas 532,27 Ha dan lainnya masih berupa ijin lokasi) kelapa sawit seluas 2.070 Ha.
 - PMKS Mesin-mesin, sarana dan prasarana.
- Kebun Plasma:
- MUBA tahap 2 (Kelapa Sawit), SHM masing-masing petani plasma (saat ini masih berupa Surat Pengakuan Hak atas Tanah) seluas 1.210 Ha.

25. Bank loans (continued)

Subsidiaries(continued)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (continued)

PT Perkebunan Mitra Ogan (continued)

Collateral :

- a. The main collateral for the MUBA 1 project
- Nucleus plantation, nucleus HGU covering an area of 4,430 Ha (currently an area of 1,852.56 Ha has been issued a HGU and an area of 2,577.44 Ha is still in the certification process).
 - Plasma plantations, SHM of each farmer for an area of 2,900 Ha are still in the certification process.
 - Inventories, in the form of fiduciary stock of materials with a guaranteed value of Rp 74,755,000,000.
- b. Additional collateral for the MUBA 1 project
- The land along with everything that is above HGU No. 2 covering an area of 2,513.5 Ha which is located in Pagar Gunung Village and Kota Baru District. Lubai, Kab. Muara Enim, South Sumatra Province on behalf of PT Perkebunan Mitra Ogan. The land has been tied with a First Rank Mortgage of Rp 76,625,000,000 and a Second Rank Mortgage Certificate of Rp 79,375,000,000.
- c. Principal collateral for MUBA 2 and Semidang Aji projects and PMKS
- Kebun inti:
- MUBA phase 2 (Palm Oil), core HGU (currently still a location permit) covering an area of 585 Ha.
 - MUBA phase 2 (Rubber), Core HGU (currently still a location permit) covering an area of 294.18 Ha.
 - Semidang Aji (Palm Oil), core HGU (currently 532.27 Ha has HGU and others are still in the form of location permits) palm oil covering an area of 2,070 Ha.
 - PMKS Machinery, facilities and infrastructure.
- Kebun Plasma:
- MUBA phase 2 (Palm Oil), Certificate of Ownership of each plasma farmer (currently still in the form of Letter of Recognition of Land Rights) covering an area of 1,210 Ha.

31 Desember 2021

31 December 2021

25. Utang bank (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

PT Perkebunan Mitra Ogan (lanjutan)

d. Agunan tambahan proyek PT Perkebunan Mitra Ogan

- Tanah beserta segala sesuatu yang ada di atas HGU No. 1 seluas 1.173,30 Ha yang terletak di Desa Peninjauan, Kec. Peninjauan, Kab. OKU, Provinsi Sumatera Selatan atas nama PT Perkebunan Mitra Ogan, telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebesar Rp 35.000.000.000.
- Tanah beserta segala sesuatu yang ada di atas HGU No. 1 seluas 2.103,72 Ha yang terletak di Desa Lunggaian, Kec Peninjauan, Kab OKU, Provinsi Sumatera Selatan atas nama PT Perkebunan Mitra Ogan, telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebesar Rp 65.000.000.000.

Saldo utang bank jangka pendek PT Perkebunan Mitra Ogan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 65.775.000.000 dan Rp 60.000.000.000.

PT PG Candi Baru

Entitas memperoleh fasilitas pinjaman jangka pendek berupa tambahan modal kerja industry gula dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada tanggal 23 Juni 2016, dengan Perjanjian Fasilitas Kredit No. B.4073KC/IX/ADK/06/2016, atas perjanjian tersebut telah diperpanjang dengan perjanjian kredit No. B.2824RO-SUB/COP/XI/2021 tanggal 19 November 2021.

Jenis kredit : Kredit Modal Kerja
Plafon : Rp 50.000.000.000
Bunga : 12% per tahun
Provisi kredit : 0,25%
Administrasi : Rp 25.000.000
Jangka waktu : 12 bulan dihitung mulai tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan 5 Juni 2022.

25. Bank loans (continued)

Subsidiaries(continued)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (continued)

PT Perkebunan Mitra Ogan (continued)

d. Additional collateral for PT Perkebunan Mitra Ogan project

- Land and everything that is above HGU No. 1 area of 1.173.30 Ha which is located in Peninjauan Village, Kec. Review, Kab. OKU, South Sumatra Province on behalf of PT Perkebunan Mitra Ogan, has been installed with a First Rank Mortgage of Rp 35,000,000,000.
- Land and everything that is above HGU No. 1 area of 2,103.72 Ha located in Lunggaian Village, Peninjauan District, OKU Regency, South Sumatra Province on behalf of PT Perkebunan Mitra Ogan, has installed First Rank Mortgage of Rp 65,000,000,000.

The balance of short-term bank loan of PT Perkebunan Mitra Ogan from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as of 31 December 2021 and 2020 amounted to Rp 65,775,000,000 and Rp 60,000,000,000, respectively.

PT PG Candi Baru

The entity obtained a short-term loan facility in the form of additional working capital for the sugar industry from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk on 23 June 2016, with a Credit Facility Agreement No. B.4073KC/IX/ADK/06/2016, the agreement has been extended with a credit agreement No. B.2824RO-SUB/COP/XI/2021 dated 19 November 2021.

Types of credit : Working Capital Loan
Credit line : Rp 50,000,000,000
Interest : 12% per annum
Credit provision : 0.25%
Administration : Rp 25,000,000
Time period : 12 months starting from 5 June 2021 until 5 June 2022.

31 Desember 2021

31 December 2021

25. Utang bank (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
(lanjutan)**

PT PG Candi Baru (lanjutan)

Pinjaman tersebut diatas dijaminkan dengan :

- Agunan pokok berupa Piutang yang dimiliki oleh PG Candi Baru diikat secara fidusia sebesar Rp26.906.786.000 dan Persediaan yang berada di lokasi usaha di Jalan Raya Candi No. 10 Kabupaten Sidoarjo diikat secara fidusia sebesar Rp 15.000.993.000 dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia.
- Agunan tambahan berupa tanah dan bangunan Pabrik dengan luas tanah sebesar 44.240 m² yang berlokasi di Jl Raya Candi No. 5 Kabupaten Sidoarjo dengan bukti kepemilikan SHGB No. 5 berlaku sampai 21 Agustus 2028 yang telah diikat dengan HT I sebesar Rp 10.000.000.000, HT II sebesar Rp 28.000.000.000, HT III sebesar Rp 12.000.000.000, dan diteruskan selanjutnya dengan HT IV sebesar Rp9.000.000.000.

Saldo utang bank jangka pendek PT PG Candi Baru ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 49.999.000.548 dan Rp 29.747.712.978.

PT Rajawali Citramass

Berdasarkan Offering Letter BRI No.B.2322/KW-IX/OPK/07/2021 tanggal 6 Juli 2021 dan akta notaris No.51 tanggal 15 Juli 2021 dihadapan Notaris Katarina Dyanawati, S.H., Sp.1., Entitas melakukan restrukturisasi ke-2 pinjaman Kredit Modal Kerja yang mulai berlaku pada bulan Mei 2021.

Jenis pinjaman Kredit Modal Kerja berubah dari KMK W/A menjadi KMK Co. Menurun. Fasilitas Kredit Modal Kerja diturunkan dari Rp 22.466.438.740 menjadi Rp 24.181.780.667.

Bunga pinjaman tetap sebesar 7% (tujuh persen) per tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 3% (tiga persen) dibayar tertib tiap bulan sesuai tanggal realisasi restrukturisasi kredit.
- b. 4% (empat persen) ditunda. Akumulasi bunga yang ditunda sampai dengan bulan Desember tahun berjalan dibayar pada bulan Desember tahun yang bersangkutan, dan pada akhir periode restrukturisasi.

25. Bank loans (continued)

Subsidiaries(continued)

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
(continued)**

PT PG Candi Baru (continued)

The above loans are secured by :

- The principal collateral in the form of accounts receivable owned by PG Candi Baru is bound in a fiducia amounting to Rp 26,906,786,000 and Inventory located at the business location on Jalan Candi No. 10 Sidoarjo Regency is bound by fiducia in the amount of Rp 15,000,993,000 and registered with the Fiducia Registration Office.
- Additional collateral in the form of land and factory buildings with a land area of 44,240 sqm located on Jl Raya Candi No. 5 Sidoarjo Regency with proof of ownership of SHGB No. 5 until 21 August 2028 which has been bound with HT I in the amount of Rp 10,000,000,000, HT II in the amount of Rp 28,000,000,000, HT III of Rp 12,000,000,000, and continued with HT IV in the amount of Rp 9,000,000,000.

The balance of PT PG Candi Baru's short-term bank loan to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as of 31 December 2021 and 2020 amounting to Rp 49,999,000,548 and Rp 29,747,712,978, respectively.

PT Rajawali Citramass

Based on BRI Offering Letter No. B.2322/KW-IX/OPK/07/2021 dated 6 July 2021 and notarial deed No. 51 dated 15 July 2021 before Notary Katarina Dyanawati, SH, Sp.1., The Entity restructured the 2nd Working Capital Loans which come into force in May 2021.

The type of working capital loan has changed from KMK W/A to KMK Co. Decrease. The Working Capital Credit Facility was reduced from Rp 22,466,438,740 to Rp 24,181,780,667.

Fixed loan interest at 7% (seven percent) per annum, with the following conditions:

- a. 3% (three percent) is paid orderly every month according to the date of the credit restructuring realization.
- b. 4% (four percent) was postponed. Accumulated interest which is postponed until December of the current year is paid in December of the current year, and at the end of the restructuring period.

31 Desember 2021

31 December 2021

25. Utang bank (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
(lanjutan)**

PT Rajawali Citramass (lanjutan)

Jangka waktu pinjaman berubah dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan sejak akad kredit restrukturisasi, dengan jadwal angsuran pokok pinjaman sebagai berikut:

- Pembayaran pokok pinjaman dari bulan 1 (satu) sampai dengan bulan 23 (dua puluh tiga) dari tanggal akad restrukturisasi sebesar Rp 160.000.000 per bulan.
- Pembayaran pokok pinjaman bulan 24 (dua puluh empat) dari tanggal akad restrukturisasi sebesar Rp 19.950.741.974.

Saldo utang bank jangka pendek PT Rajawali Citramass ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 22.466.438.740 dan Rp 24.181.780.667.

PT Mitra Kerinci

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. B-350-KC.III/ADK/11/2019 tanggal 16 November 2019. Pada tahun 2019 telah dilakukan Addendum suspensi perjanjian kredit, yaitu sesuai dengan akta perjanjian No. 50 tanggal 29 November 2019 Fasilitas kredit modal kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

Jenis kredit : Kredit Modal Kerja
Plafon : Rp 1.900.000.000
Bunga : 9,95% per tahun
Jangka waktu : 29 November 2019 sampai dengan 29 November 2020

Agunan : Invoice mesin ECP DRYER 4 Feet (lengkap HE Tungku) diikat dengan Feduciare Eigendom Overdracht No. 01 sebesar Rp 671.000.000

25. Bank loans (continued)

Subsidiaries(continued)

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
(continued)**

PT Rajawali Citramass (continued)

The loan term has changed from 12 (twelve) months to 24 (twenty four) months since the restructuring credit agreement, with the principal loan installment schedule as follows:

- Payment of loan principal from month 1 (one) to month 23 (twenty three) from the date of the restructuring agreement, amounting to Rp 160,000,000 per month.
- Payment of principal for 24 (twenty four) months from the date of the restructuring agreement amounting to Rp 19,950,741,974.

The balance of PT Rajawali Citramass's short-term bank loan to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as of 31 December 2021 and 2020 amounting to Rp 22,466,438,740 and Rp 24,181,780,667, respectively.

PT Mitra Kerinci

Based on Credit Agreement No. B-350-KC.III/ADK/11/2019 dated 16 November 2019. In 2019 an Addendum was suspended for the credit agreement, in accordance with the agreement deed No. 50 dated 29 November 2019 Working capital credit facilities with the following conditions:

Types of credit : Working Capital Loan
Credit line : Rp 1,900,000,000
Interest : 9.95% per annum
Time period : 29 November 2019 up to 29 November 2020

Guarantee : ECP DRYER 4 Feet machine invoice (complete HE Furnace) tied with Feduciare Eigendom Overdracht No. 01 amounting to Rp 671,000,000

31 Desember 2021

31 December 2021

25. Utang bank (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
(lanjutan)**

PT Mitra Kerinci (lanjutan)

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. B - 296 - KC.III/ ADK/ 12/ 2016 tanggal 27 Desember 2016. Pada tahun 2019 telah dilakukan Addendum suspensi perjanjian kredit, yaitu sesuai dengan akta perjanjian No. 40 tanggal 28 November 2019 Fasilitas kredit investasi dengan ketentuan sebagai berikut :

Jenis kredit : Kredit Modal Kerja
Plafon : Rp 2.400.000.000
Bunga : 9,5% per tahun
Jangka waktu : 27 November 2018 sampai dengan 27 November 2019

Berdasarkan Perjanjian No. B-350-KC.III/ADK/11/2019 tanggal 29 November 2019, fasilitas Kredit Investasi dengan ketentuan sebagai berikut :

Jenis kredit : Kredit Investasi
Bunga : 9,95 per tahun
Jangka waktu : 29 November 2019 sampai dengan 29 November 2020.

Berdasarkan Perjanjian No. B-350-KC.III/ADK/11/2019 tanggal 29 November 2019, fasilitas Kredit Investasi dengan ketentuan sebagai berikut : (lanjutan)

Agunan : 2 unit kendaraan, yaitu merek Toyota, tipe Kijang Innova G DSL, tahun 2011, warna silver metalik, nomor polisi BA 1097 RV atas nama PT Mitra Kerinci diikat secara *Fidusia Notariil* dan didaftarkan pada lembaga fidusia sebesar Rp 160.000.000. dan merek Isuzu, type NMR 71 T HD 5,8, tahun 2016, warna putih, nomor polisi BA 9658 QU diikat dengan *Feduciare Eigendom Overdracht* No. 01 sebesar Rp 671.000.000.

25. Bank loans (continued)

Subsidiaries(continued)

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
(continued)**

PT Mitra Kerinci (continued)

Based on Credit Agreement No. B-296-KC.III/ADK/12/2016 dated 27 December 2016. In 2019 the Addendum has been suspended for credit agreements, namely in accordance with the agreement deed No. 40 dated 28 November 2019. Investment Credit facilities with the following conditions :

Types of credit : Working Capital Loan
Credit line : Rp 2,400,000,000
Interest : 9.5% per annum
Time period : 27 November 2018 until 27 November 2019

Based on Agreement No. B-350-KC.III/ADK/11/2019 dated 29 November 2019, Investment Credit facilities with the following conditions :

Types of credit : Investment Loan
Interest : 9.95 per annum
Time period : 29 November 2019 up to 29 November 2020.

Based on Agreement No. B-350-KC.III/ADK/11/2019 dated 29 November 2019, Investment Credit facilities with the following conditions : (continued)

Guarantee : 2 units of vehicles, namely the Toyota brand, type Kijang Innova G DSL, 2011, metallic silver color, police number BA 1097 RV under the name of PT Mitra Kerinci tied to a Notary Fiduciary and registered with a fiduciary institution for Rp 160,000,000. and the Isuzu brand, type NMR 71 T HD 5.8, 2016, white color, police number BA 9658 QU tied with Feduciare Eigendom Overdracht No. 01, amounting to Rp 671,000,000.

31 Desember 2021

31 December 2021

25. Utang bank (lanjutan)

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
(lanjutan)**

PT Mitra Kerinci (lanjutan)

Berdasarkan Perjanjian No. 108-III/ADK/08/2016 tanggal 16 Agustus 2016, fasilitas Kredit Investasi dengan ketentuan sebagai berikut :

Jenis kredit	: Kredit Investasi
Bunga	: 9,95% per tahun
Jangka waktu	: 16 Agustus 2016 sampai dengan 16 Agustus 2019
Agunan	: Invoice mesin ECP DRYER 4 Feet (lengkap HE Tungku) diikat dengan <i>Feduciare Eigendom Overdracht</i> No. 01 sebesar Rp 671.000.000

Saldo utang bank jangka pendek PT Mitra Kerinci ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 1.711.886.339 dan Rp 3.021.359.866.

**PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan
Banten Tbk**

PT Rajawali Nusindo

Berdasarkan perjanjian kredit No. 152/KKO-KO2/SPPK/2020 tanggal 13 Mei 2020, Perusahaan memperoleh fasilitas modal kerja usaha dari PT Bank BPD Jawa Barat dan Banten Tbk dengan maksimum plafon sebesar Rp 280.000.000.000.

Pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha yang ada atau yang akan ada minimal sebesar 100% dari jumlah hutang.

Jangka waktu pinjaman ini adalah selama 12 bulan dengan suku bunga 9,75% efektif floating rate Subject to Review. Jatuh tempo pinjaman ini tanggal 24 Mei 2021.

Berdasarkan addendum perjanjian kredit No. 04 tanggal 16 Juli 2021, jangka waktu diperpanjang sampai dengan 16 Juli 2022.

Saldo utang Bank PT Rajawali Nusindo dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk pada 31 Desember 2021 sebesar Rp 102.561.975.890 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp 30.000.000.000.

25. Bank loans (continued)

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
(continued)**

PT Mitra Kerinci (continued)

Based on Agreement No. 108-III/ADK/08/2016 dated 16 August 2016, Investment Credit facilities with the following conditions :

<i>Types of credit</i>	<i>: Investment Loan</i>
<i>Interest</i>	<i>: 9,95% per annum</i>
<i>Time period</i>	<i>: 16 August 2016 until 16 August 2019</i>
<i>Guarantee</i>	<i>: ECP DRYER 4 Feet machine invoice (complete HE Furnace) tied with <i>Feduciare Eigendom Overdracht</i> No. 01 amounting to Rp. 671,000,000</i>

The balance of PT Mitra Kerinci's short-term bank loan to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as of 31 December 2021 and 2020 amounting to Rp 1,711,886,339 and Rp 3,021,359,866, respectively.

**PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan
Banten Tbk**

PT Rajawali Nusindo

Based on the credit agreement No. 152/KKO-KO2/SPPK/2020 dated 13 May 2020, the Company obtained working capital facilities from PT Bank BPD Jawa Barat and Banten Tbk with a credit limit of Rp 280,000,000,000.

This loan is secured by existing or existing trade receivables of at least 100% of the outstanding credit.

The term of this loan is 12 months with an effective floating rate of 9.75% Subject to Review. The loan will mature on 24 May 2021.

Based on the addendum to the credit agreement No. 04 dated 16 July 2021, the term was extended until 16 July 2022.

The balance of PT Rajawali Nusindo short-term bank loans from PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tb per 31 December 2021 and 2020 amounted to Rp 102,561,975,890 and Rp 30,000,000,000, respectively.

31 Desember 2021

31 December 2021

25. Utang bank (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

**PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan
Banten Tbk (lanjutan)**

PT Mitra Rajawali Banjaran

Bedasarkan Perjanjian Kredit *Back to Back* No. 914 tanggal 9 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Widawati, SH, Mkn, Tangerang Selatan antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (BJB) dengan PT Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan PT Mitra Rajawali Banjaran dan disetujui untuk memberikan Kredit Modal Kerja Debitur dan Grup Usaha maksimal sebesar Rp 1.000.000.000.000.

Jangka waktu pembayaran angsuran kredit 12 bulan terhitung dari 9 Agustus 2019 sampai dengan 9 Agustus 2020. Biaya bunga dibayarkan tanggal 23 setiap bulan dan pokok pinjaman bias dibayarkan pada saat jatuh tempo. Agunan kredit di atas berupa penempatan giro PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan grup usaha nominal minimal 100% dari jumlah penarikan dan dilakukan pemblokiran. Bunga yang dikenakan atas *Floating rate* tergantung tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh BJB.

Saldo utang bank jangka pendek PT Mitra Rajawali Banjaran dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing Rp 7.600.000.000 dan Rp 7.600.000.000.

PT Laras Astra Kartika

Surat PT RNI (Persero) Tbk No 495/Spmh.RNI.01/X/2019 Tanggal 2 Oktober 2019 perihal permohonan penarikan fasilitas KMK – *Cash collateral* PT Laras Astra Kartika dengan nilai kredit Rp 2.000.000.000. Fasilitas pinjaman tersebut memiliki agunan pokok berupa penempatan giro PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan grup usaha dengan nominal minimal sebesar 100% dari jumlah penarikan dan dilakukan pemblokiran; LTV sebesar 100% dari nilai penempatan giro yang dijadikan agunan dan penempatan dana yang dijadikan agunan kredit dapat dilakukan secara bertahap.

25. Bank loans (continued)

Subsidiaries(continued)

**PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan
Banten Tbk (continued)**

PT Mitra Rajawali Banjaran

Based on Credit Agreement the *Back to Back* No. 914 dated 9 August 2019 made before Notary Widawati, SH, Mkn, South Tangerang between PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten, Tbk (BJB) with PT Rajawali Nusantara Indonesia National Economic Development Company (Persero), PT Mitra Rajawali Banjaran and were approved to provide Capital Credit The work of the Debtor and Business Group is a maximum of Rp 1,000,000,000,000.

The repayment period is 12 months from 9 August 2019 to 9 August 2020. The interest fee is paid on the 23rd of the month and the principal can be paid on due date. The credit collateral is in the form of demand deposits of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and the group nominal business must be at least 100% of the amount drawn and blocked. The interest charged on the floating rate depends on the interest rate set by the BJB.

PT Mitra Rajawali Banjaran's short-term bank loan balances from PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten Tbk as of 31 December 2021 and 2020, Rp 7,600,000,000 and Rp 7,600,000,000, respectively.

PT Laras Astra Kartika

Letter of PT RNI (Persero) Tbk No. 495 / Spmh.RNI.01 / X / 2019 dated 2 October 2019 regarding the request for withdrawal of the KMK Cash Collateral facility of PT Laras Astra Kartika with a credit value of Rp 2,000,000,000. The loan facility has principal collateral in the form of demand deposits of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and a business group with a nominal nominal of at least 100% of the total withdrawal and blocked; LTV of 100% of the value of the demand deposits placed as collateral and the placement of funds used as credit collateral can be done in stages.

31 Desember 2021

31 December 2021

25. Utang bank (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

**PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan
Banten Tbk (lanjutan)**

PT Laras Astra Kartika (lanjutan)

Perjanjian Kredit antara PT Laras Astra Kartika dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk telah dilakukan adendum perjanjian kredit dengan No. 001/PK-COMM/KCK/VIII/2021 dan No. 237/S.PJ-Hkm/RNI.01/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 dengan jangka waktu perjanjian kredit terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan 9 Agustus 2022, dengan commitment fee sebesar 0,25% p.a dari plafon kredit, apabila selama masa penarikan tidak terdapat penarikan fasilitas kredit.

Saldo utang bank jangka pendek PT Laras Astra Kartika dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing Rp 2.000.000.000 dan Rp 2.000.000.000.

PT Bank Muamalat Indonesia

PT Rajawali Nusindo

- a. Perjanjian kredit
Berdasarkan Akta perjanjian kredit No. 02 tanggal 25 Oktober 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas Line Facility Al Qard wal Wakalah bil Ujroh dari PT Bank Muamalat dengan maksimum plafon sebesar Rp 75.000.000.000. Pinjaman ini dijamin Fidusia atas piutang sebesar minimal 125% dari plafond fasilitas, *Cash collateral/ margin* minimal sebesar 25% dari outstanding setiap kali pencairan dan sebidang tanah sertifikat hak guna bangunan No. 00324/Wirogunan seluas 1.819 m².
- b. *Letter of Credit (L/C)*
Berdasarkan perjanjian Pemberian Fasilitas Pembukaan Letter of Credit (P4LC) No. 03 tertanggal 6 Oktober 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas pembukaan Letter of Credit (L/C) dengan plafon pinjaman sebesar USD 1.725.000 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dollar Amerika Serikat).

Saldo utang bank jangka pendek PT Rajawali Nusindo dari PT Bank Muamalat Indonesia pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 68.045.094.347 dan Nihil.

25. Bank loans (continued)

Subsidiaries(continued)

**PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan
Banten Tbk (continued)**

PT Laras Astra Kartika (continued)

Credit Agreement between PT Laras Astra Kartika and PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten Tbk has been added to the credit agreement with No. 001/PK-COMM/KCK/VIII/2021 and No. 237/S.PJ-Hkm/RNI.01/VIII/2021 dated 20 August 2021 with a credit agreement period starting from 9 August 2021 to 9 August 2022, with a commitment fee of 0.25% pa of the credit limit, if During the withdrawal period there were no credit facility withdrawals.

PT Laras Astra Kartika's short-term bank loan balances from PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten Tbk as of 31 December 2021 and 2020, Rp 2,000,000,000 and Rp 2,000,000,000, respectively.

PT Bank Muamalat Indonesia

PT Rajawali Nusindo

- a. *Credit agreement*
Based on the Deed of Credit Agreement No. 02 dated 25 October 2021, the Company obtained the Line Facility Al Qard wal Wakalah bil Ujroh from PT Bank Muamalat with a maximum ceiling of Rp 75,000,000,000. This loan is fiduciary guaranteed for receivables of a minimum of 125% of the facility ceiling, Cash collateral/margin of at least 25% of the outstanding each time it is disbursed and a plot of land certificate of building rights No. 00324/Wirogunan with an area of 1,819 m².
- b. *Letter of Credit (L/C)*
Based on the agreement for the Provision of Letter of Credit (P4LC) Opening Facility No. 03 dated 6 October 2021, the Company obtained a Letter of Credit (L/C) facility with a loan limit of USD 1,725,000 (one million seven hundred twenty five thousand United States dollars).

The balance of PT Rajawali Nusindo short-term bank loans from PT Bank Muamalat Indonesia per 31 December 2021 and 2020 amounted to Rp 68,045,094,347 and Nil, respectively.

31 Desember 2021

31 December 2021

25. Utang bank (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT GIEB Indonesia

Utang Bank PT GIEB Indonesia merupakan utang kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan rincian sebagai berikut:

a. Kredit Modal Kerja (KMK) I

Berdasarkan surat penawaran pemberian kredit nomor CM3.DPS/SPPK.0034/2021 tanggal 29 Maret 2021 adalah sebagai berikut:

Jenis kredit : Kredit Modal Kerja-Rekening Koran
Plafon : Rp 30.000.000.000
Bunga : 9% per tahun
Sifat kredit : *Revolving*
Jangka waktu : 26 April 2021 sampai dengan 25 April 2022

Agunan kredit dan pengikatannya :

- a. Agunan *non fixed asset* :
Stok barang dagangan dan piutang dagang telah diikat Sertifikat Jaminan Fidusia No. W20.00057555.AH.05.02 tahun 2015 sebesar Rp 85.000.000.000.
- b. Agunan *fixed asset*
Tiga bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Denpasar, Provinsi Bali, dengan bukti kepemilikan berupa SHGB No. 44, SHGB nomor 45, SHGB nomor 81 atas nama PT GIEB Indonesia, telah dipasang Hak Tanggungan pertama nomor 4675/2012 sebesar Rp 10.400.000.000, Hak Tanggungan kedua No. 7363/2012 sebesar Rp 11.500.000.000, Hak Tanggungan ketiga No. 3989/2013 sebesar Rp 60.000.000, Hak Tanggungan keempat No. 04520/2014 sebesar Rp 9.900.000.000 (untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 44 dan 45) dan No. 4724/2014 sebesar Rp 1.150.000.000 (untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 81), dan Hak Tanggungan kelima No. 03254/2015 sebesar Rp 1.870.000.000 (untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 44 dan 45).

25. Bank loans (continued)

Subsidiaries(continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT GIEB Indonesia

Bank Loans of PT GIEB Indonesia represent payable to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with details as follows:

a Working Capital Loan facility (KMK) I

Based on Offering Letter number CM3.DPS/SPPK.0034/2021 dated 29 March 2021 are as follows:

Types of credit : Working Capital Loan-Account Statement Loan
Credit line : Rp 30,000,000,000
Interest : 9% per annum
The nature of credit : *Revolving*
Time period : 26 April 2021 until 25 April 2022

Credit collateral and its binding:

- a. Collateral for non-fixed assets:
Merchandise stock and accounts receivable have been bound by Fiduciary Guarantee Certificate No. W20,00057555.AH.05.02 of 2015 amounting to Rp 85,000,000,000.
- b Fixed asset collateral
Three parcels of land and buildings located in Denpasar, Bali Province, with proof of ownership in the form of SHGB No. 44, SHGB number 45, SHGB number 81 on behalf of PT GIEB Indonesia, the first Mortgage No. 4675/2012 amounting to Rp 10,400,000,000 has been installed. The second Mortgage No. 7363/2012 is Rp 11,500,000,000, the third Mortgage No. 3989/2013 is Rp. 60,000,000, the fourth Mortgage No. 04520/2014 is Rp 9,900,000,000 (for Building Use Rights Certificate No. 44 and 45) and No. 4724/2014 amounting to Rp 1,150,000,000 (for Building Use Rights Certificate No. 81), and the fifth Mortgage No. 03254/2015 amounting to Rp 1,870,000,000 (for Building Use Rights Certificate No. 44 and 45).

31 Desember 2021

31 December 2021

25. Utang bank (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lanjutan)

PT GIEB Indonesia (lanjutan)

a. Kredit Modal Kerja (KMK) I (lanjutan)

Agunan kredit dan pengikatannya : (lanjutan)

b. Agunan fixed asset (lanjutan)

Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Kecamatan Buleleng, Provinsi Bali, dengan bukti kepemilikan berupa SHGB nomor 132 atas nama PT GIEB Indonesia, telah dipasang Hak Tanggungan pertama nomor 1931/2012 sebesar Rp 1.600.000.000, Hak Tanggungan kedua nomor 2539/2012 sebesar Rp 4.100.000.000, Hak Tanggungan ketiga nomor 2073/2013 sebesar Rp 70.000.000 (untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 132) dan Hak Tanggungan keempat nomor 2105/2014 sebesar Rp 1.550.000.000 (untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 132).

Tiga bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Kecamatan Tabanan, Provinsi Bali, dengan bukti kepemilikan berupa SHGB nomor 00003, SHGB nomor 00004 dan SHGB nomor 5 atas nama PT GIEB Indonesia, telah dipasang Hak Tanggungan pertama nomor 4119/2012 sebesar Rp 5.300.000.000, Hak Tanggungan kedua nomor 2569/2013 sebesar Rp 30.000.000, Hak Tanggungan ketiga nomor 03659/2014 sebesar Rp 2.450.000.000.

b. Kredit Modal Kerja (KMK) II

Berdasarkan surat penawaran pemberian kredit nomor CRO.DPS/0046/KMK/2014 tanggal 24 April 2020 adalah sebagai berikut:

Jenis kredit : Kredit Modal Kerja-
Plafon : Rp 10.000.000.000
Bunga : 10% per tahun
Sifat kredit : *Non-revolving*
Jangka waktu : 26 April 2018 sampai dengan
25 April 2023

Agunan kredit dan pengikatannya serta asuransi :

Joint collateral dan *cross default* dengan seluruh agunan dan seluruh fasilitas yang diterima PT GIEB Indonesia dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

25. Bank loans (continued)

Subsidiaries(continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (continued)

PT GIEB Indonesia (continued)

a *Working Capital Loan facility (KMK) I (continued)*

Credit collateral and its binding: (continued)

b. *Fixed asset collateral (continued)*

A plot of land and building located in Buleleng District, Bali Province, with proof of ownership in the form of SHGB number 132 on behalf of PT GIEB Indonesia, the first Mortgage Number 1931/2012 has been installed for Rp 1,600,000,000, the second Mortgage Number 2539/2012 is Rp 4,100,000,000, the third Mortgage number 2073/2013 amounting to Rp 70,000,000 (for Building Use Rights Certificate Number 132) and the fourth Mortgage Number 2105/2014 amounting to Rp 1,550,000,000 (for Building Use Rights Certificate Number 132).

Three plots of land and buildings located in Tabanan District, Bali Province, with proof of ownership in the form of SHGB number 00003, SHGB number 00004 and SHGB number 5 on behalf of PT GIEB Indonesia, the first Mortgage Right number 4119/2012 has been installed for Rp 5,300,000,000, The second Mortgage number 2569/2013 is Rp 30,000,000, the third Mortgage number 03659/2014 is Rp 2,450,000,000.

b. *Working Capital Loan facility (KMK) II*

Based on Offering Letter number CM3.DPS/SPPK.0034/2021 dated 29 March 2020 are as follows:

*Types of credit : Working Capital Loan
Credit line : Rp 10,000,000,000
Interest : 10% per annum
The nature of credit : Non-revolving
Time period : 26 April 2018 until
25 April 2023*

Credit collateral and its binding and insurance:

Joint collateral and cross default with all collateral and all facilities received by PT GIEB Indonesia from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

31 Desember 2021

31 December 2021

25. Utang bank (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lanjutan)

PT GIEB Indonesia (lanjutan)

c. Non cash loan - bank garansi

Berdasarkan surat penawaran pemberian kredit nomor CM3.DPS/SPPK.0034/2021 tanggal 29 Maret 2021 adalah sebagai berikut:

Jenis bank garansi : Jaminan Pembayaran
Jumlah fasilitas : Rp 12.850.000.000
Provisi : 0,25% per *quarter* dari nominal garansi bank

Berdasarkan surat penawaran pemberian kredit nomor CM3.DPS/SPPK.0034/2021 tanggal 29 Maret 2021 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Tujuan fasilitas : *Jaminan pembayaran atas pembelian barang kepada PT Focus Distribusi Indonesia, PT Arista Latindo, PT Sinar Antjol, PT Tokai Dharma Indonesia dan PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara.*

Jangka waktu : 26 April 2021 sampai dengan 25 April 2022

Saldo utang bank jangka pendek PT GIEB Indonesia kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 29.505.332.940 dan Rp 30.366.763.088.

25. Bank loans (continued)

Subsidiaries(continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (continued)

PT GIEB Indonesia (continued)

c Non cash loan - bank guarantee

Based on Offering Letter number CM3.DPS/SPPK.0034/2021 dated 29 March 2021 are as follows:

Type of bank guarantee : Payment bond
Amount of facilities : Rp 12,850,000,000
Provision : 0.25% per quarter of nominal bank guarantee

Based on Offering Letter number CM3.DPS/SPPK.0034/2021 dated 29 March 2021 are as follows: (continued)

Purpose of facility : *Payment guarantee for the purchase of goods to PT Focus Distribution Indonesia, PT Arista Latindo, PT Sinar Antjol, PT Tokai Dharma Indonesia and PT Kharisma Marketing Bersama Nusantara.*

Time period : 26 April 2021 until dengan 25 April 2022

The outstanding balance of PT GIEB Indonesia's short-term bank loans from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as of 31 December 2021 and 2020 amounted to Rp 29,505,332,940 and Rp 30,366,763,088, respectively.

31 Desember 2021

31 December 2021

25. Utang bank (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk

PT Laras Astra Kartika

Pada tanggal 22 Agustus 2017, sesuai dengan surat persetujuan pemberian fasilitas kredit No. B.038/SPPK/OPK/VIII/2017 menggantikan surat No. B.072/SPPK/OPK/VIII/2015 tertanggal 07 Agustus 2015, menunjuk surat PT Laras Astra Kartika No. DIR/LAK/X/125/V/2017 tanggal 24 Mei 2017 telah ditandatangani Perjanjian Kredit antara PT Laras Astra Kartika dengan PT BRI Agro Niaga Tbk, dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis kredit : Kredit Modal Kerja - Pinjaman Tetap Angsuran (KMK-PTA)
Plafon : Rp 1.500.000.000
Bunga : 12% per tahun
Tujuan : Pembiayaan kebun dan pengolahan kelapa sawit
Jangka waktu : Sampai dengan 31 Desember 2020

Pada tanggal 6 Agustus 2021, telah dilakukan Restrukturisasi fasilitas KMK – PRK yang berubah menjadi KMK PTA dengan No. B.50/SPPK/OPK-DKR/08/2021 sebesar Rp 6.993.369.007.

Saldo utang bank jangka pendek PT Laras Astra Kartika per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Nihil dan Rp 6.993.369.007.

25. Bank loans (continued)

Subsidiaries(continued)

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk

PT Laras Astra Kartika

On 22 August 2017, in accordance with the approval letter for granting credit facilities No. B.038/SPPK/OPK/VIII/2017 replacing letter No. B.072/SPPK/OPK/VIII/2015 dated 7 August 2015, appointing PT Laras letter Astra Kartika No. DIR/LAK/X/125/V/2017 dated 24 May 2017 has signed a Credit Agreement between PT Laras Astra Kartika and PT BRI Agro Niaga Tbk, with the following conditions:

Types of credit : Working Capital Loans - Fixed Installment Loans (KMK-PTA)
Credit line : Rp 1,500,000,000
Interest : 12% per annum
Objective : Funding for oil palm plantations and processing
Time period : Until 31 December 2020

On 6 August 2021, the KMK-PRK facility was restructured which changed to KMK PTA with the No. B.50/SPPK/OPK-DKR/08/2021 amounting to Rp 6,993,369,007.

The balance of short-term bank loan of PT Laras Astra Kartika as of 31 December 2021 and 2020 amounted to Nil and Rp 6,993,369,007, respectively.

31 Desember 2021

31 December 2021

26. Utang usaha

26. Trade payables

	2021	2020	
Pihak berelasi			Related parties
PT Pertamina Petrochemical			<i>PT Pertamina Petrochemical</i>
Trading	6.480.408.000	-	<i>Trading</i>
Lain-lain	6.070.911.802	105.723.003	<i>Others</i>
Sub jumlah pihak berelasi	12.551.319.802	105.723.003	Subtotal related parties
Pihak ketiga			Third parties
Utang leveransir, pemborong dan pemasok	171.716.173.499	165.880.827.211	<i>Wholesalers and suppliers payables</i>
Utang barang lokal	69.649.834.092	721.626.628.617	<i>Local goods payables</i>
Utang kulit dan bahan kimia	17.601.690.529	16.814.936.467	<i>Leathers and chemicals payables</i>
Utang barang impor	10.813.468.115	3.831.531.851	<i>Imported goods payable</i>
Lain-lain	51.984.311	3.650.816	<i>Others</i>
Sub jumlah pihak ketiga	269.833.150.546	908.157.574.962	Subtotal third parties
Jumlah utang usaha	282.384.470.348	908.263.297.965	Total trade payables

Utang barang lokal tahun 2021 sebesar Rp 69.649.834.092 diantaranya sebesar Rp 910.952.409 merupakan utang atas pembelian tebu.

Local goods payables in 2021 amounted to Rp 69,649,834,092 which Rp 910,952,409 is a debt for purchasing sugar cane.

31 Desember 2021

31 December 2021

27. Utang lain-lain

27. Other payables

a. Utang lain-lain lancar

b. Other current payables

	2021	2020	
Pihak berelasi terdiri dari :			Related parties consist of :
Dividen (minoritas PT Phapros Tbk dan PT Perkebunan Mitra Ogan)	12.211.498.927	12.211.498.926	<i>Dividend (minority interest of PT Phapros Tbk and PT Perkebunan Mitra Ogan)</i>
Utang karyawan	449.604.317	433.301.150	<i>Employee loan</i>
PT Madu Baru	439.339.843	439.339.843	<i>PT Madu Baru</i>
PT Phapros Tbk	-	32.931.611	<i>PT Phapros Tbk</i>
Sub jumlah pihak berelasi	13.100.443.087	13.117.071.530	Subtotal related parties
Pihak ketiga terdiri dari :			Third parties consist of :
Utang KUD dan Pengembangan Perkebunan Rakyat	538.959.169.734	534.329.970.381	<i>KUD and Development of Smallholder Plantations</i>
Uang muka pembelian	31.554.058.533	62.403.451.955	<i>Down payment</i>
Utang DOC BJB	11.800.000.000	11.800.000.000	<i>BJB DOC debt</i>
Uang jaminan pekerjaan	4.089.290.837	5.363.811.638	<i>Job security deposit</i>
Titipan dan retribusi	2.834.545.147	917.067.482	<i>Deposit and retribution</i>
Utang pembelian aset	1.880.255.232	13.825.770.410	<i>Debt asset purchases</i>
Jamsostek/ premi pensiun	1.711.347.537	2.925.926.318	<i>Jamsostek/ pension premium</i>
Utang penyertaan PT Tirta Marta	1.290.706.308	2.746.422.008	<i>PT Tirta Marta debt equity</i>
Utang dana pensiun	-	2.893.370.175	<i>Pension fund liabilities</i>
Utang dana PUKK dan bina lingkungan	-	71.324.438	<i>Partnership and environmental guidance payables</i>
Lain-lain	45.264.409.307	90.936.354.042	<i>Others</i>
Sub jumlah pihak ketiga	639.383.782.635	728.213.468.847	Subtotal third parties
Jumlah utang lain-lain	652.484.225.722	741.330.540.377	Total other payables

31 Desember 2021

31 December 2021

27. Utang lain-lain (lanjutan)

27. Other payables (continued)

a. Utang lain-lain lancar (lanjutan)

a. Other current payables (continued)

Rincian utang kepada KUD/petani terdapat pada Entitas Anak sebagai berikut :

Details of loan to KUD/farmers are in the Subsidiaries as follows :

	2021	2020	
PT PG Rajawali II	359.156.481.302	305.808.479.455	<i>PT PG Rajawali II</i>
PT PG Rajawali I	102.428.344.577	167.464.638.749	<i>PT PG Rajawali I</i>
PT PG Candi Baru	54.344.991.449	56.320.877.590	<i>PT PG Candi Baru</i>
PT Perkebunan Mitra Ogan	23.029.352.406	4.735.974.587	<i>PT Perkebunan Mitra Ogan</i>
Jumlah utang kepada KUD	538.959.169.734	534.329.970.381	Total loans to KUD

Utang KUD adalah dana kelompok tani I koperasi yang merupakan dana hasil pencairan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE-Tebu) Kemitraan MT 2013/2014 sampai dengan MT 2014/2015 dari Bank atau Lembaga Keuangan lainnya kepada Kelompok Tani dan Koperasi Primer yang pengelolaannya diserahkan kepada Unit-unit pabrik gula di PT PG Rajawali I, PT PG Rajawali II, PT PG Candi Baru dan PT Perkebunan Mitra Ogan.

KUD payable is a fund of farmer group I cooperative which is fund of disbursement of Credit of Food Resistance and Energy (KKPE-Sugarcane) Partnership of MT 2013/2014 until MT 2014/2015 from Bank or other Financial Institution to Farmer Group and Primary Cooperative whose management is handed over to Sugar factory units in PT PG Rajawali I, PT PG Rajawali II, PT PG Candi Baru dan PT Perkebunan Mitra Ogan.

b. Utang lain-lain tidak lancar

b. Other non current payables

	2021	2020	
Pihak berelasi terdiri dari :			Related parties consist of :
PT Phapros Tbk	117.161.807.971	140.015.571.287	<i>PT Phapros Tbk</i>
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	28.998.650.322	26.232.666.749	<i>PT Perkebunan Nusantara III (Persero)</i>
Lain-lain	700.001	699.199	<i>Others</i>
Sub jumlah pihak berelasi	146.161.158.294	166.248.937.235	Subtotal related parties

31 Desember 2021

31 December 2021

28. Biaya yang masih harus dibayar

28. Accrued expenses

	2021	2020	
Gaji dan tunjangan	34.180.931.401	29.619.977.004	Salary and allowance
Jasa produksi karyawan, Direksi dan Komisaris	14.765.739.701	14.744.482.071	Employees', Director and Commissioner production service
Kantor, umum dan administrasi	7.948.774.150	6.559.288.090	Office, general and administrative
Beban pengangkutan dan distribusi	2.931.608.359	8.631.046.906	Freight and distribution expenses
Premi pensiun	2.176.296.248	1.950.531.164	Pension premium
Biaya produksi	2.012.985.752	2.061.402.630	Production expenses
Jamsostek	874.262.566	988.758.940	Jamsostek
Beban lainnya	35.533.878.487	14.829.073.791	Other expenses
Jumlah biaya yang masih harus dibayar	100.424.476.664	79.384.560.596	Total accrued expenses

Rincian biaya yang masih harus dibayar lain-lain diantaranya merupakan akumulasi saldo biaya yang masih harus dibayar lain-lain di beberapa entitas anak PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Tbk.

The details of accrued expenses include the accumulated balance of other accrued expenses in the subsidiaries PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Tbk.

29. Pendapatan diterima dimuka

29. Unearned revenues

	2021	2020	
Uang muka penjualan CPO dan PK	19.561.535.649	22.332.432.155	Unearned revenue of CPO and PK
Sewa gedung/ gudang dan lainnya	2.168.016.429	6.345.655.042	Lease building/ warehouses etc.
Pendapatan diterima di muka lainnya	1.629.784.999	4.745.099	Other unearned revenue
Jumlah pendapatan diterima dimuka	23.359.337.077	28.682.832.296	Total unearned revenues

31 Desember 2021

31 December 2021

30. Surat berharga jangka menengah (MTN)

30. Medium Term Notes (MTN)

Saldo MTN sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah :

The balance of MTN until 31 December 2021 and 2020 is :

	2021	2020	
Utang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			Current maturity of liability
PT PG Rajawali I (MTN I)	-	250.000.000.000	PT PG Rajawali I (MTN I)
PT PG Rajawali I (MTN II)	-	250.000.000.000	PT PG Rajawali I (MTN II)
Diskonto atas MTN PT PG Rajawali I	-	(2.321.766.684)	Discounted of MTN of PT PG Rajawali I
Utang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		497.678.233.316	Current maturity of liability
Utang jangka panjang setelah Dikurangi jatuh tempo dalam satu tahun			Long-term bank loans -net of current portion
PT PG Rajawali I (MTN I)	-	-	PT PG Rajawali I (MTN I)
PT PG Rajawali I (MTN II)	-	-	PT PG Rajawali I (MTN II)
Diskonto atas MTN PT PG Rajawali I	-	-	Discounted of MTN of PT PG Rajawali I
Utang jangka panjang setelah Dikurangi jatuh tempo dalam satu tahun	-	-	Long-term bank loans -net of current portion

Entitas Anak

Subsidiaries

PT PG Rajawali I

PT PG Rajawali I

Berdasarkan Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau Medium Term Notes (MTN) I PT PG Rajawali I Tahun 2018 yang diaktakan di hadapan Notaris I Made Kartijaya, S.H, dalam aktanya No. 24 tanggal 15 Mei 2018, Entitas telah menerbitkan MTN dengan informasi sebagai berikut:

Based on the Issuance and Appointment Monitoring Agents Appointment of Medium Term Notes (MTN) I Agreement, which were notarized on Notary I Made Kartijaya, S.H, in its deed No. 24 dated 15 May 2018, the Entity has issued MTN with information as follows:

Agen pemantau : PT Astra Kapital Asia
 Arranger : PT Bank Bukopin Tbk
 Agen pembayaran : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Monitoring agents : PT Astra Kapital Asia
 Arranger : PT Bank Bukopin Tbk
 Paying agents : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Nilai pokok MTN yang diterbitkan adalah Rp 500.000.000.000 yang diterbitkan secara berseri yaitu masing-masing MTN I dengan nilai pokok Rp 250.000.000.000 dengan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal penerbitan MTN yaitu tanggal 17 Mei 2018 dengan bunga sebesar 8,25% per tahun, serta MTN II dengan nilai pokok Rp 250.000.000.000 dengan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal penerbitan MTN yaitu tanggal 31 Mei 2018 dengan bunga sebesar 8,25% per tahun.

The principal value of MTN issued was Rp 500,000,000,000 which are issue in series, that are MTN I with a principal value of Rp 250,000,000,000 with 3 years period since the issuance date of MTN that is 17 May 2018 and an interest rate of 8.25% per annum, and MTN II with a principal value of MTN that is 31 May 2018 and an interest are of 8.25% per annum.

31 Desember 2021

31 December 2021

30. Surat berharga jangka menengah (MTN) (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

PT PG Rajawali I (lanjutan)

Bunga atas MTN dibayarkan setiap 6 bulan dihitung sejak tanggal penerbitan, kecuali bunga MTN terakhir yang akan dibayarkan bersamaan dengan tanggal jatuh tempo MTN. Pelunasan seluruh pokok MTN dilakukan pada tanggal jatuh tempo.

MTN ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan kekayaan penerbit baik barang bergerak dan tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Di tahun 2021 telah dilakukan pelunasan MTN I dan MTN II masing-masing sebesar Rp 250.000.000.000.

31. Utang Rekening Dana Investasi

Saldo pinjaman per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 1.189.664.277.147 dan Rp 1.189.619.753.527 disajikan dalam konsolidasian Perusahaan sebagai berikut :

	2021	2020	
Utang RDI yang telah jatuh tempo	22.083.980.569	22.381.291.446	Mature investment fund account
Utang RDI yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	1.167.580.296.578	1.167.238.462.081	Long term investment fund account
Jumlah utang Rekening Dana Investasi	1.189.664.277.147	1.189.619.753.527	Total investment fund account
Utang RDI yang telah jatuh tempo :			Mature investment fund account :
Utang RDI PT RNI	22.083.980.569	22.083.980.569	Investment fund account of PT RNI
Utang RDI PT PG Rajawali II	-	297.310.877	Investment fund account of PT PG Rajawali II
Jumlah	22.083.980.569	22.381.291.446	Total
Utang RDI PT RNI yang telah jatuh tempo :			Mature investment fund account of PT RNI :
RDI-265/DP3/1994 :			RDI-265/DP3/1994 :
Kewajiban	3.659.585.285	5.227.979.000	Liabilities
Pembayaran	-	(1.568.393.715)	Payment
Sub jumlah	3.659.585.285	3.659.585.285	Subtotal
RDI-302/DP3/1996 :			RDI-302/DP3/1996 :
Kewajiban	2.665.638.618	3.808.055.125	Liabilities
Pembayaran	-	(1.142.416.507)	Payment
Sub jumlah	2.665.638.618	2.665.638.618	Subtotal
RDI-330/DP3/1998 :			RDI-330/DP3/1998 :
Kewajiban	15.758.756.666	22.512.509.546	Liabilities
Pembayaran	-	(6.753.752.880)	Payment
Sub jumlah	15.758.756.666	15.758.756.666	Subtotal
Jumlah utang RDI PT RNI yang telah jatuh tempo	22.083.980.569	22.083.980.569	Total mature investment fund account of PT RNI

30. Medium Term Notes (MTN) (continued)

Subsidiaries (continued)

PT PG Rajawali I (continued)

The interest of MTN will be paid every 6 months period since the date of issuance, except the last interest of MTN which will be paid together with the maturity date of the MTN. Repayment of all MTN principal is made on the due date.

The MTN is not guaranteed with special guarantees, but is guaranteed by the issuer's both movable and immovable properties, both existing and those which are acquired in the future.

In 2021, MTN I and MTN II have been repaid in the amount of Rp 250,000,000,000 each.

31. Investment fund account

The outstanding loan balance as of 31 December 2021 and 2020 amounting to Rp 1,189,664,277,147 and Rp 1,189,619,753,527, respectively, is presented in the consolidated terms of the Company as follows :

31 Desember 2021

31 December 2021

31. Utang Rekening Dana Investasi (lanjutan)

31. Investment fund account (continued)

	2021	2020	
Utang RDI PT PG Rajawali II yang telah jatuh tempo :			<i>Mature investment fund account of PT PG Rajawali II :</i>
RDI-213/DP3/1993 :			<i>RDI-213/DP3/1993 :</i>
Pokok pinjaman	89.047.233	179.091.000	<i>Principal loan</i>
Kewajiban lainnya	(89.047.233)	(90.043.767)	<i>Other liabilities</i>
Sub jumlah	-	89.047.233	<i>Subtotal</i>
RDI-218/DP3/1993 :			<i>RDI-218/DP3/1993 :</i>
Pokok pinjaman	208.263.644	402.163.720	<i>Principal loan</i>
Kewajiban lainnya	(208.263.644)	(193.900.076)	<i>Other liabilities</i>
Sub jumlah	-	208.263.644	<i>Subtotal</i>
Jumlah utang RDI PT PG Rajawali II yang telah jatuh tempo	-	297.310.877	<i>Total mature investment fund account of PT PG Rajawali II</i>
Jumlah utang RDI yang telah jatuh tempo	22.083.980.569	22.381.291.446	<i>Total mature investment fund account</i>
Utang RDI yang jatuh tempo lebih dari satu tahun :			<i>Long term investment fund account</i>
Utang RDI PT RNI	1.020.069.578.692	1.020.069.578.692	<i>Investment fund account of PT RNI</i>
Utang RDI PT PG Rajawali II	147.510.717.886	147.168.883.389	<i>Investment fund account PT PG Rajawali II</i>
Jumlah	1.167.580.296.578	1.167.238.462.081	<i>Total</i>
RDI-265/DP3/1994 :			<i>RDI-265/DP3/1994 :</i>
Pokok pinjaman	169.037.987.652	174.265.966.667	<i>Principal loan</i>
Pembayaran	-	(1.742.659.682)	<i>Payment</i>
Dipindah ke utang jatuh tempo	-	(3.485.319.333)	<i>Transferred to maturity liabilities</i>
Sub jumlah	169.037.987.652	169.037.987.652	<i>Subtotal</i>
RDI-302/DP3/1996 :			<i>RDI-302/DP3/1996 :</i>
Pokok pinjaman	123.127.115.689	126.935.170.833	<i>Principal loan</i>
Pembayaran	-	(1.269.351.727)	<i>Payment</i>
Dipindah ke utang jatuh tempo	-	(2.538.703.417)	<i>Transferred to maturity liabilities</i>
Sub jumlah	123.127.115.689	123.127.115.689	<i>Subtotal</i>
RDI-330/DP3/1998 :			<i>RDI-330/DP3/1998 :</i>
Pokok pinjaman	727.904.475.351	750.416.984.862	<i>Principal loan</i>
Pembayaran	-	(7.504.169.814)	<i>Payment</i>
Dipindah ke utang jatuh tempo	-	(15.008.339.697)	<i>Transferred to maturity liabilities</i>
Sub jumlah	727.904.475.351	727.904.475.351	<i>Subtotal</i>
Jumlah utang RDI PT RNI yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	1.020.069.578.692	1.020.069.578.692	<i>Long-term investment fund account of PT RNI</i>

31 Desember 2021

31 December 2021

31. Utang Rekening Dana Investasi (lanjutan)

31. Investment fund account (continued)

	2021	2020	
Utang RDI PT PG Rajawali II yang jatuh tempo lebih dari satu tahun :			Long-term Investment fund account of PT PG Rajawali II :
RDI No: AMA-213/DP3/2008 :			RDI No: AMA-213/DP3/2008 :
Pokok angsuran	44.078.379.266	44.167.426.496	Principal installment
Denda pinjaman	133.570.249	-	Loan penalties
Dipindahkan ke utang jatuh tempo	-	(89.047.230)	Transferred to maturity liabilities
Sub jumlah	44.211.949.515	44.078.379.266	Subtotal
RDI No: AMA-218/DP3/2008 :			RDI No: AMA-218/DP3/2008 :
Pokok angsuran	103.090.504.123	103.298.767.767	Principal installment
Denda pinjaman	208.264.248	-	Loan penalties
Dipindahkan ke utang jatuh tempo	-	(208.263.644)	Transferred to maturity liabilities
Sub jumlah	103.298.768.371	103.090.504.123	Subtotal
Jumlah utang RDI PT PG Rajawali II yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	147.510.717.886	147.168.883.389	Total long-term Investment fund account of PT PG Rajawali II
Jumlah utang RDI yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	1.167.580.296.578	1.167.238.462.081	Total long-term Investment fund account

32. Utang sewa pembiayaan

32. Lease payable

	2021	2020	
<u>Bagian sewa jatuh tempo dalam satu tahun:</u>			<u>Current lease payables</u>
ACC Finance	4.747.754.751	5.959.755.770	ACC Finance
BCA Finance	95.645.326	95.645.326	BCA Finance
PT Astra Sedaya Finance	-	28.169.148	PT Toyota Astra Motor
Jumlah utang sewa bagian jatuh tempo dalam satu tahun	4.843.400.077	6.083.570.244	Total current lease payables
<u>Bagian sewa jangka panjang</u>			<u>Long-term lease payables</u>
BCA Finance	627.646.559	627.646.559	BCA Finance
Jumlah utang sewa bagian jangka panjang	627.646.559	627.646.559	Total long-term lease payables
Jumlah utang sewa pembiayaan	5.471.046.636	6.711.216.803	Total lease payables

Tidak ada klausul-klausul yang berkaitan dengan opsi perpanjangan atau pembelian dan eskalasi. Tidak ada pembatasan signifikan yang ditetapkan oleh perusahaan sewa guna usaha (lessor) dalam perjanjian sewa pembiayaan dengan entitas anak terkait dengan penggunaan.

There are no clauses relating to extension or purchase and escalation options. There are no significant restrictions imposed by the lessor in the finance lease agreement with the subsidiary in connection with the use.

31 Desember 2021

31 December 2021

33. Utang bank jangka panjang

33. Long term bank loans

	2021	2020	
Induk Perusahaan			Holding Company
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	398.000.000.000	459.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	122.947.335.001	139.383.227.701	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Jumlah utang bank induk Perusahaan	520.947.335.001	598.383.227.701	Total bank loan of holding Company
Entitas Anak			Subsidiaries
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Perkebunan Mitra Ogan	282.435.088.340	266.463.118.215	PT Perkebunan Mitra Ogan
PT Rajawali Citramass	9.449.980.373	9.738.281.729	PT Rajawali Citramass
Sub jumlah	291.885.068.713	276.201.399.944	Subtotal
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk			PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT PG Rajawali I	208.241.584.075	-	PT PG Rajawali II
Sub jumlah	208.241.584.075	147.127.010.776	Subtotal
PT Bank Syariah Indonesia Tbk			PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT PG Rajawali II	145.848.215.588	128.980.698.943	PT PG Rajawali II
PT Laras Astra Kartika	18.002.311.833	18.146.311.833	PT Laras Astra Kartika
Sub jumlah	163.850.527.421	147.127.010.776	Subtotal
PT Bank Rakyat Indonesia Agro Tbk			PT Bank Rakyat Indonesia Agro Tbk
PT Laras Astra Kartika	16.393.369.007	10.450.000.000	PT Laras Astra Kartika
Sub jumlah	16.393.369.007	10.450.000.000	Subtotal
Jumlah utang bank entitas anak	680.370.549.216	433.778.410.720	Total bank loan of subsidiaries
Dikurangi jumlah yang jatuh tempo satu tahun	(181.040.154.207)	(67.904.892.701)	Less current maturity
Jumlah utang bank jangka panjang	1.020.277.730.010	964.256.745.720	Total long term bank loan

Induk Perusahaan

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Pada tahun 2018, Perusahaan menerima pinjaman kredit transaksi khusus dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Khusus No. 22 tanggal 22 November 2018 dengan fasilitas pinjaman transaksi khusus sebesar Rp 460.000.000.000 dengan jangka waktu 84 bulan dan suku bunga 9,5% per tahun dibayar efektif tiap bulan setiap tanggal 23 dan *reviewable* setiap saat sesuai ketentuan suku bunga yang berlaku di bank. Perubahan suku bunga cukup diberitahukan secara tertulis dan bersifat mengikat. Pinjaman ini tidak dikenakan biaya provisi. Pinjaman ini digunakan untuk pelunasan pinjaman KMK BRI anak perusahaan atas nama PT PG Rajawali II.

Holding Company

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

In 2018, the Company received a special transaction credit loan from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk in accordance with the Deed of Special Credit Agreement No. 22 dated 22 November 2018 with a special transaction loan facility of Rp 460,000,000,000 with a period of 84 months and an interest rate of 9.5% per year paid effectively every month on the 23rd and reviewable at any time according to the applicable interest rates in the bank. Changes in interest rates are simply notified in writing and are binding. This loan is not subject to provision fees. This loan was used to repay BRI subsidiary KMK loans on behalf of PT PG Rajawali II.

31 Desember 2021

31 December 2021

33. Utang bank jangka panjang (lanjutan)

Induk Perusahaan (lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

Agunan atau jaminan kredit debitur menyerahkan tanah dan bangunan pabrik gula di Subang desa Pasir Bungur atas sertifikat guna usaha No 2 dengan uraian:

- Tanah seluas 23.595.140 m²
- Bangunan seluas 33.066 m²
- Berikut mesin dan peralatan pabrik seluruhnya diikat hak tanggungan peringkat I dengan nilai Rp 300.000.000.000

Tanah dan bangunan pabrik gula di Subang desa Pasir Muncang dengan uraian :

- Tanah seluas 16.095.690 m²
- Seluruhnya akan diikat hak tanggungan peringkat I dengan nilai Rp 180.000.000.000

Tanah dan bangunan pabrik gula di Subang di desa Sidajaya Cipunegara dengan uraian :

- Tanah seluas 3.405.200 m²
- Seluruhnya diikat hak tanggungan peringkat I dengan nilai Rp 30.000.000.000

Tanah dan bangunan pabrik gula di Subang di desa Manyingsal Cipunegara dengan uraian :

- Tanah seluas 11.509.353 m²
- Bangunan 1.673 m²
- Seluruhnya diikat hak tanggungan peringkat I dengan nilai Rp 60.000.000.000.

Saldo utang bank jangka panjang kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp 398.000.000.000 dan Rp 459.000.000.000.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Sesuai dengan surat No. 3/ SPMH/ KU.02.09/ RNI.03/ 23/ VIII/ 2021 mengenai perpanjangan Plafon Fasilitas Pembiayaan bahwa jangka waktu tersebut masih dalam proses pengajuan perpanjangan jangka waktu pembiayaan untuk 12 bulan ke depan yaitu dari tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022.

33. Long term bank loans (continued)

Holding Company (continued)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (continued)

Collateral or credit guarantees from the debtor submitting land and sugar factory buildings in Subang, Pasir Bungur village on a certificate of use No. 2 with a description:

- Land area of 23,595,140 m²
- Building area of 33,066 m²
- Following this, all machines and factory equipment are bound with mortgage rights rank I with a value of Rp 300,000,000,000

Land and sugar factory building in Subang, Pasir Muncang village with the following description:

- Land area of 16,095,690 m²
- All rights will be tied to rank I with a value of Rp 180,000,000,000

Land and sugar factory building in Subang in the village of Sidajaya Cipunegara with descriptions:

- Land area of 3,405,200 m²
- Entirely tied with security rights rank I with a value of Rp 30,000,000,000

Land and sugar factory buildings in Subang in Manyingsal Cipunegara village with descriptions:

- Land area of 11,509,353 m²
- Building 1,673 m²
- Entirely tied with security rights rank I with a value of Rp 60,000,000,000.

The balance of long-term bank loans to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as of 31 December 2021 and 31 December 2020 amounted to Rp 398,000,000,000 and Rp 459,000,000,000 respectively.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

In accordance with letter No. 3/ SPMH/ KU.02.09/ RNI.03/ 23/ VIII/ 2021 regarding the extension of the Financing Facility Ceiling that this period is still in the process of applying for an extension of the financing period for the next 12 months, from 24 August 2021 to 23 August 2022.

31 Desember 2021

31 December 2021

33. Utang bank jangka panjang (lanjutan)

Induk Perusahaan (lanjutan)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (lanjutan)

Menunjuk pada tanggapan perpanjangan fasilitas pembiayaan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dengan Bank Syariah Indonesia Tbk tanggal 15 Februari 2022 dengan surat No. 02/180-3/CB1 berdasarkan pertemuan antara Bank Syariah Indonesia dan RNI pada tanggal 14 September 2021 terkait permohonan fasilitas pembiayaan sebesar Rp 345.000.000.000 belum dapat dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Isu *corporate action* berupa menjadi holding pangan sehingga kami perlu mengetahui kondisi bisnis dan keuangan RNI grup setelah menjadi holding pangan.
2. BSI akan melakukan penyesuaian skema pembiayaan melalui fasilitas pembiayaan baru yang lebih cocok dengan kondisi RNI pasca menjadi holding pangan.

Jenis fasilitas : Fasilitas *Line* Pembiayaan
 Jenis akad : Mudharabah/ Musyarakah/
 Murabahah/ MMQ
 Plafon : Rp 345.000.000.000
 Keperluan : *Refinancing/* Digunakan
 untuk keperluan anak
 perusahaan maksimum
 Rp 160.000.000.000 untuk
 keperluan revitalisasi aset
 atas nama PT PG Rajawali
 II.

Syirkah pembiayaan :

1. Mudharabah
 100% dari nilai *invoice purchase order/ delivery order/ underlying* pembiayaan yang akan dibiayai.
2. Musyarakah
 Maksimal 80% dari nilai *invoice purchase order/ delivery order/ underlying* pembiayaan yang akan dibiayai.
3. Murabahah
 Maksimal 80% dari nilai *invoice purchase order/ delivery order/ underlying* pembiayaan yang akan dibiayai.
4. MMQ
 Maksimal 80% dari nilai *invoice purchase order/ delivery order/ underlying* pembiayaan yang akan dibiayai.

33. Long term bank loans (continued)

Holding Company (continued)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (continued)

Referring to the response to the extension of the financing facility of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) with Bank Syariah Indonesia Tbk dated 15 February 2022 with letter No. 02/180-3/CB1 based on a meeting between Bank Syariah Indonesia and RNI on 14 September 2021 regarding the application the financing facility of Rp 345,000,000,000 has not been made available for the following considerations:

1. *The issue of corporate action is to become a food holding company, so we need to know the business and financial conditions of the RNI group after becoming a food holding company.*
2. *BSI will make adjustments to the financing scheme through a new financing facility that is more suitable for RNI conditions after becoming a food holding.*

Types of facilities : Financing Line Facility
Type of contract : Mudharabah/ Musyarakah/
Murabahah/ MMQ
Credit line : Rp 345,000,000,000
Purpose : Refinancing/ Used for the needs
of the subsidiary a maximum of
Rp 160,000,000,000 for the
purpose of revitalizing assets on
behalf of PT PG Rajawali II.

Syirkah financing :

1. *Mudharabah*
100% of the invoice value of the purchase order/
delivery order/ underlying financing to be financed.
2. *Musyarakah*
A maximum of 80% of the invoice purchase order/
delivery order/ underlying financing to be financed.
3. *Murabahah*
A maximum of 80% of the invoice purchase order/
delivery order/ underlying financing to be financed.
4. *MMQ*
A maximum of 80% of the invoice purchase order/
delivery order/ underlying financing to be financed.

31 Desember 2021

31 December 2021

33. Utang bank jangka panjang (lanjutan)

Induk Perusahaan (lanjutan)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (lanjutan)

Bentuk/ Sifat :

1. Modal kerja
Revolving, bagi hasil/ setara margin bulanan (khusus murabahah) dibayarkan setiap bulan, pokok dibayarkan ketika jatuh tempo pembiayaan (*clean up based*) maksimal 12 bulan.
2. Investasi/ *Refinancing*
Non Revolving, angsuran dibayarkan setiap bulan maksimal 84 bulan.

Jangka waktu plafon : 12 bulan terhitung sejak ditandatangani Akad Plafon

Nisbah bagi hasil :

1. Setara (equivalent) 9,5% per tahun untuk pembiayaan dengan jangka waktu 12 bulan,
2. Untuk pembiayaan dengan jangka waktu diatas 12 bulan akan ditentukan pada saat realisasi pembiayaan,
3. Untuk PT PG Rajawali II akan ditentukan pada saat realisasi pembiayaan atau saat ini setara 10,75% per tahun untuk pembiayaan dengan jangka waktu diatas 12 bulan dan akan dapat direview setiap 12 bulan sekali.

Atas fasilitas kredit tersebut, Perusahaan menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan kantor dengan luas tanah 20.710 m² dan luas bangunan 6.801 m², terletak di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 46, Kel. Sukapura, Kec. Kejaksana, Kota Cirebon; 8 bidang tanah satu hamparan dengan bangunan Pabrik Gula Tersana Baru terletak di Jl. Pangeran Sutajaya Babakan Desa Babakan Kec. Babakan Kab. Cirebon; 8 bidang tanah satu hamparan terletak di Jl. Raya Kersana, Brebes, Desa Ciampel, Cigendong, dan Kersana.

Saldo utang bank jangka panjang kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp 122.947.335.001 dan Rp 139.383.227.701.

33. Long term bank loans (continued)

Holding Company (continued)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (continued)

Shape/ Nature :

1. *Working capital*
Revolving, profit sharing / monthly margin equivalent (especially murabahah) is paid every month, the principal is paid when the financing is due (clean up based) for a maximum of 12 months.
2. *Investment/ Refinancing*
Non Revolving, installments are paid every month for a maximum of 84 months.

Ceiling term : 12 months from the signing of the Ceiling Agreement

Profit sharing ratio :

1. *Equivalent (equivalent) 9.5% per year for financing with a period of 12 months,*
2. *For financing with a period of more than 12 months, it will be determined at the time of financing realization,*
3. *For PT PG Rajawali II, it will be determined at the time of financing realization or currently equivalent to 10.75% per year for financing with a period of more than 12 months and will be reviewed every 12 months.*

For the credit facility, the Company handed over collateral in the form of land and office buildings with a land area of 20,710 sqm and a building area of 6,801 sqm, located on Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 46, Kel. Sukapura, Kec. Kejaksana, Cirebon; 8 plots of land in one stretch with the Tersana Baru Sugar Factory building located on Jl. Pangeran Sutajaya Babakan Desa Babakan Kec. Babakan Kab. Cirebon; 8 plots of land one stretch is located on Jl. Raya Kersana, Brebes, Desa Ciampel, Cigendong, and Kersana.

The balance of long-term bank loans to PT Bank Syariah Indonesia Tbk as of 31 December 2021 and 31 December 2020 amounted to Rp 122,947,335,001 and Rp 139,383,227,701, respectively.

31 Desember 2021

31 December 2021

33. Utang bank jangka panjang (lanjutan)

Entitas Anak

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

PT Perkebunan Mitra Ogan

Perjanjian kredit KI PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk beberapa kali mengalami perpanjangan dan perubahan.

Perubahan fasilitas Kredit Investasi (KI) sebagai berikut:

KI MUBA 1 INTI

Plafond KI Pokok : Rp 80.553.000.000
Plafond KI IDC : Rp 11.739.000.000
Keperluan : Pembangunan PMKS di MUBA I kapasitas 30 ton/jam.

Bentuk kredit : Pseudo R/C dengan maksimum Co. menurun.

Jenis kredit : Kredit Investasi.

Jangka waktu : 17 tahun 10 bulan dihitung sejak penandatanganan addendum pertama (4 Februari 2010) (termasuk *grace period*) atau sampai dengan Desember 2027.

Suku bunga : 9% per tahun dan dibayar secara tertib setiap tanggal 23 dengan ketentuan kewajiban bunga yang dibayarkan sebesar selisih antara beban bunga yang ditentukan dengan beban bunga yang ditanggungkan.

KI SEMIDANG AJI INTI

Plafond KI Pokok : Rp 78.198.000.000
Plafond KI IDC : Rp 21.019.000.000
Jangka waktu : 16 tahun dihitung sejak tanggal akad kredit (termasuk *grace period* 4 tahun 6 bulan) atau sampai dengan Mei 2028.

Suku bunga : 9% per tahun dan dibayar secara tertib setiap tanggal 23 dengan ketentuan kewajiban bunga yang dibayarkan sebesar selisih antara beban bunga yang ditentukan dengan beban bunga yang ditanggungkan.

33. Long term bank loans (continued)

Subsidiaries

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

PT Perkebunan Mitra Ogan

Working capital credit and investment credit of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk has been amended several times.

Amend to the Investment Credit facility (KI) as follows:

KI MUBA 1 INTI

Credit line : Rp 80,553,000,000
Amount of credit : Rp 11,739,000,000
Purposes : Construction of PMKS in MUBA I capacity of 30 tons / hour.

Category : Pseudo R/C with maximum Co. decreased.

Type of credit : Investment Loan

Time period : 17 years 10 months from the signing of the first addendum (4 February 2010) (including the *grace period*) or up to December 2027

Interest rate : 9% per annum and paid in an orderly manner on the 23rd with the provisions of interest obligations paid in the amount of the difference between the interest expense determined with the deferred interest expense.

KI SEMIDANG AJI INTI

Credit line : Rp 78,198,000,000
Amount of credit : Rp 21,019,000,000
Time period : 16 years from the date of credit agreement (including a *grace period* of 4 years 6 months) or until May 2028.

Interest rate : 9% per annum and paid in an orderly manner on the 23rd with the provisions of interest obligations paid in the amount of the difference between the interest expense determined with the deferred interest expense.

31 Desember 2021

31 December 2021

33. Utang bank jangka panjang (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
(lanjutan)**

PT Perkebunan Mitra Ogan (lanjutan)

KI MUBA 2 INTI

Plafond KI Pokok	: Rp 22.185.000.000
Plafond KI IDC	: Rp 8.008.000.000
Jangka waktu	: 16 tahun dihitung sejak tanggal akad kredit (termasuk <i>grace period</i> 4 tahun 6 bulan) atau sampai dengan Mei 2028.
Suku bunga	: 9% per tahun dan dibayar secara tertib setiap tanggal 23 dengan ketentuan kewajiban bunga yang dibayarkan sebesar selisih antara beban bunga yang ditentukan dengan beban bunga yang ditangguhkan.

KI MUBA 2 KARET

Plafond KI Pokok	: Rp 14.078.000.000
Plafond KI IDC	: Rp 6.043.000.000
Jangka waktu	: 17 tahun dihitung sejak tanggal akad kredit (termasuk <i>grace period</i> 6 tahun 6 bulan) atau sampai dengan Mei 2029.
Suku bunga	: 9% per tahun dan dibayar secara tertib setiap tanggal 23 dengan ketentuan kewajiban bunga yang dibayarkan sebesar selisih antara beban bunga yang ditentukan dengan beban bunga yang ditangguhkan.

33. Long term bank loans (continued)

Subsidiaries (continued)

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
(continued)**

PT Perkebunan Mitra Ogan (continued)

KI MUBA 2 INTI

<i>Credit line</i>	: Rp 22,185,000,000
<i>Amount of credit</i>	: Rp 8,008,000,000
<i>Time period</i>	: 16 years from the signing of the first addendum (including the <i>grace period</i> 4 years 6 months) or up to May 2028.
<i>Interest rate</i>	: 9% per annum and paid in an orderly manner on the 23rd with the provisions of interest obligations paid in the amount of the difference between the interest expense determined with the deferred interest expense.

KI MUBA 2 RUBBER

<i>Credit line</i>	: Rp 14,078,000,000
<i>Amount of credit</i>	: Rp 6,043,000,000
<i>Time period</i>	: 17 years from the date of credit agreement (including a <i>grace period</i> of 6 years 6 months) or until May 2029.
<i>Interest rate</i>	: 9% per annum and paid in an orderly manner on the 23rd with the provisions of interest obligations paid in the amount of the difference between the interest expense determined with the deferred interest expense.

31 Desember 2021

31 December 2021

33. Utang bank jangka panjang (lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

PT Perkebunan Mitra Ogan (lanjutan)

Agunan kredit berupa:

1. Agunan pokok proyek MUBA I

- Kebun inti, HGU inti seluas 4.430 Ha (saat ini seluas 1.852,56 Ha telat terbit HGU dan seluas 2.577,44 Ha masih dalam proses sertifikasi),
- Persediaan, berupa fidusia persediaan bahan dengan nilai penjaminan sebesar Rp 74.755.000.000.

2. Agunan tambahan proyek MUBA I

Tanah beserta segala sesuatu yang ada di HGU No. 2 seluas 2.513,6 Ha yang terletak di desa Pagar Gunung dan Kota Baru, Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan atas nama PT Perkebunan Mitra Ogan. Atas tanah tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebesar Rp 76.625.000.000 dan Sertifikat Hak Tanggupan Peringkat Kedua sebesar Rp 79.375.000.000.

3. Agunan pokok proyek MUBA 2 dan Semidang Aji serta PMKS:

Kebun inti :

- MUBA tahap 2 (kelapa sawit), HGU inti (saat ini masih izin lokasi) seluas 585 Ha,
- MUBA tahap 2 (karet), HGU inti (saat ini masih izin lokasi) seluas 294,18 Ha,
- Semidang Aji (kelapa sawit), HGU inti (saat ini sudah HGU seluas 532,27 Ha dan lainnya masih berupa izin lokasi) kelapa sawit seluas 2.070 Ha,

Kebun plasma :

- MUBA tahap 2 (kelapa sawit), SHM masing-masing petani plasma (saat ini masih berupa Surat Pengakuan Hak Atas Tanah) untuk seluas 1.210 Ha.

33. Long term bank loans (continued)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (continued)

PT Perkebunan Mitra Ogan (continued)

Credit collateral are:

1. Principal collateral of MUBA I

- Core plantations, HGU covering 4,430 Ha (currently covering 1,852.56 Ha late in the issuance of HGU and covering an area of 2,577.44 Ha still in the process of certification),
- Inventories, in the form of fiduciary material inventory with a guarantee value of Rp 74,755,000,000.

2. Addition collateral of MUBA I

Land and everything in HGU No. 2 covering 2,513.6 Ha located in Pagar Gunung and Kota Baru villages, Lubai District, Muara Enim Regency, South Sumatra on behalf of PT Perkebunan Mitra Ogan. The land has been bound with the First Rank Mortgage of Rp 76,625,000,000 and the Second Rank Obligation Certificate is Rp 79,375,000,000.

3. The principal collateral for the MUBA 2 and Semidang Aji projects and PMKS:

Core plantations :

- MUBA stage 2 (oil palm), core HGU (currently location permits) covering 585 Ha,
- MUBA stage 2 (rubber), HGU core (currently still licensed location) covering an area of 294.18 Ha,
- Semidang Aji (oil palm), core HGU (currently HGU covering an area of 532.27 Ha and the other is still a location permit) for oil palm covering an area of 2,070 Ha,

Plasma plantations :

- MUBA stage 2 (oil palm), the SHM of each plasma farmer (currently still in the form of Recognition of Land Rights) for an area of 1,210 Ha.

31 Desember 2021

31 December 2021

33. Utang bank jangka panjang (lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

PT Perkebunan Mitra Ogan (lanjutan)

**4. Agunan tambahan proyek PT Perkebunan
Mitra Ogan**

- Tanah beserta segala sesuatu yang ada di atas HGU No. 1 seluas 1.173,30 Ha yang terletak di Desa Peninjauan, Kec. Peninjauan, Kab. OKU, Provinsi Sumatera Selatan atas nama PT Perkebunan Mitra Ogan, telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebesar Rp35.000.000.000.

Saldo utang bank jangka panjang PT Perkebunan Mitra Ogan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 282.435.088.340 dan Rp 266.463.118.215.

PT Rajawali Citramass

Utang modal kerja BRI terdiri dari Kredit Investasi II yang mengacu pada Surat Penawaran BRI tanggal 7 Juni 2012 No. B.22-KC-IX/ADK/06/2012; adapun Kredit Investasi IV dan Kredit Modal Kerja (KMK) mengacu pada *Offering Letter* BRI No. B.1187-KC-IX/ADK/08/2016 tanggal 27 Juli 2016 yang kemudian di addendum syarat kredit dalam *Offering Letter* No. B.1364-KC-IX/ADK/08/2016 tanggal 24 Agustus 2016. Selanjutnya kembali di addendum perjanjian kredit pada tanggal 11 April 2017 No. B.609-KC-IX/ADK/04/2017. Dana hasil pencairan fasilitas kredit investasi dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam bentuk Pseudo Rekening Koran dengan ketentuan pembayaran pokok pinjaman dibayar secara angsuran, dengan ketentuan sebagai berikut:

Berdasarkan *Offering Letter* BRI No.B808/KW-IX/ADK/04/2019 tanggal 26 April 2019 dan akta notaris No.02 tanggal 29 April 2019 dihadapan Notaris Indra Istiningsih, S.H., M.Kn., Entitas melakukan restrukturisasi pinjaman Kredit Investasi IV pada tanggal 29 April 2019 yang mulai berlaku pada bulan Mei 2019.

33. Long term bank loans (continued)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (continued)

PT Perkebunan Mitra Ogan (continued)

**4. Addition collateral of PT Perkebunan Mitra
Ogan**

- Land and everything above HGU No. 1 covering an area of 1,173.30 Ha located in the Peninjauan Village, Peninjauan Sub-district, OKU, South Sumatra Province on behalf of PT Perkebunan Mitra Ogan, the First Rank Mortgage has been placed in the amount of Rp 35,000,000,000.

The balance of long-term bank loans of PT Perkebunan Mitra Ogan as of 31 December 2021 and 2020 amounted to Rp 282,435,088,340 and Rp 266,463,118,215, respectively.

PT Rajawali Citramass

BRI's working capital loan consists of Investment Credit II which refers to *Offering Letter* dated 7 June 2012 No. B.22-KC-IX/ADK/06/2012; As for Investment Credit IV and Working Capital Credit (KMK) refers to BRI's *Offering Letter* no. B.1187-KC-IX/ADK/08/2016 dated 27 July 2016 which was later in the addendum to the credit terms in *Offering Letter* No. B.1364-KC-IX/ADK/08/2016 dated 24 August 2016. Then again at the addendum of the credit agreement on 11 April 2017 No. B.609-KC-IX/ADK/04/2017. Funds from the disbursement of investment credit facilities from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk in the form of a Pseudo Current Account with the terms of payment of loan principal paid in installments, with the following conditions:

Based on the BRI *Offering Letter* No.B808 / KW-IX / ADK / 04/2019 dated 26 April 2019 and notarial deed No.02 dated 29 April 2019 before Notary Indra Istiningsih, SH, M.Kn., the Entity restructured its Investment Credit IV loan on 29 April 2019 which came into force in May 2019.

31 Desember 2021

31 December 2021

33. Utang bank jangka panjang (lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

PT Rajawali Citramass (lanjutan)

Fasilitas Kredit Investasi IV diturunkan dari Rp 14.000.000.000 menjadi Rp 11.221.480.378. Bunga pinjaman diturunkan dari 11% (sebelas persen) per tahun menjadi 7% (tujuh persen) per tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. 3% (tiga persen) dibayar tertib tiap bulan sesuai tanggal realisasi restrukturisasi kredit.
2. 4% (empat persen) ditunda. Akumulasi bunga yang ditunda sampai dengan bulan Desember tahun berjalan dibayar pada bulan Desember tahun yang bersangkutan, dan pada akhir periode restrukturisasi.

Jangka waktu pinjaman tidak mengalami perubahan, yaitu 54 (lima puluh empat) bulan sejak akad kredit restrukturisasi, tetapi jadwal angsuran pokok pinjaman per bulan mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Pembayaran pokok pinjaman dari bulan 1 (satu) sampai dengan bulan 46 (empat puluh enam) sebesar Rp 200.000.000 per bulan berubah menjadi pembayaran pokok pinjaman dari bulan 1 (satu) sampai dengan bulan 12 (dua belas) sebesar Rp 25.000.000 per bulan.
2. Pembayaran pokok pinjaman dari bulan 47 (empat puluh tujuh) sampai dengan bulan 54 (lima puluh empat) sebesar Rp 225.000.000 per bulan berubah menjadi pembayaran pokok pinjaman dari bulan 13 (tiga belas) sampai dengan bulan 42 (empat puluh dua) sebesar Rp 50.000.000 per bulan.
3. Pembayaran pokok pinjaman dari bulan 55 (lima puluh lima) sebesar Rp 72.359.184 berubah menjadi pembayaran pokok pinjaman dari bulan 43 (empat puluh tiga) sampai dengan bulan 54 (lima puluh empat) sebesar Rp 785.123.365 per bulan.

33. Long term bank loans (continued)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (continued)

PT Rajawali Citramass (continued)

The Investment Credit IV facility was reduced from Rp 14,000,000,000 to Rp 11,221,480,378. Loan interest is reduced from 11% (eleven percent) per year to 7% (seven percent) per year, with the following conditions:

1. 3% (three percent) are paid in an orderly manner each month according to the date of credit restructuring realization.
2. 4% (four percent) is postponed. Accumulated interest deferred until December of the current year is paid in December of the year concerned, and at the end of the restructuring period.

The loan period has not changed, which is 54 (fifty four) months since the restructuring credit agreement, but the principal installment schedule per month has changed as follows:

1. The principal repayment of loans from 1 (one) month to 46 (forty six) in the amount of Rp. 200,000,000 per month is changed to the principal repayment of loans from 1 (one) to 12 (twelve) months in the amount of Rp 25,000,000 per month.
2. Principal loan repayments from 47 (forty seven) months to 54 (fifty four) months amounting to Rp 225,000,000 per month are changed to principal loan payments from 13 (thirteen) to 42 (forty two) months in the amount of Rp 50,000,000 per month.
3. The principal loan payment from month 55 (fifty five) in the amount of Rp 72,359,184 changed to principal loan payment from month 43 (forty three) to month 54 (fifty four) in the amount of Rp 785,123,365 per month.

31 Desember 2021

31 December 2021

33. Utang bank jangka panjang (lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

PT Rajawali Citramass (lanjutan)

Jenis Kredit : Kredit Investasi IV
Plafon : Rp 13.847.359.184
Bunga : 11% pa, ditinjau setiap ada perubahan suku bunga bank dan dibayar setiap bulan.

Jangka waktu: Sampai dengan bulan Juli tahun 2023.
Bentuk : Pseudo Rekening koran.
Agunan : Mesin-mesin milik PT Rajawali Citramass yang berkedudukan di Dusun Sidolegi, Desa Parengan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto.

Tujuan : Kredit investasi pembiayaan pembelian mesin dan peralatan produksi karung plastik, dengan TPC sebesar Rp 21.352.905.450 dengan sharing dana debitur sebesar Rp 7.505.546.266 atau 35,17%.

Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja W/A
Plafon : Rp 25.000.000.000
Bunga : 12,5% pa, ditinjau setiap ada perubahan suku bunga bank dan dibayar setiap bulan.

Jangka waktu: 12 bulan.
Bentuk : Pseudo Rekening koran.
Agunan : Mesin-mesin milik PT Rajawali Citramass yang berkedudukan di Dusun Sidolegi, Desa Parengan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto.

Tujuan : Untuk tambahan modal kerja produksi dan perdagangan karung dan plastik berdasarkan kontrak/ PO dari perusahaan BUMN dan perusahaan grup PT RNI.

Saldo utang bank jangka panjang PT Rajawali Citramass per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 9.449.980.373 dan Rp 9.738.281.729.

33. Long term bank loans (continued)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (continued)

PT Rajawali Citramass (continued)

Type of Credit : Credit investment IV
Credit line : Rp 13,847,359,184
Interest : 11% pa, reviewed at every change in bank interest rate and paid monthly.

Time period : Up to July 2023.
Category : Pseudo cash standing loan.
Collateral : Machinery owned by PT Rajawali Citramass which is located in Sidolegi village, Parengan Village, Jetis subdistrict, Mojokerto regency.

Purpose : Investment credit financing for the purchase of plastic sack machines and production equipment, with TPC amounting to Rp 21,352,905,450 sharing debtor funds in the amount of Rp7,505,546,266 or 35.17%.

Type of Credit : Working Capital Loan W/A
Credit line : Rp 25,000,000,000
Interest : 12.5% pa, reviewed at every change in bank interest rate and paid monthly.

Time period : 12 months.
Category : Pseudo cash standing loan.
Collateral : Machinery owned by PT Rajawali Citramass which is located in Sidolegi village, Parengan Village, Jetis subdistrict, Mojokerto regency.

Purpose : For additional working capital, the production and trade of sacks and plastics is based on contracts/ Purchase order from state-owned companies and PT RNI group.

The balance of long-term bank loans of PT Citramass as of 31 December 2021 and 2020 amounted to Rp 9,449,980,373 and Rp 9,738,281,729, respectively.

31 Desember 2021

31 December 2021

33. Utang bank jangka panjang (lanjutan)

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

PT PG Rajawali I

Entitas memperoleh fasilitas Pembiayaan Musyarakah dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan No.272/M/MLG/COMC/IV/2021 tanggal 27 April 2021 dan telah diaktakan melalui Akta No.306 tanggal 29 April 2021 di hadapan Paulus Oliver Yoesoef, S.H, M.Kn., Notaris di Kota Malang, sebagai berikut:

Pembiayaan Musyarakah

Plafon : Rp 250.000.000.000
Bunga : 8,25%
Jangka waktu: 36 bulan sampai dengan 29 April 2024

Pinjaman tersebut dijamin dengan:

- Piutang dagang senilai Rp 171.946.359.637.
- Tanah yang berlokasi di unit-unit Entitas (Unit Krebet Baru dan Unit Rejo Agung Baru) yang dijamin dengan Hak Tanggungan I sebesar Rp 375.000.000.000.

Saldo utang bank jangka panjang PT Perkebunan Mitra Ogan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 208.241.584.075 dan Nihil.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

PT PG Rajawali II

Pada tanggal 30 Juli 2018 perusahaan memperoleh pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan maksimum kredit sebesar Rp 160.000.000.000 dengan tingkat bunga 10,75%. Dalam jangka waktu 144 bulan pinjaman ini dijamin dengan hampan bangunan PG Tersana Baru di Jl. Pangeran Sutajaya, Babakan dengan tanah SHGB seluas 292.695 m2 dan di Jl. Raya Kersana, Brebes, Desa Ciampel, Cigedong dan Kersana dengan tanah SHGB seluas 209.035 m2.

33. Long term bank loans (continued)

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

PT PG Rajawali I

The Entity obtained a Musyarakah Financing facility from PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on the Letter of Approval for the Giving of Financing No.272/M/MLG/COMC/IV/2021 dated 27 April 2021 and has been notarized through Deed No. 306 dated 29 April 2021 on Paulus Oliver Yoesoef, SH, M.Kn., Notary in Malang City, as follows:

Musyarakah Financing

Credit line : Rp 250,000,000,000
Interest : 8.25%
Time period : 36 months until 29 April 2024

The loan is guaranteed by:

- Accounts receivable amounted to Rp 171,946,359,637.
- Lands located in units of the Entity (Unit Krebet Baru and Unit Rejo Agung Baru) which are guaranteed by Mortgage I amounted to Rp 375,000,000,000.

The balance of long-term bank loans of PT Perkebunan Mitra Ogan as of 31 December 2021 and 2020 amounted to Rp 208,241,584,075 and Nil, respectively.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

PT PG Rajawali II

On 30 July 2018 the company obtained a loan from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk with a maximum credit of Rp 160,000,000,000 at an interest rate of 10.75%. Within 144 months the loan was secured by a stretch of the PG Tersana Baru's building on Jl. Pangeran Sutajaya, Babakan with a land of SHGB covering an area of 292,695 sqm and on Jl. Raya Kersana, Brebes, Ciampel Village, Cigedong and Kersana with SHGB land covering an area of 209,035 sqm.

31 Desember 2021

31 December 2021

33. Utang bank jangka panjang (lanjutan)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (lanjutan)

PT PG Rajawali II (lanjutan)

Pada tanggal 29 Januari 2019 perusahaan memperoleh pinjaman dari PT Bank BNI Syariah dengan maksimum kredit sebesar Rp 345.000.000.000 dengan tingkat misbah/ margin 10,75%. Dalam jangka waktu pembiayaan 144 bulan ini dijamin dengan sebidang tanah dan bangunan kantor dengan luas bangunan seluas 6.801 m2, delapan bidang tanah satu hamparan dengan bangunan PG Tersana Baru terletak di Jl. Pangeran Sutajaya Babakan. Desa Babakan, Kec. Babakan, Kab Cirebon dan delapan bidang tanah satu hamparan terletak di Jl. Raya Kersana – Brebes, Desa Ciampel, Cigedong dan Kersana. Berdasarkan surat BSI No. 01/1190-3/CB1 tanggal 24 November 2021, BSI memberikan penurunan price fasilitas pembiayaan musyarakah dari semula 10,75% menjadi 9,5% yang berlaku mulai angsuran bulan November 2021.

Saldo utang bank jangka panjang PT PG Rajawali II per 31 Desember 2021 dan 2020 masing - masing sebesar Rp 145.848.215.588 dan Rp 128.980.698.943.

PT Laras Astra Kartika

Utang Bank PT BNI Syariah pada PT Laras Astra Kartika memperoleh fasilitas pembiayaan musyarakah mutanaqisah produktif dalam 4 tahap dengan jenis akad mutanaqisah, untuk keperluan pembiayaan *refinancing* untuk penerusan pembiayaan PT Laras Astra Kartika.

Bentuk dan sifat kredit *Non revolving* dengan angsuran yang dibayarkan setiap bulan. Suku bunga untuk tahap 1 dan 2 sebesar 10,75% per zz, sedangkan tahap 3 dan 4 sebesar 12% per tahun. Jangka waktu masing-masing tahap kredit yaitu 114 hari. Jumlah untuk masing-masing kredit antara lain :

1. Tahap I = Rp 3.500.000.000
2. Tahap II = Rp 5.192.616.250
3. Tahap III = Rp 6.934.495.009
4. Tahap IV = Rp 2.726.201.574

33. Long term bank loans (continued)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (continued)

PT PG Rajawali II (continued)

On 29 January 2019 the company obtained a loan from PT Bank BNI Syariah with a maximum credit of Rp 345,000,000,000 with a misbah / margin of 10.75%. Within a period of 144 months this financing is guaranteed with a plot of land and office buildings with a building area of 6,801 m2, eight parcels of land one overlay with PG Tersana Baru building located on Jl. Prince Sutajaya Babakan. Desa Babakan, Kec. Babakan, Cirebon Regency and eight one-layered parcels of land are located on Jl. Raya Kersana - Brebes, Ciampel, Cigedong and Kersana Villages. Based on BSI letter No. 01/1190-3/CB1 dated 24 November 2021, BSI provides a reduction in the price of the musyarakah financing facility from the original 10.75% to 9.5% which is effective starting in November 2021 installments.

The balance of long-term bank loan of PT PG Rajawali II as of 31 December 2021 and 2020 amounted to Rp 145,848,215,588 and Rp 128,980,698,943, respectively.

PT Laras Astra Kartika

Bank Loan of PT BNI Syariah on PT Laras Astra Kartika obtained productive financing facilities for *mutanaqisah musyarakah* in four stages with *mutanaqisah contract types*, for *refinancing financing purposes* for the continued financing of PT Laras Astra Kartika.

The form and nature of *Non revolving credit* with installments paid every month. The interest rates for stages 1 and 2 are 10.75% per annum while stages 3 and 4 are 12% per annum. The duration of each credit phase is 114 days. The amount for each credit includes:

1. Phase I = Rp 3,500,000,000
2. Phase II = Rp 5,192,616,250
3. Phase III = Rp 6,934,495,009
4. Phase IV = Rp 2,726,201,574

31 Desember 2021

31 December 2021

33. Utang bank jangka panjang (lanjutan)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (lanjutan)

PT Laras Astra Kartika (lanjutan)

Saldo utang bank jangka panjang PT Laras Astra Kartika per 31 Desember 2021 dan 2020 masing - masing sebesar Rp 18.002.311.833 dan Rp 18.146.311.833.

PT Bank Rakyat Indonesia Agro Tbk

PT Laras Astra Kartika

Pada tanggal 22 Agustus 2017 sesuai dengan surat persetujuan pemberian fasilitas kredit No. B.061/SPPK/OPK/06/2015 tertanggal 7 April 2015, menunjuk surat PT Laras Astra Kartika No. DIR/LAK/X/125/V/2017 tanggal 24 Mei 2017 telah ditandatangani Perjanjian Kredit antara PT Laras Astra Kartika dengan PT BRI Agro Niaga Tbk dan telah dilakukan restrukturisasi sesuai dengan perjanjian No. B.070-OL/KC/PLG/06/2020 tanggal 30 Juni 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

Tipe fasilitas : Kredit Investasi - Pinjaman Tetap
Angsuran (KI-PTA)
Jangka waktu : Sampai dengan
31 Desember 2025
Plafon : Rp 10.750.000.000,-
Tujuan : Pembiayaan kebun dan
pengolahan kelapa sawit
Tingkat Bunga : 11 % per tahun

Agunan :

- Persediaan CPO, PK dan bahan kimia pertanian atas nama PT Laras Astra Kartika dengan nilai pengikatan Rp 3.600.000.000.
- Lahan perkebunan kelapa sawit berikut tanah, tanaman, mesin pengolahan kelapa sawit, bangunan dan sarana pelengkap yang melekat di atasnya dengan bukti kepemilikan SHGU No. 01/ Desa Pandan Jaya, Kota Negara, Sri Mulyo/Kecamatan Buay Madang/Kabupaten Ogan Komering Ulu/Provinsi Sumatera Selatan atas nama PT Laras Astra Kartika dengan luas tanah 963,5 hektar dengan nilai pengikatan sebesar Rp43.750.000.000.

33. Long term bank loans (continued)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (continued)

PT Laras Astra Kartika (continued)

The balance of long-term bank loan of PT Laras Astra Kartika as of 31 December 2021 and 2020 amounted to Rp 18,002,311,833 and Rp 18,146,311,833 respectively.

PT Bank Rakyat Indonesia Agro Tbk

PT Laras Astra Kartika

On 22 August 2017 according to approval credit letter No. B.061/SPPK/OPK/06/2015 dated 7 April 2015, designating a letter PT Laras Astra Kartika No. DIR/LAK/X/125/V/2017 dated 24 May 2017 has been signed a credit agreement between PT Laras Astra Kartika with PT BRI Agro Niaga Tbk and has been restructured in accordance with agreement No. B.070-OL/KC/PLG/06/2020 date 30 June 2020 with the following conditions:

Facility Type : Investment Loans - Fixed
Installment Loans (KI-PTA)
Time period : until 31 December 2025
Credit line : Rp 10,750,000,000,-
Purpose : Financing plantation and
maintenance costs of oil palm
plantations
Interest Rate : 11% per annum

Collateral :

- Inventory of CPO, PK and agricultural chemicals in the name of PT Laras Astra Kartika with a binding value of Rp 3,600,000,000.
- Oil palm plantation land including land, plants, palm oil processing machinery, buildings and complementary facilities attached to it with ownership No. 01/Pandan Jaya Village, Kota Negara, Sri Mulyo/Buay Madang District/Ogan Komering Ulu District/Province South Sumatera on behalf of PT Laras Astra Kartika with a land area of 963.5 hectares with a binding value of Rp 43,750,000,000.

31 Desember 2021

31 December 2021

33. Utang bank jangka panjang (lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia Agro Tbk (lanjutan)

PT Laras Astra Kartika (lanjutan)

Pada tanggal 6 Agustus 2021 telah dilakukan restrukturisasi fasilitas KMK-PRK yang berubah menjadi KMK PTA dengan No. B.50/SPPK/OPK-DKR/08/2021, telah ditandatangani perjanjian fasilitas kredit antara PT Laras Astra Kartika dengan PT Bank Raya Indonesia Tbk, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tipe fasilitas : Kredit Modal Kerja – Pinjaman Tetap Angsuran (KMK-PTA)
Jangka waktu : 6 Agustus 2021 sampai dengan Juni 2025
Plafon : Rp 6.993.377.794
Tujuan : Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) dan biaya perawatan kebun kelapa sawit
Tingkat Bunga : 10,25 % per tahun
Biaya provisi : 0,25% from the credit limit

Saldo utang bank jangka panjang PT Laras Astra Kartika per 31 Desember 2021 dan 2020 masing - masing sebesar Rp 16.393.369.007 dan Rp 10.450.000.000.

33. Long term bank loans (continued)

PT Bank Rakyat Indonesia Agro Tbk (continued)

PT Laras Astra Kartika (continued)

On 6 August 2021, the KMK-PRK facility was restructured which changed to KMK PTA with No. B.50/SPPK/OPK-DKR/08/2021, a credit facility agreement was signed between PT Laras Astra Kartika and PT Bank Raya Indonesia Tbk, with the following conditions:

Facility Type : Working Capital Loans – Fixed Installment Loans (KMK-PTA)
Time period : 6 August 2021 until June 2025
Credit line : Rp 6,993,377,794
Purpose : Purchase of Fresh Fruit Bunches (FFB) and maintenance costs for oil palm plantations
Interest Rate : 10.25% per annum
Provision fee : 0.25% from the credit limit

The balance of long-term bank loan of PT Laras Astra Kartika as of 31 December 2021 and 2020 amounted to Rp 16,393,369,007 and Rp 10,450,000,000, respectively.

31 Desember 2021

31 December 2021

34. Pendapatan yang ditangguhkan

34. Deferred income

Akun pendapatan yang ditangguhkan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Deferred income accounts as of 31 December 2021 and 2020 are as follows :

	2021	2020	
Nilai perolehan aset hibah Kemenperin pada PT PG Rajawali II	50.952.400.000	50.952.400.000	<i>Acquisition value of grant assets of the Ministry of Industry at PT PG Rajawali II</i>
PT Mitra Kerinci atas investasi LIKI	17.270.000.000	17.270.000.000	<i>PT Mitra Kerinci on LIKI investment</i>
Jumlah	68.222.400.000	68.222.400.000	Total
Amortisasi aset hibah yang sudah dibukukan sebagai aset tetap	-	-	<i>Amortization of grant assets recorded as fixed assets</i>
Saldo akhir	68.222.400.000	68.222.400.000	Ending balance

Sehubungan dengan adanya program bantuan langsung dari Kementerian Perindustrian dalam rangka melakukan revitalisasi pabrik gula di Indonesia sejalan dengan program swasembada gula yang dicanangkan oleh pemerintah, maka Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Industri Agro memberikan bantuan kepada pabrik-pabrik gula dalam meningkatkan kinerja produksi dengan cara memberikan bantuan pemerintah melalui dana APBN yang telah disetujui dalam bentuk bantuan tunai maupun bantuan aset. PT PG Rajawali II merupakan salah satu Perusahaan yang menerima bantuan tersebut berdasarkan surat pengajuan bantuan No. 543/IA.3/10/2011 tertanggal 28 Oktober 2012 dan No. 04/IA.3/BAST/12/2011 tanggal 28 Desember 2011 kepada Kementerian Perindustrian.

In connection with the direct assistance program of the Ministry of Industry in order to revitalize the sugar factory in Indonesia in line with the sugar self-sufficiency program proclaimed by the government, the Ministry of Industry through the Directorate of Agro Industry provides assistance to sugar mills in improving production performance by providing government assistance through state budget funds that have been approved in the form of cash assistance and asset assistance. PT PG Rajawali II is one of the company that received such assistance based on the letter of appeal No. 543/IA.3/10/2011 dated 28 October 2012 and No. 04/IA.3/BAST/12/2011 to the Ministry of Industry.

Atas pengajuan yang telah disampaikan, PT PG Rajawali II telah menerima bantuan Hibah mesin sebesar Rp 50.952.400.000 yang diimplementasikan di unit PG Subang dari Kementerian Perindustrian. Selain daripada itu Perusahaan telah turut serta menandatangani pakta integritas program revitalisasi industri gula tersebut dengan No 10-GG/INSIP/12001 tertanggal 4 Januari 2012.

Upon submission, PT PG Rajawali II has received grant machine which is amounting to Rp 50,952,400,000 implemented in PG Subang unit from the Ministry of Industry. In addition, the Company has also signed the integrity pact of the sugar industry revitalization program with No. 10-GG/INSIP/12001 dated 4 January 2012.

Atas bantuan hibah aset tersebut, PT PG Rajawali II akan mengamortisasikan pendapatan yang akan ditangguhkan menjadi pendapatan berdasarkan estimasi umur penyusutan aset hibah yang telah digunakan dan telah direklasifikasikan menjadi aset tetap yang sebelumnya dicatat sebagai aset titipan.

Under the grant asset, PT PG Rajawali II will amortized the deferred revenue to income based on the estimated useful life of the depreciation of the used grant assets and has been reclassified to the property, plant and equipment previously recorded as entrusted assets.

Saldo pendapatan ditangguhkan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp 17.270.000.000 merupakan pendapatan ditangguhkan atas nilai potensi aset PT Mitra Kerinci atas lahan pinjam pakai yang digunakan oleh PT Rajawali Liki Energi (Anak Perusahaan) untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air.

The balance of deferred income as of 31 December 2021 and 2020 amounting to Rp 17,270,000,000 represents deferred income for the potential value of PT Mitra Kerinci's assets on borrowed land used by PT Rajawali Liki Energi (Subsidiary) for the Hydro Power Project.

31 Desember 2021

31 December 2021

34. Pendapatan yang ditangguhkan (lanjutan)

Pendapatan akan diakui secara bertahap selama 30 (tiga puluh) tahun sejak Pembangkit Listrik Tenaga Air beroperasi.

34. Deferred income (continued)

Revenue will be recognized in stages over 30 (thirty) years since the Hydroelectric Power Plant operates.

35. Imbalan paska kerja

Perusahaan membukukan liabilitas imbalan kerja untuk karyawannya sesuai dengan undang-undang No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan. Besarnya liabilitas dan beban yang timbul sehubungan dengan program imbalan kerja karyawan tersebut adalah sebagai berikut:

35. Post employment benefits

The Company records employee benefits liability for its employees in accordance with Law No. 13/2003 on manpower. The amount of liabilities and expenses incurred in connection with the employee benefits plan is as follows:

	2021	2020	
Perubahan Liabilitas/ Aset Imbalan Pasti Neto :			Changes in Liabilities/ Assets of Net Defined Benefit
Saldo awal	(512.624.360.520)	(499.471.336.681)	<i>Beginning balance</i>
Pembayaran iuran Perusahaan	40.976.652.693	49.355.837.699	<i>Contributions made by the Company</i>
Pembayaran imbalan oleh Perusahaan (selain terminasi)	41.137.886.954	36.816.040.193	<i>Benefits paid by the Company (excluding termination)</i>
Pendapatan (beban) yang diakui pada laporan laba/ rugi	(47.410.141.833)	(65.050.091.651)	<i>Income (expense) recognized in profit/ loss statement</i>
Pendapatan (beban) yang diakui pada OCI	(48.413.387.160)	(34.274.810.080)	<i>Income (expense) recognized in other comprehensive income</i>
Liabilitas/ (aset) imbalan pasti neto akhir tahun	(526.333.349.866)	(512.624.360.520)	Net defined Liability/ (Asset) at end of year
Perubahan nilai kini kewajiban imbalan pasti			<i>Changes in of Present Value of Defined Benefit Obligation (PVDBO)</i>
Nilai kini kewajiban awal periode	974.500.062.341	955.080.882.081	<i>PVDBO at beginning of period</i>
Biaya jasa lalu	(5.256.883.466)	-	<i>Past service cost</i>
Biaya jasa kini	30.702.000.187	32.971.662.879	<i>Current service cost</i>
Dampak kuartilment		-	<i>Quartilement effect</i>
Biaya bunga dari nilai kini kewajiban imbalan pasti	61.605.058.364	67.018.017.286	<i>Interest cost on PVDBO</i>
Provisi untuk imbalan terminasi	590.230.636	-	<i>Provision for termination benefits</i>
Pembayaran imbalan dari program pendanaan	-	(9.916.468.531)	<i>Benefit payment from funding program</i>
Pembayaran imbalan Perusahaan (selain imbalan terminasi)	(108.596.494.749)	(83.896.745.753)	<i>Benefit payment from Company (excluding termination benefit)</i>
Liabilitas atas <i>transfer in</i> karyawan	380.444.781	2.486.925.985	<i>Liability assumed due to employee transferred in</i>
Liabilitas atas <i>transfer out</i> karyawan (Keuntungan)/kerugian aktuarial	-	(4.113.613.400)	<i>Liability released due to employee transferred out</i>
	(7.130.894.230)	14.869.401.794	<i>Actuarial (gains)/losses</i>
Nilai kini kewajiban akhir periode	946.793.523.864	974.500.062.341	PVDBO at end of period

31 Desember 2021

31 December 2021

35. Imbalan paska kerja (lanjutan)

35. Post employment benefits (continued)

	2021	2020	
Perubahan aset program			Changes in of plan assets
Nilai wajar aset program pada awal periode	461.875.701.821	455.609.545.398	Fair value of plan assets at beginning of period
Koreksi saldo awal periode	(18.443.487.116)	-	Correction of the beginning balance period
Iuran Perusahaan pada periode berjalan	38.872.119.899	49.355.837.699	Company contributions during period
Iuran karyawan pada periode berjalan	3.315.920.920	2.954.466.237	Employee contributions during period
Pembayaran manfaat pensiun dari aset program	(62.802.214.038)	(56.997.174.041)	Benefits payment from plan assets
Bunga neto atas kewajiban (aset)	5.304.236.079	33.321.373.861	Net interest income on liabilities (assets)
Imbalan hasil atas aset program tidak termasuk bunga neto	(7.662.103.567)	(22.368.347.333)	Return on plan assets excluding net interest income
Nilai wajar aset program pada akhir periode	420.460.173.998	461.875.701.821	Fair value of plan assets at end of period
Penetapan jumlah yang diakui di laporan keuangan			Amounts recognized in the statement of financial position
Nilai masa kini liabilitas imbalan paska kerja	(946.793.523.864)	(974.500.062.341)	Present value of post employment benefit obligation (PVDBO)
Nilai wajar aset program	420.460.173.998	461.875.701.821	Fair value of plan assets
Kewajiban/aset imbalan pasti neto	(526.333.349.866)	(512.624.360.520)	Net defined benefit liability/ asset

36. Kepentingan non pengendali

36. Non-controlling interests

Akun tersebut merupakan hak pemegang saham minoritas atas aset bersih entitas anak per 31 Desember 2021 dan 2020 terinci sebagai berikut :

The account represents the minority shareholders' interest in the net assets of subsidiaries as of 31 December 2021 and 2020 detailed as follows :

	2021	2020	
Modal	78.193.779.871	106.252.097.016	Capital
Laba tahun berjalan	(37.596.810.595)	(20.363.635.187)	Current year net income
Keuntungan/ (kerugian) aktuarial	11.767.896.327	(7.694.681.958)	Actuarial profit (loss)
Jumlah kepentingan non pengendali	52.364.865.603	78.193.779.871	Total non-controlling interests

31 Desember 2021

31 December 2021

37. Modal saham

Pada tanggal 31 Mei 2017 Perseroan melakukan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham No. SK-291/MBU/05/2017 tanggal 8 Mei 2017 yang diaktakan dengan Akta Notaris No. 11 oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H, M.Kn dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0011956.AH.01.02 tahun 2017 tanggal 2 Juni 2017 yang di antaranya meningkatkan Modal Dasar Perseroan dari semula Rp 600.000.000.000 menjadi Rp 4.100.000.000.000 terbagi atas 4.100.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per lembar saham. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 1.027.425 lembar saham atau sebesar Rp 1.027.425.000.000.

Pada tanggal 22 Mei 2018 PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) melakukan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham No. S-302/MBU/04/2018 tanggal 4 Mei 2018 yang diaktakan dengan Akta Notaris Nomor 14 Tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0011424.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 23 Mei 2018 yang diantaranya menyetujui penambahan modal Negara Republik Indonesia kedalam saham Perseroan berupa pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian sebesar Rp 24.141.010.000 dan sebesar Rp 990.000 berasal dari kapitalisasi sebagian cadangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero). Dengan adanya penambahan modal tersebut, maka modal ditempatkan/ disetor PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) yang semula Rp 1.027.425.000.000 menjadi sebesar Rp 1.051.567.000.000.

37. Share capital

On 31 May 2017, the Company amended the Articles of Association under Decree of the Minister of State Owned Enterprises as the Shareholder No. SK-291/MBU/05/2017 dated 8 May 2017 which is notarized under Deed No. 11 by Notary Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-0011956.AH.01.02 year 2017 dated 2 June 2017 which amongst others increased the Company's Authorized Capital from Rp 600,000,000,000 to Rp 4,100,000,000,000 divided into 4,100,000 shares at par value of Rp 1,000,000 per share. From that the authorized capital stock has been issued and fully paid which are 1,027,425 shares or Rp 1,027,425,000,000.

On 22 May 2018 PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) amended the Articles of Association based on the Decree of the Minister of BUMN as Shareholder No. S 302/MBU/04/2018 dated 4 May 2018 which was notarized by Notary Deed Number 14 dated 22 May 2018 made by Notary Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn and was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with a Letter Decree Number AHU-0011424.AH.01.02 year 2018 dated 23 May 2018 which among others approved the addition of the State capital of the Republic of Indonesia into the Company's shares in the form of transfer of State Property to the Ministry in the amount of Rp 24,141,010,000 and Rp 990,000 from the capitalization of part of the reserves of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero). With the addition of the capital, the issued/paid-up capital of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) which was originally Rp 1,027,425,000,000 became Rp 1,051,567,000,000.

	2021	2020	
Modal Dasar	4.100.000.000.000	4.100.000.000.000	Authorized capital
Modal ditempatkan dan disetor	1.051.567.000.000	1.051.567.000.000	Issued and paid up capital

Nilai saham Pemerintah Negara Republik Indonesia pada Perusahaan tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

The value of Government's shares of the Republic of Indonesia in the Company in 2021 and 2020 are as follows :

2021 dan/and 2020				
Pemegang Saham	Jumlah Saham/ Total shares (lembar/ share)	Kepemilikan/ Ownership (%)	Nilai/ Value	Shareholder
Negara Republik Indonesia	1.051.567	100%	1.051.567.000.000	Republic of Indonesia

31 Desember 2021

31 December 2021

38. Tambahan modal disetor

a. Penyertaan modal negara

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 mengenai Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), memutuskan bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp 24.141.010.000.
2. Penambahan tersebut berasal dari pengalihan barang milik negara pada Kementerian Perindustrian yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010.

Pada tanggal 4 Mei 2018 Menteri Negara Badan Usaha Milik negara Republik Indonesia melalui Surat No. S-302/MBU/04/2018 melakukan penambahan modal disetor atas penyertaan modal negara tersebut di atas.

b. Pengampunan pajak

Entitas Anak

PT Pabrik Gula Rajawali II

Pada tanggal 20 April 2017, perusahaan melaporkan surat pernyataan harta kepada Direktorat Jenderal pajak dengan nomor KET-620/PP/WPJ.19/2017 dan mendapatkan surat pengampunan pajak sebesar Rp 28.849.000 berupa aset tetap. Perusahaan mencatat tambahan modal disetor sebesar Rp 28.849.000 dan mencatat uang tebusan sebesar Rp 1.442.450 sebagai beban pajak pada laba rugi komprehensif tahun berjalan.

38. Additional paid up capital

a. State capital

Based on Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 50 Year 2017 concerning Addition of Government share Capital of the Republic of Indonesia Into Share Capital of Limited Liability Company of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), decides that the Republic of Indonesia shall increase the capital into share capital of PT Rajawali Nusantara Indonesia is as follows:

1. *The value of the addition of state capital participation as referred to in Article 1 amounting to Rp 24,141,010,000.*
2. *The addition is derived from the transfer of state-owned goods at the Ministry of Industry that its procurement is derived from the State Budget in 2010.*

On 4 May 2018 the Minister of State for State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia through Letter No. S-302/MBU/04/2018 make additional paid-in capital for the state capital participation mentioned above.

b. Tax amnesty

Subsidiary

PT Pabrik Gula Rajawali II

On 20 April 2017, the Company reported the statement of property to the Directorate General of Taxes with KET-620/PP/WPJ.19/2017 and obtained a tax amnesty of Rp 28,849,000 in the form of fixed assets. The Company recorded an additional paid-in capital of Rp 28,849,000 and recorded a ransom of Rp 1,442,450 as tax expense in the current year's comprehensive income.

31 Desember 2021

31 December 2021

38. Tambahan modal disetor (lanjutan)

b. Pengampunan pajak (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

PT Pabrik Gula Candi Baru

Perusahaan telah menyampaikan Surat Pernyataan Harta untuk program Pengampunan Pajak pada tanggal 28 Desember 2016. Berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor KET-1550/PP/WPJ.19/2016 tanggal 31 Desember 2016, aset pengampunan pajak yang telah disetujui oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I sebesar Rp 400.000.000 dengan uang tebusan sebesar Rp 12.000.000.

PT Mitra Kerinci

Saldo tambahan modal disetor sebesar Rp 33.000.000 pada tahun 2017 merupakan transaksi pengampunan pajak atas persediaan barang jadi teh *low grade* dengan Surat Keterangan Pengampunan Pajak dengan No. KET-336/PP/WPJ.19/2017 tanggal 5 April 2017.

39. Saldo laba

a. Saldo laba telah ditentukan penggunaannya

Akun ini merupakan saldo yang dibentuk dari sisa laba (rugi) yang ditahan untuk tujuan tertentu dan tujuan pengembangan usaha. Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 1.119.420.468.624 dan Rp 1.056.633.742.444.

b. Saldo laba belum ditentukan penggunaannya

Saldo laba (rugi) yang belum ditentukan penggunaannya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 65.220.914.079 dan Rp 57.608.686.290.

38. Additional paid up capital (continued)

b. Tax amnesty (continued)

Subsidiary (continued)

PT Pabrik Gula Candi Baru

The Company has submitted the Letter of Declaration of Property to the Tax Amnesty program on 28 December 2016. Based on Tax Remission Certificate Number KET-1550/PP/WPJ.19/2016 dated 31 December 2016, tax amnesty assets approved by the DGT Regional Office of East Java I amounting to Rp 400,000,000 with a ransom of Rp 12,000,000.

PT Mitra Kerinci

The additional paid-in capital balance of Rp 33,000,000 in 2017 represents a tax amnesty transaction on low grade finished goods of tea stocks with Tax Amnesty Letter with No. KET-336/PP/WPJ.19/2017 dated 5 April 2017.

39. Retained earnings

a. Appropriated

This account represents the balance that is formed from the remaining retained earnings (losses) for a particular purpose and business development purposes. The appropriate retained earnings as of 31 December 2021 and 2020 amounted to Rp 1,119,420,468,624 and Rp 1,056,633,742,444, respectively.

b. Unappropriated

Unappropriated retained earnings (losses) as of 31 December 2021 and 2020 amounted to Rp 65,220,914,079 and Rp 57,608,686,290, respectively.

31 Desember 2021

31 December 2021

40. Penjualan

40. Sales

Rincian pendapatan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The details of revenue for the years ended 31 December 2021 and 2020 are as follows:

	2021	2020	
<u>Industri gula dan lainnya</u>			<u>Sugar industries etc.</u>
Gula dan tetes	3.082.283.021.074	3.138.969.376.252	Sugar and molasses
White sugar dan raw sugar	1.321.673.453.849	-	White sugar and raw sugar
Alkohol, spiritus, dan arak	25.809.157.715	19.634.441.086	Alcohol, spirituous, arrack
Jumlah industri gula dan lainnya	4.429.765.632.638	3.158.603.817.338	Total sugar industries and others
<u>Perkebunan</u>			<u>Plantation</u>
Tandan Buah Segar	76.795.897.849	32.804.342.808	Fresh fruit bunches
Teh	54.000.449.597	64.568.190.466	Tea
Minyak kelapa sawit	35.143.889.401	65.994.076.361	Crude Palm Oil
Inti kelapa sawit	5.126.428.355	8.657.705.660	Palm kernel
Karet	4.146.107.279	4.972.422.748	Rubber
Jumlah perkebunan	175.212.772.481	176.996.738.043	Total plantations
<u>Obat-obatan dan alat kesehatan</u>			<u>Medicines and healthy tools</u>
Alat kesehatan	1.672.267.991.627	1.690.893.141.385	Healthy tools
Obat-obatan	648.951.289.143	750.553.115.742	Medicines
Kondom	12.569.837.338	12.691.826.913	Condom
ASSP	4.729.653.212	30.841.090.673	Disposable syringe
Jumlah obat-obatan dan alat kesehatan	2.338.518.771.320	2.484.979.174.713	Total medicines and healthy tools
<u>Perdagangan</u>			<u>Tradings</u>
Barang konsumen	869.382.537.129	912.375.487.827	Consumer goods
Karung plastik	150.695.251.729	142.408.183.363	Plastic bags
Obat-obatan dan bahan kimia	14.102.197.216	15.839.530.431	Medicines and chemical
Pupuk	18.254.718.300	19.043.021.321	Fertilizer
Beras	9.669.297.760	19.065.868.880	Rice
Kulit hewan dan barang jadi kulit	2.181.818	1.786.152.941	Animal leather and Finished goods leather
Jumlah perdagangan	1.062.106.183.952	1.110.518.244.763	Total tradings
<u>Pendapatan usaha lainnya</u>			<u>Other incomes</u>
Sewa gedung dan kantor	10.172.880.898	16.167.979.270	Building and office lease
Dividen	3.341.838.771	-	Dividend
Pendapatan properti MT Haryono	-	25.000.000.000	Property income of MT Haryono
Barang dan jasa lainnya	-	1.817.990.872	Other goods and services
Jumlah pendapatan usaha lainnya	13.514.719.669	42.985.970.142	Total other incomes
Jumlah penjualan	8.019.118.080.060	6.974.083.944.999	Total sales

31 Desember 2021

31 December 2021

40. Penjualan (lanjutan)

40. Sales (continued)

<u>Gula dan tetes</u>			<u>Sugar and molasses</u>		
	Kuantum/ Quantum	Harga per ku/ Price per ku	2021 (Rp)	2020 (Rp)	
<u>PT PG Rajawali I</u>			<u>PT PG Rajawali I</u>		
<u>Gula:</u>			<u>Sugar:</u>		
Penjualan tahun 2021	1.948.025	1.055.541	2.056.219.742.207	-	Sales in 2021
Penjualan tahun 2020	1.100.856	1.097.182	-	1.207.838.821.255	Sales in 2020
Subjumlah			2.056.219.742.207	1.207.838.821.255	Subtotal
<u>Tetes:</u>			<u>Molasses:</u>		
Penjualan tahun 2021	733.617	237.009	173.874.060.910	-	Sales in 2021
Penjualan tahun 2020	1.276.534	281.276	-	304.984.650.674	Sales in 2020
Subjumlah			173.874.060.910	304.984.650.674	Subtotal
<u>PT PG Rajawali II</u>			<u>PT PG Rajawali II</u>		
<u>Gula:</u>			<u>Sugar:</u>		
Penjualan tahun 2021	526.324	1.052.104	553.747.330.449	-	Sales in 2021
Penjualan tahun 2020	1.215.188	1.063.698	-	1.292.593.352.247	Sales in 2020
Subjumlah			553.747.330.449	1.292.593.352.247	Subtotal
<u>Tetes:</u>			<u>Molasses:</u>		
Penjualan tahun 2021	100.057	233.101	23.323.398.689	-	Sales in 2021
Penjualan tahun 2020	225.350	237.140	-	53.439.603.926	Sales in 2020
Subjumlah			23.323.398.689	53.439.603.926	Subtotal
<u>PT PG Candi Baru</u>			<u>PT PG Candi Baru</u>		
<u>Gula:</u>			<u>Gula:</u>		
Penjualan tahun 2021	185.704	1.060.019	196.849.776.534	-	Sales in 2021
Penjualan tahun 2020	212.678	1.092.039	-	232.252.425.133	Sales in 2020
Subjumlah			196.849.776.534	232.252.425.133	Subtotal
<u>Tetes:</u>			<u>Molasses:</u>		
Penjualan tahun 2021	124.844	270.395	33.757.096.075	-	Sales in 2021
Penjualan tahun 2020	165.917	288.461	-	47.860.523.017	Sales in 2020
Subjumlah			33.757.096.075	47.860.523.017	Subtotal
<u>PT Rajawali Nusindo</u>			<u>PT PG Candi Baru</u>		
<u>Tetes:</u>			<u>Molasses:</u>		
Penjualan tahun 2021	119.791	321.257	38.483.616.210	-	Sales in 2021
Penjualan tahun 2020	-	-	-	-	Sales in 2020
Subjumlah			38.483.616.210	-	Subtotal

31 Desember 2021

31 December 2021

40. Penjualan (lanjutan)

40. Sales (continued)

Gula dan tetes (lanjutan)

Sugar and molasses (continued)

	Kuantum/ Quantum	Harga per ku/ Price per ku	2021 (Rp)	2020 (Rp)	
PT GIEB Indonesia			PT GIEB Indonesia		
Tetes:			Molasses:		
Penjualan tahun 2021	23.500	256.511	6.028.000.000	-	Sales in 2021
Penjualan tahun 2020	-	-	-	-	Sales in 2020
Subjumlah			6.028.000.000	-	Subtotal
Jumlah penjualan gula			2.806.816.849.190	2.732.684.598.635	Total sugar sales
Jumlah penjualan tetes			275.466.171.884	406.284.777.617	Total molasses sales
Jumlah			3.082.283.021.074	3.138.969.376.252	Total

Alkohol, spiritus dan arak

Alcohol, spirituous, and arrack

	2021 (Liter)	2020 (Liter)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	
Alkohol	1.317.290	943.800	16.218.894.067	12.440.394.961	Alcohol
Arak	253.000	184.000	9.582.463.648	7.194.046.125	Arrack
Spiritus	600	-	7.800.000	-	Rubbing alcohol
Jumlah	1.570.890	1.127.800	25.809.157.715	19.634.441.086	Total

Penjualan teh

Tea sales

	2021 (Kg)	2020 (Kg)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	
Ekspor	49.156	103.805	1.893.176.692	2.351.332.534	Export
Lokal	2.695.348	3.250.658	52.107.272.905	62.216.857.932	Local
Jumlah	2.744.504	3.354.463	54.000.449.597	64.568.190.466	Total

Kelapa sawit dan karet

Crude Palm oil and rubber

	2021 (Kg)	2020 (Kg)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	
Minyak sawit mentah	3.663.720	8.688.470	35.143.889.401	65.994.076.361	Crude Palm Oil
Inti sawit	894.990	2.171.230	5.126.428.355	8.657.705.660	Palm kernel
Tandan Buah Segar	36.403.965	20.012.819	76.795.897.849	32.804.342.808	Fresh fruit bunches
Karet	267.936	320.099	4.146.107.279	4.972.422.748	Rubber
Jumlah	41.230.611	31.192.618	121.212.322.884	112.428.547.577	Total

31 Desember 2021

31 December 2021

40. Penjualan (lanjutan)

40. Sales (continued)

<u>Penjualan karung</u>		<u>Sales of sack</u>			
	2021 (Lembar/ Sheet)	2020 (Lembar/ Sheet)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	
Karung	45.938.516	46.782.448	150.695.251.729	142.408.183.363	Sack
Jumlah	45.938.516	46.782.448	150.695.251.729	142.408.183.363	Total
<u>Kulit hewan dan barang jadi kulit</u>		<u>Animal leather and finished goods leather</u>			
	2021 (sq.ft/ pcs)	2020 (sq.ft/ pcs)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	
Kulit hewan dan barang jadi kulit	150	161.869	2.181.818	1.786.152.941	Animal leather and finished goods leather
Jumlah	150	161.869	2.181.818	1.786.152.941	Total
<u>Kondom dan alat suntik sekali pakai</u>		<u>Condom and disposable syringe</u>			
	2021 (sq.ft/ pcs)	2020 (sq.ft/ pcs)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	
Kondom lokal	88.091	123.355	12.569.837.338	12.691.826.913	Local condom
Alat Suntik Sekali Pakai	6.356.700	36.775.900	4.729.653.212	30.841.090.673	Disposable syringe
Jumlah	6.444.791	36.899.255	17.299.490.550	43.532.917.586	Total

31 Desember 2021

31 December 2021

41. Beban pokok penjualan

41. Cost of goods sold

	2021	2020	
Industri gula, tetes dan lainnya			<u>Sugar industri, molasses, and others</u>
Gula			<u>Sugar</u>
Beban produksi :			Production expenses:
Tanaman	1.582.285.460.555	1.667.331.602.739	Plantations
HPP gula putih	705.373.663.752	345.856.195.476	Cost of good sales of white sugar
HPP gula mentah	364.081.561.056	209.390.181.511	Cost of good sales of raw sugar
Pembuatan gula	165.015.713.765	154.027.178.482	Sugar manufacture
Pemeliharaan	78.768.794.100	87.909.516.500	Maintenance
Beban penyusutan	72.951.176.030	103.078.569.515	Depreciation expense
Pengelolaan	59.960.073.955	99.933.235.238	Management
Tebang dan angkut	49.251.407.138	49.789.505.429	Cutting and transport
Pembungkusan dan pengangkutan	34.509.320.112	345.739.511.649	Packaging and transportation
Jumlah	3.112.197.170.463	3.063.055.496.539	Total
Persediaan awal	710.931.510.290	37.647.670.546	Beginning inventory
Persediaan akhir	(14.809.028.869)	(706.753.477.653)	Ending inventory
Jumlah beban pokok penjualan gula	3.808.319.651.884	2.393.949.689.432	Total cost of sugar sold
Tetes			<u>Molasses</u>
Tanaman	225.764.063.955	203.875.085.618	Plantations
Pembuatan tetes	19.328.483.913	24.976.668.632	Molasses manufacture
Pemeliharaan	10.019.416.378	17.466.809.033	Maintenance
Beban penyusutan	8.857.799.522	17.511.475.945	Depreciation expense
Tebang dan angkut	8.233.059.465	46.263.746.885	Cutting and transport
Pengelolaan	7.931.366.394	17.482.566.323	Management
Jumlah	280.134.189.627	327.576.352.436	Total
Persediaan awal	12.029.994.873	270.319.802	Beginning inventory
Persediaan akhir	(7.348.135.005)	(12.029.706.613)	Ending inventory
Jumlah beban pokok penjualan tetes	284.816.049.495	315.816.965.625	Total cost of molasses sold
Alkohol, spiritus, arak & lainnya			<u>Alcohol, spirituous, arrack and others</u>
Alkohol, spiritus dan arak	27.825.274.849	17.293.827.815	Alcohol, spirituous, and arrack
Jumlah beban pokok penjualan alkohol, spiritus dan arak	27.825.274.849	17.293.827.815	Total cost of goods sold of alcohol, spirituous, and arrack
Total jumlah beban pokok industri gula, tetes, alkohol, spiritus, dan arak	4.120.960.976.228	2.727.060.482.872	Total cost of goods sold of sugar, molasses, alcohol, spirituous, and arrack

31 Desember 2021

31 December 2021

41. Beban pokok penjualan (lanjutan)

41. Cost of goods sold (continued)

	2021	2020	
Perkebunan			Plantation
Tandan buah segar	54.067.613.914	25.810.191.173	Fresh Fruit Bunches
Teh	49.939.807.911	49.888.448.795	Tea
Minyak kelapa sawit	43.489.115.361	71.587.452.554	Crude palm oil
Inti kelapa sawit	5.990.292.651	9.350.064.581	Palm kernel
Karet	1.168.557.307	1.787.386.251	Rubber
Jumlah beban pokok penjualan perkebunan	154.655.387.144	158.423.543.354	Total cost of sales of plantation
Obat-obatan dan alat kesehatan			Medicines and medical tools
Alat kesehatan	1.139.631.896.522	1.249.874.896.660	Medical equipments
Obat-obatan	560.641.692.517	640.944.176.108	Medicines
Kondom	10.806.910.267	9.316.779.700	Condom
ASSP	2.435.116.228	20.869.412.567	ASSP
Jumlah beban pokok penjualan farmasi dan kesehatan	1.713.515.615.534	1.921.005.265.035	Total cost of goods sold of pharmaceuticals and healthcare
Perdagangan			Trading
Barang konsumen	807.269.428.474	873.636.370.746	Consumer goods
Karung plastik	142.993.501.479	137.068.515.220	Plastic bags
Pupuk	16.569.807.801	16.675.090.662	Fertilizer
Obat-obatan dan bahan kimia	13.037.498.546	13.877.870.107	Medicines and chemical material
Beras	9.085.006.127	18.197.235.816	Rice
Kulit hewan dan barang jadi kulit	1.866.758	2.119.214.502	Animal leather and finished goods leather
Jumlah beban pokok penjualan perdagangan	988.957.109.185	1.061.574.297.053	Total cost of sales of trading
Beban pokok penjualan usaha lainnya			Cost of other business sales
Barang dan jasa lainnya	-	3.584.394.950	Other goods and services
Jumlah beban pokok penjualan usaha lainnya	-	3.584.394.950	Total cost of other business sales
Jumlah beban pokok penjualan	6.978.089.088.091	5.871.647.983.264	Total cost of goods sold

Beban pokok penjualan gula dan tetes merupakan beban pokok penjualan gula dan tetes di PT PG Rajawali I, PT PG Rajawali II, dan PT PG Candi Baru.

The cost of selling sugar and molasses represent the cost of sugar and molasses sales in PT PG Rajawali I, PT PG Rajawali II and PT PG Candi Baru.

Beban pokok penjualan perkebunan merupakan beban pokok penjualan CPO, PK, karet, teh, dan TBS di PT Perkebunan Mitra Ogan, PT Mitra Kerinci, dan PT Laras Astra Kartika.

The cost of sales of plantations represent the cost of sales of CPO, PK, rubber, tea and FFB in PT Perkebunan Mitra Ogan, PT Mitra Kerinci and PT Laras Astra Kartika.

Beban pokok penjualan obat-obatan dan alat kesehatan merupakan beban pokok penjualan obat-obatan dan alat kesehatan di PT Rajawali Nusindo, PT Mitra Rajawali Banjaran dan PT PG Rajawali II.

Cost of sales of medicines and medical equipment represent the cost of sales of medicines and medical equipment at PT Rajawali Nusindo, PT Mitra Rajawali Banjaran and PT PG Rajawali II.

31 Desember 2021

31 December 2021

41. Beban pokok penjualan (lanjutan)

41. Cost of goods sold (continued)

Beban pokok penjualan alkohol, spiritus dan arak merupakan beban pokok penjualan alkohol, spiritus dan arak PT PG Rajawali II.

The cost of sales of alcohol, spirituous and arrack represent the cost of sales of alcohol, spirituous and arrack at PT PG Rajawali II.

Beban pokok penjualan kondom dan ASSP merupakan beban pokok penjualan PT Mitra Rajawali Banjarn dan PT Rajawali Nusindo

The cost of condom and ASSP sales represent the cost of sales of PT Mitra Rajawali Banjarn and PT Rajawali Nusindo

Beban pokok penjualan pupuk merupakan beban pokok penjualan pupuk PT Rajawali Nusindo kepada pihak ketiga.

Cost of sales of fertilizer represent the cost of sales of fertilizer at PT Rajawali Nusindo to a third party.

Beban pokok penjualan obat-obatan, dan bahan kimia merupakan beban pokok penjualan di PT Rajawali Nusindo.

Cost of sales of medicines and chemicals represent cost of goods sold in PT Rajawali Nusindo.

Beban pokok penjualan karung plastik merupakan beban pokok penjualan karung plastik PT Rajawali Citramass, PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring.

The cost of selling plastic bags represent cost of goods sold of plastic bags at PT Rajawali Citramass PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring.

Beban pokok penjualan kulit hewan merupakan beban pokok penjualan di PT Rajawali Tanjungsari.

Cost of sale of animal leather represent the cost of goods sold in PT Rajawali Tanjungsari.

42. Beban usaha

42. Operating expenses

	2021	2020	
<u>Beban umum dan administrasi</u>			<u>General and administrative expense</u>
Beban kantor dan umum	45.939.264.110	51.843.076.334	<i>General and office expenses</i>
Beban penyusutan	37.194.491.114	34.786.022.608	<i>Depreciation expenses</i>
Beban pemeliharaan gedung, mess dan sewa	25.676.611.841	27.865.836.861	<i>Building maintenance, mess and rent expenses</i>
Beban jamuan dan sumbangan	15.705.441.388	13.361.004.025	<i>Representation and donations expenses</i>
Beban konsultan (yuridis dan audit)	15.053.722.970	15.572.780.959	<i>Consultant (juridical and audit) expenses</i>
Beban pengangkutan/ perjalanan	10.872.490.336	10.128.352.887	<i>Travelling/ transportation expenses</i>
Beban rapat, seminar, riset dan Pengembangan	9.414.807.794	5.384.703.202	<i>Meeting, seminar, research and development expenses</i>
Beban pajak dan PBB	8.906.768.215	10.879.302.491	<i>Tax expenses</i>
Beban asuransi	5.395.991.905	7.563.578.963	<i>Insurance expenses</i>
Beban bank/ iklan/ komputerisasi	2.815.529.897	2.502.598.164	<i>Bank / advertisement/ computerization expenses</i>
Beban iuran, retribusi, perijinan dan keamanan	2.282.798.756	893.827.929	<i>Contribution, retribution license, security expenses</i>
Biaya koreksi perpajakan	1.240.812.465	3.564.994.017	<i>Tax correction fee</i>
Biaya penjualan gula dan tetes	-	8.472.969.975	<i>The cost of sugar and molasses sales</i>
Beban lainnya	24.198.183.508	14.273.259.617	<i>Other expenses</i>
Jumlah beban umum dan administrasi	204.696.914.299	207.092.308.032	Total general and administrative expenses
<u>Beban pegawai</u>			<u>Employee expenses</u>
Jaminan sosial pegawai	274.293.895.264	237.639.582.478	<i>Employees social security</i>
Beban gaji, pengobatan, dan premi pensiun	172.975.506.114	175.152.416.881	<i>Salary, medical and pension premium expenses</i>
Sub jumlah beban pegawai	447.269.401.378	412.791.999.359	Subtotal employee expenses

31 Desember 2021

31 December 2021

42. Beban usaha (lanjutan)

42. Operating expenses (continued)

	2021	2020	
<u>Beban penjualan</u>			<u>Selling expenses</u>
Beban promosi dan distribusi produk	16.635.445.008	18.838.713.653	Promotion and product distribution expenses
Beban pemeliharaan kendaraan	15.075.869.307	14.457.032.602	Vehicle maintenance expenses
Dinas karyawan	11.905.427.310	10.707.241.835	Employee travel expenses
Sponsor dan seminar	11.498.036.527	10.915.854.731	Sponsorship and seminar
Beban kirim dan asuransi	10.329.446.782	13.603.014.226	Delivery and insurance expenses
Beban distribusi kulit	481.713.547	563.277.740	Leather distribution expenses
Beban distribusi minyak sawit	254.507.136	316.530.048	Palm oil distribution expenses
Iklan dan pameran	237.937.200	93.607.499	Advertisement and exhibition
Brosur, buku, dan lain-lain	67.559.000	221.147.880	Brochures, books, and others
Beban penjualan lainnya	10.477.381.078	8.160.529.928	Other selling expenses
Jumlah beban penjualan	76.963.322.895	77.876.950.142	Total selling expenses

43. Pendapatan (beban) lain-lain

43. Other income (expenses)

	2021	2020	
<u>Pendapatan lain-lain</u>			<u>Other income</u>
Laba penjualan aset tetap	63.131.408.270	5.528.713.741	Gain on sales of fixed assets
Pendapatan bunga deposito dan jasa giro	30.773.646.038	46.987.453.327	Deposits interest income and account income
Denda keterlambatan pengambilan gula dan tetes	30.111.269.445	296.412.574	Delay penalty of taking sugar and molasses
Pendapatan lain-lain dari selisih nilai wajar aset biologis	25.342.300.000	17.386.232.959	Other income from differences in fair value of biological assets
Penjualan barang bekas	5.081.186.396	1.866.296.722	Sales of second-hand goods
Pendapatan klaim/ denda impor	4.204.475.014	312.764.577	Income claim/ import penalty
Pemulihan piutang	2.694.902.173	103.672.020	Recovery of receivables
Sewa gudang dan rumah dinas	1.004.908.872	169.269.522	Warehouse and official house lease
Pendapatan hortikultura	8.290.000	150.195.652	Horticultural income
Pendapatan hak laba Perusahaan Asosiasi dan Anak	4.919.709	4.764.000	Earnings revenue of Associates and Subsidiaries Companies
Pendapatan sewa mesin	-	224.579.482	Machine rental income
Penjualan cangkang	-	52.727.273	Shell sales
Lain-lain	56.548.288.035	89.047.968.129	Others
Jumlah pendapatan lain-lain	218.905.593.952	162.131.049.978	Total other income

31 Desember 2021

31 December 2021

43. Pendapatan (beban) lain-lain (lanjutan)

43. Other income (expenses) (continued)

	2021	2020	
<u>Beban lain-lain</u>			<u>Other expenses</u>
Penyisihan dan penurunan nilai piutang	17.575.342.590	22.059.487.846	Allowance and impairment of receivables
Beban pajak penghasilan dan denda	13.727.611.487	10.056.617.804	Income tax expenses and penalty
Penyisihan dan penurunan persediaan	9.796.017.222	14.941.897.302	Allowance and impairment of inventories
Beban non operasi	2.626.693.700	3.168.824.426	Non-operating expenses
Selisih kurs	2.565.969.139	3.926.902.689	Forex difference
Biaya jasa kontrak manajemen	462.548.787	799.924.301	Contract management service fees
Beban keamanan	8.580.000	6.446.212.972	Security cost
Lain-lain	45.865.085.379	39.246.036.165	Others
Jumlah beban lain-lain	92.627.848.304	100.645.903.505	Total other expenses

44. Beban keuangan

44. Finance costs

	2021	2020	
<u>Beban keuangan</u>			<u>Finance costs</u>
Biaya bunga pinjaman	354.773.951.173	377.856.033.739	Bank interest expense
Jumlah beban keuangan	354.773.951.173	377.856.033.739	Total finance cost

Beban keuangan merupakan beban bunga atas bunga pinjaman Rekening Dana Investasi di Perusahaan atas RDI No. 265, 302, 324, dan 330 dan pinjaman RDI No. 213 dan 218 di PT PG Rajawali II, beban bunga atas pinjaman ke PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank BNI Syariah, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, Sebagian bunga pinjaman RDI dikapitalisasi ke tanah MBAU tambahan bunga MTN dan Sukuk Ijarah.

Financing charges represent interest charges on the interest of investment fund account in the Company No.265, 302, 324, and 330 and investment fund account No.213 and 218 at PT PG Rajawali II, interest expense on loans to PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank BNI Syariah, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Part of investment fund account interest is capitalized to the land of MBAU added interest of MTN and Sukuk Ijarah.

31 Desember 2021

31 December 2021

45. Informasi mengenai pihak berelasi

Grup merupakan suatu kelompok usaha dari sebagaimana dijelaskan di bawah, dalam menjalankan operasinya berhubungan dan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Mengenai hubungan tersebut terdapat kemungkinan adanya transaksi yang dilakukan dengan kondisi dan syarat yang tidak sama apabila transaksi tersebut dilakukan dengan pihak yang tidak berelasi.

Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut:

- a. Negara Kesatuan Republik Indonesia diwakili oleh Menteri BUMN merupakan pemegang saham Perusahaan dan BUMN lain memiliki hubungan afiliasi melalui penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia.
- b. Perusahaan menempatkan dan meminjam dana dari bank-bank yang dimiliki Pemerintahan dengan persyaratan dan tingkat bunga normal sebagaimana yang berlaku untuk nasabah pihak ketiga.
- c. Perusahaan dan Entitas Anak memperoleh pinjaman jangka panjang dalam bentuk Rekening Dana Investasi dalam mata uang Rupiah dengan tingkat suku bunga 0% per tahun.
- d. Perusahaan mengadakan perjanjian dalam rangka usaha dengan BUMN lain atau Perusahaan yang tergabung dalam Grup PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) yang tidak dikonsolidasikan serta badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintahan yang berwenang.

Transaksi dengan pihak berelasi di bawah ini dilakukan dalam rangka usaha antara lain:

- a. Perusahaan melakukan transaksi dengan PT Perkebunan Nusantara X dan XIV dalam rangka peningkatan kinerja pabrik gula.
- b. Perusahaan melakukan transaksi dengan PT PG Madu Baru dalam rangka melakukan kegiatan usaha pemberian jasa manajemen dan kucuran modal kerja.
- c. Perusahaan melakukan transaksi dengan PT Asuransi Jasa Indonesia dalam rangka transaksi asuransi.

45. Related parties information

The Group represent a group of businesses as described below, in carrying out its operations in relation to and conducting transactions with related parties. Regarding the relationship there is a possibility that transactions are conducted with conditions and terms that are not the same if the transaction is done with a non-related party.

Nature of relationship with related parties are as follows:

- a. *The United States of Republic Indonesia is represented by the Minister of State-Owned Enterprises as a shareholder of the Company and other SOEs having affiliated relationships through the capital participation of Government of Republic of Indonesia.*
- b. *The Company places and owes funds from Government-owned banks with normal terms and interest rates as applicable to third party customers.*
- c. *The Company and Subsidiaries obtain long-term loans in the form of Investment Fund Accounts denominated in Rupiah bearing interest at 0% per annum.*
- d. *The Company entered into agreements in the framework of business with other SOEs or companies incorporated in the unconsolidated PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Group and other authorized bodies or government agencies.*

Transactions with related parties are as follows:

- a. *The Company entered into transactions with PT Perkebunan Nusantara X and XIV in order to improve the performance of the sugar factory.*
- b. *The Company conducts transactions with PT PG Madu Baru in the framework of conducting business activities of providing management and dropping of working capital.*
- c. *The Company entered into transactions with PT Asuransi Jasa Indonesia in the framework of insurance transactions.*

31 Desember 2021

31 December 2021

46. Perjanjian-perjanjian penting

PT Rajawali Nusindo

Pihak berelasi

Berdasarkan perjanjian distribusi dengan PT Phapros Tbk No. 033/S.Pj/LE/IX/18, Perusahaan ditunjuk untuk mendistribusikan produk-produk phapros secara eksklusif dengan cakupan wilayah di seluruh Indonesia. Perjanjian ini berlaku sejak tahun 2018 dan berlaku 5 tahun.

Berdasarkan perjanjian distribusi dengan PT Mitra Ogan, Perusahaan ditunjuk untuk mendistribusikan CPO dan Palm Kernel secara eksklusif dengan cakupan wilayah di seluruh Indonesia maupun luar negeri. Perjanjian ini berlaku sejak tahun 2007 sampai waktu yang belum ditentukan.

Berdasarkan perjanjian distribusi dan marketing eksklusif alat kesehatan dan kondom dengan PT Mitra Rajawali Banjaran (MRB) No. 009/SPJ/MRB.RN/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018, Perusahaan ditunjuk sebagai distributor dan marketing eksklusif/ tunggal atas produk produk yang dihasilkan oleh MRB. Perjanjian berlaku mulai 21 Agustus 2018 sampai waktu yang belum ditentukan.

Berdasarkan perjanjian dengan PT PG Rajawali II No. 20/S.Pj/Nus.01/III/2016 tanggal 10 Maret 2016, Perusahaan ditunjuk untuk melakukan jual beli dan mendistribusikan produk gula dan turunannya dengan cakupan wilayah di seluruh Indonesia maupun luar negeri. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tahun 2016 sampai waktu yang belum ditentukan.

Pihak ketiga

Berdasarkan perjanjian dengan PT Roche Indonesia Divisi Diagnostics, No. SPK/01/ 2014XII/V-I/FJ, Perusahaan berhak untuk memakai peralatan tertentu milik PT Roche Indonesia yang ditempatkan di RSUP Prof. Dr. R.D. Kandaou, di Jl. Raya Manado - Tanawangko, Kec. Malalayang Manado. Perjanjian ini berlaku 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 10 Desember 2014 dan akan berakhir pada tanggal 9 Desember 2019.

Perjanjian ini terakhir kali diperbaharui untuk memperpanjang periode perjanjian dari tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023.

46. Significant agreement

PT Rajawali Nusindo

Related parties

Based on a distribution agreement with PT Phapros Tbk No. 033/S.Pj/LE/IX/18, the Company was appointed to distribute phapros products exclusively with regional coverage throughout Indonesia. This agreement is for 5 years starting from 2018.

Based on a distribution agreement with PT Mitra Ogan, the Company was appointed to distribute CPO and Palm Kernel exclusively with coverage throughout Indonesia and abroad. This agreement is effective from 2007 until an undetermined time.

Based on the distribution agreement and exclusive marketing of medical devices and condoms with PT Mitra Rajawali Banjaran (MRB) No. 009/SPJ/MRB.RN/VIII/2018 dated 21 August 2018, the Company was appointed as a distributor and exclusive/ sole marketing of the products produced by MRB. The agreement from 21 August 2018 until an undetermined time.

Based on the agreement with PT PG Rajawali II No. 20/S.Pj/Nus.01/III/2016 dated 10 March 2016, the Company was appointed to buy and sell and distribute sugar products and derivatives with regional coverage throughout Indonesia and abroad. This agreement is effective from 2016 until an undetermined time.

Third parties

Based on the agreement with PT Roche Indonesia Diagnostics Division, No. SPK / 01 / 2014XII / V-I / FJ, the Company has the right to use certain equipment of PT Roche Indonesia located at RSUP Prof. Dr. R.D. Kandaou, on Jl. Raya Manado - Tanawangko, Kec. Malalayang Manado. This agreement is effective for 5 (five) years, starting from 10 December 2014 and will expire on 9 December 2019.

This agreement was last amended to extend the period from 23 January 2020 to 22 January 2023.

31 Desember 2021

31 December 2021

46. Perjanjian-perjanjian penting (lanjutan)

PT Rajawali Nusindo (lanjutan)

Pihak ketiga (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian dengan PT Novapharin, Perusahaan telah ditunjuk untuk mendistribusikan produk E-Catalog PT Novapharin Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Perjanjian ini terakhir kali diperbaharui untuk memperpanjang periode perjanjian dari tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Berdasarkan perjanjian distribusi dengan PT Tokai Dharma Indonesia No. 140/SPK/PGA/TDI/XI/2020, Perusahaan ditunjuk untuk mendistribusikan/menjual produk-produk PT Tokai Dharma Indonesia melalui outlet-outlet milik Perusahaan untuk wilayah/Propinsi Pontianak, Balikpapan dan Banjarmasin. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dari tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Sampai dengan laporan ini dibuat, perjanjian masih dalam proses perpanjangan.

Perusahaan memiliki perjanjian distribusi dengan prinsipal dari luar negeri dengan cakupan distribusi di seluruh Indonesia, antara lain sebagai berikut :

1. Smith medical ASD, Inc
2. Robert Riele GmbH
3. DFI Co Ltd

Jangka waktu perjanjian prinsipal luar negeri berakhir tahun 2015 dan berakhir tahun 2024.

Berdasarkan perjanjian distribusi dengan PT Trimaran dengan No. 203/S.Pj/Nus.01.00/VIII/19, Perusahaan ditunjuk untuk mendistribusikan/ menjual produk-produk dari PT Trimaran. Perjanjian mulai berlaku sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022.

Berdasarkan perjanjian distribusi dengan PT Maesindo Indonesia No. 037/PKS/Lgl/MI/IX//2020 dan No. 307/S.Pj/Nus.01.00/IX/2020, Perusahaan ditunjuk untuk mendistribusikan barang dari PT Maesindo Indonesia. Perjanjian mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2022.

46. Significant agreements (continued)

PT Rajawali Nusindo (continued)

Third parties (continued)

Based on the agreement with PT Novapharin, the Company has been appointed to distribute PT Novapharin E-Catalog products. This agreement is effective from 4 January 2018 until 31 December 2019.

This agreement was last amended to extend the period from 1 January 2020 to 31 December 2022.

Based on the distribution agreement with PT Tokai Dharma Indonesia No. 140/SPK/PGA/TDI/XI/2020, the Company is appointed to distribute/ sell PT Tokai Dharma Indonesia's products through outlets owned by the Company for the regions/ Provinces of Pontianak, Balikpapan and Banjarmasin. This agreement is valid for 1 (one) year, from the date 01 January 2021 to 31 December 2021. As of the date of this report, the agreement is still in the process of being extended.

The company has distribution agreements with overseas principals with distribution coverage throughout Indonesia, including as follows:

1. Smith medical ASD, Inc
2. Robert Riele GmbH
3. DFI Co Ltd

The term of the overseas principal agreement ends in 2015 and end in 2024.

Based on the distribution agreement with PT Trimaran No. 203/S.Pj/Nus.01.00/VIII/19, the Company was appointed to distribute / sell products from PT Trimaran The agreement is effective from 18 August 2019 to 18 August 2022.

Based on the distribution agreement with PT Maesindo Indonesia No. 037/PKS/Lgl/MI/IX/2020 and No. 307/S.Pj/Nus.01.00/IX/2020, the company was appointed to distribute goods from PT Maesindo Indonesia. The agreement is valid from 1 September 2020 to 1 September 2022.

31 Desember 2021

31 December 2021

46. Perjanjian-perjanjian penting (lanjutan)

PT GIEB Indonesia

1. PT Unilever Indonesia

- a. Perjanjian distribusi antara PT Unilever Indonesia Tbk dan PT GIEB Indonesia Cabang Gianyar, berkedudukan di Jl. Mambal-Ubud, Banjar Tingas, Mekar Buana, Abiansemal.

Nomor : 20480118/PPSD/I/2018
Tanggal : 23 Januari 2018

- b. Perjanjian distribusi antara PT Unilever Indonesia Tbk dan PT GIEB Indonesia cabang Singaraja berkedudukan di Jl. P Dewata, Pamaron, Singaraja.

Nomor : 20480118/PPSD/I/2018
Tanggal : 23 Januari 2018

- c. Perjanjian distribusi antara PT Unilever Indonesia Tbk dan PT GIEB Indonesia cabang Tabanan berkedudukan di Jl. Mawar No.140 Bongan Pala, Tabanan.

Nomor : 20480118/PPSD/I/2018
Tanggal : 23 Januari 2018

2. PT PG Candi Baru (lanjutan)

PT PG Candi Baru merupakan perusahaan afiliasi, pada tahun 2013, PT GIEB Indonesia kembali menjual produk Gula yang diproduksi oleh PT PG Candi Baru. Setiap pemesanan produk gula dibuatkan Surat Persetujuan Pembelian Gula. Surat persetujuan pembelian gula adalah sebagai berikut:

- a. Nomor : 068/DIR/GIEB.4/V/2018
Tanggal : 12 Mei 2018
Kuantum : 5.000 Ton

46. Significant agreements (continued)

PT GIEB Indonesia

1. PT Unilever Indonesia

- a. The distribution agreement between PT Unilever Tbk and PT GIEB Indonesia Gianyar is located at Jl. Mambal-Ubud, Banjar Tingas, Mekar Buana, Abiansemal.

Number : 20480118/PPSD/I/2018
Date : 23 January 2018

- b. Distribution agreement between PT Unilever Indonesia Tbk and PT GIEB Indonesia Singaraja branch based in Jl. P Dewata, Pamaron, Singaraja.

Number : 20480118/PPSD/I/2018
Date : 23 January 2018

- c. Distribution agreement between PT Unilever Indonesia Tbk and PT GIEB Indonesia Tabanan branch located in Jl. Mawar No.140 Bongan Pala, Tabanan.

Number : 20480118/PPSD/I/2018
Date : 23 January 2018

2. PT PG Candi Baru (continued)

PT PG Candi Baru is an affiliated company, in 2013, PT GIEB Indonesia again sells Sugar products manufactured by PT PG Candi Baru. Any ordering of sugar products is made under Sugar Purchase Approval Agreement. The approval letter for sugar purchase is as follows:

- a. Number : 068/DIR/GIEB.4/V/2018
Date : 12 May 2018
Quantum : 5,000 Tons

31 Desember 2021

31 December 2021

46. Perjanjian-perjanjian penting (lanjutan)

46. Significant agreements (continued)

PT GIEB Indonesia

PT GIEB Indonesia

2. PT PG Candi Baru (lanjutan)

2. PT PG Candi Baru (continued)

PT PG Candi Baru merupakan perusahaan afiliasi, pada tahun 2013, PT GIEB Indonesia kembali menjual produk Gula yang diproduksi oleh PT PG Candi Baru. Setiap pemesanan produk gula dibuatkan Surat Persetujuan Pembelian Gula. Surat persetujuan pembelian gula adalah sebagai berikut: (lanjutan)

PT PG Candi Baru is an affiliated company, in 2013, PT GIEB Indonesia again sells Sugar products manufactured by PT PG Candi Baru. Any ordering of sugar products is made under Sugar Purchase Approval Agreement. The approval letter for sugar purchase is as follows: (continued)

b. Nomor : 176/DIR/GIEB.4/X/2018
Tanggal : 20 Oktober 2018
Kuantum : 118 Ton
Harga : Rp 9.000.000/Ton

b. Number : 176/DIR/GIEB.4/X/2018
Date : 20 October 2018
Quantum : 118 Tons
Price : Rp 9,000,000/ Ton

c. Nomor : 458/DIR/GIEB.4/XII/2017
Tanggal : 22 Desember 2017
Kuantum : 40 Ton
Harga : Rp 9.725.000/Ton

c. Number : 458/DIR/GIEB.4/XII/2017
Date : 22 December 2017
Quantum : 40 Tons
Price : Rp 9,725,000/ Ton

3. PT Dua Kelinci

3. PT Dua Kelinci

Nomor : 1232/PD/MT-R-East/V/2021
Tanggal : 31 Mei 2021
Masa : 17 September 2021 sampai
dengan 16 September 2022

Number : 1232/PD/MT-R-East/V/2021
Date : 31 May 2021
Period : 17 September 2021 until
16 September 2022

4. PT Tokai Dharma Indonesia

4. PT Tokai Dharma Indonesia

Nomor : 166/SPK/PGA/TDI/XI/2020
Tanggal : 25 November 2020
Masa : 1 Januari 2021 sampai dengan
31 Desember 2021

Number : 166/SPK/PGA/TDI/XI/2020
Date : 25 November 2020
Period : 1 January 2021 until
31 December 2021

5. PT Sinar Antjol

5. PT Sinar Antjol

Nomor : SPD-03611c050
Tanggal : 3 Februari 2021
Masa : 1 Maret 2021 sampai dengan
1 Maret 2022

Number : SPD-03611c050
Date : 3 February 2021
Period : 1 March 2021 until
1 March 2022

6. PT Garam (Persero)

6. PT Garam (Persero)

Nomor : 09.A/KS/GRM/IV/2019
Tanggal : 9 September 2021
Masa : 31 Maret 2021 sampai dengan
31 Maret 2023

Number : 09.A/KS/GRM/IV/2019
Dated : 9 September 2021
Period : 31 March 2021 until 31 March
2023

31 Desember 2021

31 December 2021

46. Perjanjian-perjanjian penting (lanjutan)

46. Significant agreements (continued)

PT GIEB Indonesia (lanjutan)

PT GIEB Indonesia

7. PT Tirta Mumbul Jaya Abadi

7. PT Tirta Mumbul Jaya Abadi

Nomor : 06/PRJ/TMJA-GIEB/I/2021
Tanggal : 28 Januari 2021
Masa : 1 Februari 2021 sampai dengan
31 Januari 2022

Number : 06/PRJ/TMJA-GIEB/I/2021
Date : 28 January 2021
Period : 1 February 2021 until
31 January 2022

8. PT Industri Gula Glenmore

8. PT Industri Gula Glenmore

Nomor : 1.5/476/050/SP/IX/2019
Tanggal : 26 September 2019
Masa : 26 September 2019 sampai
dengan 26 Januari 2020 (tidak
ada kontrak permanen)

Number : 1.5/476/050/SP/IX/2019
Date : 26 September 2019
Period : 26 September 2019 until
26 January 2020 (non
permanent contract)

9. PT Perkebunan Nusantara XII

9. PT Perkebunan Nusantara XII

Nomor : 14/PKS/-/2019
Tanggal : 25 Oktober 2019
Masa : 25 Oktober 2019 sampai dengan
31 Desember 2019 (tidak ada
kontrak permanen)

Number : 14/PKS/-/2019
Date : 25 Oktober 2019
Period : 25 October 2019 until
31 December 2019 (non
permanent contract)

10. PT Daesang Agung Indonesia

10. PT Daesang Agung Indonesia

Denpasar

Nomor : 05/JA/BO-BALI/VIII/2020
Tanggal : 21 Agustus 2020
Masa : 21 Agustus 2020 sampai
dengan 21 Agustus 2021

Denpasar

Number : 05/JA/BO-BALI/VIII/2020
Date : 21 August 2020
Period : 21 August 2020 until
21 August 2021

Klungkung

Nomor : 04/JA/BO-BALI/VIII/2020
Tanggal : 21 Agustus 2020
Masa : 21 Agustus 2020 sampai
dengan 21 Agustus 2021

Klungkung

Number : 04/JA/BO-BALI/VIII/2020
Date : 21 August 2020
Period : 21 August 2020 until
21 August 2021

Singaraja

Nomor : 62/DAI/BO-BALI/XI/2021
Tanggal : 18 November 2021
Masa : 18 November 2021 sampai
dengan 18 November 2022

Singaraja

Number : 62/DAI/BO-BALI/XI/2021
Date : 18 November 2021
Period : 18 November 2021 until
18 November 2022

31 Desember 2021

31 December 2021

46. Perjanjian-perjanjian penting (lanjutan)

PT GIEB Indonesia (lanjutan)

11. CV Bali Utama Sukses

Nomor : -
Tanggal : 28 Juni 2021
Masa : 1 Juli 2021 sampai dengan
30 Juni 2022

12. PT Resto Pangan Utama

Nomor : 316/DIR/GIEB/XII/2021 dan
1061/S.Pj/NUS.01.00/XII/2021
Tanggal : 10 Desember 2021
Masa : 10 Desember 2021 sampai
dengan 10 Desember 2023

13. PT Perikanan Indonesia (Persero)

Nomor : 214/DIR/GIEB/IX/2021 dan
DIR/1/Dirut/002/IX/2021
Tanggal : 01 September 2021
Masa : 01 September 2021 sampai
dengan 31 Agustus 2022

PT Mitra Rajawali Banjaran

- a. Kontrak Katalog antara PT Mitra Rajawali Banjaran dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan No. 51 tahun 2021 tertanggal 04 Februari 2021 yang merupakan perjanjian kerjasama untuk pencantuman barang/jasa dalam katalog *electronic* sebagai dasar melakukan *e-purchasing* antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kontrak katalog penyediaan alat kesehatan dan PT Mitra Rajawali Banjaran sebagai penyedia alat kesehatan kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi. Jangka waktu perjanjian kerjasama tersebut sampai dengan 31 Desember 2022.

46. Significant agreements (continued)

PT GIEB Indonesia (continued)

11. CV Bali Utama Sukses

Number : -
Date : 28 June 2021
Period : 01 July 2021 until 30 June 2022

12. PT Resto Pangan Utama

Number : 316/DIR/GIEB/XII/2021 dan
1061/S.Pj/NUS.01.00/XII/2021
Date : 10 December 2021
Period : 10 December 2021 until
10 December 2023

13. PT Perikanan Indonesia (Persero)

Number : 214/DIR/GIEB/IX/2021 dan
DIR/1/Dirut/002/IX/2021
Date : 01 September 2021
Period : 01 September 2021 until
31 August 2022

PT Mitra Rajawali Banjaran

- a. Catalog Contract between PT Mitra Rajawali Banjaran and the Government Goods/Services Procurement Policy Institute with No. 51 of 2021 dated 04 February 2021 which is a cooperation agreement for the inclusion of goods/services in an electronic catalog as the basis for conducting *e-purchasing* between the Government Goods/Services Procurement Policy Institute representing the Government of the Republic of Indonesia to carry out a catalog contract for the supply of medical devices and PT Mitra Rajawali Banjaran as a provider of medical devices to Ministries/ Institutions/ Regional Work Units/ Institutions. The term of the cooperation agreement is until 31 December 2022.

31 Desember 2021

31 December 2021

46. Perjanjian-perjanjian penting (lanjutan)

PT Mitra Rajawali Banjaran (lanjutan)

- b. Perjanjian distribusi dan pemasaran eksklusif antara PT Mitra Rajawali Banjaran dengan PT Rajawali Nusindo dengan No. 123/SPJ/Nus.03.00/VIII/18 ter-tanggal 21 Agustus 2018 yang menyatakan PT Mitra Rajawali Banjaran menunjuk PT Rajawali Nusindo sebagai penyalur dan pemasaran tunggal penjualan alat kesehatan Alat Suntik Sekali Pakai (ASSP) Merek Skifa, RD dan Artika serta memasarkan untuk kepentingan reguler, tender *e-catalog* inpres, dan pasar pemerintah. Jangka waktu perjanjian tersebut berlaku dari 21 Agustus 2015 sampai dengan 20 Agustus 2020.

Addendum perjanjian distribusi dan pemasaran eksklusif antara PT Mitra Rajawali Banjaran dengan PT Rajawali Nusindo No. 297/S.pj/Nus.01.00/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2018 yang menyatakan bahwa PT Mitra Rajawali Banjaran dan PT Rajawali Nusindo menetapkan untuk melakukan masa berlaku kontrak menjadi 19 Agustus 2021

- c. Perjanjian kerjasama produksi ASSP PT Rajawali Nusindo dengan PT Mitra Rajawali Banjaran No. 004.1/S.Pj/MRB/V/2017 tanggal 16 Mei 2017 menerangkan bahwa :
- 1) Kedua pihak sepakat untuk kerjasama dalam rangka pengembangan kapasitas Produksi ASSP melalui investasi mesin baru.
 - 2) PT Rajawali Nusindo menyediakan modal investasi untuk pembelian mesin dan modal kerja untuk proses produksi ASSP dengan mesin baru.
 - 3) PT Rajawali Nusindo akan memberikan modal kerja kepada PT Mitra Rajawali Banjaran sebesar Rp 6.000.000.000.
 - 4) Perhitungan HPP (terkait biaya langsung produksi yang terdiri dari bahan baku dan bahan pembantu, tenaga kerja langsung, perawatan mesin, dan biaya energi sesuai dengan ketentuan disepakati sebesar 53% dari total nilai jual produksi yang dihasilkan).

46. Significant agreements (continued)

PT Mitra Rajawali Banjaran (continued)

- b. Exclusive distribution and marketing agreement between PT Mitra Rajawali Banjaran and PT Rajawali Nusindo with No. 123/ SPJ/ Nus.03.00/ VIII/ 18 dated 21 August 2018 which states that PT Mitra Rajawali Banjaran has appointed PT Rajawali Nusindo as the sole distributor and marketing agent for the sale of medical devices for the Skifa brand of disposable syringes (ASSP), RD and Artika as well as marketing for regular purposes, the Presidential Instruction *e-catalog* tender, and the government market. The term of the agreement is valid from 21 August 2015 to 20 August 2020.

Addendum to the exclusive distribution and marketing agreement between PT Mitra Rajawali Banjaran and PT Rajawali Nusindo No. 297/S.pj/Nus.01.00/VIII/2020 dated 18 August 2018 which states that PT Mitra Rajawali Banjaran and PT Rajawali Nusindo have decided to extend the contract to 19 August 2021

- c. The ASSP production cooperation agreement between PT Rajawali Nusindo and PT Mitra Rajawali Banjaran No. 004.1/S.Pj/MRB/V/2017 dated 16 May 2017 explains that:
- 1) Both parties agreed to cooperate in developing ASSP Production capacity through investment in new machines.
 - 2) PT Rajawali Nusindo provides investment capital for the purchase of machines and working capital for the ASSP production process with new machines.
 - 3) PT Rajawali Nusindo will provide working capital to PT Mitra Rajawali Banjaran amounting to Rp 6,000,000,000.
 - 4) Calculation of HPP (related to direct production costs consisting of raw materials and auxiliary materials, direct labor, machine maintenance, and energy costs in accordance with agreed terms of 53% of the total selling value of the resulting production).

31 Desember 2021

31 December 2021

46. Perjanjian-perjanjian penting (lanjutan)

PT Mitra Rajawali Banjaran (lanjutan)

- c. Perjanjian kerjasama produksi ASSP PT Rajawali Nusindo dengan PT Mitra Rajawali Banjaran No. 004.1/S.Pj/MRB/V/2017 tanggal 16 Mei 2017 menerangkan bahwa : (lanjutan)
- 5) PT Rajawali Nusindo mendapatkan pembagian *margin* untuk pengembalian modal kerja dan modal investasi dengan persentase 20% dari total nilai jual produksi dan margin distribusi sebesar 12% dari total nilai jual produksi.
 - 6) Perjanjian ini berlaku selama 5 tahun.
- d. Perjanjian kerjasama produksi ASSP CV Kadipo dengan PT Mitra Rajawali Banjaran No. 010/S.Pj/MRV/IX/2021 tanggal 17 September 2021 menerangkan bahwa :
- 1) Kedua pihak sepakat untuk kerjasama dalam rangka pengembangan kapasitas.
 - 2) Produksi ASSP melalui investasi mesin baru kapasitas 10 juta pcs perbulan, *cleanroom* ASSP, QC dan Raking Gudang.
 - 3) Sharing keuntungan sebesar 27% dari laba kotor setelah dikurangi biaya *marketing* untuk CV Kadipo.

Perjanjian ini berlaku untuk produksi 500 juta barang.

46. Significant agreements (continued)

PT Mitra Rajawali Banjaran (continued)

- c. The ASSP production cooperation agreement between PT Rajawali Nusindo and PT Mitra Rajawali Banjaran No. 004.1/S.Pj/MRB/V/2017 dated 16 May 2017 explains that: (continued)
- 5) PT Rajawali Nusindo gets a margin distribution for the return of working capital and investment capital with a percentage of 20% of the total selling value of production and a distribution margin of 12% of the total selling value of production.
 - 6) This agreement is valid for 5 years.
- d. The ASSP CV Kadipo production cooperation agreement with PT Mitra Rajawali Banjaran No. 010/S.Pj/MRV/IX/2021 dated 17 September 2021 explains that:
- 1) Both parties agree to cooperate in the framework of capacity building.
 - 2) ASSP production through investment in new machines with a capacity of 10 million pcs per month, ASSP cleanroom, QC and Warehouse Raking.
 - 3) Profit sharing of 27% of gross profit after deducting marketing costs for CV Kadipo.

This agreement applies to the production of 500 million items.

31 Desember 2021

31 December 2021

46. Perjanjian-perjanjian penting (lanjutan)

PT Mitra Kerinci

Perusahaan mempunyai perjanjian dengan Teguh Kustiono. Perjanjian *Technical Assistance* dalam rangka peningkatan kinerja perkebunan dan pabrik teh:

- Nomor perjanjian : 01/S.Pj/MKI/11112014
- Jangka waktu : 07 Maret 2014 sampai dengan 07 Maret 2017
- Nilai kontrak : Rp 5.375.000.000

Sampai dengan laporan audit diterbitkan, surat perpanjangan perjanjian masih dalam proses pengurusan.

Perjanjian penyeteroran modal PT Mitra Kerinci kepada PT Rajawali Liki Energi, Akta No. 4 pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017, antara Tuan Yosdian Adi Pramono selaku Direktur PT Mitra Kerinci dengan Tuan Ondi selaku Direktur Rajawali Liki Energi.

Para pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- 1) Berita acara negosiasi No. 01/MK-BA/474/VIII/2016 dan No. 001/BE-MK/DIR/VIII/2016 dibuat materai tanggal 11 Agustus 2017 oleh notaris, No. 190/SBTD/XII/2017 antara PT Mitra Kerinci dan PT Brantas Energi yang telah menyetujui besaran nilai potensi atau aset yang digunakan Pembangkit Listrik Tenaga Air PT Rajawali Liki Energi senilai Rp 22.400.000.000 dengan tanah seluas 50 ha sebesar Rp 17.270.000.000.
- 2) Surat pernyataan Bukti Setoran Modal PT Mitra Kerinci ke PT Rajawali Liki Energi No. 01/ MK/ 604/ XII/ 2017 menyatakan PT Mitra Kerinci telah melakukan tambahan setoran modal pada PT Rajawali Liki Energi sebesar Rp 17.270.000 atau sejumlah 3.540 lembar saham.

PT Rajawali Liki Energi dengan ini berjanji untuk menerima pemasukan dari PT Mitra Kerinci yaitu setoran modal non tunai dan dicatat sebagai setoran modal PT Rajawali Liki Energi senilai Rp 22.400.000.000 dan para penghadap telah menyetujui perhitungan seluruh kewajiban PT Mitra Kerinci atas uang modal untuk saham PT Rajawali Liki Energi sebesar 55% dari keseluruhan saham yang dikeluarkan oleh PT Mitra Kerinci.

46. Significant agreements (continued)

PT Mitra Kerinci

The company has an agreement with Teguh Kustiono. *Technical Assistance Agreement* in order to improve the performance of tea plantations and factories:

- Agreement number : 01/S.Pj/MKI/11112014
- Term : 07 March 2014 until 07 March 2017
- Contract value : Rp 5,375,000,000

Until the audit report is issued, the agreement extension letter is still in the process of being processed.

PT Mitra Kerinci's capital deposit agreement to PT Rajawali Liki Energi, Deed No. 4 on Thursday 28 December 2017, between Mr. Yosdian Adi Pramono as Director of PT Mitra Kerinci and Mr. Ondi as Director of Rajawali Liki Energi.

The parties first explain that:

- 1) Minutes of negotiation No.01/MK-BA/474/VIII/2016 and No.001/BE-MK/DIR/VIII/2016 stamped on 11 August 2017 by a notary, No.190/SBTD/XII/2017 between PT Mitra Kerinci and PT Brantas Energi which has agreed on the amount of potential value or assets used by the PT Rajawali Liki Energi Hydroelectric Power Plant of Rp 22,400,000,000 with a 50 ha land area of Rp 17,270,000,000.
- 2) Statement letter of proof of payment of capital from PT Mitra Kerinci to PT Rajawali Liki Energi No. 01/MK/604/XII/2017 stated PT Mitra Kerinci has made an additional capital contribution to PT Rajawali Liki Energi of Rp 17,270,000 or a total of 3,540 shares.

PT Rajawali Liki Energi hereby promises to receive income from PT Mitra Kerinci, which is a non-cash capital deposit and recorded as a capital deposit of PT Rajawali Liki Energi worth Rp 22,400,000,000 and the viewers have agreed to the calculation of all PT Mitra Kerinci's obligations on capital money for PT Rajawali Liki Energi's shares of 55% of the total shares issued by PT Mitra Kerinci.

31 Desember 2021

31 December 2021

46. Perjanjian-perjanjian penting (lanjutan)

PT Mitra Kerinci (lanjutan)

Rincian atas setoran modal PT Mitra Kerinci ke PT Rajawali Liki Energi sebesar Rp 22.400.000.000:

1. Setoran awal sebesar Rp 5.130.000.000 atau 5.130 lembar saham dengan nominal Rp 1.000.000 ternyata dalam surat pernyataan bukti setoran modal No. 91/MK/706/XII/2016 yang didaftarkan notaris tanggal 27 Desember 2017 dibawah No. 192/SBTD/XII/2017.
2. Sebesar Rp 17.270.000.000 atau sejumlah 34.540 saham dengan harga nominal sebesar Rp 500.000 sebagaimana ternyata dari surat pernyataan bukti setoran modal No. 01.MK/604/XII/2017 yang didaftarkan tanggal 27 Desember 2017 No. 192/SBTD/XII/2017.

Tagihan piutang PT Mitra Kerinci kepada PT Rajawali Nusindo No. 01/MK/404/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 meneruskan surat kami sebelumnya No. 01/MK/535/XI/2017 tanggal 2 Mei 2016 perihal tagihan piutang PT Mitra Kerinci kepada PT Rajawali Nusindo, dengan ini kami sampaikan:

1. Hasil rekonsiliasi data piutang PT Mitra Kerinci kepada PT Rajawali Nusindo pada tanggal 21 November 2008. Telah disepakati menjadi dasar penagihan kami sebagai berikut:
Piutang ekspor USD 259.258 =Rp 2.958.584.460
Piutang USD 22.869 =Rp 297.967.540
Total dalam bentuk rupiah Rp 3.256.552.000.
2. PT Mitra Kerinci telah melakukan penagihan atas piutang tersebut kepada PT Rajawali Nusindo, terakhir melalui surat No. 01/MK/535/XI/2017 tanggal 24 November 2017, sampai dengan saat ini belum ada penyelesaian dan pembayarannya.
3. Piutang tersebut telah menjadi temuan rutin KAP setiap tahunnya dan disarankan untuk dilakukan penagihan serta penyelesaian.
4. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, dengan ini agar PT Rajawali Nusindo dapat melakukan penyelesaian utang kepada PT Mitra Kerinci sejumlah Rp 3.256.552.000.

46. Significant agreements (continued)

PT Mitra Kerinci (continued)

Details of PT Mitra Kerinci's capital injection to PT Rajawali Liki Energi amounting to Rp 22,400,000,000:

1. Initial deposit amounting to Rp 5,130,000,000 or 5,130 shares with nominal of Rp 1,000,000 recorded in a letter of proof of capital injection No. 91/MK/706/XII/2016 registered by notary dated 27 December 2017 under No. 192/SBTD/XII/2017.
2. An amount of Rp 17,270,000,000 or 34,540 shares at a nominal value of Rp 500,000 as it stated from the letter of proof of capital payment letter No: 01.MK/604/XII/2017 registered on 27 December 2017 No. 192/SBTD/XII/2017.

PT Mitra Kerinci's receivables from PT Rajawali Nusindo No. 01/MK/404/VII/2019 dated 31 July 2019 forwarding our previous letter No. 01/MK/535/XI/2017 dated 2 May 2016 Regarding PT Mitra Kerinci's receivables to PT Rajawali Nusindo, we hereby submit:

1. The results of PT Mitra Kerinci's data reconciliation account to PT Rajawali Nusindo on 21 November 2008. It was agreed to become the basis for our collection as follows:
Export receivables USD 259,258 =Rp 2,958,584,460
Receivables USD 22,869 =Rp 297,967,540
The total is in the form of rupiah Rp 3,256,552,000.
2. PT Mitra Kerinci has collected the receivables from PT Rajawali Nusindo, most recently by letter No. 01/MK/535/XI/2017 dated 24 November 2017, until now there has been no settlement and payment.
3. These receivables have become routine findings of KAP every year and are recommended for collection and settlement.
4. In connection with these matters, hereby PT Rajawali Nusindo can settle the debt to PT Mitra Kerinci in the amount of Rp 3,256,552,000.

31 Desember 2021

31 December 2021

46. Perjanjian-perjanjian penting (lanjutan)

PT Mitra Kerinci (lanjutan)

Tagihan piutang PT Mitra Kerinci kepada PT Rajawali Nusindo No. 01/MK/404/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 meneruskan surat kami sebelumnya No. 01/MK/535/XI/2017 tanggal 2 Mei 2016 perihal tagihan piutang PT Mitra Kerinci kepada PT Rajawali Nusindo, dengan ini kami sampaikan: (lanjutan)

5. Apabila PT Rajawali Nusindo belum dapat menyelesaikan utang tersebut dan untuk menghindari temuan dari KAP setiap tahunnya, maka diperlukan bantuan dari PT RNI Holding untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan utang-piutang tersebut.
6. PT Mitra Kerinci telah melakukan pertemuan dengan Direksi PT Rajawali Nusindo dan melakukan klarifikasi. Dari pertemuan terakhir, masalah ini akan segera diselesaikan dengan mediasi pihak RNI Holding selaku induk perusahaan dan telah dikirimkan surat ke VP Keuangan PT RNI (Persero) untuk arahan dan tindak lanjutnya.

PT PG Rajawali I

Entitas memberikan jaminan *delivery order* gula yang tercantum dalam perjanjian No. 38/S.Pj/RWI.01/XII/2020 tertanggal 28 Desember 2020 di mana Entitas bersedia untuk memberikan jaminan peminjaman *delivery order* sebanyak 63.700 ton kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), entitas induk. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 27 Desember 2021. Dalam perpanjangan perjanjian yang ditandatangani pada Desember 2021, Entitas tidak lagi memberikan jaminan *delivery order* gula.

46. Significant agreements (continued)

PT Mitra Kerinci (continued)

PT Mitra Kerinci's receivables from PT Rajawali Nusindo No. 01/MK/404/VII/2019 dated 31 July 2019 forwarding our previous letter No. 01/MK/535/XI/2017 dated 2 May 2016 Regarding PT Mitra Kerinci's receivables to PT Rajawali Nusindo, we hereby submit: (continued)

5. *If PT Rajawali Nusindo has not been able to settle the debt and to avoid findings from KAP every year, assistance from PT RNI Holding is needed to facilitate the settlement of the debt problems.*
6. *PT Mitra Kerinci has held a meeting with the Board of Directors of PT Rajawali Nusindo and made clarifications. From the last meeting, this issue will soon be resolved through mediation from RNI Holding as the parent company and a letter has been sent to the VP of Finance of PT RNI (Persero) for direction and follow-up.*

PT PG Rajawali I

The Entity give a guarantee of sugar delivery order which is stated in the agreement No. 38/S.Pj/RWI.01/XII/2020 dated 28 December 2020 in which the Entity is willing to give the guarantee by borrowing a delivery order up to 63,700 tons to PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), a parent entity. On the extension agreement which signed on December 2021, the Entity is not longer give guarantee of sugar delivery order.

31 Desember 2021

31 December 2021

47. Manajemen risiko keuangan

Risiko keuangan utama yang dihadapi Perusahaan adalah risiko kredit, risiko nilai tukar mata uang asing, risiko suku bunga, risiko likuiditas dan risiko harga. Perhatian atas pengelolaan risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangan perubahan dan volatilitas pasar keuangan di Indonesia dan internasional.

(i) Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana Perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan/konsumen dan penyewa yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Instrumen keuangan Perusahaan yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain dan investasi. Jumlah eksposur risiko kredit maksimum sama dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut. Perusahaan mengelola risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk masing-masing pelanggan/konsumen/ penyewa dan lebih selektif dalam pemilihan bank dan institusi keuangan, yaitu hanya bank-bank dan institusi keuangan ternama dan yang berpredikat baik yang dipilih.

(ii) Risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Perusahaan dan perusahaan anak memiliki risiko suku bunga terutama karena adanya pinjaman dengan suku bunga mengambang. Perusahaan mengelola risiko suku bunga melalui kombinasi pinjaman dengan suku bunga tetap dan mengambang yang tepat dan pengawasan terhadap dampak pergerakan suku bunga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap Perusahaan.

47. Financial risk management

The main financial risks faced by the Company are credit risk, foreign exchange rate risk, interest rate risk, liquidity risk and price risk. Attention to risk management has increased significantly by considering the changes and volatility of financial markets in Indonesia and internationally.

(i) Credit risk

Credit risk is the risk that the Company will suffer losses incurred by customers and tenants who fail to meet their contractual obligations. The Company's financial instruments that have potential credit risk consist of cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables and investments. The maximum amount of credit risk exposure is equal to the carrying amount of those accounts. The Company manages credit risk by setting acceptable limits on the amount of risk for each customer/ tenant and more selective in the choosing banks and financial institutions, ie only well-known and well-selected banks and financial institutions.

(ii) Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate due to changes in market interest rates. Company and subsidiaries have interest rate risk mainly due to loans with floating interest rates. The Company manages interest rate risk through a combination of loans with appropriate fixed and floating interest rates and oversight of the impact of interest rate movements to minimize negative impacts to the Company.

31 Desember 2021

31 December 2021

47. Manajemen risiko keuangan (lanjutan)

(iii) Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana posisi arus kas Perusahaan menunjukkan pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk menutupi pengeluaran jangka pendek. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang mencukupi dalam memenuhi komitmen Perusahaan untuk operasi normal Perusahaan dan secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, serta jadwal tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan.

(iv) Risiko harga

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar. Perusahaan memiliki risiko harga terutama karena investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Perusahaan mengelola risiko harga dengan secara rutin melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan dan harga pasar atas investasinya, serta selalu memantau perkembangan pasar global.

48. Kondisi kelangsungan usaha beberapa entitas anak

1. PT PG Rajawali II

Rencana Manajemen ini dilatarbelakangi atas dasar keprihatinan manajemen terhadap penurunan kinerja perusahaan dalam kurun waktu 8 tahun terakhir pasca kuasi reorganisasi. Tingginya nilai hutang modal kerja terutama kepada induk perusahaan (PT RNI) yang sampai saat ini sudah terakumulasi dikisaran Rp 2,03 Triliun memberi dampak pada tingginya beban bunga yang harus ditanggung perusahaan. Perusahaan mengalami kesulitan pendanaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja untuk persiapan giling tahun berikutnya terpaksa dibiayai dengan menambah hutang baru atau dengan jaminan hasil giling.

47. Financial risk management (continued)

(iii) Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that the Company's cash flow position shows short-term income is not sufficient to cover short-term expenses. The Company manages liquidity risk by maintaining sufficient cash and cash equivalents in fulfilling the Company's commitment to normal operation of the Company and regularly evaluating actual cash flows and cash flows projections, as well as scheduling the maturity dates of financial assets and liabilities.

(iv) Price risk

Price risk is the risk of fluctuations in the value of financial instruments as a result of changes in market prices. Company have a price risk primarily because investments are classified as available for sale. The Company manages the price risk by regularly evaluating the financial performance and market price of its investment, and always monitor the development of the global market.

48. Going concern of some subsidiaries condition

1. PT PG Rajawali II

This Management Plan is based on management's concern about the decline in company performance in the last 8 years after the quasi-reorganization. The high value of working capital debt, especially to the parent company (PT RNI), which until now has accumulated in the range of Rp 2.03 trillion has an impact on the high interest expense that must be borne by the company. The company is experiencing funding difficulties in meeting its working capital requirements for preparation of milling for the following year and has to be financed by adding new debt or by guaranteeing mill results.

31 Desember 2021

31 December 2021

48. Kondisi kelangsungan usaha beberapa entitas anak (lanjutan)

1. PT PG Rajawali II (lanjutan)

PT PG Rajawali II saat ini dalam situasi yang sangat sulit, dimana posisi dalam *SWOT Analysis* menunjukkan pada kuadran III atau defensif, dimana perusahaan mengalami kondisi yang sangat lemah dan terhambat pertumbuhannya. Untuk itu, perusahaan harus melakukan *Turn Around Strategy*, yaitu strategi untuk membalikkan penurunan profitabilitas, kembali menuju pemulihan dan mencapai masa depan yang berkelanjutan. Perusahaan dalam krisis membutuhkan tindakan drastis dan restrukturisasi untuk menghasilkan perubahan haluan.

Atas hal tersebut di atas, manajemen berupaya keras dan berkesinambungan menyusun strategi membangun kekuatan dalam memulihkan perusahaan menjadi sehat kembali. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah dengan memformulasikan dan mengartikulasikan peluang dan kekuatan yang dimiliki perusahaan secara seksama dan akurat serta berorientasi pada usaha di tahun-tahun mendatang.

Adapun langkah-langkah strategis manajemen dapat disampaikan sebagai berikut :

- a. Peningkatan produktivitas, luas areal, controlling
 - *Back to Basic* Bisnis Gula
Program ini merupakan upaya kembali ke standar (*back to basic*) bisnis gula. Penyelenggaraan kegiatan *on farm* yang sesuai baku teknis, penyediaan saprodi yang memadai serta pemilihan varietas unggul yang disesuaikan dengan jadwal panen dapat mendukung peningkatan produktivitas sehingga diharapkan produktivitas tebu secara bertahap akan meningkat sampai dengan 100 ton/ha (tahun 2021-2025),
 - Peningkatan luas areal
Dalam rangka mencapai luas areal menjadi > 17.000 ha (di tahun 2024), areal HGU yang belum terokupasi dikerjasamakan dengan masyarakat melalui program desa penyangga, untuk mempertahankan lahan sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menjaga kestabilan pasokan tebu,

48. Going concern of some subsidiaries condition (continued)

1. PT PG Rajawali II (continued)

PT PG Rajawali II is currently in a very difficult situation, where the position in the SWOT Analysis shows in quadrant III or defensive, where the company is in a very weak condition and its growth is stunted. For this reason, the company must carry out a Turn Around Strategy, namely a strategy to reverse the decline in profitability, return to recovery and achieve a sustainable future. Companies in crisis need drastic action and restructuring to bring about a turnaround.

Based on the foregoing, the management strives and continuously develops a strategy to build strength in restoring the company to a healthy state. The steps that must be taken are to carefully and accurately formulate and articulate the opportunities and strengths of the company and to be business-oriented in the years to come.

The strategic management steps can be conveyed as follows:

- a. *Increased productivity, area, controlling*
 - *Back to Basic Sugar Business*
This program is an effort to return to the standard (back to basic) sugar business. The implementation of on-farm activities in accordance with technical standards, provision of adequate inputs and selection of high-yielding varieties adapted to the harvest schedule can support increased productivity so that sugarcane productivity is expected to gradually increase up to 100 tons/ha (2021-2025),
 - *Increased area*
In order to reach an area of > 17,000 ha (by 2024), the unoccupied HGU area is collaborated with the community through the buffer village program, to maintain land while improving people's living standards and maintaining a stable supply of sugar cane,

31 Desember 2021

31 December 2021

48. Kondisi kelangsungan usaha beberapa entitas anak (lanjutan)

1. PT PG Rajawali II (lanjutan)

Adapun langkah-langkah strategis manajemen dapat disampaikan sebagai berikut :

- a. Peningkatan produktivitas, luas areal, controlling (lanjutan)
 - Pengendalian pola kemitraan
Menjalankan SOP kemitraan dengan sebaik-baiknya dan melakukan pengawasan secara intensif baik secara langsung maupun tidak langsung,
 - Kerjasama dengan Mitra Strategis (*Crowdfunding/Strategic Partner*)
Mulai menjajagi pendanaan KUR di luar perbankan bekerjasama dengan mitra strategis.
- b. Peningkatan produksi dan kualitas gula/tetes
 - Produksi gula dengan memperhatikan kualitas yang sesuai kebutuhan pasar,
 - *Turnaround* PG-PG melalui kerjasama dengan *Strategic Partner* dengan membangun kembali PG Subang (*The New of PG SB*) pada tahun 2023, Revitalisasi PG Sindang Laut, PG Tersana Baru dan PG Jatitujuh.
- c. *Maximum Opportunity (Go Ritel + Strategic Partner)*
 - Membangun Brand dan Strategi Marketing untuk menuju *Go Ritel (Local Content Gumara* untuk Jabar),
 - *Strategic Partner* untuk hilirisasi produk berbasis tebu.
- d. Restrukturisasi Perusahaan
 - Jangka pendek :
 1. Meningkatkan pendapatan dengan menambah pasokan tebu, mengolah *raw sugar* dan kerjasama dengan investor untuk makloon/jasa olah,
 2. Efisiensi Biaya dengan meningkatkan skala produksi dan mengurangi kebocoran biaya.

48. Going concern of some subsidiaries condition (continued)

1. PT PG Rajawali II (continued)

The strategic management steps can be conveyed as follows:

- a. *Increased productivity, area, controlling (continued)*
 - *Partnership pattern control*
Carry out partnership SOPs as well as possible and carry out intensive supervision both directly and indirectly,
 - *Cooperation with Strategic Partners (Crowdfunding/Strategic Partner)*
Start exploring KUR funding outside of banking in collaboration with strategic partners.
- b. *Increased production and quality of sugar/drops*
 - *Production of sugar by paying attention to quality according to market needs,*
 - *PG-PG turnaround in collaboration with Strategic Partners by rebuilding PG Subang (The New of PG SB) in 2023, Revitalizing PG Sindang Laut, PG Tersana Baru and PG Jati Tujuh.*
- c. *Maximum Opportunity (Go Ritel + Strategic Partner)*
 - *Building a Brand and Marketing Strategy towards Go Retail (Local Content Gumara for West Java),*
 - *Strategic Partner for downstream sugarcane-based products.*
- d. *Company Restructurization*
 - *Short-term :*
 1. *Increase income by increasing the supply of sugar cane, processing raw sugar and cooperating with investors for makloon/processing services,*
 2. *Cost Efficiency by increasing production scale and reducing cost leakage.*

31 Desember 2021

31 December 2021

48. Kondisi kelangsungan usaha beberapa entitas anak (lanjutan)

1. PT PG Rajawali II (lanjutan)

Adapun langkah-langkah strategis manajemen dapat disampaikan sebagai berikut : (lanjutan)

- d. Restrukturisasi Perusahaan (lanjutan)
- Jangka menengah dan panjang :
 1. *Corporate Structure* dengan melakukan *spin-off* dan pembentukan anak perusahaan Subang, Jatitujuh maupun PSA Palimanan,
 2. Restrukturisasi Utang dengan mengusulkan skema *Debt to Equity Conversion* (DEC), *Rescheduling* angsuran pinjaman dan *Optimalisasi Aset*,
 3. Restrukturisasi Perusahaan menuju *Sugar Cane based Industry (New Culture)*.
 - e. Restrukturisasi SDM & TI menuju *New Culture*
 - Membangun *Roadmap* Pengembangan SDM (termasuk Restrukturisasi Organisasi) menuju *New Culture of R2*,
 - Membangun *Roadmap* Teknologi Informasi (*Digitalisasi R2*),
 - Disiplin eksekusi atas *Roadmap* SDM dan TI.

2. PT Inti Bagas Perkasa

Berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan PT PG Rajawali II No. 916/S.PMh/RW-11.01NII/2015, PT Inti Bagas Perkasa (PT IBP) dinyatakan beku operasi per tanggal 31 Juli 2015 hingga waktu yang belum ditentukan. Seluruh kewajiban PT Inti Bagas Perkasa (PT IBP) baik pada pihak ketiga/ rekanan maupun kepada karyawan PT Inti Bagas Perkasa (PT IBP) diambil alih dan diselesaikan oleh PT PG Rajawali II.

Tindak lanjut dari pembekuan PT IBP, dilakukan serah terima kepengurusan dari Direktur PT IBP kepada PT PG Rajawali II sebagai pemegang saham dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 004/BA/RW.II.01/I/2016 antara Plt. Direktur PT Inti Bagas Perkasa dengan Direktur Utama PT PG Rajawali II selaku Pemegang Saham PT Inti Bagas Perkasa.

48. Going concern of some subsidiaries condition (continued)

1. PT PG Rajawali II (continued)

The strategic management steps can be conveyed as follows: (continued)

- d. *Company Restructurization (continued)*
- *Medium and long term:*
 1. *Corporate Structure by doing a spin-off and the establishment of Subang, Jati Tujuh and PSA Palimanan subsidiaries,*
 2. *Debt Restructuring by proposing a Debt to Equity Conversion (DEC) scheme, rescheduling loan installments and Asset Optimization,*
 3. *Company restructuring towards Sugar Cane based Industry (New Culture).*
 - e. *HR & IT restructuring towards a new culture*
 - *Building a HR Development Roadmap (including Organizational Restructuring) towards a New Culture of R2,*
 - *Building an Information Technology Roadmap (Digitalization R2),*
 - *Discipline of execution of HR and IT Roadmap.*

2. PT Inti Bagas Perkasa

Based on the decision letter issued by PT PG Rajawali II No.916/S.PMh/RW-11.01NII/2015, PT Inti Bagas Perkasa (PT IBP) was declared frozen operation as of 31 July 2015 up to undetermined time. All obligations of PT Inti Bagas Perkasa (PT IBP) to third parties/partners and employees of PT Inti Bagas Perkasa (PT IBP) are taken over and will be settled by PT PG Rajawali II.

As a follow-up to the suspension of PT IBP, a management handover was carried out from the Director of PT IBP to PT PG Rajawali II as a shareholder with an Official Report of Handover of Work No. 004/BA/RW.II.01/I/2016 between Plt. Director of PT Inti Bagas Perkasa with the President Director of PT PG Rajawali II as Shareholders of PT Inti Bagas Perkasa.

31 Desember 2021

31 December 2021

48. Kondisi kelangsungan usaha beberapa entitas anak (lanjutan)

2. PT Inti Bagas Perkasa (lanjutan)

Sebagai upaya pemanfaat aset *idle* di PT IBP (Kec. Jatiwangi), pada tanggal 27 Juli 2017 dilakukan penandatanganan perjanjian nomor 064/S.Pj/RWII.01/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Rencana Kerjasama Pengembangan Bisnis Rumah Sakit Rajawali Timah Medika antara PT PG Rajawali II dengan PT Rumah Sakit Bakti Timah dengan objek aset yang diminati adalah lahan kantor ex. PG Karangsuwung, lahan tanah kosong Palimanan, Rumah dinas dan tanah kosong Plumbon serta Lahan Jatiwangi.

Dalam perkembangannya, pihak PT Rumah Sakit Bakti Timah dan PT Phapros, Tbk meminanti lahan di lahan kosong Palimanan dan lahan eks. PG Karangsuwung yang lebih strategis. Untuk memetakan kembali potensi aset-aset Perusahaan, telah dilakukan kajian HBU dan FS oleh PT Surveyor Indonesia yang hasilnya adalah lahan di PT IBP dapat dikembangkan menjadi *mix use* (hotel, ruko dan mall).

3. PT Mitra Rajawali Banjaran (MRB)

Laporan keuangan disajikan dengan asumsi Perusahaan memiliki kelangsungan hidup usaha, dengan asumsi tersebut aset akan dapat direalisasi dan liabilitas akan dipenuhi selama masa bisnis normal. Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2021 Perusahaan telah mengalami kerugian kumulatif sebesar Rp 122.463.702.350. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, masih terjadi pandemi virus COVID-19 yang mengakibatkan kenaikan nilai tukar mata uang asing dan menurunnya kegiatan di sektor ekonomi. Secara langsung dan tidak langsung, dampaknya tentu juga akan mempengaruhi kegiatan operasional Perusahaan.

48. Going concern of some subsidiaries condition (continued)

2. PT Inti Bagas Perkasa (continued)

As an effort to utilize idle assets at PT IBP (Kec. Jatiwangi), on 27 July 2017, agreement number 064 / S.Pj / RWII.01 / VII / 2017 was signed on 27 July 2017 concerning the Business Development Cooperation Plan for Rajawali Timah Medika Hospital between PT PG Rajawali II and PT Rumah Sakit Bakti Timah, the object of interest is the ex office land. PG Karangsuwung, Palimanan vacant land, official housing and Plumbon vacant land and Jatiwangi Land.

During its development, PT Rumah Sakit Bakti Timah and PT Phapros, Tbk are interested in land on vacant land in Palimanan and former land PG Karangsuwung which is more strategic. To remap the potential of the Company's assets, a HBU and FS study was carried out by PT Surveyor Indonesia, which resulted in the development of land in PT IBP into a mix use (hotels, shop houses and malls).

3. PT Mitra Rajawali Banjaran (MRB)

The financial statements are presented with the assumption that the Company has a going concern, with the assumption that assets will be realized and liabilities will be fulfilled during the normal course of business. In the year ended 31 December 2021, the Company has suffered a cumulative loss of Rp 122,463,702,350. As of the issuance date of the financial statements, the COVID-19 virus pandemic is still occurring which has resulted in an increase in foreign currency exchange rates and decreased activity in the economic sector. Directly and indirectly, the impact will also affect the Company's operational activities.

31 Desember 2021

31 December 2021

48. Kondisi kelangsungan usaha beberapa entitas anak (lanjutan)

48. Going concern of some subsidiaries condition (continued)

3. PT Mitra Rajawali Banjaran (MRB) (lanjutan)

3. PT Mitra Rajawali Banjaran (MRB) (continued)

Rencana manajemen untuk memperbaiki kinerja dan mengurangi akumulasi rugi, serta mempertahankan kelangsungan hidup Perusahaan sebagai berikut :

The management plan to improve performance and reduce accumulated losses, as well as maintain the Company's survival as follows:

1. Revitalisasi Mesin

1. Revitalization machine

a. Mesin ASSP

Berdasarkan usulan investasi tahun 2021, PT Mitra Rajawali Banjaran sudah mengajukan usulan investasi mesin ASSP (*Normal Syringe, ADS, Safety Syringe*) senilai 10,5 Miliar. Hal tersebut merupakan langkah dalam upaya revitalisasi dan penambahan kapasitas mesin ASSP.

a. Machine ASSP

Based on the investment proposal in 2021, PT Mitra Rajawali Banjaran has submitted an investment proposal for ASSP machines (Normal Syringe, ADS, Safety Syringe) worth 10.5 billion. This is a step in an effort to revitalize and increase the capacity of the ASSP engine.

Di tahun 2020, PT Mitra Rajawali Banjaran memperoleh proyek ADS 0,5 ML Kemenkes sebanyak 31 juta pcs atau senilai Rp 26,2 Miliar atau meningkat dibandingkan tahun 2019 yang sebanyak 12,1 juta pcs atau senilai Rp 12 Miliar.

In 2020, PT Mitra Rajawali Banjaran received an ADS 0.5 ML project of the Ministry of Health of 31 million pieces or worth Rp 26.2 billion or an increase compared to 2019 which amounted to 12.1 million pieces or worth Rp 12 billion.

Selain itu untuk ASSP jenis ADS 3 ML dan 5 ML juga masih menjadi kebutuhan di Kemenkes dan BKKBN, sementara dengan kondisi pandemi Covid-19 dan rencana Pemerintah dalam hal ini Kemenkes, PT Mitra Rajawali Banjaran sudah diminta mengajukan kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan Kemenkes atas ADS 0,5 ML untuk program Vaksinasi Covid-19.

In addition, ASSP types of ADS 3 ML and 5 ML are still a necessity at the Ministry of Health and BKKBN, while with the Covid-19 pandemic conditions and the Government's plan in this case the Ministry of Health, PT Mitra Rajawali Banjaran has been asked to propose the ability to meet the Ministry of Health's needs for ADS , 5 ML for the Covid-19 Vaccination program.

Melalui surat nomor 022/MRB.03/I/2021 tanggal 18 Januari 2021, Direktur PT Mitra Rajawali Banjaran sudah menyampaikan kesiapan produksi Skifa ADS 0,5 ML tahun 2021 sebanyak 100 juta pcs.

Through letter number 022 / MRB.03 / I / 2021 dated 18 January 2021, the Director of PT Mitra Rajawali Banjaran has conveyed the readiness for production of Skifa ADS 0.5 ML in 2021 of 100 million pcs.

Atas kondisi tersebut, dengan kesiapan mesin dan tersedianya modal kerja maka peluang atas menjadi bagian rencana ketercapaian usulan RKAP 2021 yang telah diajukan kepada Pemegang Saham.

Due to these conditions, with the readiness of the machines and the availability of working capital, the opportunities for this will become part of the plan to achieve the 2021 RKAP proposal that has been submitted to the Shareholders.

31 Desember 2021

31 December 2021

48. Kondisi kelangsungan usaha beberapa entitas anak (lanjutan)

3. PT Mitra Rajawali Banjaran (MRB) (lanjutan)

Rencana manajemen untuk memperbaiki kinerja dan mengurangi akumulasi rugi, serta mempertahankan kelangsungan hidup Perusahaan sebagai berikut : (lanjutan)

1. Revitalisasi Mesin (lanjutan)

a. Mesin ASSP (lanjutan)

Sehingga optimalisasi mesin ASSP merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan oleh PT Mitra Rajawali Banjaran di tahun 2021 mengingat kebutuhan ADS 0,5 ML khususnya di masa vaksinasi yang dimungkinkan masih cukup banyak.

b. Mesin kondom

Dengan melihat potensi penjualan kondom di tahun 2020 dimana penjualan sebanyak 123.355 gross atau senilai 12,6 Miliar, di tahun 2021 PT Mitra Rajawali Banjaran berusaha mencapai penjualan kondom minimal sesuai RKAP 2021 yang tealah diusulkan kepada Pemegang Saham.

Dalam rangka membangun kembali bisnis kondom, PT MRB tetap mengusulkan kembali investasi mesin kondom dengan melakukan Kemitraan mengingat Peluang bisnis kondom merupakan satu-satunya pabrik kondom di Indonesia sehingga menjadi pertimbangan Pemegang Saham untuk memberikan perhatian atas usulan investasi tersebut.

Diharapkan atas pengadaan mesin kondom baru tersebut dapat menggantikan mesin lama yang sudah tidak produktif dan memberikan kontribusi bukan hanya omset dari *captive market* BKKBN dan reguler saja namun dapat memberikan kontribusi di pasar ekspor dan OEM produk.

48. Going concern of some subsidiaries condition (continued)

3. PT Mitra Rajawali Banjaran (MRB) (continued)

The management plan to improve performance and reduce accumulated losses, as well as maintain the Company's survival as follows: (continued)

1. Revitalization machine (continued)

a. Machine ASSP (continued)

So the ASSP engine optimization is a necessary condition that must be done by PT Mitra Rajawali Banjaran in 2021 given the need ADS 0.5 ML specially future possible vaccination is still quite a lot.

b. Condom machine

By looking at the potential for condom sales in 2020 where sales of 123,355 gross or worth 12.6 billion, in 2021 PT Mitra Rajawali Banjaran is trying to achieve minimum condom sales according to the 2021 RKAP that has been proposed to shareholders.

In the context of rebuilding the condom business, PT MRB still proposes to reinvest in condom machines by conducting a Partnership considering that the condom business opportunity is the only condom factory in Indonesia so that it is considered by shareholders to pay attention to the proposed investment.

It is hoped that the procurement of the new condom machines can replace the old machines that are no longer productive and contribute not only to the turnover of the BKKBN and regular captive markets but also to contribute to the export market and OEM products.

31 Desember 2021

31 December 2021

48. Kondisi kelangsungan usaha beberapa entitas anak (lanjutan)

3. PT Mitra Rajawali Banjaran (MRB) (lanjutan)

Rencana manajemen untuk memperbaiki kinerja dan mengurangi akumulasi rugi, serta mempertahankan kelangsungan hidup Perusahaan sebagai berikut : (lanjutan)

2. Pengembangan produk

Terkait pengembangan produk HYPE, Duk Operasi, *Folley Chateter* diharapkan berkembang dan dapat memberikan kontribusi lebih di tahun-tahun mendatang sehingga signifikan memberikan kontribusi laba. Sementara untuk kerjasama yang sudah dilakukan inisiasi dan proses kajian di tahun 2021 dan diharapkan dapat segera direalisasikan.

3. Pengembangan SDM dalam peningkatan produktivitas

Sumber daya manusia sebagai aset dalam peningkatan produktivitas perusahaan menjadi konsentrasi selanjutnya dalam rencana perbaikan kinerja perusahaan.

Upaya pengembangan SDM dibuktikan dalam penetapan anggaran pendidikan dan pelatihan yang menunjang kompetensi SDM sekaligus memberikan dampak motivasi bagi karyawan yang bersangkutan.

Peningkatan kompetensi individu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan SDM sehingga jumlah anggaran ditetapkan lebih besar dari tahun sebelumnya dan diharapkan dapat terealisasi dengan hasil yang maksimal bagi peningkatan produktivitas perusahaan.

48. Going concern of some subsidiaries condition (continued)

3. PT Mitra Rajawali Banjaran (MRB) (continued)

The management plan to improve performance and reduce accumulated losses, as well as maintain the Company's survival as follows: (continued)

2. Product Development

Regarding the development of HYPE products, Operations Duck, Folley Chateter is expected to grow and be able to contribute more in the coming years so that it will significantly contribute to profit. Meanwhile, for the collaboration, the initiation and study process has been carried out in 2021 and is expected to be realized soon.

3. HR Development in increasing productivity

Human resources as an asset in increasing company productivity are the next concentration in the company's performance improvement plan.

Efforts to develop human resources are evidenced in the stipulation of a budget for education and training that supports the competence of human resources and at the same time has a motivational impact on the employees concerned.

Increasing individual competence is an inseparable part of developing human resources so that the amount of the budget is set to be bigger than the previous year and is expected to be realized with maximum results for increasing company productivity.

31 Desember 2021

31 December 2021

48. Kondisi kelangsungan usaha beberapa entitas anak (lanjutan)

4. PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring (RTE)

Laporan keuangan disusun dengan anggapan bahwa Entitas akan melanjutkan usahanya secara berkelanjutan. Pada tanggal 31 Desember 2021 Entitas mengalami kerugian komprehensif sebesar Rp 4.744.098.959.

Adapun langkah-langkah manajemen Entitas untuk mempertahankan kinerja positif ditahun-tahun mendatang, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja usaha karung plastik.
 - a. Peningkatan produksi karung plastik dengan menekan *reject* maksimal 5%.
 - b. Rasionalisasi mesin produksi, melanjutkan program kerja yang telah dijalankan pada Q4 tahun 2021 dengan tujuan efisiensi biaya tenaga kerja dan biaya energi listrik serta efektivitas produksi.
 - c. Optimalisasi tenaga operator untuk meningkatkan produktivitas operator, yang dilakukan dengan melakukan optimalisasi hari produksi dan jumlah *shift* kerja sesuai kebutuhan.
 - d. Reformulasi komposisi pemakaian bahan baku untuk memperoleh standar kualitas dan harga pokok produksi yang kompetitif.
 - e. Meningkatkan penjualan karung plastik dengan optimalisasi tender pelanggan existing dan pelanggan baru, serta pengembangan produk turunan plastik berupa kantong plastik medis, *hand gloves* plastik, karung laminasi termasuk tradingnya.

48. Going concern of some subsidiaries condition (continued)

4. PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring (RTE)

The financial statements are prepared with the assumption that the Entity will continue its business in a sustainable manner. As of 31 December 2021, the Entity suffered a comprehensive loss of Rp 4,744,098,959.

The Entity's management steps to maintain positive performance in the coming years are as follows:

1. *Improve the performance of the plastic sack business.*
 - a. *Increase the production of plastic bags by pressing the reject maximum of 5%.*
 - b. *Rationalization of production machines, continuing the work program that was carried out in Q4 2021 with the aim of efficiency in labor costs and electricity costs as well as production effectiveness.*
 - c. *Optimization of operator manpower to increase operator productivity, which is done by optimizing production days and the number of work shifts as needed.*
 - d. *Reformulation of the composition of the use of raw materials to obtain quality standards and competitive cost of goods manufactured.*
 - e. *Increasing sales of plastic bags by optimizing existing and new customer tenders, as well as developing plastic derivative products in the form of medical plastic bags, plastic hand gloves, laminated sacks, including trading.*

31 Desember 2021

31 December 2021

48. Kondisi kelangsungan usaha beberapa entitas anak (lanjutan)

4. PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring (RTE) (lanjutan)

Adapun langkah-langkah manajemen Entitas untuk mempertahankan kinerja positif ditahun-tahun mendatang, adalah sebagai berikut: (lanjutan)

2. Pengembangan karung laminasi bekerjasama dengan PT Rajawali Citramass maupun dengan mitra strategis lainnya serta karung ramah lingkungan bekerjasama dengan *Green Hope* untuk pemenuhan bahan baku.
3. Manajemen cash flow untuk menjaga likuiditas perusahaan dengan menjaga *Net Operating Cash Flow* (NOCF) tetap positif.
4. Perbaikan penyusunan laporan keuangan untuk pengambilan keputusan yang akurat dan tepat waktu, salah satunya dengan *update* aplikasi sistem informasi akuntansi berbasis *Enterprise Resources Planning* (ERP) yang dijalankan serta pengawalan persediaan baik fisik maupun *inventory* melalui *stock opname*.
5. Rencana perbaikan mesin CL 9 unit untuk pemantapan kapasitas 1.300.000 lembar per bulan..
6. Sinergi dengan BUMN klaster pangan dan anak perusahaan RNI grup.
7. Transformasi *human capital resources* yang unggul untuk meningkatkan produktivitas, keahlian/ *skill* sumber daya manusia.

48. *Going concern of some subsidiaries condition (continued)*

4. *PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring (RTE) (continued)*

The Entity's management steps to maintain positive performance in the coming years are as follows: (continued)

2. *The development of laminated sacks in collaboration with PT Rajawali Citramass as well as with other strategic partners and environmentally friendly sacks in collaboration with Green Hope for the fulfillment of raw materials.*
3. *Cash flow management to maintain company liquidity by keeping Net Operating Cash Flow (NOCF) positive.*
4. *Improvements in the preparation of financial reports for accurate and timely decision making, one of which is by updating the application of an accounting information system based on Enterprise Resources Planning (ERP) that is run and controlling physical and inventory inventories through stock taking.*
5. *Plan to repair 9 units of CL machines to strengthen the capacity of 1,300,000 pieces per month.*
6. *Synergy with SOEs in the food cluster and RNI group subsidiaries.*
7. *Transformation of superior human capital resources to increase productivity, expertise/ skills of human resources.*

31 Desember 2021

31 December 2021

48. Kondisi kelangsungan usaha beberapa entitas anak (lanjutan)

5. PT Rajawali Gloves (dalam likuidasi)

Berdasarkan Surat Permohonan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) No. 367/RNI/01/XII/09 tanggal 17 Desember 2009 selaku Pemegang Saham terbesar Perusahaan untuk meminta persetujuan atas perubahan pola divestasi penjualan saham dengan cara dilikuidasi kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia hal ini menunjukkan Pemegang Saham sudah tidak lagi mempunyai keinginan untuk melanjutkan kegiatan usahanya.

Perusahaan juga mengalami kerugian dalam 7 (tujuh) tahun terakhir. Sampai dengan tahun 2011 akumulasi kerugian mencapai Rp 12.571.901.777. Hal ini disebabkan penjualan ke Master Grip Inc. sebagai pembeli terbesar sekaligus Pemegang Saham sejak tahun 2005 tidak lagi memberi order sehingga penjualan menurun hingga 90% lebih, kemudian Perusahaan mencoba membidik pasar lokal yang hingga saat ini produk dari perusahaan harganya tidak bisa bersaing dari produk-produk lokal lain yang sejenis. Para Pemegang Saham asing yaitu Fabry Gloves & Mitten Co, Master Grip Inc, dan Mirae Trading Co, hingga saat ini tidak ada kejelasan dan kepastian untuk meneruskan kelangsungan usaha ke depan.

Dalam kegiatan operasionalnya selama tahun 2010 Perusahaan tidak lagi mendapat modal kerja dari PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) selaku Pemegang Saham yang selama ini memberikan modal kerja dikarenakan akumulasi pinjaman modal kerjanya sudah mencapai Rp 11.315.052.075 pada tahun 2010.

Akibat kerugian operasi yang berulang kali terjadi menyebabkan saldo ekuitas per 31 Desember 2010 menjadi defisit sebesar Rp 12.571.901.777 oleh karena itu Perusahaan sudah tidak dimungkinkan lagi untuk dilanjutkan operasionalnya dengan pertimbangan pihak Pemegang Saham sudah tidak mempunyai kemampuan untuk melanjutkan operasional perusahaan dan juga modal Perusahaan yang dalam kondisi negatif lebih dari 75 %.

48. Going concern of some subsidiaries condition (continued)

5. PT Rajawali Gloves (in liquidation)

Based on the application letter of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) No. 367/RNI/01/XII/09 dated 17 December 2009 as the largest shareholder of the Company to request approval for the change of divestment of share sales by liquidation to the Minister of State Owned Enterprises (BUMN) of the Republic of Indonesia indicates that shareholders no longer have the intention to continue their business activities.

The Company also suffered losses in the last 7 (seven) years. Until 2011 accumulated losses reached Rp 12,571,901,777. This was due to sales to Master Grip Inc. as the biggest buyer as well as Shareholder since 2005 no longer gave orders so that sales decreased up to 90% more, then the Company tried to target the local market which until now the products of the Company the price cannot compete from other similar local products. The foreign shareholders were Fabry Gloves & Mitten Co, Master Grip Inc, and Mirae Trading Co., until now there was no clarity and certainty to continue the business continuity in the future.

In its operational activities during 2010 the Company no longer got working capital from PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) as the shareholder who has been providing working capital due to the accumulation of working capital loan has reached Rp 11,315,052,075 in 2010.

As a result of repeated operating losses, the equity balance as of 31 December 2010 becomes a deficit of Rp 12,571,901,777 therefore the Company is no longer allowed to continue operations with the consideration that the Shareholders have no ability to continue the Company's operations and also the Company's capital in negative condition more than 75%.

31 Desember 2021

31 December 2021

48. Kondisi kelangsungan usaha beberapa entitas anak (lanjutan)

5. PT Rajawali Gloves (dalam likuidasi) (lanjutan)

PT Rajawali Gloves telah mengalami akumulasi kerugian dari usahanya yang sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp 12.571.901.777 dan yang mengakibatkan kesulitan modal kerja, terjadinya pemutusan hubungan kerja serta penghentian kegiatan operasional Perusahaan.

Berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Surabaya No.762/Pdt.P/2012PN.Sby tanggal 26 Juni 2012 PT Rajawali Gloves diputuskan disetujui untuk dilikuidasi yang selanjutnya diaktakan dengan akta RUPS-LB PT Rajawali Gloves No.7 tanggal 16 Juli 2012.

Sampai saat ini proses likuidasi masih berlangsung (lebih dari 30 bulan), diantaranya dengan pencabutan perizinan termasuk pencabutan NPWP, Penjualan Aset Bergerak dan lainnya. Khusus untuk penjualan Aset Tidak Bergerak, agak terkendala menyangkut Persetujuan dan pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebagai Pemegang Saham Utama.

6. PT GIEB Indonesia

Di tahun 2022, Perusahaan akan melakukan langkah-langkah lebih lanjut untuk meningkatkan produktivitas bisnis organisasi untuk mencapai hasil tahunan yang positif yaitu dengan langkah strategi berikut ini:

1. Pada tahun 2022 Perusahaan telah menyusun Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dengan omzet sebesar Rp 427.260.000.000 dengan laba sebelum pajak Rp 1.210.000.000 miliar.
2. Melakukan trading tetes bekerjasama dengan anak perusahaan *ID Food* seperti PG Rajawali I, PG Candi Baru dan PG Rajawali II dengan omzet sebesar Rp 111.120.000.000 miliar.
3. Bekerjasama dengan *ID Food* untuk melakukan trading gula dengan omset sebesar Rp 57.360.000.000 dengan laba kotor sebesar Rp 985.000.000.

48. Going concern of some subsidiaries condition (continued)

5. PT Rajawali Gloves (in liquidation) (continued)

PT Rajawali Gloves had accumulated losses from its operations up to 31 December 2013 amounting to Rp 12,571,901,777 and which resulted in difficulties in working capital, termination of employment and termination of the Company's operational activities.

Based on the decision of Surabaya District Court No.762/Pdt.P/2012PN.Sby dated 26 June 2012 PT Rajawali Gloves was decided approved for liquidation which further notarized by deed of AGM-LB PT Rajawali Gloves No.7 dated 16 July 2012.

Until now the liquidation process is still ongoing (more than 30 months), such as with revocation of licenses including revocation of Taxpayer Identification Number, Sale of Movable Assets and others. Especially for the sale of fixed assets, it is rather constrained concerning Approval and Work Plan and Company Budget (RKAP) of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) as the Main Shareholder.

6. PT GIEB Indonesia

In 2022, the Company will take further steps to increase the organization's business productivity to achieve positive annual results, namely the following strategic steps:

1. *In 2022, the Company has prepared a Corporate Budget Work Plan (RKAP) with a turnover of Rp 427,260,000,000 with profit before tax of Rp 1,210,000,000 billion.*
2. *Doing drip trading in collaboration with ID Food subsidiaries such as PG Rajawali I, PG Candi Baru and PG Rajawali II with a turnover of Rp 111,120,000,000 billion.*
3. *Cooperating with ID Food to trade sugar with a turnover of Rp 57,360,000,000 with a gross profit of Rp 985,000,000.*

31 Desember 2021

31 December 2021

48. Kondisi kelangsungan usaha beberapa entitas anak (lanjutan)

6. PT GIEB Indonesia (lanjutan)

Di tahun 2022, Perusahaan akan melakukan langkah-langkah lebih lanjut untuk meningkatkan produktivitas bisnis organisasi untuk mencapai hasil tahunan yang positif dengan langkah strategi berikut ini: (lanjutan)

4. Perusahaan merencanakan akan menambah principal baru dengan margin 10% dan TOP diatas 45 hari yaitu produk mentos dengan omzet sebesar Rp 5.200.000.000.
5. Mengajukan penurunan suku bunga pinjaman modal kerja di Bank Mandiri yang sebelumnya tahun 2021 sebesar 7,75% per tahun menjadi 7% ditahun 2022, sehingga beban bunga dapat berkurang sebesar Rp 225.000.000 setahun.
6. Melakukan penurunan piutang *overdue* dari 20% menjadi 10% dengan cara mengefektifkan penagihan dan *update* plafon kredit dan termin kredit yang diberikan kepada pelanggan untuk bisa membantu likuiditas Perusahaan dan menghindari terjadinya kerugian piutang yang tidak tertagih.
7. Menganalisa beban kerja per karyawan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dan melakukan efisiensi biaya dengan merealisasikan biaya yang berdampak pada peningkatan penjualan sehingga produktivitas karyawan menjadi meningkat.

7. PT Rajawali Citramass

Laporan keuangan disusun dengan anggapan bahwa Entitas akan melanjutkan usahanya secara berkelanjutan. Pada tanggal 31 Desember 2021 Entitas mengalami kerugian dari usahanya dan mencatat defisit sebesar Rp 58.691.593.166 dan defisiensi modal sebesar Rp 40.170.531.040.

48. Going concern of some subsidiaries condition (continued)

6. PT GIEB Indonesia (continued)

In 2022, the Company will take further steps to increase the organization's business productivity to achieve positive annual results, namely the following strategic steps: (continued)

- 4. The company plans to add new principals with a margin of 10% and TOP above 45 days, namely Mentos products with a turnover of Rp 5,200,000,000.*
- 5. Propose a decrease in the working capital loan interest rate at Bank Mandiri from 7.75% per year in 2021 to 7% in 2022, so that interest expenses can be reduced by Rp 225,000,000 per year.*
- 6. Reducing overdue receivables from 20% to 10% by streamlining billing and updating credit ceilings and credit terms given to customers to assist the Company's liquidity and avoid uncollectible receivables losses.*
- 7. Analyze the workload per employee in accordance with the needs of the Company and implement cost efficiency by realizing costs that have an impact on increasing sales so that employee productivity increases.*

7. PT Rajawali Citramass

The financial statements are prepared assuming that the entity will continue as a going concern. As of 31 December 2021, the Entity incurred a loss of Rp 58,691,593,166 and deficiency of capital amounting to Rp 40,170,531,040.

31 Desember 2021

31 December 2021

48. Kondisi kelangsungan usaha beberapa entitas anak (lanjutan)

7. PT Rajawali Citramass (lanjutan)

Langkah-langkah manajemen Entitas untuk mempertahankan kinerja positif di tahun-tahun mendatang, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas produksi dengan cara sebagai berikut:
 - Rekondisi 15 (lima belas) unit mesin *circular loom* dan mengaktifkan kembali 6 (enam) unit mesin *circular loom*.
 - Meningkatkan kapasitas mesin printing dengan cara memodifikasi *chain hoist* untuk percepatan penggantian drum film.
2. Menambah pelanggan baru untuk *segment* reguler dan memasok kebutuhan karung dalam satu grup holding pangan.
3. Melakukan pemenuhan bahan baku produksi dengan cara sebagai berikut:
 - Melakukan kontrak pengadaan bahan baku produksi dengan produsen langsung untuk menjaga rantai pasokan bahan baku.
 - Memenuhi target kontrak pengadaan bahan baku yang telah disepakati.
4. Melakukan penagihan piutang usaha secara rutin.

8. PT Rajawali Liki Energi

Perusahaan akan mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA Liki) yang ada di wilayah Sumatera Barat melalui Anak Perusahaan PT Rajawali Liki Energi. Salah satu proyek yang akan dikembangkan adalah proyek PLTA dengan memanfaatkan potensi aliran sungai Lambai dan sungai Belangir (*run off river*) dengan kapasitas 15,6 MW.

48. Going concern of some subsidiaries condition (continued)

7. PT Rajawali Citramass (continued)

The steps of the Entity's management to maintain positive performance in the years to come, are as follows:

1. *Increase production capacity in the following ways:*
 - *Recondition 15 (fifteen) circular loom machines and reactivate 6 (six) circular loom machines.*
 - *Increase the capacity of the printing machine by modifying the chain hoist to accelerate the replacement of film drums.*
2. *Adding new customers for the regular segment and supplying sacks in a food holding group.*
3. *Carry out the fulfillment of production raw materials in the following ways:*
 - *Conducting contracts for the procurement of raw materials for production with direct producers to maintain the supply chain of raw materials.*
 - *Fulfill the target of the agreed raw material procurement contract.*
4. *Collecting accounts receivable on a regular basis.*

8. PT Rajawali Liki Energi

The company will develop a hydroelectric power plant (PLTA Liki) in West Sumatra through its subsidiary PT Rajawali Liki Energi. One of the projects that will be developed is a hydropower project by utilizing the potential of the Lambai and Belangir rivers (run off river) with a capacity of 15.6 MW.

31 Desember 2021

31 December 2021

48. Kondisi kelangsungan usaha beberapa entitas anak (lanjutan)

8. PT Rajawali Liki Energi (lanjutan)

Lokasi rencana proyek PLTA LIKI berada di Kebun teh PT Mitra Kerinci di Desa Sungai Lambai, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Konsep pembangunannya menggunakan konsep 3 Lokasi Pembangkit yang terdiri dari :

1. PLTA Lambai 1 (2 x 2,6 MW)
2. PLTA Lambai 2 (2 x 2,4 MW)
3. PLTA Belangir (2 x 2,8 MW)

Dijumlahkan menjadi satu substation sebesar 15.6 MW dan disambungkan ke sistem grid (70 kV/150 kV) di gardu induk Supreme berjarak ± 10 Km dari lokasi.

Pekerjaan proyek PLTA Liki pada saat ini masih dalam tahap pra konstruksi dan estimasi investasi sebesar Rp 556.188.639.269.

Permasalahan yang dihadapi

Proses perjanjian jual beli listrik (PJBL) dengan PT PLN belum selesai ditandatangani karena harus mengikuti lelang DPT (Daftar Penyedia Terseleksi) mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No. 50 tahun 2017. Lelang DPT sedang dalam proses mulai dari tanggal 30 April 2019 dan sesuai revisi ke 5 jadwal pengumuman penetapan DPT diagendakan pada tanggal 14 Maret 2019. Sampai dengan laporan audit diterbitkan, surat perjanjian jual beli listrik (PJBL) dengan PT PLN (Persero) belum selesai ditandatangani.

48. Going concern of some subsidiaries condition (continued)

8. PT Rajawali Liki Energi (continued)

The planned location for the LIKI hydropower project is in the PT Mitra Kerinci tea plantation in Sungai Lambai Village, Sangir District, South Solok Regency, West Sumatra Province. The construction concept uses the concept of 3 Generating Locations which consists of:

- 1) PLTA Lambai 1 (2 x 2.6 MW)*
- 2) PLTA Lambai 2 (2 x 2.4 MW)*
- 3) PLTA Belangir (2 x 2.8 MW)*

Added to one substation of 15.6 MW and connected to the grid system (70 kV/150 kV) at the Supreme substation, ± 10 Km from the location.

The Liki hydropower project work is currently still in the pre-construction stage and the estimated investment is Rp 556,188,639,269.

Problems encountered

The process of signing the electricity purchase agreement (PJBL) with PT PLN has not yet been completed because it must participate in the DPT (Selected Provider List) auction referring to the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 50 of 2017. The DPT auction is in process starting from 30 April 2019 and according to the 5th revision, the schedule for the announcement of the determination of DPT is scheduled for 14 March 2019. Until the audit report is issued, a power purchase agreement (PJBL) with PT PLN (Persero) has not yet been signed.

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan Entitas Anak
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and Subsidiaries
Notes to consolidated financial statements (continued)
 For the year ended

31 Desember 2021

31 December 2021

48. Kondisi kelangsungan usaha beberapa entitas anak (lanjutan)

48. Going concern of some subsidiaries condition (continued)

9. Dampak permasalahan kelangsungan usaha beberapa Entitas Anak terhadap Konsolidasian

9. The impact of the business continuity problems of several subsidiaries to consolidation

	% Aset terhadap Total Aset Konsolidasian/ % Assets to Consolidated Total Assets	% Penjualan terhadap Total Penjualan Konsolidasian/ % Sales to Consolidated Total Sales	
<u>Entitas Anak</u>			<u>Subsidiaries</u>
PT PG Rajawali II	19,80%	18,11%	<i>PT PG Rajawali II</i>
PT GIEB Indonesia	0,92%	4,20%	<i>PT GIEB Indonesia</i>
PT Mitra Rajawali Banjaran	0,81%	0,60%	<i>PT Mitra Rajawali Banjaran</i>
PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring	0,33%	0,83%	<i>PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring</i>
PT Rajawali Citramass	0,52%	1,30%	<i>PT Rajawali Citramass</i>
PT Rajawali Gloves Corporation	0,00%	0,00%	<i>PT Rajawali Gloves Corporation</i>
<u>Entitas Cucu</u>			<u>Sub Subsidiaries</u>
PT Inti Bagas Perkasa	0,21%	0,00%	<i>PT Inti Bagas Perkasa</i>
PT Rajawali Liki Energi	0,29%	0,00%	<i>PT Rajawali Liki Energi</i>

31 Desember 2021

31 December 2021

49. Aset dan liabilitas keuangan

49. Financial asset and liability

Sebagaimana diisyaratkan dalam PSAK 50 dan 55 revisi 2014 tentang penerapan Instrumen Keuangan yang diterapkan pada tahun 2015. Berdasarkan penelaahan Manajemen perseroan dan Entitas Anak memiliki berbagai aset keuangan seperti kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, dan investasi jangka pendek, yang timbul secara langsung dari kegiatan usaha. Perusahaan dan Entitas Anak juga memiliki liabilitas keuangan yang terdiri dari utang usaha, beban akrual, dan liabilitas jangka panjang. Tujuan utama dari liabilitas keuangan tersebut adalah untuk membiayai kegiatan usaha Perusahaan dan Entitas Anak.

As indicated in the revised SFAS 50 and 55 revised in 2014 on the application of Financial Instruments adopted in 2015. Based on the management review and the Company and Subsidiaries have various financial assets such as cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables and short-term investments, which arise directly from business activities. The Company and Subsidiaries also have financial liabilities consisting of accounts payable, accrued expenses, and long-term liabilities. The main objective of the financial liabilities is to finance the Company's and Subsidiaries' business activities.

Rincian aset keuangan dan liabilitas keuangan Perusahaan dan entitas anak pada tanggal 31 Desember 2021:

Details of financial assets and financial liabilities of the Company and its subsidiaries as of 31 December 2021:

	Nilai tercatat/ <i>Carrying amount</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	
Aset keuangan			<i>Financial assets</i>
Kas dan setara kas	674.070.695.044	674.070.695.044	<i>Cash and cash equivalents</i>
Piutang usaha	623.791.723.632	623.791.723.632	<i>Trade receivables</i>
Piutang lain lain	810.083.018.542	810.083.018.542	<i>Others receivables</i>
Investasi jangka panjang	55.412.821.304	55.412.821.304	<i>Long-term investments</i>
Aset lain	91.069.519.700	91.069.519.700	<i>Other assets</i>
Jumlah	2.254.427.778.222	2.254.427.778.222	Total
Liabilitas keuangan			<i>Financial liabilities</i>
Utang bank	3.312.271.122.381	3.312.271.122.381	<i>Bank loans</i>
Utang usaha	282.384.470.348	282.384.470.348	<i>Trade payables</i>
Utang lain lain	652.484.225.722	652.484.225.722	<i>Others payables</i>
Biaya yang masih harus dibayar	100.424.476.664	100.424.476.664	<i>Accrued expenses</i>
Liabilitas jatuh tempo dalam 1 thn	207.967.534.853	207.967.534.853	<i>Current Maturity liabilities</i>
Liabilitas jangka panjang	2.989.072.654.777	2.989.072.654.777	<i>Long-term liabilities</i>
Jumlah	7.544.604.484.745	7.544.604.484.745	Total

31 Desember 2021

31 December 2021

49. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Metode dan asumsi berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap kelompok instrumen keuangan :

Instrumen keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo satu tahun atau kurang termasuk kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha, utang lain-lain, dan beban akrual. Nilai wajar instrumen keuangan tersebut dianggap mendekati nilai tercatatnya. Piutang usaha dan piutang lainnya dilakukan penyisihan penurunan nilai berdasarkan pengamatan atas kemungkinan tidak tertagihnya.

Investasi pada saham biasa yang tidak memiliki kuota pasar dengan kepemilikan saham dibawah 20% atau sampai dengan pemilikan 50% yang tidak diketahui nilai pasarnya, dicatat pada biaya perolehan karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal.

Nilai tercatat dari liabilitas bank jangka panjang dengan suku bunga mengambang kurang lebih sebesar nilai wajarnya karena dilakukan penilaian secara berkala.

49. Financial asset and liability (continued)

The following methods and assumptions are used to estimate the fair value for each group of financial instruments :

Short-term financial instruments with maturities of one year or less including cash and cash equivalents, accounts receivable, other receivables, accounts payable, other debt, and accrued expenses. The fair value of such financial instruments is deemed to be close to their carrying amount. Trade receivables and other receivables are provided allowance for impairment based on observation of the possibility of uncollectible.

Investments in ordinary shares that do not have market quotas with ownership interest below 20% or up to 50% of unrecognized market value are recorded at cost as their fair value cannot be measured reliably.

The carrying amount of long-term bank liabilities with floating interest rate is approximately equal to its fair value due to periodic appraisal.

31 Desember 2021

31 December 2021

50. Estimasi dan pertimbangan akuntansi yang penting

Estimasi dan pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lainnya, termasuk ekspektasi dari peristiwa masa depan yang diyakini wajar. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula. Asumsi dan pertimbangan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat diungkapkan di bawah ini.

Usaha yang berkelanjutan

Manajemen Grup telah melakukan penilaian atas kemampuan Grup untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Grup memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

Nilai wajar atas instrumen keuangan

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika. Masukan untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model seperti volatilitas untuk transaksi derivatif yang berjangka waktu panjang dan tingkat diskonto, tingkat pelunasan dipercepat, dan asumsi tingkat gagal bayar.

50. Significant accounting estimates and judgements

The estimates and judgements used in the preparation of the financial statements are continuously evaluated based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable. Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and actions, the resulting results may differ from those initially estimated. Assumptions and considerations that have a significant effect on the carrying amount are disclosed below.

Going concern

The Group's management has assessed the Group's ability to continue its business and believes that the Group has the resources to continue its operations in the future. In addition, management is unaware of material uncertainty that can cause significant doubts about the Group's ability to maintain its viability. Therefore, financial statements have been prepared on the basis of sustainable enterprises.

Fair value of financial instrument

If the fair value of financial assets and financial liabilities recorded in the statement of financial position are not available in the active market, it is determined using various assessment techniques including the use of mathematical models. The input for this model come from market data that can be observed as long as the data is available. When such observable market data are not available, management considerations are required to determine fair value. These considerations include liquidity considerations and model inputs such as volatility for long-term derivative transactions and discount rates, accelerated repayment rates, and the assumption of default rates.

31 Desember 2021

31 December 2021

50. Estimasi dan pertimbangan akuntansi yang penting (lanjutan)

Penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang

Grup menelaah pinjaman yang diberikan dan piutang yang signifikan secara individu pada setiap tanggal laporan posisi keuangan untuk menilai apakah penurunan nilai harus dicatat dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Secara khusus, justifikasi oleh manajemen diperlukan dalam estimasi jumlah dan waktu arus kas di masa mendatang ketika menentukan penurunan nilai. Dalam estimasi arus kas ini, Grup membuat justifikasi tentang situasi keuangan nasabah dan nilai realisasi neto jaminan. Estimasi-estimasi ini didasarkan pada asumsi-asumsi tentang sejumlah faktor dan hasil aktual yang mungkin berbeda, yang tercermin dalam perubahan di masa mendatang pada penyisihan kerugian penurunan nilai tersebut.

Penurunan nilai investasi tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo

Grup menelaah efek utang dan ekuitas yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo pada setiap tanggal laporan posisi keuangan untuk menilai apakah telah terjadi penurunan nilai. Penilaian tersebut memerlukan pertimbangan yang sama seperti yang diterapkan pada penilaian individu pada pinjaman yang diberikan dan piutang.

Masa manfaat aset

Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset tetap berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan, jika ada. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material atas perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas.

50. Significant accounting estimates and judgements (continued)

Impairment of loan and receivable value

The Group reviews individual loans and receivables at each statement of financial position date to assess whether impairment should be recorded in the consolidated statements of comprehensive income. In particular, justification by management is required in estimating the amount and timing of future cash flows when determining impairment. In the estimated cash flows, the Group justifies the client's financial situation and net realizable value of the guarantee. These estimates are based on assumptions about a number of factors and actual results that may differ, which are reflected in future changes in the allowance for impairment losses.

The decrease in value of investments available for sale and held to maturity

The Group reviews debt and equity securities classified as available-for-sale and held-to-maturity at each statement date of the financial position to assess whether there has been a decline in value. Such assessments require the same considerations as those applied to individual assessments of loans and receivables.

Fixed assets useful lives

The Group conducts periodic review of the economic useful lives of the assets based on factors such as technical conditions and future technological developments, if any. Future results of operations will be materially affected by changes in these estimates resulting from changes in the factors mentioned above.

31 Desember 2021

31 December 2021

50. Estimasi dan pertimbangan akuntansi yang penting (lanjutan)

Perpajakan

Grup beroperasi di bawah peraturan perpajakan di Indonesia. Pertimbangan yang signifikan diperlukan untuk menentukan provisi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Apabila keputusan final atas pajak tersebut berbeda dari jumlah yang pada awalnya dicatat, perbedaan tersebut akan dicatat di laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada periode di mana hasil tersebut dikeluarkan.

Sedangkan aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan.

Kewajiban imbalan kerja

Nilai kini kewajiban imbalan kerja tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan dengan menggunakan asumsi aktuarial. Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya neto untuk pensiun termasuk tingkat pengembalian jangka panjang yang diharapkan atas aset program dan tingkat diskonto yang relevan. Setiap perubahan dalam asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat kewajiban imbalan kerja.

Asumsi tingkat pengembalian yang diharapkan atas aset program ditentukan secara seragam, dengan mempertimbangkan pengembalian historis jangka panjang, alokasi aset dan perkiraan masa depan atas pengembalian investasi jangka panjang.

Asumsi penting lainnya untuk kewajiban imbalan kerja sebagian didasarkan pada kondisi pasar saat ini.

50. Significant accounting estimates and judgements (continued)

Taxation

The Group operates under Indonesian tax laws. Significant consideration is required to determine the provision for income tax and value added tax. If the final tax decision is different from the amount originally recorded, the difference will be recorded in the consolidated statements of comprehensive income in the period in which the results are issued.

Deferred tax assets are recognized on the recoverable tax amount in the future periods as a result of temporary differences that may be deducted. Management justification is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, in accordance with the appropriate time and future fiscal profit levels in line with the strategy of the future tax plan.

Employee benefits obligations

The present value of the employee benefits obligation depends on a number of factors determined by using the actuarial assumptions. The assumptions used in determining the net cost for pensions include the expected long-term expected return on the program assets and the relevant discount rate. Any change in this assumption will have an impact on the carrying amount of the employee benefits obligation.

The expected assumption of expected return on plan assets is determined uniformly, taking into account long-term historical returns, asset allocation and future forecasts of long-term return on investment.

Another important assumption for employee benefits obligations is partly based on current market conditions.

**51. Kondisi Menyediakan Penggantian Lahan
Jatitujuh**

PT Pabrik Gula Rajawali II

Kewajiban Penggantian Lahan

Kewajiban penggantian lahan hutan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 12.022,50 ha sesuai luasan awal pencadangan kawasan hutan untuk perkebunan tebu, yang saat ini merupakan HGU Pabrik Gula Jatitujuh dengan sertifikat No.00001/Kab.Majalengka seluas 5.673 ha dan No. 02/Kab.Indramayu di Jatitujuh seluas 6.248 ha atau total seluas 11.921 Ha.

Kewajiban penggantian seluas 12.022,50 ha tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor:152/HGU/BPN/2004 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat dan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 153/HGU/BPN/2004 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan gula nasional, Departemen Pertanian yang pada waktu itu masih membawahi bidang kehutanan sesuai Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 481/Kpts/Um/8/1976 tanggal 9 Agustus 1976 mengeluarkan areal kawasan hutan di wilayah Jatitujuh dan sekitarnya seluas 12.022,50 ha untuk dicadangkan sebagai lahan tanaman tebu dalam rangka membangun pabrik gula Jatitujuh yang merupakan salah satu unit pabrik gula milik PTP XIV (Persero).

Sesuai SK Mentan No. 481/Kpts/Um/8/1976, terkait pencadangan areal kawasan hutan tersebut PTP XIV (Persero) berkewajiban untuk:

- Mengganti areal hutan secara bertahap selama 10 tahun.
- Membayar ganti rugi tanaman (telah dibayar).
- Membayar biaya pengukuran batas.

51. Conditions Provide Jatitujuh Land Replacement

PT Pabrik Gula Rajawali II

Land Replacement Obligations

The obligation to replace forest land to the Ministry of Environment and Forestry covers an area of 12,022.50 ha in accordance with the initial area of forest reserve for sugarcane plantations, which is currently the HGU of Jati Tujuh Sugar Factory with certificate No. 00001 / Kab.Majalengka covering 5,673 ha and No. 02 / Kab. Indramayu in Jatitujuh covering an area of 6,248 ha or a total area of 11,921 Ha.

The obligation to replace an area of 12,022.50 ha is contained in the Decree of the Head of the National Land Agency No. 152/HGU/BPN/2004 concerning the Granting of the Extension of the Period of Land for Cultivation Rights on Land No. 153/HGU/BPN/2004 concerning the Granting of Extension of the Term of Land Use Rights located in Indramayu Regency, West Java Province.

In order to meet the needs of national sugar, the Ministry of Agriculture, which at that time was still in charge of the forestry sector, was in accordance with Minister of Agriculture Decree No. 481/Kpts/Um/8/1976 dated 9 August 1976 issued a forest area in the Jatitujuh region and its surrounding area of 12,022.50 ha to be reserved as sugarcane land in the context of building a Jatitujuh sugar factory which is one of the PTP XIV mill sugar mill units (Persero).

In accordance with Minister of Agriculture Decree No. 481/Kpts/Um/8/1976, related to the reserve of the forest area PTP XIV (Persero) is obliged to:

- *Changing forest area gradually over 10 years.*
- *Pay crop compensation (already paid).*
- *Paying boundary measurement fees.*

31 Desember 2021

31 December 2021

51. Kondisi Menyediakan Penggantian Lahan Jatitujuh (Lanjutan)

PT Pabrik Gula Rajawali II (lanjutan)

Kewajiban Penggantian Lahan (lanjutan)

Pada tahun 1979 telah terbit sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT Perkebunan XIV (Persero).

Dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 1989 pengelolaan PT Perkebunan XIV (Persero) diserahkan kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan selanjutnya pada tahun 1993 kepemilikan saham pemerintah dialihkan kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero). Sejak saat itu PT Perkebunan XIV (Persero) menjadi anak perusahaan Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan dirubah namanya menjadi PT PG Rajawali II. Upaya penggantian Kawasan hutan sejak HGU masih atas nama PTP XIV (Persero) sampai dengan saat ini HGU atas nama PT PG Rajawali II belum terealisasi.

Terdapat ketentuan dalam PP No. 10 tahun 2010 yang mencantumkan bahwa perusahaan perkebunan yang sudah mendapat izin prinsip sebelum berlakunya Undang Undang Kehutanan No. 41 tahun 1999, penyerahan lahan pengganti dilakukan paling lama 12 tahun sejak PP tersebut diberlakukan. Atas dasar hal tersebut PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II diberi kesempatan melakukan penggantian Kawasan hutan paling lambat pada tahun 2022.

Tahun 1976: Pencadangan kawasan hutan untuk perkebunan tebu

Surat Keputusan Menteri Pertanian No.481/Kpts/Um/8/1976 tanggal 9 Agustus 1976 mengeluarkan areal kawasan hutan di wilayah Jatitujuh dan sekitarnya seluas 12.022,50 ha untuk dicadangkan sebagai lahan tanaman tebu dalam rangka membangun pabrik gula Jatitujuh yang merupakan salah satu unit pabrik gula milik PTP XIV (Persero), dengan syarat PTP XIV (Persero) berkewajiban:

- Mengganti areal hutan secara bertahap selama 10 tahun.
- Membayar ganti rugi tanaman (telah dibayar).
- Membayar biaya pengukuran batas.

51. Conditions Provide Jatitujuh Land Replacement (Continued)

PT Pabrik Gula Rajawali II (continued)

Land Replacement Obligations (continued)

In 1979, a certificate of land use rights (HGU) was issued on behalf of PT Perkebunan XIV (Persero).

In a further development in 1989 the management of PT Perkebunan XIV (Persero) was handed over to PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and subsequently in 1993 ownership of government shares was transferred to PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero). Since then PT Perkebunan XIV (Persero) became a subsidiary of Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and changed its name to PT PG Rajawali II. Efforts to replace forest areas since HGU are still in the name of PTP XIV (Persero) until now HGU on behalf of PT PG Rajawali II have not been realized.

There are provisions in PP No. 10 of 2010 which states that plantation companies that have obtained a principle permit prior to the enactment of Forestry Law No. 41 of 1999, surrender of replacement land was made no later than 12 years after the PP was enacted. Based on this, PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II was given the opportunity to replace the forest area no later than 2022.

In 1976: Forest reserve for sugarcane plantation

Decree of the Minister of Agriculture No.481 / Kpts / Um / 8/1976 dated 9 August 1976 issued an area of forest area in the Jatitujuh region and its surrounding area of 12,022.50 ha to be reserved as sugarcane land in the context of building a Jati Tujuh sugar factory which is one of the units PTP XIV (Persero) millik sugar factory, with the condition that PTP XIV (Persero) is obliged to:

- *Changing forest area gradually over 10 years.*
- *Pay crop compensation (already paid).*
- *Paying boundary measurement fees.*

31 Desember 2021

31 December 2021

**51. Kondisi Menyediakan Penggantian Lahan
Jatitujuh (lanjutan)**

PT Pabrik Gula Rajawali II (lanjutan)

**Tahun 1979 - 1989: Pengelolaan PG Jatitujuh
Oleh PTP XIV (Persero)**

- Pada tahun 1979 terbit HGU atas nama PTP XIV yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2004.
- Upaya penggantian Kawasan hutan, namun tidak terealisasi.

**Tahun 1989 - 1993: Pengalihan Pengelolaan PTP
XIV (Persero) kepada PT RNI (Persero)**

- Tahun 1989 Pemerintah menyerahkan pengelolaan PTP XIV (Persero) kepada PT RNI (Persero).
- Pada tahun 1993 Pemerintah mengalihkan saham PTP XIV (Persero) kepada PT RNI (Persero), dan PTP XIV (Persero) menjadi anak perusahaan PT RNI (Persero) serta berubah nama menjadi PT PG Rajawali II.
- Upaya penyelesaian penggantian lahan melalui hibah atau PMP sesuai usulan Menteri Keuangan surat No.S-1204/MK.013/1989 tanggal 28 November 1989 kepada Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, & Industri yang telah disetujui Menko Ekuin sesuai surat No. S-613/M.Ekuin/1989 tanggal 18 Desember 1989 namun ditolak oleh Kementerian Kehutanan.

**Tahun 2004 - 2008: Perpanjangan HGU dan
Upaya Alternatif Penyelesaian Penggantian
Kawasan Hutan**

- Pengajuan Perpanjangan HGU, terdapat kendala dikarenakan PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II belum melakukan penggantian Kawasan hutan.
- Perpanjangan Sertifikat HGU dengan rekomendasi Menteri Kehutanan yang bersyarat kesanggupan PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II untuk mengganti Kawasan hutan selambatnya 10 tahun sampai dengan 31 Desember 2014, surat Menteri Kehutanan No.S.410/Menhut-VII/2004 tanggal 8 Oktober 2004.
- Sertifikat HGU terbit atas nama PT PG Rajawali II dan berlaku hingga 31 Desember 2029.

**51. Conditions Provide Jatitujuh Land Replacement
(continued)**

PT Pabrik Gula Rajawali II (continued)

**Year 1979 - 1989: Management of PG Jatitujuh by
PTP XIV (Persero)**

- In 1979 the HGU was issued on behalf of PTP XIV which was valid until 31 December 2004.
- Efforts to replace forest areas, but were not realized.

**Year 1989 - 1993: Transfer of PTP XIV (Persero)
Management to PT RNI (Persero)**

- In 1989 the Government handed over the management of PTP XIV (Persero) to PT RNI (Persero).
- In 1993 the Government transferred PTP XIV (Persero) shares to PT RNI (Persero), and PTP XIV (Persero) became a subsidiary of PT RNI (Persero) and changed its name to PT PG Rajawali II.
- Efforts to complete land replacement through a grant or PMP according to the proposal of the Minister of Finance letter No. S-1204/MK.013/1989 dated 28 November 1989 to the Coordinating Minister for Economy, Finance & Industry which has been approved by the Coordinating Minister for the Economy in accordance with letter No. S-613/M.Ekuin/1989 dated 18 December 1989 but was rejected by the Ministry of Forestry.

**Year 2004 - 2008: Extension of HGU and
Alternative Efforts to Complete Forest Area
Replacement**

- Submission of HGU Extension, there are obstacles due to PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II has not yet carried out forest area replacement.
- Extension of the HGU Certificate with recommendation from the Minister of Forestry who is conditional on the ability of PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II to replace the Forest Zone no later than 10 years until 31 December 2014, Forestry Minister's letter No.S.410/Menhut-VII/2004 dated 8 October 2004.
- The HGU certificate is issued in the name of PT PG Rajawali II and is valid until 31 December 2029.

31 Desember 2021

31 December 2021

51. Kondisi Menyediakan Penggantian Lahan Jatitujuh (lanjutan)

PT Pabrik Gula Rajawali II (lanjutan)

Tahun 2004 – 2008: Perpanjangan HGU dan Upaya Alternatif Penyelesaian Penggantian Kawasan Hutan (lanjutan)

- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II juga pernah mengusulkan alternatif penyelesaian dengan program penghijauan/rehabilitasi lahan kritis di Provinsi Jawa Barat.
- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II pada tahun 2008 telah mendapatkan 2 (dua) kali Surat Peringatan dari Menteri Kehutanan sesuai surat No. S.201/Menhut-VII/2008 tanggal 21 April 2008 dan surat No. S.582/Menhut-VII/2008 tanggal 15 September 2008.

Upaya Penggantian Kawasan Hutan

Tahun 2009

- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II kembali mendapatkan Surat Peringatan ketiga dari Menteri Kehutanan sesuai surat No. S.484/Menhut-VII/2009 tanggal 23 Juni 2009, dinyatakan bahwa apabila dalam jangka waktu 30 hari tidak dapat memenuhi kewajibannya maka persetujuan prinsip tukar menukar atas nama PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II akan dipertimbangkan untuk dicabut.
- Upaya Penggantian Lahan dilakukan melalui Mou PT RNI (Persero) dengan PTPN VIII (Persero) tentang penyediaan calon lahan pengganti HGU Jatitujuh No. NK/IV.2/560/VII/2009 qq No. 30/MoU/RNI.01/VII/09 tanggal 27 Juli 2009. Rencana penggantian lahan terhenti karena ada larangan penjualan aset BUMN (Rekomendasi Panja Aset Komisi VI DPR RI)

Tahun 2010

Batas waktu penggantian lahan dengan dasar: Pasal 52 ayat 1 PP No. 10 tahun 2010 yang mencantumkan bahwa Perusahaan perkebunan yang sudah mendapat izin prinsip sebelum Undang Undang Kehutanan No. 41 tahun 1999, lahan pengganti dilakukan paling lama 12 tahun sejak PP tersebut diberlakukan, sehingga diberikan kesempatan batas waktu penggantian kawasan hutan adalah pada tahun 2022.

51. Conditions Provide Jatitujuh Land Replacement (continued)

PT Pabrik Gula Rajawali II (continued)

Year 2004 - 2008: Extension of HGU and Alternative Efforts to Complete Forest Area Replacement (continued)

- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II has also proposed an alternative settlement with the reforestation/ rehabilitation of critical land in West Java Province.
- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II in 2008 received 2 (two) times a Warning Letter from the Minister of Forestry in accordance with letter No. S.201/Menhut-VII/2008 dated 21 April 2008 and letter No. S.582/Menhut-VII/2008 dated 15 September 2008.

Efforts to Replace Forest Areas

Year 2009

- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II again received a third Warning Letter from the Minister of Forestry in accordance with letter No. S.484/Menhut-VII/2009 dated 23 June 2009, stated that if within 30 days could not fulfill its obligations then approval of the principle of exchange on behalf of PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II will be considered revoked.
- Land Replacement Efforts are made through the MoU of PT RNI (Persero) with PTPN VIII (Persero) regarding the provision of prospective land replacement for Jatitujuh HGU No. NK/IV.2/560/VII/2009 qq No. 30/MoU/RNI.01/VII/09 dated 27 July 2009. The plan to replace the land was stalled due to a ban on the sale of BUMN assets (Recommendation of the Working Committee on Assets of Commission VI of the Republic of Indonesia)

Year 2010

Deadline for replacing land on the basis of: Article 52 paragraph 1 PP No. 10 of 2010 which states that plantation Companies that have obtained a principle permit before the Forestry Law No. 41 of 1999, replacement land is carried out no later than 12 years since the PP was enacted, so that given the opportunity to deadline the replacement of forest areas in 2022.

31 Desember 2021

31 December 2021

51. Kondisi Menyediakan Penggantian Lahan Jatitujuh (lanjutan)

PT Pabrik Gula Rajawali II (lanjutan)

Upaya Penggantian Kawasan Hutan (lanjutan)

Tahun 2011

Telah terbit Tim Terpadu pada tahun 2011

Tahun 2014

PT RNI (Persero) dengan surat No. 404/RNI.01/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 mengajukan permohonan perpanjangan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk diberi kesempatan penggantian Kawasan hutan sampai dengan tahun 2022.

Tahun 2015

- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II mengirim kembali surat permohonan perpanjangan pemenuhan lahan pengganti melalui surat No.110/RNI.01/IV/2015 tanggal 29 April 2015 perihal Rencana Penggantian Lahan sampai dengan tahun 2022.
- Menteri LHK mengirimkan surat kepada Menteri BUMN melalui surat No. S.316/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 13 Juli 2015, perihal Tuntutan agar Kawasan Tebu PT PG Rajawali II PG Jatitujuh menjadi Kawasan Hutan kembali. Dalam surat tersebut memohon Menteri BUMN untuk mendorong PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II agar segera menyelesaikan penyediaan lahan pengganti.
- Menteri BUMN mengirim surat kepada Menteri LHK melalui surat No. S-555/MBU/09/2015 tanggal 9 September 2015, hal: Permasalahan Kawasan Tebu PT PG Rajawali II unit PG Jatitujuh. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa Menteri BUMN selalu mendorong PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II untuk segera memenuhi kewajibannya dalam mencari lahan pengganti. Selain itu dimohonkan pula perpanjangan waktu kepada PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II dalam upaya memenuhi pemenuhan kewajiban lahan pengganti.
- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II mengirimkan surat kepada Menteri LHK melalui surat No.480/RNI.01/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 Perihal Calon Lahan Pengganti Kawasan Hutan PG Jatitujuh Kab. Indramayu dan Kab. Majalengka atas nama PT PG Rajawali II dan PTP XIV (Persero).

51. Conditions Provide Jatitujuh Land Replacement (continued)

PT Pabrik Gula Rajawali II (continued)

Efforts to Replace Forest Areas (continued)

Year 2011

The Integrated Team was published in 2011

Year 2014

PT RNI (Persero) with letter No. 404 / RNI.01 / XII / 2014 dated 10 December 2014 submitted a request for an extension to the Minister of Environment and Forestry to be given the opportunity to replace forest areas until 2022.

Year 2015

- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II sent a letter requesting the extension of replacement land fulfillment through letter No.110/RNI.01/IV/2015 dated 29 April 2015 regarding the Land Replacement Plan up to 2022.
- The Minister of LHK sent a letter to the Minister of SOEs through letter No. S.316/Menlhk-Setjen/2015 dated 13 July 2015, regarding the Demand that the PT PG Rajawali II PG Jatitujuh Sugarcane Area be a Forest Zone back. In the letter, the SOE Minister requested that PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II immediately complete the provision of replacement land.
- The SOE Minister sent a letter to the Minister of LHK through letter No. S-555/MBU/09/2015 dated 9 September 2015, regarding: Problems of Sugarcane Zone of PT PG Rajawali II PG Jatitujuh unit. The letter stated that the SOE Minister always encouraged PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II to immediately fulfill its obligations in finding replacement land. In addition, PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II is also requested for an extension of time to fulfill the fulfillment of the replacement land obligations.
- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II sent a letter to the Minister of LHK via letter No.480/RNI.01/X/2015 dated 15 October 2015 Regarding Prospective Land Replacement Forest Areas PG Jatitujuh District. Indramayu and Kab. Majalengka on behalf of PT PG Rajawali II and PTP XIV (Persero).

31 Desember 2021

31 December 2021

**51. Kondisi Menyediakan Penggantian Lahan
Jatitujuh (lanjutan)**

PT Pabrik Gula Rajawali II (lanjutan)

Upaya Penggantian Kawasan Hutan (lanjutan)

Tahun 2015

- Sebagai bentuk keseriusan PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II dalam memenuhi calon lahan pengganti, telah membentuk Tim yang khusus menangani proses pemenuhan penggantian lahan dengan SK Nomor: 93/SK/RNI.01/VIII/15 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Penggantian Lahan HGU PG Jatitujuh.

**Proses Dalam Rangka Penggantian Kawasan
Hutan**

Tahun 2018

- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II telah mengirimkan surat Kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 57/RNI.01/II/2018 tanggal 26 Februari 2018.
- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II mengajukan lahan calon pengganti HGU PG Jatitujuh yang berasal dari lahan tidak produktif milik PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) seluas 12.308 ha dan calon lahan pengganti berasal dari APL (Areal Penggunaan Lain) seluas 1.000 ha yang terletak di Kecamatan Tegal Buleud, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II telah mengirimkan surat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.108/RNI.01/IV/2018 tanggal 10 April 2018.
- Kerjasama dengan PTPN VIII (Persero) untuk penyediaan calon lahan pengganti: MOU Nomor NK/III.3/183/III/2018 dan 23/MoU/RNI.01/2018 tanggal 13 Maret 2018. Perjanjian Pendahuluan No. SP/III.2/549/VII/2018 dan No. 45.4/S.Pj/RNI.01/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018.
- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II telah mengirimkan surat Kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 86/RNI.01/III/2018 tanggal 22 Maret 2018.

**51. Conditions Provide Jatitujuh Land Replacement
(continued)**

PT Pabrik Gula Rajawali II (continued)

Efforts to Replace Forest Areas (continued)

Year 2015

- As a form of the seriousness of PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II in meeting prospective replacement land, has formed a Team that specifically handles the process of fulfilling land replacement with SK Number: 93/SK/RNI.01/VIII/15 concerning the Formation of Replacement Settlement Team PG Jatitujuh Land HGU.

Process in order to replace forest area

Year 2018

- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II has sent a letter to the Indonesian Ministry of Environment and Forestry No. 57/RNI.01/II/2018 on 26 February 2018.
- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II submitted a candidate land for the replacement of PG Jatitujuh's HGU from an unproductive land owned by PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) covering 12,308 ha and the prospective replacement land came from APL (Other Use Areas) covering 1,000 ha which is located in Tegal Buleud District, Sukabumi Regency, West Java. PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II has sent a letter to the Indonesian Ministry of Environment and Forestry No. 108/RNI.01/IV/2018 on 10 April 2018.
- Cooperation with PTPN VIII (Persero) to provide prospective replacement land: MOU Number NK/III.3/III/2018 and 23/MoU/RNI.01/2018 dated 13 March 2018. Preliminary Agreement No. SP/III.2/549/VII/2018 and No. 45.4/S.Pj/RNI .01/VII/2018 dated 16 July 2018.
- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II has sent a letter to the Indonesian Ministry of Environment and Forestry No. 86/RNI.01/III/2018 dated 22 March 2018.

31 Desember 2021

31 December 2021

**51. Kondisi Menyediakan Penggantian Lahan
Jatitujuh (lanjutan)**

PT Pabrik Gula Rajawali II (lanjutan)

**Proses Dalam Rangka Penggantian Kawasan
Hutan (lanjutan)**

Tahun 2018 (lanjutan)

- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II telah melakukan survey calon lahan pengganti HGU PG Jatitujuh tahap I milik PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) yang terletak di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Cianjur seluas + 2.442,70 ha. Dalam rangka percepatan program Perhutanan Sosial, PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II memprioritaskan lahan-lahan yang diokupasi masyarakat berupa sawah dan lading. Selain lahan yang diokupasi masyarakat kami juga mensurvei lahan cadangan yang diperuntukkan untuk konservasi dan lahan marginal. Surat belum mendapat jawaban.
- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II telah mengirimkan surat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 108/RNI.01/IV/2018 tanggal 10 April 2018.
- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II telah melakukan survei calon lahan pengganti HGU PG Jatitujuh milik PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) yang terletak di Kabupaten Bandung seluas 1.667,09 ha. Lahan milik PTPN VIII (Persero) yang telah disurvei tahap I 2.442,7 ha dan tahap II 1.667,09 ha, dengan demikian lahan yang telah kami survey seluas 4.109,79 ha.
- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II memohon arahan setelah dilakukan survey calon lahan pengganti tersebut. Surat belum mendapat jawaban.

Tahun 2019

- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II mengajukan permohonan Pertimbangan Gubernur tahap I seluas 7.089 ha kepada Gubernur Jawa Barat melalui surat No. 26/S.Pmh/RNI.01/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 perihal Permohonan Pertimbangan Gubernur.
- Telah terbit Pertimbangan Gubernur Tahap I berdasarkan surat No. 522/722/Rek tanggal 27 Februari 2019, hal Pertimbangan Gubernur Calon Lahan Pengganti Kawasan Hutan PT RNI (Persero) seluas 7.089,84 Ha.

**51. Conditions Provide Jatitujuh Land Replacement
(continued)**

PT Pabrik Gula Rajawali II (continued)

Process in order to replace forest area (continued)

Year 2018 (continued)

- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II has conducted a survey of prospective land replacement for HGU PG Jatitujuh phase I owned by PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) located in Bandung Regency, Bogor Regency, and Cianjur Regency covering + 2,442.70 ha. In the framework of accelerating the Social Forestry program, PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II prioritizes lands occupied by the community in the form of rice fields and fields. In addition to land occupied by the community, we also survey reserve land intended for conservation and marginal land. The letter hasn't received an answer.
- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II has sent a letter to the Indonesian Ministry of Environment and Forestry No. 108/RNI.01/IV/2018 on 10 April 2018.
- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II has surveyed prospective land replacement for PG Jatitujuh HGU owned by PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) located in Bandung Regency covering an area of 1,667.09 ha. The land owned by PTPN VIII (Persero) surveyed in phase I was 2,442.7 ha and phase II was 1,667.09 ha, thus the land surveyed was 4,109.79 ha.
- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II requested referrals after a survey of the proposed replacement land was carried out. The letter hasn't received an answer.

Year 2019

- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II submitted a request for a Governor's Consideration phase I covering an area of 7,089 ha to the Governor of West Java through letter No. 26/S.Pmh/RNI.01/I/2019 dated 21 January 2019 regarding the Governor's Request for Consideration.
- Governor Phase I Considerations have been issued based on letter No. 522/722/Rek dated 27 February 2019, regarding the Consideration of the Governor of PT RNI (Persero)'s Forest Land Replacement Area covering an area of 7,089.84 Ha.

31 Desember 2021

31 December 2021

**51. Kondisi Menyediakan Penggantian Lahan
Jatitujuh (lanjutan)**

PT Pabrik Gula Rajawali II (lanjutan)

**Proses Dalam Rangka Penggantian Kawasan
Hutan (lanjutan)**

Tahun 2019 (lanjutan)

- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II telah mengirimkan surat Kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 126/S.Pmh/RNI.01/III/2019 tanggal 28 Maret 2019. Gubernur Jawa Barat telah memberikan pertimbangan atas usulan calon lahan pengganti tahap I seluas 7.089,84 ha yang terletak di Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur sesuai surat No. 522/772/Rek tanggal 27 Februari 2019. Selanjutnya agar tidak mengalami kekeliruan dalam memproses Tukar Menukar Kawasan Hutan tersebut, PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II mohon arahan tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Surat belum mendapat jawaban.
- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II mengajukan permohonan Pertimbangan Gubernur tahap II seluas 5.557,34 ha kepada Gubernur Jawa Barat melalui surat No. 106/S.Pmh/RNI.01/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 perihal Permohonan Pertimbangan Gubernur.
- PT RNI (Persero) mengajukan permohonan Pertimbangan Gubernur untuk Lahan Tambahan di Kebun Ciater Kabupaten Subang seluas ± 702,75 ha melalui surat No.208/S.Pmh/RNI.01/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019 perihal Tambahan Calon Lahan Pengganti.
- PT RNI (Persero) mengajukan permohonan Pertimbangan Gubernur untuk Lahan Tambahan di Kebun Cibungur seluas 1.021,04 ha melalui surat No. 229/S.Pmh/RNI.01/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019.
- Pemprov Jawa Barat telah melaksanakan Rapat Pokja untuk permohonan Pertimbangan Gubernur tahap II. Proses sampai dengan saat ini adalah konsep surat Pertimbangan Gubernur Tahap II telah selesai dibuat dan siap untuk diajukan kepada Gubernur Jawa Barat.
- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II meminta berkonsultasi dengan KPK untuk proses permasalahan HGU PG Jatitujuh dan proses pengadaan konsultan pengurusan penggantian lahan HGU PG Jatitujuh.

**51. Conditions Provide Jatitujuh Land Replacement
(continued)**

PT Pabrik Gula Rajawali II (continued)

Process in order to replace forest area (continued)

Year 2019 (continued)

- *PT RNI (Persero) cq PT PG Rajawali II has sent a letter to the Indonesian Ministry of Environment and Forestry No. 126/S.Pmh/RNI.01/III/2019 dated 28 March 2019. The Governor of West Java has given due consideration to the candidate's proposal Phase I replacement land area of 7,089.84 ha located in Bandung Regency, Subang Regency, Sukabumi Regency and Cianjur Regency in accordance with letter No. 522/772/Rek dated 27 February 2019. Furthermore, in order not to experience mistakes in processing the Exchange of Forest Area Exchange, PT RNI (Persero) cq PT PG Rajawali II, asking for guidance on the obligations that must be carried out. The letter hasn't received an answer.*
- *PT RNI (Persero) cq PT PG Rajawali II submitted a Phase II Governor's Consideration request covering an area of 5,557.34 ha to the Governor of West Java through letter No.106/S.Pmh/RNI.01/III/2019 dated 19 March 2019 regarding the Request for Consideration Governor.*
- *PT RNI (Persero) submitted a request for Governor's Consideration for Additional Land in Subang Regency Ciater Plantation of ± 702.75 ha through letter No. 208/S.Pmh/RNI.01/VI/2019 dated 13 June 2019 regarding Additional Supplementary Land for Candidates .*
- *PT RNI (Persero) submitted a Governor's Consideration Request for Additional Land in Cibungur Plantation covering an area of 1,021.04 ha through letter No. 229/S.Pmh/RNI.01/VI/2019 dated 20 June 2019.*
- *The West Java Provincial Government has held a Working Group Meeting to request Phase II of the Governor's Consideration. The process up to now is that the concept of the Phase II Governor's Consideration letter has been completed and is ready to be submitted to the Governor of West Java.*
- *PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II requested to consult with the KPK for the process of the PG Jati Tujuh HGU problem and the procurement process for the consultant of the PG Jati Tujuh HGU land replacement.*

31 Desember 2021

31 December 2021

**51. Kondisi Menyediakan Penggantian Lahan
Jatitujuh (lanjutan)**

PT Pabrik Gula Rajawali II (lanjutan)

**Proses Dalam Rangka Penggantian Kawasan
Hutan (lanjutan)**

Tahun 2019 (lanjutan)

- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II telah mengumumkan Lelang Terbuka di Harian Nasional Media Indonesia tentang pengumuman Lelang Pengurusan Pemenuhan Lahan Pengganti dalam rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) pada tanggal 8 November 2019.
- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II telah mengajukan permohonan TMKH kepada Menteri KLHK No. 2086/S.Pmh/RW-II/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dan No. 2250/S.Pmh/RW-II.01/XI/2019 tanggal 13 November 2019. Secara berangsur melengkapi berkas persyaratan yang masih belum terpenuhi.

Tahun 2020

Seiring dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan peraturan pelaksanaannya yaitu PP 23 tahun 2021, PP 24 tahun 2021 serta Permen LHK No. 7 tahun 2021 maka penggunaan areal Kawasan hutan tidak lagi menggunakan skema tukar-menukar Kawasan hutan (TMKH) tetapi bisa dengan opsi skema permohonan pelepasan Kawasan hutan melalui pembayaran kepada negara (KLHK) baik dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) maupun tanpa PNBP.

Tahun 2021

PT RNI selaku pemegang saham PT. PG Rajawali II saat ini sedang melakukan upaya permohonan pelepasan Kawasan hutan atas lahan HGU Jatitujuh kurang lebih seluas 12.000 ha tanpa penerimaan negara bukan pajak (PNBP) karena pada tahun 1976 PNP XIV selaku pemohon HGU telah membayar kompensasi kepada PERUM PERHUTANI unit III jabar banten selaku pengelola Kawasan hutan tersebut sebesar Rp 397.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah).

Selanjutnya proses pengajuan tukar menukar kawasan hutan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan secara bertahap sampai tahun 2022 dengan estimasi biaya Rp 3,6 Triliun untuk total lahan seluas 12.000 ha.

**51. Conditions Provide Jatitujuh Land Replacement
(continued)**

PT Pabrik Gula Rajawali II (continued)

Process in order to replace forest area (continued)

Year 2019 (continued)

- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II has announced the Open Auction at the National Media Indonesia Daily regarding the announcement of the Auction for the Completion of Replacement Land in the context of Exchange of Forest Areas (TMKH) on 8 November 2019.
- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II has submitted a request for TMKH to the Minister of KLHK No. 2086/S.Pmh/RW-II/X/2019 dated 22 October 2019 and No. 2250/S.Pmh/RW-II.01/XI/2019 dated 13 November 2019. Gradually completing the file requirements that still have not been met.

Year 2020

Along with the work copyright law No. 11 of 2020 regarding job creation and its implementing regulations, namely PP 23 of 2021, PP 24 of 2021 and Permen LHK No. 7 of 2021, the use of forest area areas will no longer use the forest area swap scheme (TMKH) but can use the option of an application for the release of forest area through payments to the state (KLHK) both with non-tax state revenues (PNBP) or without PNBP.

Year 2021

PT. RNI as the shareholder of PT. PG Rajawali II is currently making an effort to apply for the release of the forest area on the Jati Tujuh HGU land of approximately 12,000 ha without non-tax state revenue (PNBP) because in 1976 PNP XIV as the HGU applicant has paid compensation to PERUM PERHUTANI unit III West Java Banten as the manager The forest area is Rp 397,000,000 (three hundred and ninety-seven million rupiah).

Furthermore, the process of applying for the exchange of forest areas with the Ministry of Environment and Forestry is carried out in stages until 2022 with an estimated cost of Rp 3.6 trillion for a total land area of 12,000 ha.

31 Desember 2021

31 December 2021

52. Kejadian setelah tanggal neraca

52. Subsequent event

Induk Perusahaan

Holding companies

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 555/KMK.06/2021 tentang Penetapan Nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia, menetapkan nilai penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal Perusahaan sebesar Rp 9.281.905.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

Based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 555/KMK.06/2021 concerning the Stipulation of the Additional Value of the State Equity Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of the Company (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia, stipulates the additional value of the State's equity participation in the Company's capital is Rp 9,281,905,000,000 with the following details:

	Jumlah saham seri B / Number of shares series B	Nilai saham/ Shares value	
Nama Perseroan Terbatas			<i>Name of Limited Company</i>
PT Sang Hyang Seri (Persero)	1.506.992	4.211.690.000.000	<i>PT Sang Hyang Seri (Persero)</i>
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	942.744	3.725.494.000.000	<i>PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)</i>
PT Garam (Persero)	599.999	684.461.000.000	<i>PT Garam (Persero)</i>
PT Perikanan Indonesia (Persero)	495.216	458.477.000.000	<i>PT Perikanan Indonesia (Persero)</i>
PT Berdikari (Persero)	74.999	201.783.000.000	<i>PT Berdikari (Persero)</i>
Jumlah	3.619.950	9.281.905.000.000	Total

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-55/MBU/02/2022 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia mengangkat Saudari Muhammad Riza Adha Damanik sebagai Komisaris pada tanggal 17 Februari 2022.

Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-55/MBU/02/2022 concerning the Appointment of Members of the Board of Commissioners The company PT Rajawali Nusantara Indonesia appointed Sister Muhammad Riza Adha Damanik as Commissioner on 17 February 2022.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 5/SK/RNI.00/II/2022 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) menimbang bahwa Arief Prasetyo Adi sebagai Direktur Utama yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-365/MBU/11/2020 telah dilantik menjadi Kepala Badan Pangan Nasional oleh Presiden RI pada tanggal 21 Februari 2022. Sehingga berdasarkan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 21 Februari 2022, Dewan Komisaris sepakat untuk menunjuk Saudari Endang Suraningsih, Direktur SDM sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).

Based on the Decree of the Board of Commissioners No. 5/SK/RNI.00/II/2022 concerning the Appointment of the Acting President Director of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) considering that Arief Prasetyo Adi as the President Director who was appointed based on the Decree of the Minister of SOEs No. SK-365/MBU/11/2020 has been appointed to the National Food Agency by the President of the Republic of Indonesia on 21 February 2022. So based on the Joint Meeting of the Board of Commissioners and Directors on 21 February 2022, the Board of Commissioners agreed to appoint Sister Endang Suraningsih, Director of Human Resources as Acting President Director of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).

31 Desember 2021

31 December 2021

52. Kejadian setelah tanggal neraca (lanjutan)

52. Subsequent event (continued)

Entitas anak

Subsidiaries

PT PG Rajawali I

PT PG Rajawali I

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Entitas No.16/Kep.PS/RNI.01/I/2022 tanggal 31 Januari 2022, terhitung sejak 2 Februari 2022, susunan Dewan Direksi Entitas berubah menjadi sebagai berikut:

Based on the Decision of the Share holders outside the Entity's General Meeting of Shareholders No.16/Kep.PS/RNI.01/I/2022 dated 31 January 2022, effective 2 February 2022, the composition of the Entity's Board of Directors has changed to the following:

	2022		2021
Direktur Utama	Daniyanto	Rachmad Sartono	<i>President Commissioner</i>
Direktur Keuangan dan Pendukung Bisnis	Subhan Kurniawan	-	<i>Finance Director and Business Support</i>
Direktur Operasional	Nanik Soelistyowati	-	<i>Operational Director</i>

PT Pabrik Gula Candi Baru

PT Pabrik Gula Candi Baru

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Entitas No.18/Kep.PS/RNI.01/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan direktur PT Pabrik Gula Candi Baru yang mulai berlaku tanggal 2 Februari 2022, susunan dewan direksi mengalami pergantian sebagai berikut:

Based on the Decision of the Shareholders outside the Entity's General Meeting of Shareholders No.18/Kep.PS/RNI.01/I/2022 dated 31 January 2022 regarding the dismissal and appointment of the director of PT Factory Sugar Candi Baru which takes effect on 2 February 2022, the composition of the board of directors has changed as follows:

	2022		2021
Direktur	Rachmad Sartono	Adang Sukendar Djuanda	<i>Director</i>

PT GIEB Indonesia

PT GIEB Indonesia

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT GIEB Indonesia pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 yang tercantum dalam akta Notaris I Gede Semester Winarno, SH. No. 18, Perusahaan memutuskan mengubah susunan Komisaris dan Direksi.

Based on the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT GIEB Indonesia on Friday, 14 January 2022 as stated in the deed of Notary I Gede Semester Winarno, SH. No. 18, the Company decided to change the composition of the Commissioners and Directors.

Selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan menjadi sebagai berikut :

Furthermore, the composition of the Company's Board of Commissioners and Directors is as follows:

	2022		2021
Komisaris Utama	Warsim	Mohammad Najib	<i>President Commissioner</i>
Komisaris	Miqdad Husein	Miqdad Husein	<i>Commissioner</i>
Direktur	Salim	Salim	<i>Director</i>

31 Desember 2021

31 December 2021

52. Kejadian setelah tanggal neraca (lanjutan)

52. Subsequent event (continued)

Entitas anak (lanjutan)

Subsidiaries (continued)

PT Rajawali Citramass

PT Rajawali Citramass

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Rajawali Citramass No. 21/Kep.PS/RNI.01/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PT Rajawali Citramass, susunan dewan komisaris dan dewan direksi mengalami pergantian sebagai berikut:

Based on the Decision of the Shareholders outside the General Meeting of Shareholders of PT Rajawali Citramass No. 21/Kep.PS/RNI.01/I/2022 dated 31 January 2022 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Rajawali Citramass, the composition of the board of commissioners and board of directors has changed as follows:

	2022	2021	
Direktur	Agus Mutiar	Hillarius Bayu W	<i>Director</i>

PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring

PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring No. 22/Kep.PS/RNI.01/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring, susunan dewan direksi mengalami pergantian sebagai berikut:

Based on the Decision of the Shareholders outside the General Meeting of Shareholders of PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring No. 22/Kep.PS/RNI.01/I/2022 dated 31 January 2022 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring, the composition of the board of directors has changed as follows:

	2022	2021	
Direktur	Hinu Banarwan	Agus Mutiar	<i>Director</i>

PT Rajawali Nusindo

PT Rajawali Nusindo

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Rajawali Nusindo No. 15/Kep.PS/RNI.01/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 para pemegang saham Perusahaan mengambil keputusan untuk mengubah nomenklatur dan pengangkatan anggota Direksi. Sehingga susunan Direksi Perusahaan menjadi:

Based on the Decision of Shareholders outside the General Meeting of Shareholders of PT Rajawali Nusindo No. 15/Kep.PS/RNI.01/I/2022 dated 31 January 2022, the shareholders of the Company took a decision to change the nomenclature and appoint members of the Board of Directors. So that the composition of the Company's Board of Directors becomes:

	2022	2021	
Direktur Keuangan dan Pendukung Bisnis	Warsim	-	<i>Finance Director and Business Support</i>
Direktur Operasional	Sonni Subarnas	-	<i>Operational Director</i>

31 Desember 2021

31 December 2021

53. Persetujuan laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian yang diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan tanggal 28 Februari 2022.

53. *Approval of the consolidated financial statements*

Management is fully responsible for the preparation of the Consolidated Financial Statements that were completed and approved to be issued on 28 February 2022.

54. Informasi keuangan tambahan

Informasi berikut pada lampiran 1 sampai dengan lampiran 5 adalah informasi tambahan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), entitas induk saja yang menyajikan penyertaan Perusahaan pada Entitas Anak berdasarkan metode biaya.

54. *Additional financial information*

The following information in appendix 1 to appendix 5 represents additional information of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), a parent entity represent the Company's investment in subsidiaries based on the cost method.

**LAMPIRAN/
*APPENDIX***

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Entitas Induk
Laporan posisi keuangan
Per 31 Desember 2021

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Holding Company
Statements of financial position
As of 31 December 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2021	2020	
Aset			ASSETS
Aset lancar			Current assets
Kas dan setara kas	172.635.849.431	68.726.564.488	Cash and cash equivalents
Deposito dibatasi penggunaannya	986.843.631.579	979.143.631.579	Restricted deposit
Piutang usaha	108.296.680.000	-	Trade receivables
Piutang lain-lain			Other receivables
Pihak berelasi	3.279.348.580.883	2.896.439.008.609	Related parties
Pihak ketiga	65.880.000.000	-	Third parties
Pajak dibayar dimuka	77.043.697.740	72.479.090.637	Prepaid taxes
Pendapatan yang akan diterima	123.369.392.173	115.263.175.872	Accrued income
Biaya dibayar dimuka	2.622.066.028	2.471.834.492	Prepaid expenses
Jumlah aset lancar	4.816.039.897.834	4.134.523.305.677	Total current assets
Aset tidak lancar			Non-current assets
Aset pajak tangguhan - bersih	64.062.291.260	64.683.119.126	Deferred tax assets - net
Piutang lain-lain			Other receivables
Pihak berelasi	51.107.757.439	49.298.819.712	Related parties
Pihak ketiga	93.647.735.383	93.841.645.550	Third parties
Investasi dalam entitas anak	1.368.817.769.884	1.368.817.769.884	Investment in subsidiaries
Investasi dalam entitas lainnya	39.997.192.026	38.492.168.235	Investment in other entities
Properti investasi			Investment property
setelah dikurangi akumulasi			net of accumulated depreciation
penyusutan per 31 Desember 2021			as of 31 December 2021 and 2020
dan 2020 masing-masing sebesar			amounting to Rp 50,931,833,371
Rp 50.931.833.371 dan			and Rp 48,893,946,854
Rp 48.893.946.854	2.754.363.242.187	2.831.038.714.747	respectively
Aset tetap			Fixed assets
setelah dikurangi akumulasi			net of accumulated depreciation
penyusutan per 31 Desember 2021			as of 31 December 2021 and 2020
dan 2020 masing-masing sebesar			amounting to Rp 111,310,237,370
Rp 111.310.237.370 dan			and Rp 95,148,182,906
Rp 95.148.182.906	793.486.076.158	804.809.165.461	respectively
Aset tidak lancar lainnya	34.271.133.785	36.948.604.267	Other non current assets
Jumlah aset tidak lancar	5.199.753.198.122	5.287.930.006.982	Total non current assets
Jumlah aset	10.015.793.095.956	9.422.453.312.659	Total assets

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Entitas Induk
Laporan posisi keuangan
Per 31 Desember 2021

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Holding Company
Statements of financial position
As of 31 December 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2021	2020	
Liabilitas dan ekuitas			Liabilities and equity
Liabilitas jangka pendek			Current liabilities
Utang bank	1.690.182.000.000	1.334.619.206.346	Bank loans
Utang usaha	30.527.828.107	29.132.934.012	Trade payables
Utang lain-lain			Other payables
Pihak berelasi	207.292.040.526	37.792.754.152	Related parties
Pihak ketiga	4.346.497.122	2.384.890.978	Third parties
Utang pajak	10.068.739.485	10.165.908.526	Taxes payable
Pendapatan diterima dimuka	2.127.906.428	6.282.625.040	Prepaid income
Biaya yang masih harus dibayar	14.123.661.277	9.979.221.379	Accrued expenses
Utang yang jatuh tempo dalam satu tahun :			Current maturity of liabilities :
PT BRI (Persero) Tbk	72.000.000.000	61.000.000.000	PT BRI (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	21.340.000.000	5.160.892.701	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Pinjaman Rekening Dana Investasi (RDI)	22.083.980.572	22.083.980.572	Investment fund accounts payable
Jumlah liabilitas jangka pendek	2.074.092.653.517	1.518.602.413.706	Total current liabilities
Liabilitas jangka panjang			Non-current liabilities
Utang jangka panjang setelah dikurangi jatuh tempo dalam satu tahun			Long-term bank loans - net of current portion
Rekening Dana Investasi (RDI)	1.020.069.578.692	1.020.069.578.692	Investment fund account
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	101.607.335.001	134.222.335.000	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT BRI (Persero) Tbk	326.000.000.000	398.000.000.000	PT BRI (Persero) Tbk
Liabilitas imbalan kerja	90.031.519.002	76.597.546.801	Employee benefits
Jumlah liabilitas jangka panjang	1.537.708.432.695	1.628.889.460.493	Total non current liabilities
Jumlah liabilitas	3.611.801.086.212	3.147.491.874.199	Total liabilities
Ekuitas			Equity
Modal saham – Modal dasar 4.100.000 lembar ditempatkan dan disetor penuh 1.051.567 lembar dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per lembar saham	1.051.567.000.000	1.051.567.000.000	Share capital – authorized 4,100,000 shares issued and fully paid 1,051,567 shares with nominal value Rp 1,000,000 per share
Tambahan modal disetor	1.285.527.566.239	1.285.527.566.239	Additional paid in capital
Komponen ekuitas lainnya	2.195.630.735.104	2.209.877.152.748	Other components of equity
Saldo laba			Retained earnings
Telah ditentukan penggunaannya	143.276.988.928	1.500.165.168.033	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	1.727.989.719.473	227.824.551.440	Unappropriated
Jumlah ekuitas	6.403.992.009.744	6.274.961.438.460	Total equity
Jumlah liabilitas dan ekuitas	10.015.793.095.956	9.422.453.312.659	Total liabilities and equity

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Entitas Induk
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
Per 31 Desember 2021

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Holding Company
Statements of profit or loss and other comprehensive income
As of 31 December 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2021	2020	
Pendapatan	1.047.576.729.117	903.656.331.000	<i>Revenue</i>
Beban pokok pendapatan	(642.412.386.930)	(360.572.904.306)	<i>Cost of revenues</i>
Laba (rugi) kotor	405.164.342.187	543.083.426.694	<i>Gross profit</i>
Beban usaha			<i>Operating expenses</i>
Beban pegawai	(112.116.409.147)	(87.411.531.906)	<i>Employee expenses</i>
Beban administrasi dan umum	(83.147.398.207)	(81.010.202.994)	<i>General and administration expenses</i>
Pendapatan lainnya	107.023.502.186	86.077.593.091	<i>Other incomes</i>
Beban lainnya	(21.483.443.817)	(11.001.981.014)	<i>Other expenses</i>
Beban keuangan	(147.524.556.047)	(192.168.628.543)	<i>Finance cost</i>
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	147.916.037.155	257.568.675.328	<i>Profit (loss) before income taxes</i>
Manfaat (beban) pajak penghasilan :			<i>Tax income benefit (expense):</i>
Pajak kini	-	(21.717.712.720)	<i>Current tax</i>
Pajak tangguhan	(4.639.048.227)	(8.026.411.168)	<i>Deferred tax</i>
Pendapatan (beban) pajak - bersih	(4.639.048.227)	(29.744.123.888)	<i>Total tax income benefit (expenses) - net</i>
Laba (rugi) operasi bersih tahun berjalan	143.276.988.928	227.824.551.440	<i>Operating profit (loss) for the year - net</i>
Penghasilan komprehensif lainnya			<i>Other comprehensive income</i>
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi :			<i>Item that will not be reclassified to profit or loss:</i>
Keuntungan (kerugian) aktuarial manfaat pasti	(18.264.638.005)	(12.508.626.000)	<i>Actuarial gain (loss) on defined benefit</i>
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	4.018.220.361	2.751.897.720	<i>Income tax related to items that will be reclassified to profit or loss</i>
Laba (rugi) penghasilan komprehensif lainnya	(14.246.417.644)	(9.756.728.280)	<i>Other comprehensive income profit (loss)</i>
Jumlah laba (rugi) dan penghasilan komprehensif lain periode berjalan	129.030.571.284	218.067.823.160	<i>Total profit (loss) and other comprehensive income for the year</i>

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Entitas Induk
Laporan perubahan ekuitas
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
 31 Desember 2021

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Holding Company
Statements of changes in equity
 For the year ended
 31 December 2021

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

	Modal saham ditempatkan dan disetor <i>Capital share</i>	Tambahkan modal disetor <i>Additional paid-in capital</i>	Komponen ekuitas lainnya <i>Other equity components</i>	Saldo laba/ <i>Retained earnings</i>		Jumlah ekuitas <i>Total equity</i>	
				Telah ditentukan penggunaannya <i>Appropriate</i>	Belum ditentukan penggunaannya <i>Unappropriate</i>		
Saldo per 1 Januari 2020	1.051.567.000.000	1.285.527.566.239	2.219.633.881.027	1.388.851.159.910	111.314.008.123	6.056.893.615.299	Balance as of 1 January 2020
Cadangan umum	-	-	-	111.314.008.123	(111.314.008.123)	-	<i>General reserve</i>
Laba (rugi) komprehensif lainnya	-	-	(9.756.728.279)	-	-	(9.756.728.279)	<i>Total other comprehensive income (loss)</i>
Laba (rugi) tahun berjalan	-	-	-	-	227.824.551.440	227.824.551.440	<i>Net profit (loss) of current year</i>
Saldo per 31 Desember 2020	1.051.567.000.000	1.285.527.566.239	2.209.877.152.748	1.500.165.168.033	227.824.551.440	6.274.961.438.460	Balance as of 31 December 2020
Cadangan umum	-	-	-	227.824.551.440	(227.824.551.440)	-	<i>General reserve</i>
Laba (rugi) komprehensif lainnya	-	-	(14.246.417.644)	-	-	(14.246.417.644)	<i>Total other comprehensive income (loss)</i>
Laba (rugi) tahun berjalan	-	-	-	-	143.276.988.928	143.276.988.928	<i>Net profit (loss) of current year</i>
Saldo per 31 Desember 2021	1.051.567.000.000	1.285.527.566.239	2.195.630.735.104	1.727.989.719.473	143.276.988.928	6.403.992.009.744	Balance as of 31 December 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2021	2020	
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flows from operating activities
Penerimaan dari pelanggan	342.626.097.951	740.769.616.563	Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada pemasok dan Karyawan dan untuk biaya-biaya lainnya	(369.810.136.610)	(540.574.680.271)	Cash paid to suppliers, employees and for other expenses
Pembayaran pajak	6.021.692.881	(45.854.332.179)	Tax payments
Penerimaan lain-lain	1.844.343.652	31.019.089.381	Other proceeds
Pembayaran bunga	(126.650.143.045)	(151.283.144.751)	Interest payment
Penerimaan dividen	60.487.584.596	124.028.909.062	Dividend received
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(85.480.560.575)	158.105.457.805	Net cash provided from (used in) operating activities
Arus kas dari aktivitas investasi			Cash flows from investing activities
Perolehan aset tetap	(7.034.874.251)	(3.457.489.815)	Acquisition cost of fixed assets
Pengurangan (penambahan) aset	136.974.609.375	-	Deduction (addition) of assets
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	129.939.735.124	(3.457.489.815)	Net cash used in investing activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash flows from financing activities
Penerimaan (pembayaran) utang bank	284.846.855.953	518.917.982.916	Proceeds (payments) from bank loans
Pembayaran utang Rekening Dana Investasi	-	(1.051.618.000)	Investment fund account liabilities payments
Pembayaran dividen	-	-	Dividend payment
Penerimaan (pembayaran) MTN & Sukuk	-	(665.000.000.000)	Proceeds (payments) from MTN & Sukuk
Kenaikan (penurunan) utang pihak berelasi	(225.396.745.559)	(450.572.401.745)	Increase (decrease) in related parties payable
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	59.450.110.394	(597.706.036.829)	Net cash used in financing activities
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	103.909.284.943	(443.058.068.839)	Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal tahun	68.726.564.488	511.784.633.327	Cash and cash equivalent at the beginning of period
Kas dan setara kas pada akhir tahun	172.635.849.431	68.726.564.488	Cash and cash equivalent at the end of period